RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GORONTALO

2025-2029

Restorasi Kabupaten Gorontalo
Berkemajuan dan Berkelanjutan

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Inodnesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO
Dan
BUPATI GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan public dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

2. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.
3. Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervise dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target setara ekonomis, efisien dan efektif
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima).
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencana Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Strategi adalah Langkah-Langkah berisikan program-program indikator untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah/Tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

KABAG HUKUM	OPD	AS 2	SEKDA	WABUP

13. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintahan Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pengembangan Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
15. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas–luasnya selama sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
18. Bupati adalah Bupati Gorontalo.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

(1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi, dan program Bupati terpilih hasil pemilihan Tahun 2024.
(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

KABAG HUKUM | OPD | AS 2 | SEKDA | WABUP

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029

(3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah Provinsi Gorontalo dan RTRW.

Pasal 3

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :

a. Landasan dan pedoman bagi pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029;
b. Pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sesuai periode RPJMD;
c. Pedoman dalam penyusunan RKPD sesuai periode RPJMD;
d. Acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai periode RPJMD;
e. Instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai periode RPJMD.

Pasal 4

(1) RPJMD Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan dokumen dengan sistematika sebagai berikut:

a. Bab I PENDAHULUAN;
b. Bab II GAMBARAN UMUM DAERAH;
c. Bab III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
d. Bab IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;
e. Bab V PENUTUP.

KABAG HUKUM	OPD	A.2	SEKDA	WABUP

(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

(1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pengendalian terhadap perumusan kebijakan RPJMD;

b. Pelaksanaan RPJMD; dan

c. Evaluasi terhadap hasil RPJMD

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

c. Terjadi perubahan yang mendasar.

(2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi ;

a. terjadinya bencana alam;

b. goncangan politik;

c. krisis ekonomi;

d. konflik sosial;
e. gangguan keamanan;
f. pemekaran daerah; dan/atau
g. perubahan kebijakan nasional.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan, disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2021) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025
BUPATI GORONTALO,

SOFYAN PUHI

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 20 AGUSTUS 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO

SUGONDO A. MAKMUR

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2025 NOMOR

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025 - 2029

I. UMUM

Prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan, pemberdayaan agar memiliki produktivitas yang tinggi, serta peningkatan daya saing daerah untuk menarik investasi. Untuk terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan pembangunan lebih terarah, maka Pemerintah Daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi yang tersedia agar perekonomian mengalami pertumbuhan, per kapita meningkat, pemerataan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan serta masalah-masalah lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan 3). Rencana Strategi Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD), 4). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMD mengikuti pendekatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan dokumen RPJMD sepenuhnya menggunakan kajian yang bersifat akademik untuk menguraikan capaian-capaian pembangunan sebelumnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dapat menjadi tantangan kedepan serta rekomendasi untuk memberikan arahan apa yang perlu menjadi penguatan nantinya.

Penyusunan RPJMD ini juga telah mengadopsi sistem berbasis elektronik melalui penerapan e-planning, yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara terkoordinasi dan harmonis bersama Bappeda serta pemangku kepentingan lainnya.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Proses diawali dengan tahap persiapan awal, yang mencakup identifikasi kebutuhan dasar, penelaahan terhadap dokumen perencanaan sebelumnya, serta penetapan mekanisme kerja dan koordinasi antar perangkat daerah. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rancangan awal RPJMD yang berisi penjabaran awal visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kerangka program pembangunan daerah berdasarkan masukan awal dari pemangku kepentingan.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 berperan sebagai dokumen strategis yang tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Lebih dari itu, RPJMD ini juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan dalam proses perumusannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami panjatkan puji dan terima kasih atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 ini dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan hasil dari proses perencanaan yang panjang, kolaboratif, dan partisipatif sebagai wujud komitmen bersama untuk membangun masa depan Kabupaten Gorontalo yang lebih baik.

Dokumen RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen teknis semata, tetapi juga menjadi manifestasi dari harapan, cita-cita, serta tanggung jawab besar yang diemban oleh pemerintah daerah bersama seluruh komponen masyarakat. Penyusunan dokumen ini dilandasi oleh pemahaman mendalam terhadap dinamika pembangunan saat ini, baik yang bersumber dari evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya maupun dari berbagai tantangan aktual yang dihadapi daerah.

Melalui proses perumusan yang berbasis data, analisis, serta dialog publik, RPJMD ini dibangun di atas fondasi visi pembangunan yang akan menjadi arah dan semangat gerak pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yakni:

"Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan"

Visi ini merupakan komitmen kolektif untuk membangun Kabupaten Gorontalo, dengan meletakkan "restorasi" sebagai pendekatan fundamental dalam mengatasi stagnasi kebijakan, memperbaiki kualitas layanan publik, serta memulihkan nilai-nilai dan potensi lokal yang selama ini belum tergarap optimal. Restorasi yang dimaksud bukanlah upaya untuk kembali ke masa lalu, melainkan gerakan pembaharuan menyeluruh yang menjawab berbagai tantangan masa kini dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai lokal dan karakter daerah.

Dalam semangat yang sama, visi "berkemajuan" menggambarkan tekad untuk menghadirkan kebijakan pembangunan yang progresif dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pembangunan yang berkemajuan juga berarti membangun kemandirian ekonomi daerah yang tidak semata bertumpu pada kekuatan sumber daya alam yang terbatas, tetapi diarahkan pada pengembangan potensi unggulan lokal yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi.

Adapun semangat "berkelanjutan" menjadi landasan moral dan strategis dalam memastikan bahwa pembangunan yang kita lakukan hari ini tidak hanya menghasilkan kemajuan sesaat, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Kabupaten Gorontalo menyadari pentingnya melakukan transisi dari ekonomi yang berbasis ekstraksi sumber daya alam menuju ekonomi hijau yang

ramah lingkungan dan berkeadilan sosial. Oleh karena itu, pembangunan lima tahun ke depan akan diarahkan pada model pertumbuhan yang inklusif dan ramah lingkungan.

Dokumen RPJMD ini disusun melalui proses yang transparan, inklusif, dan kolaboratif, melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari unsur pemerintah, masyarakat, maupun akademisi. Pendekatan perencanaan yang digunakan menggabungkan prinsip-prinsip teknokratik, politis, partisipatif, serta harmonisasi antara pendekatan bottom-up dan top-down, sehingga dokumen ini tidak hanya akurat secara teknis, tetapi juga relevan secara sosial dan politik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi RPJMD sangat ditentukan oleh sejauh mana seluruh komponen daerah memiliki semangat yang sama untuk mengawal, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh program yang telah dirumuskan. RPJMD ini bukan milik pemerintah semata, melainkan milik seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, partisipasi aktif, keterbukaan, dan sinergi antar pihak menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi besar yang telah dicanangkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan masukan, tenaga, dan pemikiran dalam proses penyusunan dokumen ini. Semoga RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 ini benar-benar menjadi dokumen hidup yang mampu mengarahkan pembangunan ke jalan yang tidak hanya membangun, tetapi juga memuliakan kehidupan seluruh masyarakat Kabupaten Gorontalo.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

BUPATI GORONTALO

SOFYAN PUHI

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	4
1.3. Hubungan Antar Dokumen	6
1.4. Maksud dan Tujuan	10
1.5. Sistematika	11
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	13
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.1. Kondisi Geografis	13
2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	14
2.1.1.2 Iklim	14
2.1.1.3 Geologi dan Keadaan Tanah	16
2.1.1.4 Topografi	17
2.1.1.5 Hidrologi	18
2.1.1.6 Penggunaan Lahan	19
2.1.2. Kondisi Demografis	20
2.1.2.1 Jumlah Penduduk	20
2.1.2.2 Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin	21
2.1.2.3 Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	23
2.1.2.4 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gorontalo	24
2.1.2.5 Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gorontalo	26
2.1.3. Potensi Sumber Daya Alam	26
2.1.3.1 Kawasan Budidaya	26
2.1.3.2 Kawasan Pemukiman	28
2.1.3.3 Kawasan Perdagangan dan Jasa	29
2.1.3.4 Kawasan Industri	30
2.1.3.5 Kawasan Pariwisata	31
2.1.3.6 Kawasan Peruntukan Lainaya	32
2.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	32
2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas	33
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	35
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	35
2.2.1.1. Perkembangan PDRB	35
2.2.1.2. Tingkat Inflasi	37
2.2.1.3 PDRB Perakpita	38
2.2.1.4. Indeks Gini	39
2.2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi	40
2.2.1.6. Ketenagakerjaan	41
2.2.1.7. Kemiskinan	43
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya	45
2.2.2.1. Indeks Pemabngunan Manusia (IPM)	45
2.2.2.2. Kesetaraan Gender	46

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) 47
2.2.2.4. Angka Harapan Hidup 48
2.2.2.5. Pravelensi Kurang Gizi (underweight) Pada Anak Balita 49
2.2.2.6. PMKS yang ditangani 50
2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga 51
2.2.3.1. Seni Budaya 51
2.2.3.2. Olahraga 52
2.2.3.3 Kepemudaan 54
2.3. Aspek Daya Saing Daerah 54
2.3.1. Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah 54
2.3.2. Fokus Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah 55
2.3.3. Fokus Daya saing Sumber daya Manusia 56
2.3.3.1. Rasio Ketergantungan 56
2.3.3.2.Penduduk Berdasarkan Kelompok Sekolah/Tingkat Pendidikan 58
2.3.4. Fokus Daya Saing Iklim Investasi 60
2.3.4.1. Angka Kriminalitas 60
2.3.4.2. Proses Perizinan 62
2.4. Aspek Pelayanan Umum 64
2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar 64
2.4.1.1 Urusan Pendidikan 64
2.4.1.2 Urusan Kesehatan 67
2.4.1.2.1 Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.00 Kelahiran Hidup 67
2.4.1.2.2 Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup 69
2.4.1.2.3 Angka Kelangsungan Hidup Bayi 70
2.4.1.2.4 Angka Kematian Balita (AKABA) per 1.000 Kelahiran Hidup 71
2.4.1.2.5 Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup 71
2.4.1.2.6 Pola Penyakit 71
2.4.1.3 Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 72
2.4.1.3.1 Infastruktur Bina Marga 73
2.4.1.3.2 Infastruktur Sumber Daya Air 74
2.4.1.3.3 Infastruktur Cipta Karya 75
2.4.1.3.4 Penata Ruang 76
2.4.1.4 Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 80
2.4.1.4.1 Lingkungan Pemukiman Kumuh 82
2.4.1.4.2 Rumah Layak Huni 84
2.4.1.4.3 Prasaranan Sarana Utilitas Permukiman 85
2.4.1.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 86
2.4.1.5.1 Penanggulangan Bencana 86
2.4.1.5.2 Perlindungan Masyarakat 93
2.4.1.6 Urusan Sosial 94

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar 95
2.4.2.1 Urusan Tenaga Kerja 95
2.4.2.2Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 97
2.4.2.3 Urusan Pangan 98
2.4.2.4 Urusan Lingkungan Hidup 100
2.4.2.4.1 Persampahan 102
2.4.2.4.2 Pengelolaan Lingkungan Hidup 105
2.4.2.4.3 Inventarisasi Gas Rumah Kaca 107
2.4.2.4 Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 108
2.4.2.5 Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa 109
2.4.2.5.1 Prasarana Perkotaan Dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) 110
2.4.2.5.2 Presentase PKK Aktif 111
2.4.2.5.3 Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 111
2.4.2.6 Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana 112
2.4.2.7 Urusan Perhubungan 113
2.4.2.8 Urusan Komunikasi Dan Informatika 115
2.4.2.9 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Manengah 116
2.4.2.10 Urusan Penanaman Modal 117
2.4.2.11 Ueusan Kepemudaan Dan Olahraga 119
2.4.2.12 Urusan Persandian 121
2.4.2.13 Urusan Kebudayaan 121
2.4.2.14 Urusan Perpustakaan 124
2.4.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan 125
2.4.3.1 Urusan Kelautan Dan Perikanan 125
2.4.3.2 Urusan Pertanian 126
2.4.3.3 Urusan Pariwisata 128
2.4.3.4 Urusan Perdagangan 129
2.4.3.5 Urusan Perindustrian 131
2.4.4 Fokus Layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan. 132
2.4.5 Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan 134
2.4.6 Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah 136
2.4.7 Fokus Layanan Unsur Kewilayahan 137
2.4.8. Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum 138
2.5. Gambaran Keuangan daerah 159
2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kabupaten Gorontalo 160
2.5.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD 160
2.5.1.2 Pendapatan Asli Daerah 163
2.5.1.3 Pendapatan Transfer 167
2.5.1.4 Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 169
2.5.1.5 Belanja Daerah 171
2.5.1.6 Belanja Operasi 175
2.5.1.7 Belanja Modal 178

2.5.1.8 Belanja Tidak Terduga 179
2.5.1.9 Belanja Transfer 180
2.6. Neraca Daerah 184
2.6.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu 185
2.6.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah 186
2.7. Kebijakan Dan Pembiayaan Daerah 195
2.7.1. Analisis Belanja Daerah Dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah 196
2.8. Kerangka Pendanaan 198
2.8.1.Ruang Fiskal 198
2.8.2.Penghitungan Kerangka Pendanaan 201
2.8.3.Kebijakan Alokasi Anggaran 201
2.9. Permasalahan Dan Isu Strategis 203
2.9.1.Permasalahan Pembangunan 203
2.9.1.1.Permasalahan Dari Aspek Geografi Dan Demografi 203
2.9.1.2.Permasalahan Dari Aspek Kesejahteraan Dan Sosial Budaya 204
2.9.1.3. Permasalahan Dari Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah 204
2.9.1.4. Permasalahan Dari Aspek Daya Saing Sumber daya manusia SDM 205
2.9.1.5.Permasalahan Dari Daya Saing Fasilitas\Infrastruktur wilayah 205
2.9.1.6. Permasalahan Dari Aspek Pelayanan Umum 206
2.9.2 Isu Strategis 207
2.9.2.1. Isu Global 207
2.9.2.2. Isu Nasional 207
2.9.2.3. Isu Wilayah (Regional) 210
2.9.2.4. Isu Kabupaten Gorontalo 211
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 216
3.1. Visi 216
3.2. Misi 221
3.3. Tujuan dan Sasaran 225
3.4. Prioritas Unggulan Daerah 227
3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah 228
3.5.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Gorontalo 229
3.5.1.1. Rumusan Strategi Pembangunan 229
3.5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 236
3.5.2.1. Program Pembangunan Daerah 241
3.5.2.2. Program Prioritas 249
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 282
4.1. Program Perangkat Daerah 282
4.2. Kinerja Penyelengaraan Pemerintah Daerah 354
4.2.1. Indikator Kinerja Utama 354
4.2.2 Indikator Kinerja Daerah 355

BAB V PENUTUP 385

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul Tabel	Hal
Tabel 2.1	Luas wilayah menurut kecamatan di kabupaten Gorontalo, 2024	14
Tabel 2.2	Kondisi iklim kabupaten gorontalo tahun 2024	15
Tabel 2.3	Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo	17
Tabel 2.4	Wilayah Sungai Kabupaten Gorontalo	19
Tabel 2.5	Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten Gorontalo	20
Tabel 2.6	Kondisi Penduduk Kab. Gorontalo Berdasarkan Usia	22
Tabel 2.7	Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Keluarga Kab. Gorontalo	24
Tabel 2.8	Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Juta Rupiah)	35
Tabel 2.9	Capaian Dimensi IPM Kabupaten Gorontalo, 2019-2024	45
Tabel 2.10	Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gorontalo, 2019-2024	48
Tabel 2.11	Capaian Dimensi IPM Kabupaten Gorontalo, 2019-2024	49
Tabel 2.12	Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gorontalo, 2019-2023	49
Tabel 2.13	Jumlah PMKS Tertangani di Kabupaten Gorontalo, 2021-2024	51
Tabel 2.14	Potensi Seni Budaya di Kabupaten Gorontalo	51
Tabel 2.15	Persentase Cabang Olahraga yang dibina di Kabupaten Gorontalo	53
Tabel 2.16	Sarana Prasana Olahraga di Kabupaten Gorontalo	53
Tabel 2.17	Data Perkembangan Bidang Kepemudaan di Kabupaten Gorontalo	54
Tabel 2.18	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (%)	55
Tabel 2.19	Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo	56
Tabel 2.20	Rasio Ketergantungan Usia Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Gorontalo, 2024	57
Tabel 2.21	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Gorontalo, 2023	60
Tabel 2.22	Lama Proses Perizinan Usaha di kabupaten Gorontalo	62
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	61
Tabel 2.23	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan	64
Tabel 2.24	Indeks Distribusi Guru Kabupaten Gorontalo	66
Tabel 2.25	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan	67
Tabel 2.26	Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Gorontalo	72

Tabel 2.27	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	73
Tabel 2.28	Infrastruktur Wilayah Kabupaten Gorontalo	74
Tabel 2.29	Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik Kabupaten Gorontalo 2020-2024	75
Tabel 2.30	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	80
Tabel 2.31	Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan Dan Pemukiman Kumuh	83
Tabel 2.32	Pembangunan Rumah Layak Huni Selang Tahun 2022 s/d 2023	84
Tabel 2.33	Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman,KetertibanUmum, Dan Perlindungan Masyarakat	86
Tabel 2.34	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Gorontalo	87
Tabel 2.35	Jumlah Penduduk Terpapar Bencana	87
Tabel 2.36	Potensi Kerusakan Lingkuangan Dan Kerugian Akibat Bencana	88
Tabel 2.37	Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Gorontalo	91
Tabel 2.38	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Sosial	94
Tabel 2.39	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja	95
Tabel 2.40	Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	97
Tabel 2.41	Capain Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Bidang Pangan	99
Tabel 2.42	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup	100
Tabel 2.43	Jumlah Timbulan Sampah Per Kecamatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2023	102
Tabel 2.44	Kondisi Dan Kapasitas Pengangkutan Sampah Kabupaten Gorontalo	104
Tabel 2.45	Cakupan Area Pelayanan Persampahan Kabupaten Gorontalo	105
Tabel 2.46	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidu	105
Tabel 2.47	Inventarisasi GRK Sektor Limbah Dikabupaten Gorontalo	107
Tabel 2.48	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	108
Tabel 2.49	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	109
Tabel 2.50	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	112
Tabel 2.51	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan	114
Tabel 2.52	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi Dan Informatika	116
Tabel 2.53	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi Dan	116

	Usaha Kecil Mencegah	
Tabel 2.54	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal	118
Tabel 2.55	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan Dan Olahraga	119
Tabel 2.56	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian	121
Tabel 2.57	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan	122
Tabel 2.58	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan	124
Tabel 2.59	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan Dan Perikanan	125
Tabel 2.60	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian	126
Tabel 2.61	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata	129
Tabel 2.62	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan	130
Tabel 2.63	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian	131
Tabel 2.64	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	132
Tabel 2.65	Capaian Klien Penyelenggara Unsur Penunjang Urusan Pemerintah	134
Tabel 2.66	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah	136
Tabel 2.67	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayaan Urusan Pemerintahan	137
Tabel 2.68	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintah Umum	138
Tabel 2.69	Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Kabupaten Gorontalo	140
Tabel 2.70	Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Urusan	157
Tabel 2.71	Jumlah Indikator TPB Berdasarkan SPM	158
Tabel 2.72	Capaian Pelaksanaan TPB di Kabupaten Gorontalo	158
Tabel 2.73	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	161
Tabel 2.74	Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	161
Tabel 2.75	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	162
Tabel 2.76	Realisasi Pendapatan Asli Daerah/PAD (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	164
Tabel 2.77	Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	165
Tabel 2.78	Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	165
Tabel 2.79	Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	166
Tabel 2.80	Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	166

Tabel 2.81	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	167
Tabel 2.82	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	168
Tabel 2.83	Anggaran dan Realisasi Transfer antar Daerah (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	169
Tabel 2.84	Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	170
Tabel 3.85	Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	172
Tabel 2.86	Proporsi Sumber Belanja Daerah (dalam %) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	173
Tabel 2.87	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	175
Tabel 2.88	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	176
Tabel 2.89	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	177
Tabel 2.90	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	177
Tabel 2.91	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	178
Tabel 2.92	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	178
Tabel 2.93	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo (miliar rupiah)	179
Tabel 2.94	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	181
Tabel 2.95	Neraca Daerah Kabupaten Gorontalo, 2020-2024	185
Tabel 2.96	Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2024 Kabupaten Gorontalo	188
Tabel 2.97	Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Gorontalo 2026-2030	189
Tabel 2.98	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	192
Tabel 2.99	Estimasi dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	192
Tabel 2.100	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2024 Kabupaten Gorontalo	193
Tabel 2.101	Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	194
Tabel 2.102	Anggaran dan Realisasi Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten	195

	Gorontalo	
Tabel 2.103	Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019–2024 Kabupaten Gorontalo	197
Tabel 2.104	Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 – 2024 (miliar rupiah)	199
Tabel 2.105	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo (miliar rupiah)	201
Tabel 2.106	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo	202
Tabel 3.1	Perumusan Misi RPJMD tahun 2025-2029	221
Tabel 3.2	Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Dan Indikator Pembangunan Jangka Mencegah Daerah Kabupaten Gorontalo tahun 2025-2029	225
Tabel 3.3	Pentahapan Pembangunan RPJMD	240
Tabel 3.4	Sinkronisasi Prioritas RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RPJMN 2025-2029	241
Tabel 3.5	Penentuan Prioritas Daerah	242
Tabel 3.6	Program Prioritas Daerah	243
Tabel 3.7	Perumusan Program Prioritas RPJMD	252
Tabel 3.8	Perumusan Arah Kebijakan RPJMD	277
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Gorontalo	283
Tabel 4.2	Indikator Kinerja Utama	354
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Daerah	357

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul Gambar	Hal
Gambar 1.1	Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	7
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Gorontalo	13
Gambar 2.2	Peta Topografi Kabupaten Gorontalo	18
Gambar 2.3	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo, 2019-2025	21
Gambar 2.4	Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo 2020-2045	21
Gambar 2.5	Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2024	23
Gambar 2.6	Kondisi Existing Dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gorontalo 2019-2030	25
Gambar 2.7	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Gorontalo 2019-2024	26
Gambar 2.8	Rata-Rata Distribusi PDRB Kabupaten Gorontalo 2020-2024	37
Gambar 2.9	PDRB Per Kapita Kabupaten Gorontalo 2019-2024 (juta rupiah)	39
Gambar 2.10	Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Gorontalo	40
Gambar 2.11	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo 2019-2024	41
Gambar 2.12	Kondisi Ketenaga Kerjaan Kabupaten Gorontalo 2019-2024	42
Gambar 2.13	Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Gorontalo 2019-2024 (jiwa)	43
Gambar 2.14	Perkembangan Jumlah (ribu jiwa) dan Presentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2024	44
Gambar 2.15	Prevalensi Stunting Kabupaten Gorontalo 2021-2024	50
Gambar 2.16	Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan 2023	58
Gambar 2.17	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Gorontalo	65
Gambar 2.18	Indeks SPBE Kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2023	115
Gambar 2.19	Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	163
Gambar 2.20	Presentase Komponen Pembentuk Pendapatan Asli Daerah	164
Gambar 2.21	Derajat Kemandirian Dan Rasio Ketergantuangan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo	171
Gambar 2.22	Rata-Rata Presentase Komponen Belanja Daerah 2019-2024 Kabupaten Gorontalo	175
Gambar 2.23	Presentase Rasio Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer Terhadap Total Belanja (%)	183

Gambar 2.24	Presentase Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang Dan Jasa, Belanja Bungan, Belanja Subsidi, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Belanja Operasi %	184
Gambar 2.25	Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 – 2024	200

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Prinsip dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional, dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pelayanan, pemberdayaan agar memiliki produktivitas yang tinggi, serta peningkatan daya saing daerah untuk menarik investasi. Penyelenggaraan pemerintahan daerah senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta mempertimbangkan keragaman masing-masing daerah. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, dilaksanakan melalui pengelolaan pemerintahan yang baik dan profesional, mendesain pembangunan sesuai dengan potensi dan kondisi daerah masing-masing.

Agar pengelolaan pemerintahan dan pembangunan lebih terarah, maka Pemerintah Daerah (Pemda) wajib menyusun perencanaan pembangunan daerah, di mana perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi yang tersedia agar perekonomian mengalami pertumbuhan, per kapita meningkat, pemerataan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan serta permasalahan lainnya yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah daerah wajib menyusun rencana pembangunan daerah yang terdiri atas: 1). Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); 2). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); 3). Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan 4). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan dokumen RPJMD sepenuhnya menggunakan kajian yang bersifat akademik untuk menguraikan capaian-capaian pembangunan sebelumnya, hambatan dan tantangan yang dihadapi, isu-isu strategis yang dapat menjadi tantangan ke depan serta rekomendasi untuk memberikan arahan apa yang perlu menjadi penguatan nantinya. Untuk selanjutnya disusun RPJMD yang merupakan dokumen penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah terpilih. Penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten Gorontalo, RPJMD Provinsi Gorontalo, RPJPD Provinsi

Gorontalo, dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah terpilih. Dokumen ini menjadi pedoman strategis yang mencakup tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan pembangunan dan keuangan daerah, baik pada level perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah. Selain itu, RPJMD juga dilengkapi dengan kerangka pendanaan indikatif untuk jangka waktu lima tahun ke depan.

RPJMD disusun guna menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan yang konkret. Hal ini bertujuan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sekaligus menciptakan kesepakatan terkait tolok ukur kinerja guna mengukur keberhasilan pembangunan daerah selama periode lima tahun. Seluruh perangkat daerah wajib mengoperasionalkan kebijakan ini sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yakni transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, partisipatif, terukur, berkeadilan, serta berwawasan lingkungan. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RPJMD mengikuti pendekatan perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pendekatan-pendekatan tersebut meliputi:

1. Pendekatan teknokratis, yaitu menggunakan metode ilmiah dan kerangka berpikir logis serta sistematis untuk merumuskan kebijakan dan program pembangunan;
2. Pendekatan partisipatif, dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai sektor dalam proses perencanaan;
3. Pendekatan politis, yang merefleksikan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan, serta dibahas bersama DPRD;
4. Pendekatan atas-bawah (*top-down*) dan bawah-atas (*bottom-up*), yang mengintegrasikan hasil-hasil musyawarah pembangunan dari level desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, hingga nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 dilandasi oleh amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Instruksi ini menegaskan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan dengan pendekatan teknokratis dan terintegrasi dengan pendekatan strategis, partisipatif, serta berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat. Dengan berpedoman pada regulasi ini, RPJMD diharapkan menjadi dokumen yang operasional, akuntabel, dan mampu mengarahkan pembangunan daerah secara efektif dalam lima tahun ke depan.

Penyusunan RPJMD ini juga telah mengadopsi sistem berbasis elektronik melalui penerapan E-Planning, yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). Setiap Perangkat Daerah melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) secara terkoordinasi dan harmonis bersama Bappeda serta pemangku kepentingan lainnya.

Tahapan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 disusun secara sistematis melalui beberapa langkah utama. Proses diawali dengan tahap persiapan awal, yang mencakup identifikasi kebutuhan dasar, penelaahan terhadap dokumen perencanaan sebelumnya, serta penetapan mekanisme kerja dan koordinasi antar perangkat daerah. Selanjutnya, dilakukan penyusunan rancangan awal RPJMD yang berisi penjabaran awal visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta kerangka program pembangunan daerah berdasarkan masukan awal dari pemangku kepentingan.

Setelah rancangan awal selesai, tahapan berikutnya adalah penyusunan rancangan lengkap yang memuat penyempurnaan substansi berdasarkan hasil konsultasi teknis dan pembahasan internal. Rancangan ini kemudian dibahas dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai media partisipasi publik untuk mengakomodasi masukan dari berbagai elemen masyarakat dan stakeholder. Hasil Musrenbang digunakan sebagai dasar dalam perumusan rancangan akhir RPJMD, yang kemudian diajukan dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda).

RPJMD yang telah disahkan menjadi dokumen fundamental dalam mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan utama dalam proses penyempurnaan Rencana Strategis (Renstra)

seluruh perangkat daerah agar sejalan dengan arah pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Penyempurnaan Renstra ini bertujuan untuk mempertajam strategi, memperjelas arah kebijakan, serta merinci program dan kegiatan yang lebih tepat sasaran.

Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 berperan sebagai dokumen strategis yang tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga menjamin keberlanjutan pembangunan daerah. Lebih dari itu, RPJMD ini juga mencerminkan komitmen terhadap pembangunan yang inklusif, adaptif terhadap perubahan, dan melibatkan seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan dalam proses perumusannya.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan dokumen perencanaan baik bersifat jangka menengah maupun jangka panjang wajib memiliki dasar hukum, untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 dasar hukumnya, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
18. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024–2043;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012–2032;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2045;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun, RPJMD memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya. RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 harus disusun selaras dengan dokumen-dokumen terkait, antara lain: RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD Kabupaten/kota yang berbatasan langsung, RPJPD, serta berbagai dokumen tata ruang seperti RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW Kabupaten. Selain itu, RPJMD juga harus terintegrasi dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, serta rencana pembangunan sektoral lainnya.

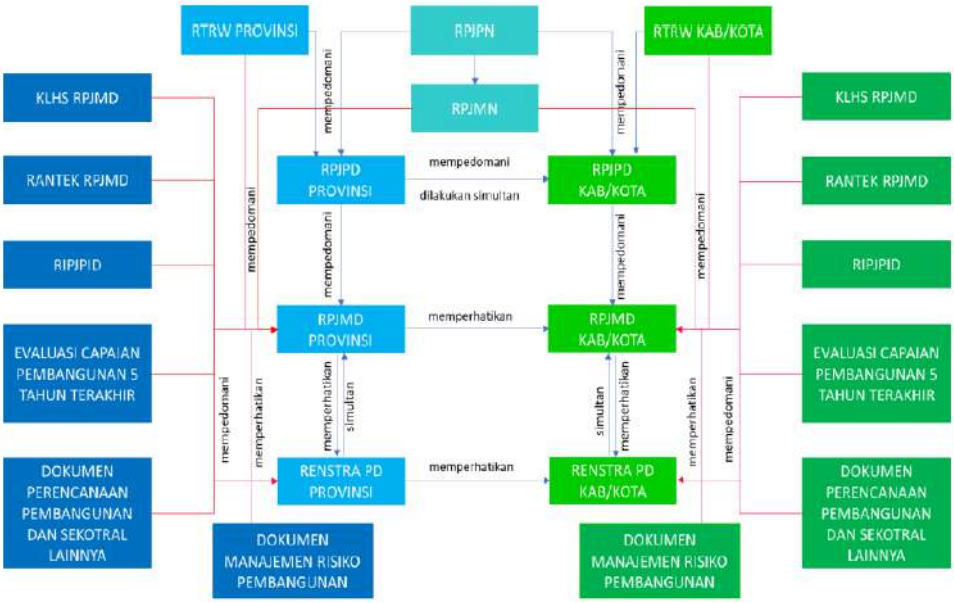

Gambar 1.1 Hubungan Antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025

1.3.1. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), RPJMD Provinsi Gorontalo, dan RPJMD Daerah Lain Berbatasan

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo mempertimbangkan dan mengacu pada RPJMN dengan melakukan sinkronisasi terhadap sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan jangka menengah daerah. Hal ini dilakukan agar selaras dengan sasaran, agenda pembangunan nasional, strategi, arah pengembangan wilayah, dan program strategis nasional, dengan tetap memperhatikan kewenangan, kondisi, serta karakteristik daerah.

Sebagai bagian dari wilayah Provinsi Gorontalo, RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029 dijadikan pedoman dalam merancang RPJMD Kabupaten Gorontalo untuk periode yang sama. Penyelarasan dilakukan pada aspek visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, dan program pembangunan daerah kabupaten agar sejalan dengan arah dan prioritas pembangunan provinsi, termasuk kebijakan dan prioritas pembangunan wilayah sesuai dengan kewenangan dan karakteristik daerah. Selain itu, dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 juga diperhatikan RPJMD dari daerah-daerah yang berbatasan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keselarasan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah antar daerah yang saling berbatasan.

1.3.2. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan RPJPD Kabupaten Gorontalo

RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2045. Dalam penyusunan RPJMD berpedoman pada RPJPD Kabupaten dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah Daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang Daerah.

1.3.3. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan RTRW

Penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 dalam konteks perencanaan kewilayahan mengacu pada kebijakan yang tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten. Penyelarasan dilakukan antara sasaran dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan tujuan kebijakan serta rencana struktur dan pola ruang wilayah. Proses penyusunan RPJMD ini juga mengintegrasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan daerah dengan ketentuan RTRW, khususnya yang mencakup rencana program-program pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebagai bagian dari indikasi program utama dalam mewujudkan struktur dan pola ruang wilayah. Dalam dokumen RPJMD tersebut juga dicantumkan program atau kegiatan dari Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) sebagai bentuk implementasi RTRW, yang mencakup program pengembangan struktur ruang maupun program pembentukan pola ruang.

1.3.4. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, khususnya dalam merumuskan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang berkaitan dengan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah. Penyusunannya mengacu pada sasaran, indikator, dan target kinerja yang tercantum dalam RPJMD serta bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada) kemudian dijadikan sebagai pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama periode lima tahun, dan juga digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan RKPD.

1.3.5. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan RKPD

RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo untuk Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030. Penyusunan tersebut dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, dan program perangkat daerah maupun lintas perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Dalam implementasinya, RKPD sebagai pelaksanaan tahunan dari RPJMD menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD setiap tahun selama lima tahun.

1.3.6. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan Renja Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029, dan selanjutnya dijadikan pedoman bagi kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahun selama lima tahun, serta digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan RKPD.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan KLHS

KLHS merupakan kajian yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi landasan dalam proses pembangunan, dengan mempertimbangkan potensi dampak yang ditimbulkan. Kajian ini menghasilkan rekomendasi perbaikan berupa langkah antisipatif, mitigatif, adaptif, dan/atau kompensatif terhadap program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah. Dalam penyusunan RPJMD, prinsip-prinsip kebijakan perencanaan pembangunan daerah memperhatikan rekomendasi yang berasal dari isu strategis, permasalahan, dan sasaran yang diidentifikasi melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Tujuannya adalah agar dokumen perencanaan pembangunan daerah dapat menetapkan prioritas pembangunan yang tepat, efektif, dan efisien dalam rangka mencapai target pembangunan daerah maupun nasional.

1.3.8. Hubungan RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan Rencana Pembangunan Sektoral Lainnya

Selain memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, maupun daerah lainnya, penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 juga memperhitungkan berbagai dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Di antaranya adalah agenda

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), serta Asta Cita, yaitu delapan misi menuju Indonesia Emas 2045.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 adalah untuk memberikan arah kebijakan pembangunan jangka menengah selama lima tahun ke depan yang bersifat holistik, tematik, integratif, dan berbasis spasial. Penyusunan ini didasarkan pada capaian pembangunan sebelumnya, permasalahan dan isu strategis yang ada, serta kemampuan keuangan daerah. Dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Gorontalo selama periode 2025–2029.

Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam bentuk tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah untuk lima tahun ke depan, agar rencana pembangunan yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.
2. Menjamin keterpaduan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Gorontalo sepanjang periode 2025–2029.
3. Mendukung tercapainya kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan keselarasan antar pelaku pembangunan dalam satu kesatuan tindakan.
4. Mendorong terciptanya keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam rangka pembangunan berkelanjutan.
5. Menjamin adanya keterpaduan, sinkronisasi, dan sinergi dalam perencanaan pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pemerintah daerah lainnya.
6. Mendorong pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, adil, dan berkelanjutan.
7. Menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan (RKPD) Pemerintah Daerah dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.
8. Berfungsi sebagai instrumen pengendalian bagi Satuan Pengawas Internal (SPI) dan sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja kepala Perangkat Daerah selama lima tahun.

9. Menjadi tolak ukur dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran awal yang menjelaskan latar belakang dan alasan penyusunan dokumen RPJMD. Selain itu, bab ini juga menjelaskan dasar hukum yang menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, serta hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pada bagian ini, dijelaskan pula maksud dan tujuan penyusunan RPJMD serta sistematika penulisannya yang memberikan kerangka kerja untuk dokumen tersebut.

BAB II: GAMBARAN UMUM DAERAH

Bab ini menggambarkan kondisi umum daerah sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Subbab yang ada di dalamnya meliputi:

1. Gambaran Umum Kondisi Daerah yang mencakup aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan pelayanan umum. Tergantung pada kondisi daerah, bisa ditambahkan beberapa subbab lain yang relevan.
2. Gambaran Keuangan Daerah yang memuat informasi tentang realisasi APBD pada periode 2020-2024 dan proyeksi keuangan untuk periode 2025-2029.
3. Permasalahan dan Isu Strategis yang berisi tentang tantangan dan isu penting yang dihadapi daerah, baik dari sisi pembangunan maupun permasalahan lain yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah.

BAB III: VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini merumuskan arah pembangunan daerah selama lima tahun mendatang, dimulai dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran yang menjadi dasar bagi pencapaian pembangunan daerah pada tahun 2025-2029.
2. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Prioritas yang berisi langkah-langkah strategis dan kebijakan yang akan diambil daerah dalam mencapai tujuan dan

sasaran RPJMD, serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapainya.

BAB IV: PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat rincian program-program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, serta indikator-indikator kinerja yang harus dicapai selama periode RPJMD:

1. Program Perangkat Daerah yang berisi daftar program dari masing-masing perangkat daerah untuk mencapai tujuan pembangunan, dilengkapi dengan target dan pagu indikatif.
2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang mencakup target pencapaian melalui indikator kinerja utama (IKU) yang mengukur keberhasilan pencapaian tujuan RPJMD dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD) untuk menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB V: PENUTUP

Bab penutup berisi kesimpulan dan refleksi terhadap keseluruhan perencanaan pembangunan daerah yang telah disusun dalam RPJMD. Selain itu, bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan serta prosedur pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa sasaran dan tujuan pembangunan daerah dapat tercapai dengan efektif dan efisien.

BAB 2 GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang berada di tengah Provinsi Gorontalo dengan letak astronomis antara 0° 19' 00" - 1° 57' 00" Lintang Utara dan 121° 23' 00" - 125° 14' 00" Bujur Timur. Kabupaten Gorontalo berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara di sebelah utara, berbatasan dengan Teluk Tomini di sebelah selatan, berbatasan dengan Kabupaten Boalemo di sebelah barat dan berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo di sebelah timur.

Secara geografis mempunyai luas 2.125,47 km² atau 15,55 persen dari luas Provinsi Gorontalo. Kabupaten Gorontalo dibagi menjadi 19 kecamatan dan terdiri dari 191 desa dan 14 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Asparaga dengan luas 430,51 km², atau sebesar 20,25 persen dari total luas Kabupaten Gorontalo. Sedangkan Kecamatan Tilango merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil, hanya sebesar 5,79 km², atau hanya sebesar 0,27 persen dari total luas wilayah Kabupaten Gorontalo.

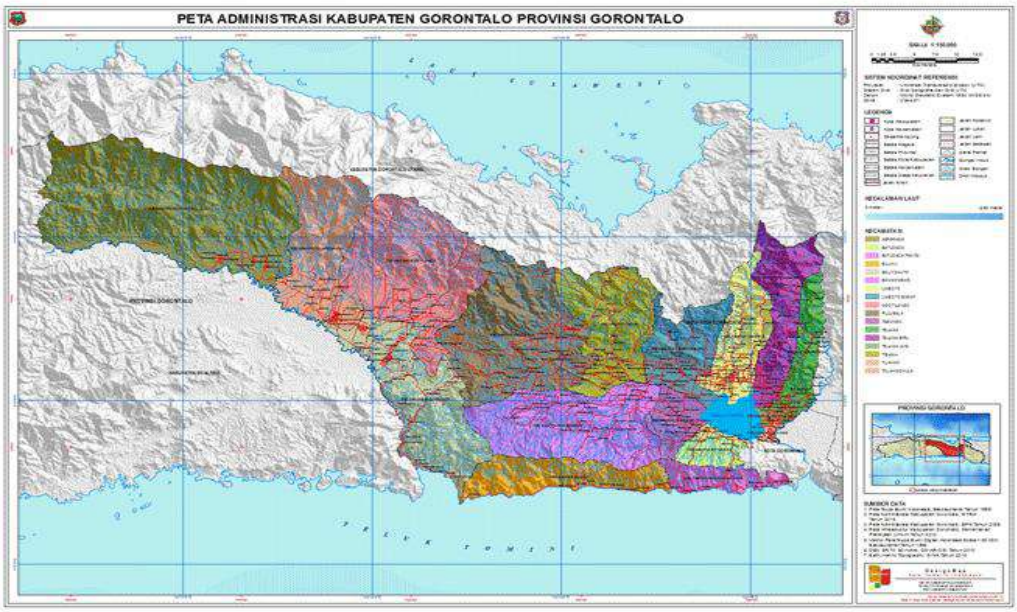

Sumber: Dok. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012–2032

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Gorontalo

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Gorontalo memiliki 19 kecamatan. Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu Kecamatan Asparaga dengan luas sebanyak 430,51 km2. Adapun kecamatan dengan luas terkecil yaitu Kecamatan Tilango dengan luas 5,79 km2. Jika dilihat dari tinggi di atas permukaan laut yang diukur pada kantor kecamatan, maka Kecamatan Asparaga juga merupakan kecamatan dengan ketinggian paling tinggi yaitu mencapai 127,3 meter. Sedangkan kecamatan dengan ketinggian di atas permukaan laut yang paling rendah yaitu Kecamatan Telaga Jaya yang hanya sebesar 5,6 meter. Kecamatan Asparaga merupakan kecamatan dengan luas terluas dan letak kantor kecamatan tertinggi dibandingkan seluruh kecamatan di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo, 2024

Kecamatan	Luas (Km2)	Persentase (%)
Batudaa Pantai	63.13	2.97
Biluhu	79.2	3.73
Batudaa	32.86	1.55
Bongomeme	144.16	6.78
Tabongo	54.8	2.58
Dungaliyo	46.62	2.19
Tibawa	145.34	6.84
Pulubala	240.57	11.32
Boliyohuto	60.59	2.85
Mootilango	211.49	9.95
Tolangohula	171.75	8.08
Asparaga	430.51	20.25
Bilato	112.34	5.29
Limboto	103.32	4.86
Limboto Barat	79.61	3.75
Telaga	28.16	1.32
Telaga Biru	108.84	5.12
Tilango	5.79	0.27
Telaga Jaya	6.41	0.30
Total	2,125.49	100

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.1.1.2. Iklim

Rata-rata suhu udara di wilayah Kabupaten Gorontalo selama tahun 2024 mencapai 27,69°C. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dari stasiun Meteorologi Djalaludin, suhu udara tertinggi tahun

2024 sebesar 35,9°C di bulan April, sedangkan suhu udara terendah sebesar 21,1°C di bulan agustus. Durasi penyinaran matahari di wilayah Kabupaten Gorontalo selama tahun 2024 adalah sebesar 5,7 jam per hari rata-rata. Sedangkan rata-rata kelembapan udara selama tahun 2024 adalah sebesar 83%. Kecepatan angin di Kabupaten Gorontalo tahun 2024 memiliki rentang yang tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir. Rata-rata kecepatan angin 5,0 Knot/detik.

Tabel 2.2 Kondisi Iklim Kabupaten Gorontalo Tahun 2024

Bulan	Suhu ^{0}C			Kelembaban (%)			Jumlah Curah Hujan (mm3)	Jumlah Hari Hujan	Durasi Matahari (Jam)
	Minimum	Average	Maksimum	Minimum	Average	Maksimum			
Januari	22.60	27.54	34.40	53.00	85.06	100	78.90	18	5.9
Februari	21.50	27.60	34.40	50.00	83.38	100	89.60	13	7.0
Maret	21.80	27.59	34.40	47.00	83.43	100	128.70	12	7.2
April	21.70	27.72	35.90	49.00	84.08	100	123.70	13	6.7
Mei	24.20	28.48	34.90	46.00	82.65	100	183.30	19	5.8
Juni	22.90	27.28	33.80	55.00	85.01	100	223.80	22	4.0
Juli	22.80	26.98	33.60	63.00	85.71	100	229.20	30	4.5
Agustus	21.10	26.94	34.10	73.00	83.38	93	68.00	31	5.0
September	21.20	28.14	35.70	64.75	76.85	87	39.20	30	6.5
Oktober	22.80	28.03	35.70	72.25	82.07	96.50	97.70	31	6.1
November	23.20	28.10	35.60	70.25	83.76	92.50	203.40	30	6.1
Desember	23.20	27.93	35.60	72.00	85.12	96.50	130.20	31	3.8

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

Kondisi iklim dan cuaca di Kabupaten Gorontalo, seperti yang dijelaskan di atas, memiliki dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Adanya perubahan suhu udara, durasi penyinaran matahari, kelembapan udara, dan kecepatan angin dapat menjadi faktor penting dalam perencanaan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Kondisi suhu udara serta perubahan durasi penyinaran matahari dapat berefek pada perubahan pola pertanian yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Selanjutnya, selain berdampak pada sektor pertanian dan kehutanan, dengan meningkatnya variabilitas iklim menyebabkan daerah terutama wilayah yang rentan bencana alam mesti merancang kebijakan penanggulangan bencana yang lebih baik, termasuk peringatan dini, evakuasi, dan pemulihan pasca-bencana. Di sisi lain, peningkatan kecepatan angin dapat menjadi potensi untuk pengembangan energi terbarukan, seperti pembangunan pembangkit listrik tenaga angin. Pemerintah daerah dapat mendorong investasi dalam

infrastruktur energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi konvensional.

2.1.1.3. Geologi dan Keadaan Tanah

Struktur geologi yang utama di daerah tersebut adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar mendatar. Sesar normal yang terdapat di Gunung Boliohuto menunjukan pola memancar, sedangkan sesar mendatar umumnya bersifat menganan tetapi adapula yang mengiri. Satuan batuan tertua pada lajur ini, yaitu Formasi Tinombo (Eosen - Miosen Awal), terdiri atas dua fasies, yaitu batuan gunung api dan batuan sedimen. Formasi Tinombo terbentuk bersamaan dengan terjadinya intrusi gabro, yang secara selaras ditindih oleh tiga satuan berumur Miosen Tengah - Pliosen Awal yang saling menjemari dan terbentuk pada laut dalam sampai dangkal. Ketiga satuan tersebut adalah batuan gunung api Bilungala yang murni tersusun oleh batuan gunung api, Formasi Dolokapa yang tersusun oleh batuan gunung api dan sedimen, dan Formasi Randangan yang murni tersusun oleh batuan sedimen.

Pada saat yang bersamaan terbentuk batuan plutonik (Diorit Bone) yang diduga komagmatik terhadap batuan gunung api Bilungala. Pada Pliosen Tengah terjadi pembentukan batuan gunung api (breksi, tuf dan lava) bersusunan menengah sampai asam, yaitu Batuan Gunung api Pani di bagian barat, Breksi Wobudu di bagian utara - tengah, dan Batuan Gunung api Motomboto di bagian timur. Secara bersamaan terjadi pembentukan batuan plutonik Diorit Boliohuto yang diduga komagmatik terhadap batuan-batuan gunung api tersebut. Pada Pliosen Akhir - Plistosen Awal diendapkan Formasi Lokodidi di lingkungan laut dangkal sampai darat, berupa sedimen molasa yang diselingi tuf. Bersamaan dengan itu terjadi pula pembentukan aglomerat, lava, dan tuf dari Batuan gunung api Pinogu yang bersusunan menengah sampai asam, dan kemungkinan besar terbentuk pada lingkungan yang sama dengan endapan molasa tersebut. Batuan plutonik yang terbentuk bersamaan dengan batuan gunung api Pliosen -Plistosen ini adalah Granodiorit Bumbulan. Selama Plio-Plistosen batugamping terumbu berkembang terutama di daerah pantai selatan, endapan danau di daerah Danau Limboto, dan bersamaan dengan itu endapan teras sungai terbentuk dan terangkat pada Plio-Plistosen. Diperkirakan sejak Plistosen Awal endapan-endapan ini mengalami pengangkatan.

2.1.1.4. Topografi

Berdasarkan topografinya wilayah Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Jika ditinjau dari elevasi di atas permukaan laut, Kecamatan Asparaga menjadi wilayah dengan ketinggian tertinggi, mencapai 127,3 meter. Sementara itu, Kecamatan Telaga Jaya merupakan kecamatan dengan elevasi paling rendah, hanya mencapai 5,6 meter di atas permukaan laut.

Tabel 2.3 Tinggi Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gorontalo

Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
Batudaa Pantai	54.5
Biluhu	70.0
Batudaa	78.0
Bongomeme	34.7
Tabongo	16.8
Dungaliyo	38.0
Tibawa	85.0
Pulubala	132.0
Boliyohuto	103.1
Mootilango	118.7
Tolangohula	83.3
Asparaga	127.3
Bilato	21.8
Limboto	89.0
Limboto Barat	85.0
Telaga	14.4
Telaga Biru	24.1
Tilango	11
Telaga Jaya	5.6

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

Wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki keragaman topografi yang mencakup sebagian besar pesisir pantai di sebelah selatan, yang langsung berbatasan dengan Teluk Tomini, dan dataran hingga pegunungan. Dari segi fisiografi, wilayah ini dapat dibagi menjadi dua satuan wilayah morfologi utama:

1) Satuan morfologi pesisir/laut: Terletak di sebelah selatan dan berbatasan langsung dengan Teluk Tomini.
2) Satuan morfologi dataran: Merupakan wilayah dataran rendah di sekitar Danau Limboto, yang umumnya terdiri dari satuan aluvium dan endapan danau. Sungai di wilayah ini memiliki pola sub-dendritik dan sub parallel.

3) Satuan morfologi pegunungan: Dicirikan oleh bentuk alam puncak mengkerucut dengan lereng yang bervariasi dari landai hingga terjal. Ketinggian pegunungan dapat mencapai 2.065 mdpl dan didominasi oleh batuan Gunungapi serta batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuarter.

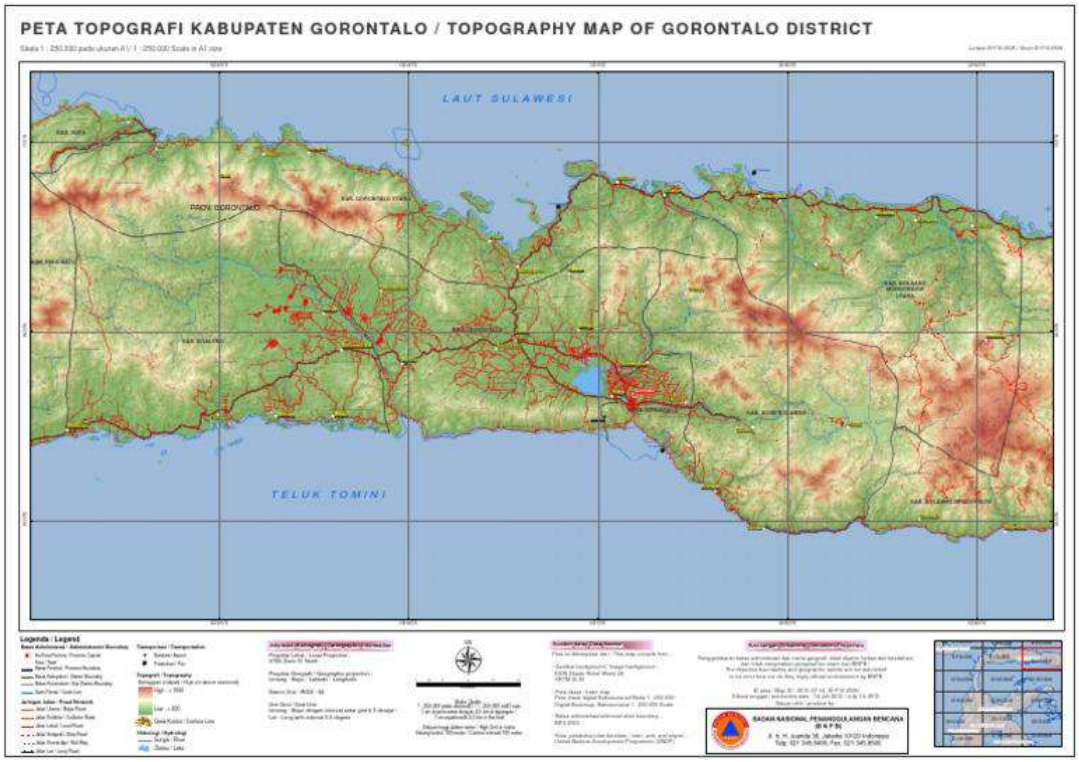

Sumber: Dok. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012–2032

Gambar 2.2. Peta Topografi Kabupaten Gorontalo

2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kabupaten Gorontalo memiliki dua puluh daerah aliran sungai dengan DAS terluas adalah DAS Paguyaman 2.396,66 km^2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total luas 245.000 hektar lahan di DAS Limboto-Bone Bolango, sebanyak 140.487 hektar tergolong dalam kategori agak kritis, kritis, dan sangat kritis. Situasi ini diyakini menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan sedimentasi baik di sungai maupun di danau Limboto. Data juga mencatat bahwa wilayah dengan luas kawasan permukiman rawan banjir terletak di Kecamatan Asparaga tepatnya Desa Mohiyolo dan Desa Pangahu.

Kabupaten Gorontalo juga memiliki danau Limboto yang potensial dan punya nilai ekonomi khususnya dalam mendorong pariwisata, pengairan, serta dapat dimanfaatkan untuk sumber energi. Danau Limboto, pada tahun 1932, memiliki rata-rata kedalaman sekitar 30 meter dengan luas mencapai 7.000 hektar. Namun, sejak tahun 1990 hingga saat ini, kedalaman rata-rata danau hanya sekitar 2,5 meter selama

musim kemarau dan dapat mencapai 5 meter pada musim hujan. Luas danau juga mengalami penurunan menjadi kurang lebih 3.000 hektar. Permasalahan utama yang menyebabkan pendangkalan danau melibatkan erosi, sedimentasi, dan permasalahan signifikan lainnya, seperti pertumbuhan enceng gondok yang menutupi sekitar 30% hingga 35% dari total luas permukaan danau.

Tabel 2.4 Wilayah Sungai Kabupaten Gorontalo

WS	KODE WS	NAMA DAS	Kode	Luas Km2
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Pohe	062	4.52
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Luluo	071	4.10
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Bolango-Bone	060	1856.02
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Lamu	069	3.23
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Langgula	068	6.53
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Limo'o	070	20.34
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Bongo	064	3.60
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Kayu Bulan	066	6.06
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Lopo	065	9.98
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Biluhu Timur	067	12.66
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Tanjung Keramat	063	22.86
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Baladu	009	40.15
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Boliohulu	007	151.62
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Bulontio	006	41.64
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Polanga	002	121.44
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Limbato	003	67.31
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Deme I	013	41.30
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Dulukapa	012	39.11
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Tolango	020	43.16
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Tudi	019	43.68
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Monano	018	47.64
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Biluhu Barat	074	2.42
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Lobuto Timur	072	61.35
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Huango	075	10.48
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Lobuto	073	20.51
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Limboto	061	875.89
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Pontolo	024	37.81
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Tolangio	023	42.23
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Datahu	021	41.27
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Posso	026	95.74
WS Limboto-Bolango-Bone	05.04.A2	DAS Soklat	033	85.45
WS Paguyaman	05.05.A3	DAS Paguyaman	001	2396.66

Sumber: Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) - BIG, Tahun 2024.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan terbagi atas dua bagian yakni kawasan lindung dan dan kawasan budidaya. Mengutip data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo,

tercatat bahwa sampai tahun 2021, total luas hutan dan perairan Kabupaten Gorontalo adalah 99.911,51 Ha.

Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Kabupaten Gorontalo

Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Dapat Dikonversi	Jumlah Luas Hutan dan Perairan
13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.1.2. Kondisi Demografis

2.1.2.1. Jumlah Penduduk

Data menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2024. Secara bertahap, jumlah penduduk meningkat dari 378.527 jiwa pada tahun 2019 menjadi 423,981 jiwa pada tahun 2024. Setiap tahun, ada peningkatan jumlah penduduk, dengan lonjakan signifikan terlihat pada tahun 2024. Peningkatan jumlah penduduk yang konsisten ini memberikan implikasi penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo untuk periode 2025-2029. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam RPJMD berdasarkan tren ini adalah bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan infrastruktur seperti jalan, air bersih, listrik, dan fasilitas kesehatan serta pendidikan akan meningkat.

Pertumbuhan penduduk yang signifikan juga akan meningkatkan tekanan pada sumber daya alam. Sehingga perlu menekankan pada pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa kebutuhan masa depan dapat terpenuhi tanpa merusak lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi peluang untuk memperluas basis ekonomi, tetapi juga menimbulkan tantangan seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, harus memasukkan kebijakan yang dapat mengakomodasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan menciptakan lapangan kerja yang memadai. Bertambahnya jumlah penduduk juga berarti kebutuhan akan perumahan dan kawasan permukiman yang layak akan meningkat. Sehingga harus mengintegrasikan perencanaan tata ruang yang efisien untuk menghindari urban sprawl dan memastikan perkembangan yang teratur.

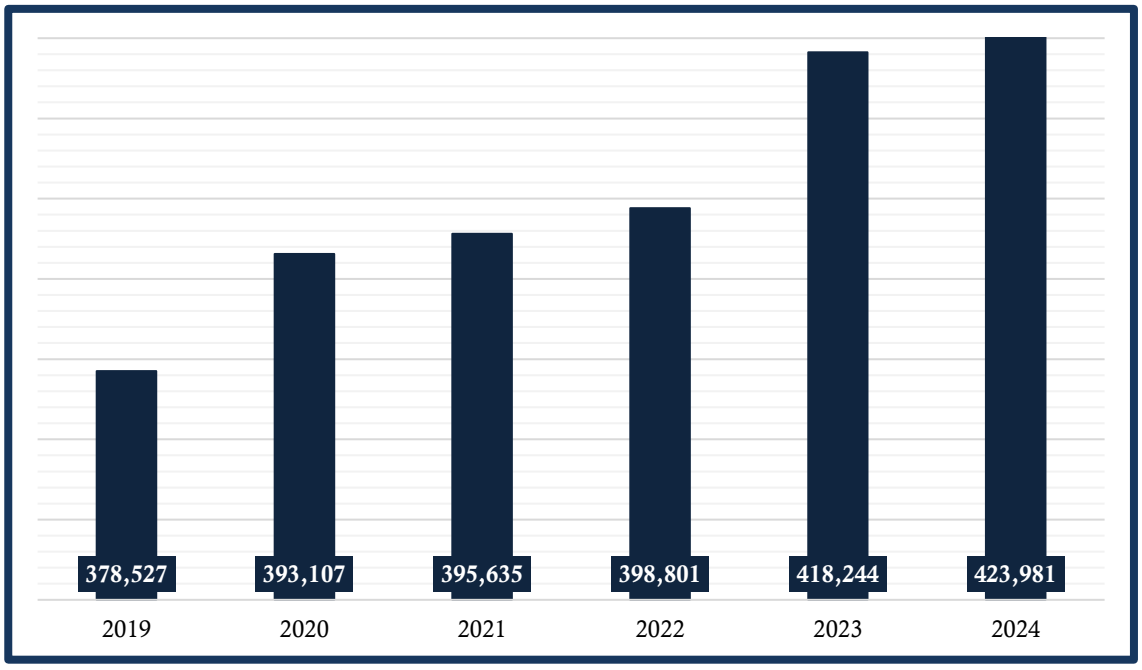

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.3 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo, 2019-2025

Melihat tren jumlah penduduk, diproyeksikan hingga 2030 nanti, jumlah penduduk di Kabupaten Gorontalo akan terus bertambah hingga mencapai 432,67 ribu jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan 1.53% per lima tahun. Pada lima tahun pertama yakni 2025–2030, laju pertumbuhan diperkirakan akan mencapai 0.88% dan akan terus melaju hingga 1.91% pada 2040–2045. Kondisi di atas tentu akan berefek secara sosial dan ekonomi karena semakin banyak penduduk maka kebutuhan akan infrastruktur dan kebutuhan dasar lainnya akan turut meningkat.

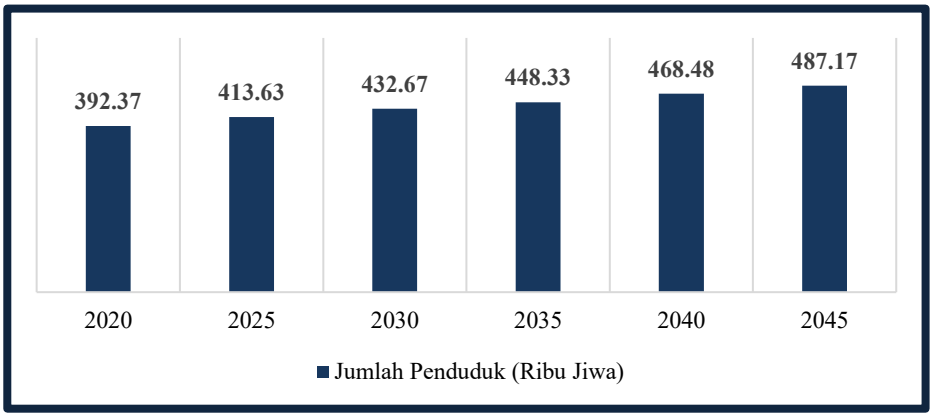

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.4 Proyeksi Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo, 2020-2045

2.1.2.2. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

Berdasarkan kelompok umur, bagian tengah piramida (usia 25-49 tahun) posisi lebar, menandakan populasi yang besar dalam kelompok usia produktif. Dengan basis penduduk usia produktif yang besar, Pemerintah harus mengarahkan pengembangan

ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, seperti peningkatan sektor industri, agrikultur, dan jasa, yang sesuai dengan potensi daerah. Namun juga perlu diingat bahwa meskipun jumlahnya relatif menurun, populasi lansia (50+) juga jumlahnya cukup signifikan, perlu adanya perencanaan terkait dukungan sosial dan layanan bagi penduduk lanjut usia, termasuk program pensiun dan layanan kesehatan khusus untuk kelompok ini.

Tabel 2.6 Kondisi Penduduk Kab. Gorontalo Berdasarkan Usia

Kel. Umur	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	34.847	31.346	31.647	31.436	32.227	31.869
5-9	33.909	30.330	29.908	30.330	33.929	34.844
10-14	34.713	35.137	34.296	35.137	34.953	34.775
15-19	33.957	35.451	35.324	35.451	34.512	35.119
20-24	32.403	36.592	36.436	36.592	40.595	39.939
25-29	31.361	34.249	34.459	34.249	36.670	37.818
30-34	28.298	30.904	31.220	30.904	33.477	34.900
35-39	27.600	29.462	29.569	29.462	27.564	26.862
40-44	27.329	27.804	27.999	27.804	30.039	30.053
45-49	24.859	25.292	25.708	25.292	29.115	29.206
50-54	20.286	22.258	22.695	22.258	26.182	26.412
55-59	16.402	18.256	18.871	18.256	19.882	21.159
60-64	12.599	13.548	14.144	13.548	15.163	15.806
65-69	8.928	9.797	10.210	9.797	10.289	10.572
70-74	5.715	6.360	6.632	6.360	6.925	7.500
75+	5.321	6.231	6.517	11.925	6.722	7.147
Total	**378.527**	**393.107**	**395.635**	**39.801**	**418.244**	**423.981**

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2019, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 189.182 jiwa dan perempuan 189.345 jiwa. Pada tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki meningkat menjadi 213.513 jiwa, sementara perempuan menjadi 210.468 jiwa. Secara umum, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan relatif seimbang, meskipun ada sedikit fluktuasi setiap tahun. Namun, pada tahun 2024, jumlah laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan perempuan. Dengan populasi yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, Pemerintah perlu memasukkan program-program yang mendorong kesetaraan gender, baik dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan publik.

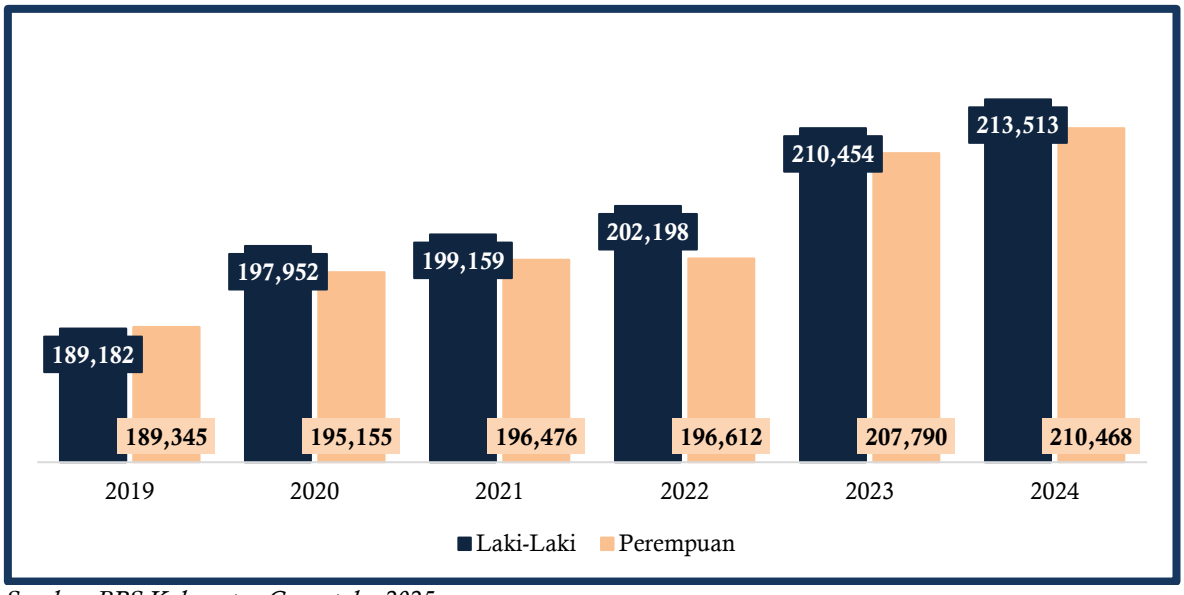

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.5 Jumlah Penduduk Kab. Gorontalo Berdasarkan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2019-2024

2.1.2.3. Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga (KK) dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Data menunjukkan bahwa Kecamatan Limboto, Tibawa, dan Telaga Biru adalah kecamatan dengan jumlah kepala keluarga terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga kecamatan ini membutuhkan perhatian khusus dalam perencanaan infrastruktur dan pelayanan publik. Infrastruktur seperti jalan, listrik, air bersih, serta fasilitas umum lainnya perlu ditingkatkan untuk mengakomodasi jumlah penduduk yang besar. Selain itu, layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan harus diperkuat agar dapat melayani masyarakat secara optimal.

Di sisi lain, kecamatan dengan jumlah kepala keluarga yang lebih sedikit, seperti Bilato, Biluhu, dan Asparaga, mungkin memerlukan pendekatan yang berbeda. Meskipun jumlah kepala keluarganya sedikit, layanan publik tetap harus dioptimalkan. Potensi lokal seperti pertanian dan pariwisata dapat dikembangkan untuk meningkatkan ekonomi kecamatan-kecamatan ini. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar yang diperlukan juga harus disesuaikan dengan skala kebutuhan dan potensi pertumbuhan penduduk.

Kecamatan Tilango, Batudaa Pantai, dan Telaga, yang memiliki rata-rata anggota keluarga yang lebih besar, mungkin memerlukan program dukungan sosial yang lebih intensif. Program-program seperti bantuan pendidikan untuk anak-anak, program kesehatan keluarga, dan subsidi kebutuhan pokok menjadi penting. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kualitas sekolah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan

bagi anggota keluarga yang banyak juga perlu diprioritaskan. Di sisi lain, pelatihan keterampilan bagi anggota keluarga yang lebih tua dapat mendukung ekonomi keluarga.

Untuk kecamatan dengan rata-rata anggota keluarga yang lebih sedikit, seperti Limboto Barat, perencanaan layanan kesehatan dan program pengembangan keterampilan individu harus menjadi fokus utama. Optimalisasi layanan kesehatan untuk individu, terutama bagi kelompok usia lanjut dan anak-anak, sangat penting. Selain itu, program perencanaan perumahan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan kebutuhan keluarga kecil harus diperhatikan.

Tabel 2.7 Jumlah Kepala Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Keluarga Kab. Gorontalo

Kecamatan	Jumlah Kepala Keluarga	Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga
Batudaa Pantai	3.475	3,44
Biluhu	2.530	3,42
Batudaa	4.316	3,38
Bongomeme	6.071	3,22
Tabongo	5.723	3,28
Dungaliyo	5.311	3,29
Tibawa	12.696	3,29
Pulubala	7.822	3,24
Boliyohuto	5.344	3,22
Mootilango	5.890	3,32
Tolangohula	6.918	3,33
Asparaga	3.954	3,36
Bilato	2.932	3,38
Limboto	15.059	3,32
Limboto Barat	8.031	3,17
Telaga	6.909	3,37
Telaga Biru	8.930	3,35
Tilango	4.357	3,48
Talaga Jaya	3.670	3,37
Kabupaten Gorontalo	**119.938**	**3,31**

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.1.2.4. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Gorontalo

Dari grafik di bawah, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024 yang mencapai 1,31, setelah sebelumnya melambat secara bertahap hingga mencapai 0,47 pada tahun 2023.

Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kelahiran pascapandemi, serta arus migrasi masuk yang lebih tinggi.

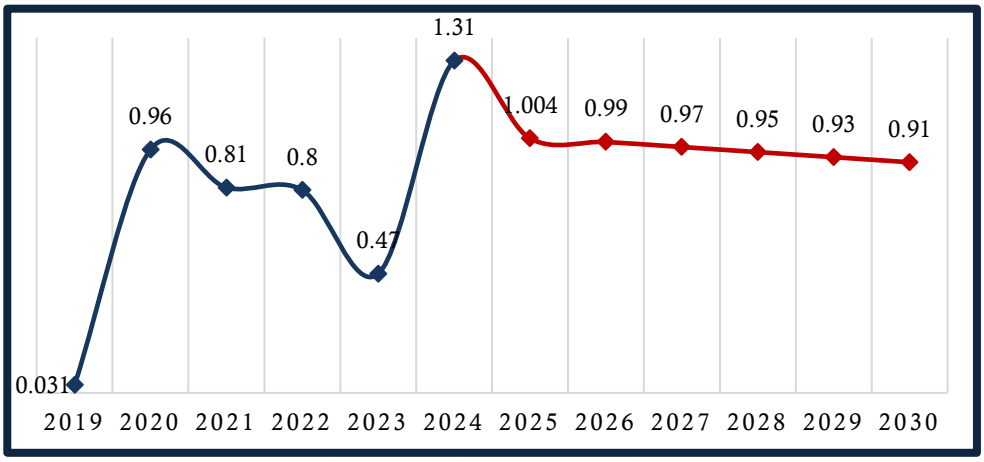

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.6 Kondisi Existing dan Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Gorontalo, 2019-2030

Permasalahan kependudukan di Kabupaten Gorontalo saat ini sangat kompleks, baik dari sisi laju pertumbuhan, kematian, persebaran dan mutu penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Gorontalo cukup rendah yaitu 1,31 persen pada tahun 2024. Pertumbuhan ini masih di atas pertumbuhan penduduk tingkat nasional 1,17 persen per tahun dan Provinsi Gorontalo sebesar 1,17 persen per tahun . Pertumbuhan penduduk ini tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas ekonomi maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk seperti tingginya angka pengangguran, kriminalitas, dan memburuknya kondisi sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menjadi tantangan tersendiri terutama bila dikaitkan dengan pencapaian bonus demografi. Pencapaian bonus demografi ini hanya dapat terjadi jika angka kelahiran di Kabupaten Gorontalo dapat ditekan yaitu dengan TFR 2,1. Sementara itu TFR Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024 masih diangka 2,30. Tantangan untuk menurunkan dan mempertahankan TFR secara konsisten ke depan sangat terkait dengan kinerja program keluarga berencana (KB), dimana dalam lima tahun terakhir terdapat kecenderungan penurunan jumlah peserta program KB aktif dan penurunan angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan.

Kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan pembangunan kependudukan. Berbagai tindakan maupun upaya yang dilakukan hanya bersifat reaktif terhadap dampak pembangunan yang terjadi serta perlakuannya cenderung normatif. Sejalan dengan otonomi daerah, maka upaya pengembangan pembangunan berwawasan kependudukan secara

konsisten dan berkelanjutan merupakan pilihan yang paling tepat di tengah dinamika penduduk yang kompleks.

2.1.2.5. Kepadatan Penduduk di Kabupaten Gorontalo

Gambar 2.7 menunjukkan peningkatan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2024. Dimulai dengan kepadatan 178 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2019, kepadatan ini terus meningkat setiap tahun hingga mencapai 194 jiwa per kilometer persegi pada tahun 2024. Peningkatan kepadatan penduduk seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk.

Kenaikan tingkat kepadatan penduduk ini menggambarkan bahwa distribusi populasi di Kabupaten Gorontalo semakin terkonsentrasi di wilayah tertentu. Fenomena ini dipengaruhi oleh urbanisasi, perpindahan penduduk ke area perkotaan, atau pengembangan kawasan permukiman baru yang tidak seimbang dengan perluasan wilayah.

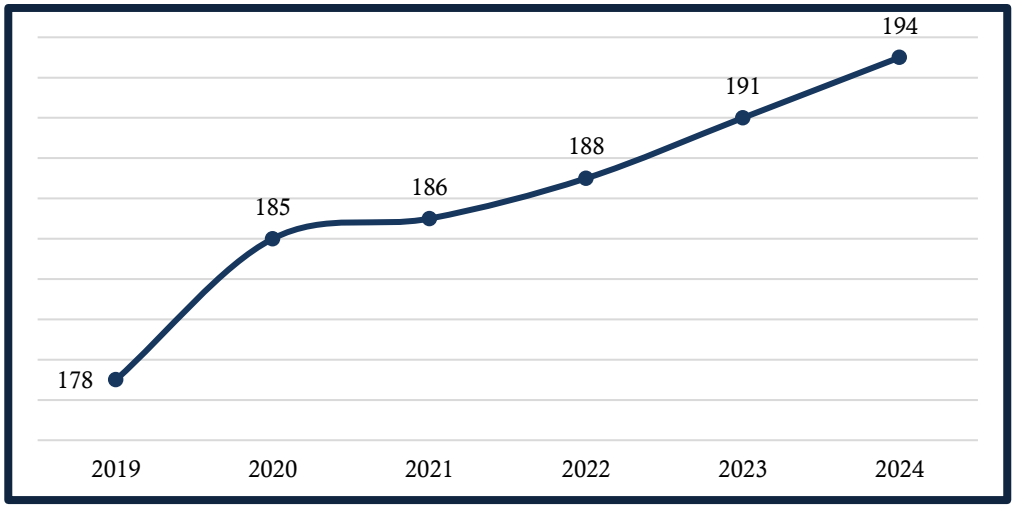

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.7 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Gorontalo, 2019-2024

2.1.3. Potensi Sumber Daya Alam

2.1.3.1. Kawasan Budidaya

a. Kawasan Hutan Produksi

Kawasan budidaya kehutanan mencakup hutan rakyat dan kawasan hutan produksi. Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999, hutan rakyat merupakan hutan hak yang berada di atas tanah yang dimiliki secara pribadi, sementara hutan produksi adalah kawasan hutan yang fungsi utamanya adalah untuk memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan produksi mencakup berbagai aktivitas, termasuk pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan, serta hasil hutan kayu dan non-kayu. Pemanfaatan kawasan

bertujuan untuk memaksimalkan ruang tumbuh guna mendapatkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi secara optimal. Pemanfaatan jasa lingkungan dilakukan melalui usaha yang mengoptimalkan potensi jasa tersebut tanpa merusak lingkungan atau mengurangi fungsi utamanya.

Pemanfaatan hasil hutan dilakukan dengan tetap mempertahankan hutan alam, serta memprioritaskan pengembangan hutan tanaman pada lahan tidak produktif. Aktivitas ini mencakup seluruh proses mulai dari pemanenan hingga pemasaran. Dalam rencana kawasan budidaya, ruang bagi kawasan hutan produksi dibedakan atas:

1. Kawasan Hutan Produksi Terbatas

   Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor: 452/KPTS-II/1999, kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang terluas terdapat di Kecamatan Tolangohula, dengan luas mencapai 10.957 hektar atau 23,5% dari keseluruhan luas HPT di kecamatan tersebut. Kawasan HPT seluas 6.284 hektar ditemukan di Kecamatan Boliyohuto, diikuti oleh Kecamatan Tibawa dengan luas 6.055 hektar, dan Kecamatan Bongomeme seluas 5.968 hektar. Sisanya tersebar di hampir seluruh kecamatan, kecuali Kecamatan Telaga yang tidak memiliki Kawasan Hutan Produksi Terbatas.
2. Kawasan Hutan Produksi Tetap

   Di Kabupaten Gorontalo, kawasan Hutan Produksi (HP) mencakup areal seluas 15.521 hektar atau 6,8 persen dari total luas kabupaten. Kawasan HP terluas terdapat di Kecamatan Mootilango, dengan luas 7.017 hektar. Selanjutnya, kawasan HP seluas 5.212 hektar ditemukan di Kecamatan Tolangohula, diikuti oleh Kecamatan Batudaa Pantai dengan luas 2.781 hektar. Sisanya tersebar di Kecamatan Tibawa, Pulubala, dan Bongomeme.
3. Kawasan Hutan Produksi Konversi

   Di Kabupaten Gorontalo, terdapat 2.017 hektar hutan produksi konversi, yang merupakan 0,9 persen dari luas keseluruhan wilayah kabupaten. Hutan Produksi Konversi (HPK) tersebar di Kecamatan Tolangohula dengan luas 1.691 hektar, serta di Kecamatan Mootilango dengan luas 296 hektar dan Kecamatan Tibawa dengan luas 84 hektar.

b. Kawasan Hutan Rakyat

Di Kabupaten Gorontalo, lahan perkebunan mencakup area seluas sekitar 64.177 hektar. Berdasarkan survei lapangan dan analisis data statistik kabupaten, terdapat lima komoditas perkebunan yang dianggap unggul dan perlu dikembangkan,

yaitu kelapa, kakao, cengkeh, tebu, dan jambu mete. Potensi pengembangan komoditas unggulan ini cukup besar dan dapat dilakukan di hampir seluruh wilayah kabupaten.

Selain itu, terdapat beberapa komoditas industri perkebunan lainnya yang berpotensi untuk dikembangkan, seperti tanaman kelapa sawit, pisang, kapas, tembakau, dan nenas. Lahan yang sangat potensial untuk pengembangan kelapa sawit mencakup 36.379 hektar (sistem lahan DLU, BKN, KTT, AWY, dan BTK), yang merupakan 10,6% dari total wilayah kabupaten atau 21,9% dari luas APL. Kapas dapat dikembangkan pada sistem lahan KNJ, LSBS, dan AWY, tembakau pada sistem lahan AWY dan SFO, serta nenas pada sistem lahan BTK, BMS, OKI, dan TWI. Kawasan peruntukan perkebunan meliputi Kecamatan Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Mootilango, Bilato, Pulubala, Batudaa, Bongomeme, Biluhu, Batudaa Pantai, Dungaliyo, Tibawa, Limboto Barat, Limboto, Tabongo, Telaga Biru, dan Telaga.

2.1.3.2. Kawasan Permukiman

a. Kawasan Permukiman Perkotaan

Rencana pengembangan kawasan permukiman perkotaan di Kabupaten Gorontalo mencakup langkah-langkah berikut:

1) Permukiman perkotaan akan diarahkan untuk mengisi kawasan yang belum terbangun di ibukota kecamatan, terutama pada pusat-pusat wilayah pembangunan.
2) Penggunaan ruang perkotaan akan diarahkan untuk mengubah struktur ruang linier, yaitu pola perkembangan wilayah yang cenderung memanjang mengikuti jalur transportasi utama, menjadi struktur ruang konsentris, yakni pola perkembangan yang berpusat pada satu inti dengan lapisan kegiatan di sekitarnya. Perubahan ini ditujukan untuk menciptakan pusat-pusat kecamatan yang lebih terpadu, kompak, serta efisien dalam mendukung aktivitas pemerintahan, pelayanan publik, dan kegiatan ekonomi masyarakat.
3) Secara bertahap, akan dilakukan penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan (RTRK) untuk seluruh ibukota kecamatan dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk ibukota kecamatan yang berfungsi sebagai pusat wilayah pengembangan pembangunan, serta penyusunan RTRK untuk ibukota kecamatan yang mengalami perkembangan perkotaan yang pesat.
4) Pengembangan kawasan permukiman akan dilakukan untuk mendukung kawasan pertanian, agroindustri, dan kegiatan lainnya.

5) Peningkatan sarana dan prasarana permukiman, terutama untuk sarana sosial, air bersih, drainase, pengelolaan limbah, persampahan, listrik, dan telekomunikasi.

b. Kawasan Permukiman Perdesaan

Rencana pengembangan kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut:

1) Prioritas pada Permukiman Perkampungan yang Sudah Ada: Fokus utama adalah pada pengembangan permukiman di kelompok perkampungan yang sudah ada untuk menghindari penyebaran permukiman secara sporadik, yang dapat mengakibatkan penggunaan lahan dan penyediaan infrastruktur menjadi tidak efisien.
2) Pengembangan Desa Pusat Pertumbuhan: Mengembangkan desa-desa yang memiliki potensi sebagai pusat pertumbuhan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut.
3) Peningkatan Aksesibilitas: Meningkatkan aksesibilitas antara kawasan permukiman dengan kawasan pertanian untuk mendukung integrasi kegiatan ekonomi dan mempermudah akses ke sumber daya pertanian.
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Permukiman: Fokus pada peningkatan sarana dan prasarana permukiman untuk memastikan kualitas hidup yang lebih baik bagi penduduk perdesaan.
5) Antisipasi Perkembangan Kawasan Terbangun: Mengantisipasi perkembangan permukiman yang dapat terjadi akibat pembangunan jalan pantai utara, yang akan meningkatkan aksesibilitas dan merangsang perkembangan di sekitarnya. Kawasan permukiman perlu diarahkan agar perkembangannya tidak sporadik.

2.1.3.3. Kawasan Perdagangan dan Jasa

Pengembangan dan peningkatan kawasan perdagangan dan jasa di Kabupaten Gorontalo mencakup beberapa wilayah utama, termasuk Isimu, Limboto, Telaga, dan Limboto Barat. Di tingkat kecamatan, pengembangan ini juga melibatkan Batudaa Pantai, Biluhu, Batudaa, Bongomeme, Tabongo, Dungaliyo, Pulubala, Boliyohuto, Mootilango, Tolangohula, Asparaga, Bilato, Telaga Biru, Tilango, dan Talaga Jaya. Upaya ini bertujuan untuk memperluas dan meningkatkan sektor perdagangan dan jasa di seluruh area tersebut, memperkuat jaringan ekonomi, dan mendukung pertumbuhan kawasan-kawasan yang terlibat.

2.1.3.4. Kawasan Industri

Kabupaten Gorontalo akan mengembangkan kawasan agroindustri yang mencakup Kecamatan Tibawa, Dungaliyo, dan Pulubala. Untuk industri besar, kawasan peruntukannya adalah di Tibawa dan Pulubala, sedangkan untuk industri sedang ditetapkan di Boliyohuto, Mootilango, dan Tolangohula. Industri kecil akan difokuskan di Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Dungaliyo, Batudaa, dan Tibawa. Selain itu, keberadaan industri kecil atau rumah tangga yang berada di luar kawasan industri juga perlu diperkuat dengan penyediaan prasarana dan sarana penunjang. Industri kecil memiliki peranan penting dalam perekonomian daerah, terutama karena banyak dioperasikan oleh penduduk perdesaan dengan modal terbatas. Oleh karena itu, pengembangan industri kecil akan dilakukan dengan menetapkan lokasi berupa:

1. Permukiman Industri Kecil (PIK): Area yang disediakan khusus untuk industri kecil, dilengkapi dengan infrastruktur, unit produksi, sarana pelayanan bersama, dan tempat tinggal pengusaha.
2. Sentra Industri Kecil: Area yang diperuntukkan bagi kegiatan industri kecil sejenis, yang tumbuh dan berkembang dalam satu lokasi tertentu. Di Kabupaten Gorontalo, sentra industri kecil akan difokuskan untuk memantapkan dan mendorong perkembangan yang telah ada.

Saat ini, industri di Kabupaten Gorontalo bersifat menyebar, dengan kegiatan industri rumah tangga yang bervariasi. Industri di daerah ini dapat dibagi menjadi empat kategori utama:

1. Industri Pengolahan Hasil Pertanian (Agro-industri)
2. Industri Aneka
3. Industri Logam, Mesin, dan Kimia
4. Industri Perikanan

Keempat jenis industri ini dapat ditemukan di semua kecamatan. Untuk jangka panjang, diperlukan penetapan wilayah dengan fungsi utama pengembangan industri, meskipun skalanya masih kecil. Dalam rencana ini, istilah kawasan industri terbatas atau sentra industri kecil digunakan sebagai langkah awal menuju pengembangan kawasan industri.

Alokasi ruang untuk pengembangan kawasan industri terbatas (sentra industri kecil) di Kabupaten Gorontalo direncanakan sebagai berikut:

1. Agro-industri di Kecamatan Tibawa dan Bongomeme.

2. Sentra Industri Kecil Aneka di Kecamatan Telaga dan Telaga Biru.
3. Sentra Industri Kecil Logam, Mesin, dan Kimia di Kecamatan Telaga dan Limboto Barat.
4. Industri Perikanan Terbatas di Kecamatan Batudaa Pantai dan Boliyohuto.

2.1.3.5. Kawasan Pariwisata

Gorontalo merupakan bagian dari sistem kesatuan kepariwisataan yang mencakup wilayah Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan. Potensi objek wisata di Kabupaten Gorontalo meliputi: (i) wisata alam bahari; (ii) wisata alam hutan dan gua; (iii) wisata alam danau; (iv) wisata alam air panas; dan (v) wisata sejarah dan budaya. Setiap jenis wisata memiliki daya tarik unik yang dapat dikembangkan di wilayah ini.

Sesuai dengan potensi objek wisata dan ketersediaan sarana dan prasarana seperti hotel dan restoran, pusat pelayanan wisata ditetapkan di Kota Limboto, selain dari Ibu Kota Gorontalo. Untuk mengoptimalkan potensi wisata, seluruh potensi wisata di Kabupaten Gorontalo perlu dikelola secara terpadu dan saling mendukung dalam skema wisata yang mencakup Kabupaten dan Provinsi Gorontalo secara umum. Kawasan wisata bahari terletak di daerah pantai dan mencakup aktivitas wisata yang melibatkan fenomena alam, budaya, kehidupan sosial masyarakat pesisir, biota laut, dan kualitas perairan. Kabupaten Gorontalo memiliki area yang luas untuk wisata bahari, dengan kawasan wisata bahari ditetapkan di Teluk Paguyaman dan sepanjang pesisir Batudaa Pantai.

Kawasan wisata alam hutan dan marga satwa terdapat di Hutan Suaka Margasatwa Nantu di Kecamatan Tolangohula, serta Cagar Alam Tangale di Kecamatan Tibawa. Gua Ular di Batudaa dan Bukit PPn 32 di Kelurahan Bongohulawa, Kecamatan Limboto juga merupakan bagian dari kawasan wisata alam. Danau Limboto adalah lokasi yang sangat potensial untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata danau. Selain nilai sejarahnya, kegiatan penangkapan ikan oleh masyarakat nelayan di danau ini menjadi daya tarik wisata yang menarik. Perencanaan fasilitas penunjang di sekitar danau sangat penting untuk meningkatkan daya tarik wisata kawasan ini.

Objek wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Gorontalo meliputi Rumah Adat Gorontalo, Menara Keagungan di Kecamatan Limboto, serta Bekas Pendaratan Pesawat Udara Katalina di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa. Gelanggang Olahraga 23

Januari di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga juga termasuk dalam daftar objek wisata sejarah dan budaya.

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata budaya diarahkan ke Desa Bongo di Kecamatan Batudaa Pantai, sementara pariwisata alam akan dikembangkan di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru; Desa Barakati, Kecamatan Batudaa; Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai; dan Desa Taulaa, Kecamatan Bilato. Pariwisata buatan akan terfokus di Kecamatan Batudaa, Boliyohuto, dan Mootilango.

2.1.3.6. Kawasan Peruntukan Lainnya

1. Kawasan Pertanian

Kegiatan pertanian lahan basah untuk kegiatan pertanian yang memerlukan air terus menerus sepanjang tahun, dengan komoditi utamanya adalah padi sawah. Kawasan lahan yang sesuai dan sangat sesuai ini tersebar di bagian selatan Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, dan Tibawa, bagian utara Kecamatan Batudaa, dan Bongomeme, sepanjang Sungai Paguyaman bagian Timur (kawasan yang akan disuplai oleh irigasi Paguyaman). Kemudian untuk budidaya lahan kering, pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan lahan kering diarahkan pada komoditas jagung sebagai andalan utama, dan untuk kepentingan diversifikasi juga dikembangkan hortikultura.

2. Kawasan Perikanan

Kawasan pengembangan perikanan di Kabupaten Gorontalo meliputi perairan darat, pesisir, dan laut. Di perairan darat, potensi pengembangan terdapat pada danau dan kolam-kolam. Danau Limboto tidak hanya berfungsi sebagai reservoir air untuk penanggulangan banjir, tetapi juga dimanfaatkan untuk perikanan tangkap dan budidaya. Kawasan sekitar sungai (DAS) juga dapat digunakan untuk perikanan budidaya di kolam yang memanfaatkan air sungai sebagai media pemeliharaan. Di kawasan pesisir dan laut, potensi pengembangan meliputi perikanan budidaya seperti pertambakan dan marikultur, serta perikanan tangkap di daerah pesisir *(coastal fisheries).*

2.1.4. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Menjaga keberadaan lingkungan alam adalah suatu keharusan untuk memastikan kelangsungan hidup yang berkelanjutan. Di Kabupaten Gorontalo, terdapat elemen penting dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, khususnya dalam hal air dan pangan. Hal ini melibatkan perlindungan serta

pemanfaatan secara bijak terhadap ekosistem yang menyediakan air dan mengatur tata air serta banjir.

1) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

   Manfaat air bersih berasal dari fungsi ekosistem. Peta jasa ekosistem penyediaan air di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa di seluruh Kabupaten dan Kota di provinsi tersebut, terdapat tingkat pelayanan ekosistem yang rendah dan sedang dalam penyediaan air. Di Kabupaten Gorontalo, dari total ketersediaan air sebesar 1.343.057.524 m^3/tahun tercatat bahwa kebutuhan air lebih didominasi oleh kebutuhan untuk lahan yaitu sebesar 951.605.946 m^3/tahun. Sedangkan untuk kebutuhan domestik sebesar 32.383.843 m^3/tahun. Berdasarkan data KLHS, diketahui bahwa ambang batas jumlah penduduk yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah adalah 9.061.340 jiwa, di sisi lain total jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo sebanyak 398.801 jiwa.

2) Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

   Ketersediaan pangan di Kabupaten Gorontalo mencapai 554.756.973.095 Kkal, sedangkan total kebutuhan pangan hanya mencapai 294.134.501.750 Kkal. Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi 398,801 jiwa populasi yang ada. Selain itu, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Gorontalo pada tahun 2024 mencapai 79,5, menempatkannya pada peringkat 128 nasional dan peringkat ke-5 di Provinsi Gorontalo. Dalam rentang waktu 2019 hingga 2024, terjadi fluktuasi dalam IKP Kabupaten Gorontalo namun cenderung stabil. Meskipun demikian, terdapat sedikit penurunan dalam indeks ketersediaan pangan dari 95,58 pada tahun 2019 menjadi 92,85 pada tahun 2022. Di sisi lain, indeks keterjangkauan pangan turun sedikit dari 77,84 pada tahun 2019 menjadi 77,54 pada tahun 2022. Namun, indeks pemanfaatan pangan mengalami peningkatan ringan dari 67,16 pada tahun 2019 menjadi 71,68 pada tahun 2022. Secara keseluruhan, meskipun terjadi fluktuasi dalam beberapa indikator, IKP Kabupaten Gorontalo tetap berada dalam kategori ketahanan pangan yang baik karena melebihi nilai cut off sebesar 75,68.

2.1.5. Lingkungan Hidup Berkualitas

Ukuran indeks kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan 3 (tiga) kriteria penilaian yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.

Tercatat indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Gorontalo di tahun 2023 adalah 71.89 atau dalam kriteria "baik". Namun jika dilihat nilai indeks berdasarkan komponen pembentuk IKLH, indeks kualitas air dan indeks kualitas lahan berada pada kategori "sedang" atau "cemar sedang" dengan skor masing-masing 60 untuk indeks kualitas air dan 55.16 untuk indeks kualitas lahan. Sedangkan indeks kualitas udara sebesar 91.97 atau ada pada kategori "Sangat baik".

Penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan oleh penurunan mutu air permukaan dan kerusakan serta penurunan kualitas air di Danau Limboto. Penurunan mutu air berakibat pada peningkatan sedimentasi dan proses eutrofikasi, akibat peningkatan kandungan mineral dan nutrisi seperti nitrogen dan fosfor dalam perairan. Pertumbuhan enceng gondok yang tidak terkendali juga menyebabkan pendangkalan danau, sementara pencemaran limbah cair dan padat dari aktivitas masyarakat sekitar danau turut meningkat. Erosi yang semakin cepat dari hulu sungai serta meningkatnya aktivitas perikanan Kerambah Jaring Apung (KJA) juga menjadi masalah serius, begitu juga dengan masalah sampah domestik yang mengancam kelestarian Danau Limboto. Padahal, Danau Limboto memiliki potensi ekonomis sebab menjadi sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata. Berdasarkan hasil penelitian total nilai manfaat ekosistem Danau Limboto adalah Rp 581.919.234.588/tahun.

Meskipun memiliki manfaat yang besar, kondisi Danau Limboto sangat memprihatinkan. Antara tahun 2000 hingga 2015, luas danau mengalami penyusutan sebesar 1.076 hektar, dengan rata-rata penyusutan 71,73 hektar atau 1,79% per tahunnya. Penyusutan terbesar terjadi di bagian barat, timur, dan utara danau. Dalam rentang waktu 52 tahun sejak tahun 1932, luas Danau Limboto menyusut sekitar 4.304 hektar atau 62,60% dari total luasnya. Pada tahun 2012-2018, kedalaman danau hanya sekitar 2,5 meter dengan luas tersisa sekitar 2.537 hektar. Luas lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto juga meningkat secara signifikan dari tahun 2013 hingga 2018. Selain itu, seiring dengan berkurangnya luas danau, vegetasi air mengalami perluasan dari 1.148 hektar pada tahun 2000 menjadi 1.811 hektar pada tahun 2015, dengan rata-rata penambahan 663 hektar atau 3,85% per tahunnya. Vegetasi air yang semula hanya berada di sekitar pinggiran danau, kini telah menyebar hingga ke tengah danau, didominasi oleh eceng gondok.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1. Perkembangan PDRB

Selama lima tahun terakhir, PDRB Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren peningkatan di berbagai sektor, baik dalam harga berlaku (ADHB) maupun harga konstan (ADHK). Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus mengalami pertumbuhan, mencerminkan peran penting sektor ini sebagai tulang punggung ekonomi daerah. Demikian juga, industri pengolahan dan konstruksi mencatatkan peningkatan signifikan, yang menandakan adanya pengembangan ekonomi dan investasi infrastruktur yang meningkat di daerah ini.

Pertumbuhan sektor perdagangan besar dan eceran juga terlihat cukup signifikan, didukung oleh peningkatan daya beli masyarakat. Sementara itu, sektor pertambangan dan penggalian, meskipun lebih kecil kontribusinya, tetap menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Dalam 5 tahun ke depan, perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas di sektor pertanian dan industri pengolahan melalui teknologi dan inovasi. Pengembangan infrastruktur harus dilanjutkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor yang belum berkembang juga penting untuk menciptakan stabilitas dan ketahanan ekonomi jangka panjang. Penyesuaian kebijakan fiskal dan investasi yang tepat akan mendukung pertumbuhan berkelanjutan sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.8. Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Lapangan Usaha, 2020-2024 (Juta Rupiah)

Sektor PDRB	ADHB					ADHK				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,277.60	5,537.92	5,828.67	6,233.62	6,589.16	3,548.19	3,599.41	3,668.19	3,813.06	3,923.31
Pertambangan dan Penggalian	223.07	230.18	245.34	268.24	289.19	163.21	165.82	171.51	184.14	195.45
Industri Pengolahan	599.07	651.41	733.27	765.50	804.15	374.58	398.85	431.93	433.44	449.51
Pengadaan Listrik dan Gas	10.08	10.27	11.19	11.94	12.15	11.81	12.04	12.78	13.55	13.96
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3.57	3.66	3.78	3.98	3.94	2.54	2.54	2.59	2.69	2.59
Konstruksi	1,751.54	1,847.22	2,080.41	2,296.21	2,457.82	1,219.07	1,244.75	1,315.12	1,398.12	1,470.51

Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,267.15	1,338.03	1,543.09	1,749.05	1,913.93	778.22	806.35	880.45	966.17	1,038.25
Transportasi dan Pergudangan	1,031.27	1,049.07	1,246.08	1,422.63	1,509.24	665.00	670.64	731.94	778.57	814.54
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	261.35	275.33	292.79	313.66	335.31	179.40	187.73	196.91	208.06	218.53
Informasi dan Komunikasi	353.23	367.48	397.16	422.71	460.39	315.13	327.65	347.86	361.96	390.69
Jasa Keuangan dan Asuransi	604.89	685.10	705.45	672.00	698.51	400.26	433.87	411.94	384.40	393.65
Real Estate	131.80	130.85	140.44	141.38	149.98	96.53	95.15	97.98	98.12	101.79
Jasa Perusahaan	7.74	8.00	9.08	9.17	9.30	5.32	5.41	5.93	5.80	5.89
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	496.16	499.30	524.66	555.93	584.42	386.58	386.46	400.72	413.92	430.68
Jasa Pendidikan	496.16	499.30	524.66	549.04	551.38	323.84	333.50	346.45	359.83	355.13
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	401.69	430.24	448.90	503.56	542.79	285.42	298.80	302.22	322.80	339.17
Jasa lainnya	150.03	154.75	158.44	169.15	183.87	112.64	114.65	114.97	121.84	128.08
PDRB	**13,044.90**	**13,713.96**	**14,889.33**	**16,087.76**	**17,095.53**	**8,867.72**	**9,083.62**	**9,440.54**	**9,866.47**	**10,271.71**

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

Distribusi PDRB Kabupaten Gorontalo selama 2020-2024 didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusi terbesar, diikuti oleh konstruksi, perdagangan besar dan eceran, transportasi, industri pengolahan, serta jasa keuangan dan asuransi. Ketergantungan yang tinggi pada sektor pertanian menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi risiko dari fluktuasi harga komoditas dan perubahan iklim.

Pengembangan sektor industri pengolahan dan jasa keuangan bisa menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja baru. Selain itu, melanjutkan investasi infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan sektor perdagangan dan transportasi, yang akan memperkuat posisi Kabupaten Gorontalo sebagai pusat distribusi di kawasan.

Adaptasi teknologi di sektor pertanian juga diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan ketahanan ekonomi, sementara peningkatan kapasitas keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan strategi

pembangunan yang seimbang antara penguatan sektor-sektor utama dan diversifikasi ekonomi, Kabupaten Gorontalo dapat menciptakan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tangguh di masa depan.

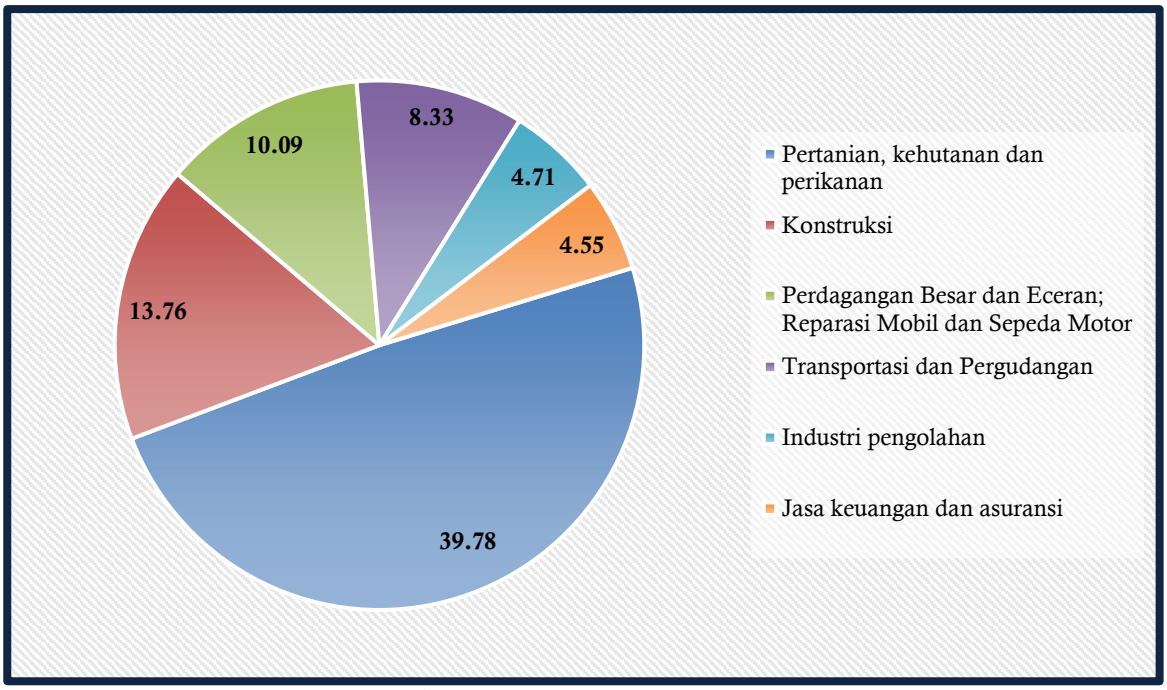

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.8 Rata-Rata Distribusi PDRB Kabupaten Gorontalo, 2020-2024

2.2.1.2. Tingkat Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu wilayah. Tingkat inflasi yang tinggi sering kali menandakan adanya perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi, sementara inflasi yang stabil menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi. Berdasarkan data BRS 2024, inflasi di Kabupaten Gorontalo hingga tahun 2024 mencapai 5,92 persen.

Kontribusi terbesar terhadap inflasi ini berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 13,39 persen. Selain itu, kelompok pakaian dan alas kaki menyumbang 2,20 persen, diikuti oleh kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,25 persen. Kelompok kesehatan berkontribusi sebesar 0,47 persen, sedangkan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan menyumbang 2,00 persen. Kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya menyumbang 0,60 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,43 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya berkontribusi sebesar 1,97 persen.

Dengan tingkat inflasi yang mencapai 5,92 persen pada tahun 2024, perencanaan daerah Kabupaten Gorontalo untuk lima tahun ke depan perlu mempertimbangkan upaya pengendalian inflasi sebagai prioritas utama. Inflasi yang tinggi, terutama didorong oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencapai 13,39 persen, menunjukkan perlunya intervensi di sektor ini. Upaya untuk meningkatkan produksi pangan lokal, memperbaiki rantai pasok, dan mengendalikan harga bahan pokok menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Dalam perencanaan lima tahun ke depan, strategi untuk memperkuat ketahanan pangan harus diintegrasikan dengan program pembangunan infrastruktur, khususnya di sektor pertanian. Pembangunan sarana dan prasarana seperti irigasi dan jalan akses ke pasar akan membantu menurunkan biaya produksi dan distribusi, yang pada gilirannya dapat menekan laju inflasi.

Selain itu, inflasi yang juga dipengaruhi oleh sektor perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,25 persen, menunjukkan perlunya perbaikan dalam pengelolaan dan distribusi energi. Perencanaan pembangunan daerah perlu difokuskan pada pengembangan energi terbarukan dan peningkatan efisiensi penggunaan energi untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya yang terbatas dan mahal. Sektor jasa keuangan, yang menyumbang 2,00 persen terhadap inflasi, juga memerlukan perhatian dalam perencanaan. Mendorong inklusi keuangan dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan dapat membantu mengelola inflasi dengan lebih efektif, terutama dalam menjaga kestabilan harga barang dan jasa.

2.2.1.3. PDRB Per Kapita

Data PDRB per kapita Kabupaten Gorontalo dari 2019 hingga 2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang moderat dengan kecenderungan meningkat. Pada 2019, PDRB per kapita tercatat sebesar 34,38 juta rupiah, kemudian mengalami sedikit penurunan pada 2020 menjadi 33,25 juta rupiah. Namun, sejak 2021, PDRB per kapita kembali menunjukkan peningkatan, mencapai 34,56 juta rupiah pada 2021, 37,12 juta rupiah pada 2022, dan 39,69 juta rupiah pada 2023, seterusnya hinga 2024 PDRB per kapita tercatat sebesar 41,75 juta rupiah.

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kinerja ekonomi daerah pasca pandemi, dengan pemulihan yang stabil terutama sejak 2021. Namun, penurunan pada 2020 menjadi catatan penting yang perlu diperhatikan dalam

perencanaan lima tahun ke depan. Perencanaan daerah harus fokus pada upaya menjaga stabilitas ekonomi dan menghindari guncangan yang dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi, seperti yang terjadi pada 2020.

Untuk lima tahun ke depan, upaya harus diarahkan pada peningkatan produktivitas di sektor-sektor utama ekonomi seperti pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan. Penguatan sektor-sektor ini akan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, meningkatkan PDRB per kapita secara berkelanjutan, dan mengurangi kesenjangan pendapatan.

Selain itu, investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja juga penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo. Dengan tenaga kerja yang lebih terampil, produktivitas bisa meningkat, yang pada gilirannya akan mendongkrak PDRB per kapita. Strategi pembangunan yang berfokus pada inklusi sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat juga perlu diintegrasikan dalam perencanaan, sehingga peningkatan PDRB per kapita benar-benar tercermin dalam peningkatan kualitas hidup warga.

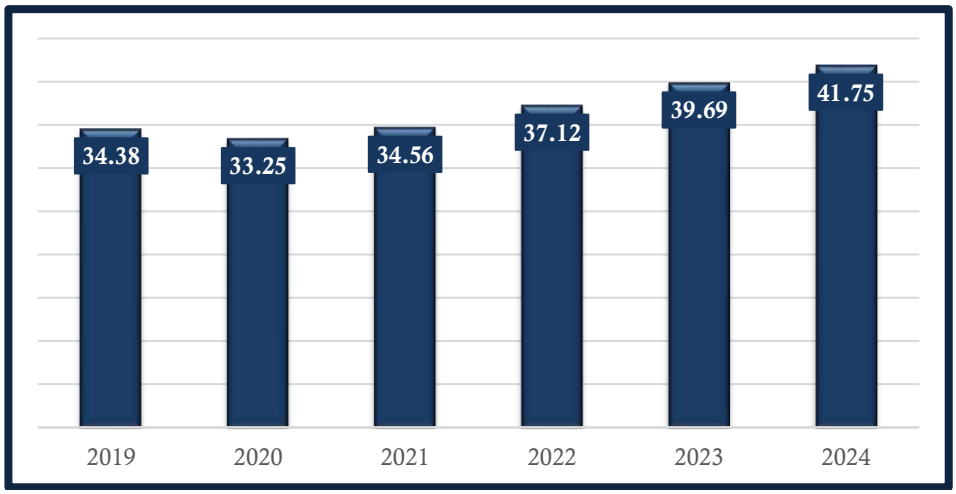

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.9 PDRB Per Kapita Kabupaten Gorontalo 2019-2024 (Juta Rupiah)

2.2.1.4. Indeks Gini

Indeks Gini adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan atau kekayaan di suatu daerah. Sebagai indikator kesenjangan ekonomi, indeks gini memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa Gini Ratio di Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan, dari 0,361 pada tahun 2019 menjadi 0,388 pada tahun 2024 Kenaikan ini mengindikasikan semakin lebarnya

kesenjangan ekonomi di antara penduduk, menunjukkan adanya peningkatan disparitas dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut.

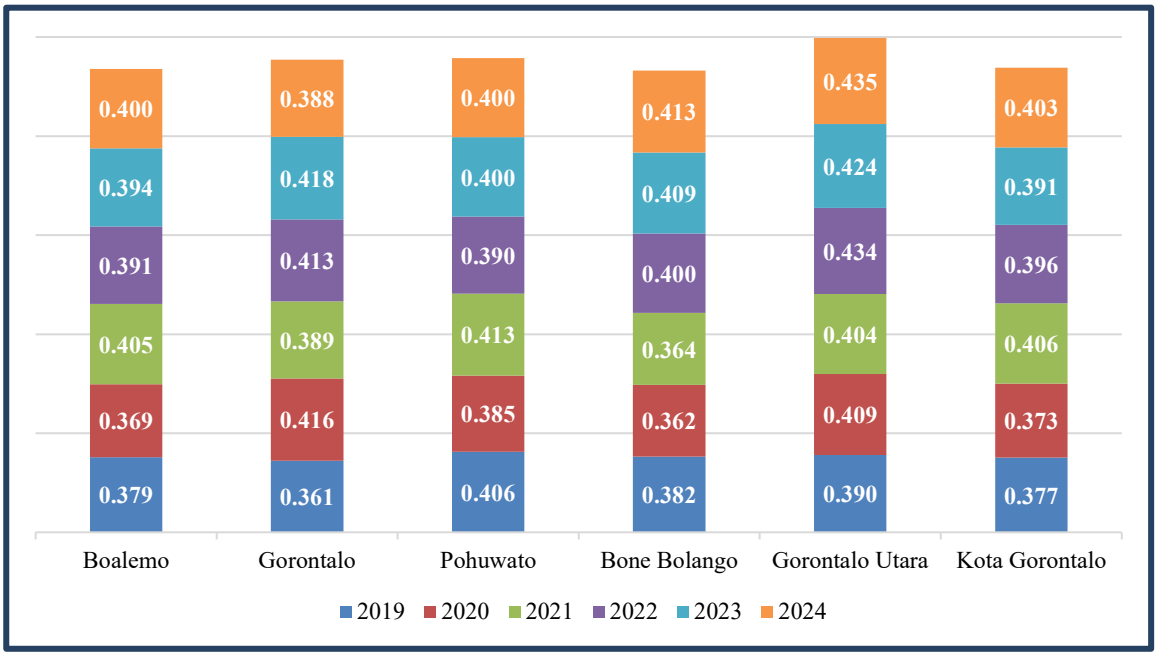

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024

Gambar 2.10 Perbandingan Gini Ratio Kabupaten Gorontalo

2.2.1.5. Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya fluktuasi yang cukup signifikan dalam kurun waktu enam tahun terakhir. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi menunjukkan capaian tertinggi sebesar 6,22 persen. Namun, pada tahun berikutnya, tepatnya tahun 2020, terjadi penurunan drastis hingga hampir mendekati nol yaitu sebesar 0,01 persen, yang mencerminkan dampak besar pandemi COVID-19 terhadap perekonomian daerah. Memasuki tahun 2021, perlahan terjadi pemulihan dengan pertumbuhan sebesar 2,43 persen, diikuti oleh peningkatan lebih lanjut di tahun 2022 mencapai 3,93 persen. Tren positif ini terus berlanjut hingga tahun 2023 dengan pertumbuhan sebesar 4,51 persen, meskipun kemudian mengalami sedikit perlambatan pada tahun 2024 dengan capaian 4,10 persen.

Jika mengkaji lebih dalam, grafik ini memperlihatkan bagaimana Kabupaten Gorontalo cukup tangguh dalam menghadapi guncangan ekonomi akibat pandemi. Pemulihan yang mulai terasa sejak 2021 menunjukkan adanya perbaikan aktivitas ekonomi, peningkatan konsumsi masyarakat, serta berjalannya kembali kegiatan produksi dan distribusi barang dan jasa. Namun demikian, perlambatan pertumbuhan pada 2024 patut menjadi perhatian serius. Kondisi ini mengindikasikan bahwa setelah

fase pemulihan, ekonomi Kabupaten Gorontalo belum mampu kembali ke tingkat pertumbuhan sebelum pandemi atau bahkan melampauinya.

Kecenderungan stagnasi pertumbuhan di bawah 5 persen setelah 2022 menunjukkan tantangan struktural yang harus segera direspons. Beberapa faktor yang berpengaruh adalah kurangnya diversifikasi sektor ekonomi, ketergantungan pada sektor primer dengan produktivitas yang relatif rendah, serta terbatasnya investasi sektor industri dan jasa modern yang mampu mendorong akselerasi pertumbuhan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi konkret untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, antara lain melalui pengembangan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas SDM, serta perluasan infrastruktur pendukung ekonomi. Selain itu, peningkatan iklim investasi juga penting dilakukan untuk menarik modal swasta, terutama dalam sektor-sektor strategis yang bernilai tambah tinggi. Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gorontalo tidak hanya pulih, tetapi juga bertransformasi menuju pertumbuhan yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

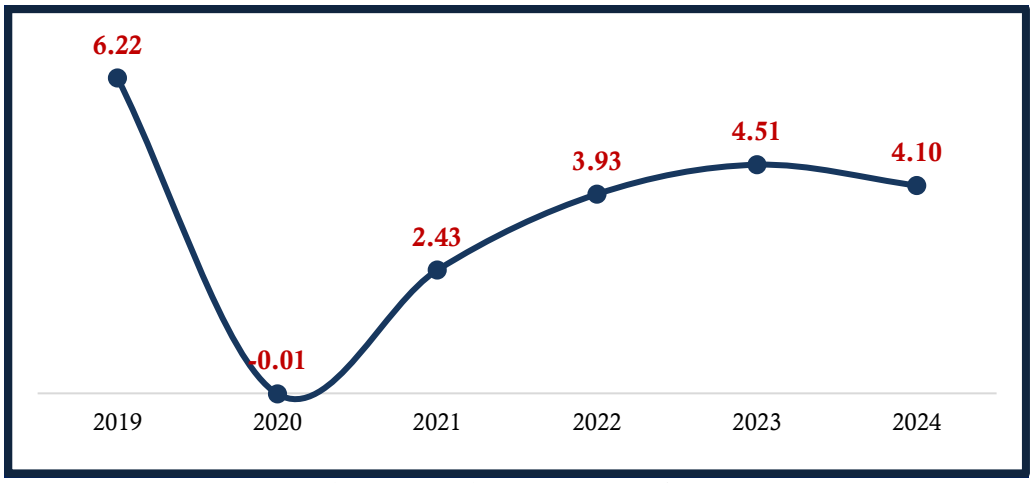

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.11 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Gorontalo, 2019-2024

2.2.1.6. Ketenagakerjaan

Data menunjukkan kondisi ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 hingga 2024, yang digambarkan melalui dua indikator utama, yaitu Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Selama enam tahun terakhir, TPAK Kabupaten Gorontalo mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2019, TPAK tercatat sebesar 66,3 persen, kemudian menurun menjadi 65,88 persen pada 2020, dan kembali turun di 2021 menjadi 65,13 persen. Namun, sejak 2022 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga

mencapai 70,47 persen, bahkan naik lebih tinggi pada 2023 menjadi 72,89 persen, meskipun sedikit menurun di 2024 menjadi 71,47 persen.

Sementara itu, TPT menunjukkan tren yang relatif menurun, meskipun tidak sepenuhnya stabil. Pada 2019, TPT berada di angka 2,97 persen, naik menjadi 3,41 persen di 2020 yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19. Namun, memasuki 2021 hingga 2022, TPT turun berturut-turut menjadi 2,12 persen dan 1,83 persen. Setelah itu, angka TPT kembali mengalami kenaikan menjadi 2,48 persen pada 2023 dan 2,64 persen di 2024.

Melihat data ini, secara umum kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan positif dalam hal peningkatan partisipasi angkatan kerja setelah melewati dampak pandemi. Namun, peningkatan TPAK tidak sepenuhnya diikuti oleh penurunan TPT yang stabil. Kenaikan kembali angka pengangguran dalam dua tahun terakhir menunjukkan adanya tantangan dalam penyediaan lapangan kerja yang mampu menampung jumlah tenaga kerja yang terus bertambah. Hal ini menandakan bahwa meskipun semakin banyak penduduk yang masuk dalam angkatan kerja, tidak seluruhnya dapat terserap oleh pasar kerja. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dalam perumusan kebijakan ketenagakerjaan ke depan, terutama dalam menciptakan sektor-sektor usaha yang produktif, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang.

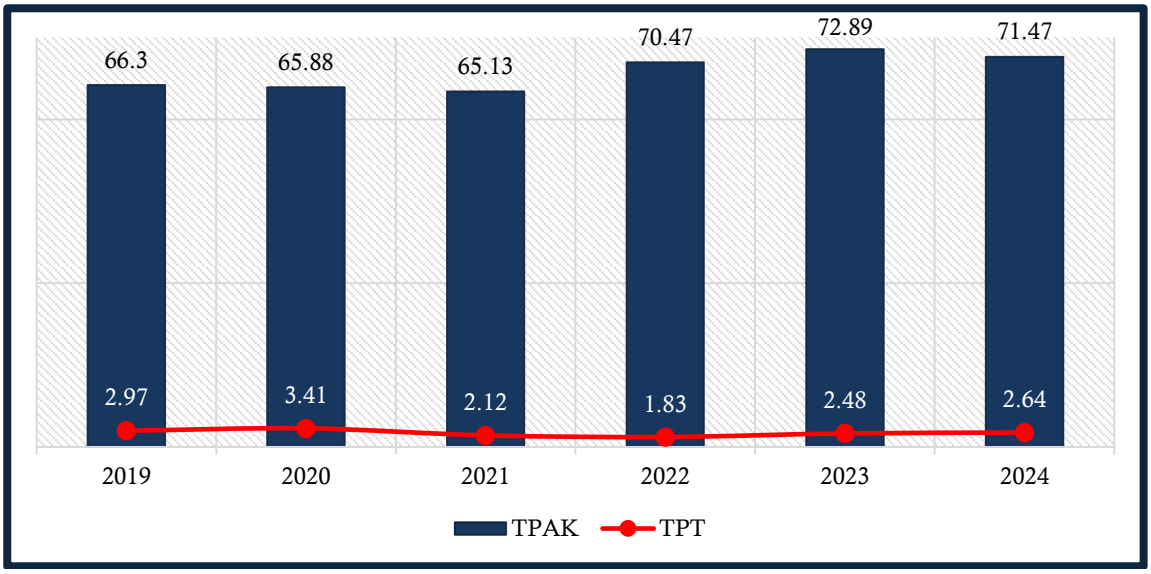

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.12 Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Gorontalo, 2019-2024

Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir didominasi oleh lulusan SMA sederajat, dengan peningkatan jumlah pengangguran hingga mencapai 3,733 jiwa. Pengangguran terbanyak kedua berasal dari lulusan perguruan tinggi, yang jumlahnya meningkat dari 1,393 jiwa pada tahun 2019 menjadi 1,469 jiwa pada tahun 2024.

Tingginya angka pengangguran di kalangan lulusan SMA dan perguruan tinggi di Kabupaten Gorontalo penyebab utamanya adalah terbatasnya lapangan kerja formal yang mampu menyerap lulusan dengan tingkat pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Laju pertumbuhan angkatan kerja dari lulusan SMA dan perguruan tinggi terus meningkat setiap tahun, sementara perluasan lapangan kerja baru cenderung berjalan lambat. Akibatnya, terjadi penumpukan pencari kerja dalam waktu bersamaan yang membuat persaingan semakin ketat, terutama untuk jenis pekerjaan dengan kualifikasi tinggi dan gaji yang layak.

Struktur ekonomi Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang umumnya lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan pendidikan rendah atau tanpa keahlian khusus, sementara sektor industri dan jasa modern yang biasanya membutuhkan tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi masih belum berkembang secara signifikan.

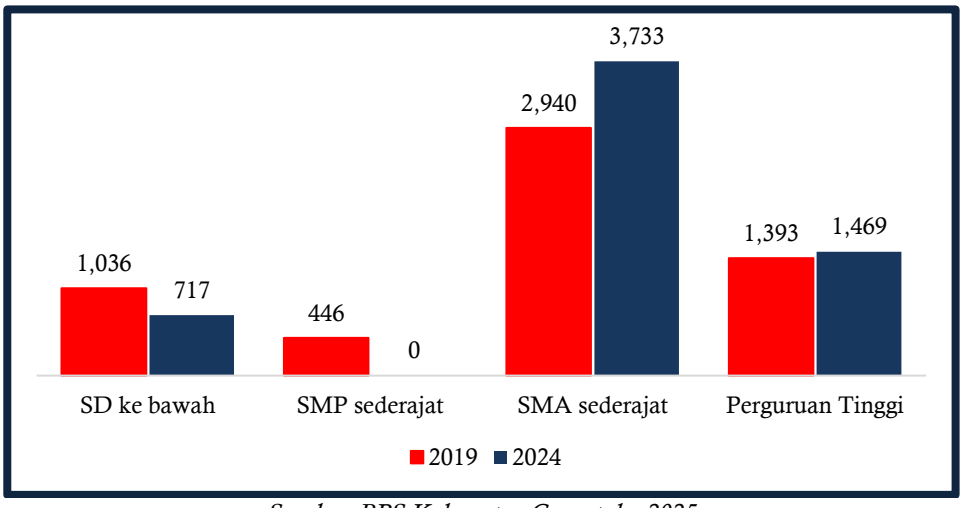

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.13 Jumlah Pengangguran Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan Kabupaten Gorontalo, 2019-2024 (Jiwa)

2.2.1.7. Kemiskinan

Data mengenai perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo selama periode 2019-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang relatif stabil, meskipun dengan sedikit penurunan. Pada tahun 2019, jumlah penduduk

miskin tercatat sebanyak 68,31 ribu jiwa dengan persentase 18,06%. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 66,72 ribu jiwa dengan persentase 17,56%. Meskipun pada tahun 2021 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin menjadi 67,21 ribu jiwa, persentasenya tetap stabil di angka 17,89%. Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin kembali menurun menjadi 66,64 ribu jiwa (17,71%), dan tren penurunan ini berlanjut hingga tahun 2024 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 61,91 ribu jiwa (16,43%).

Tren data ini mengindikasikan bahwa meskipun sempat berfluktuasi, upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Gorontalo menghasilkan penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin secara konsisten. Namun, persentase penduduk miskin yang masih berada di kisaran 16% menandakan bahwa kemiskinan tetap menjadi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.

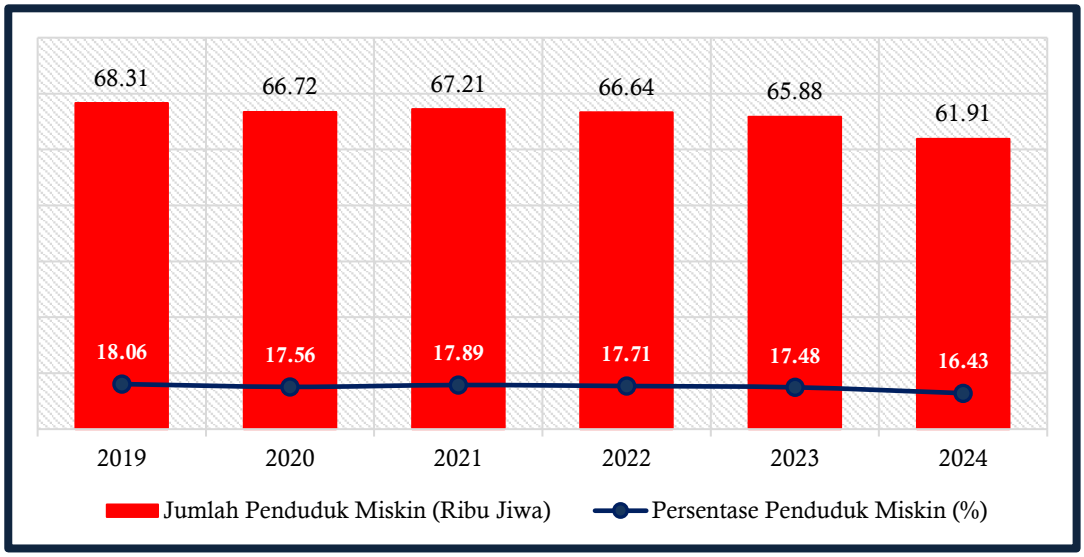

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025

Gambar 2.14 Perkembangan Jumlah (Ribu Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Gorontalo Tahun 2019-2024

Kabupaten Gorontalo telah menghadapi tantangan serius dalam menanggulangi kemiskinan ekstrem dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan ekstrem di daerah ini mencapai 12,7%, mencerminkan kondisi yang sangat memprihatinkan. Pandemi COVID-19 menjadi faktor utama yang memperburuk situasi, mengakibatkan banyak penduduk kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga meningkatkan jumlah warga yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas.

Namun, respons cepat pemerintah daerah, bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat, berhasil mendorong penurunan kemiskinan ekstrem secara signifikan. Melalui implementasi program bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengurangan kemiskinan, Kabupaten Gorontalo mencatat penurunan tingkat kemiskinan ekstrem menjadi 8,07% pada tahun 2021. Penurunan ini menandakan bahwa langkah-langkah yang diambil mulai memberikan dampak positif, meskipun pemulihan ekonomi belum sepenuhnya tercapai.

Tren penurunan ini berlanjut pada tahun 2022, dengan tingkat kemiskinan ekstrem turun lebih jauh menjadi 6,92% dan di tahun 2023 menurun hingga 4.74%. Penurunan ini mencerminkan efektivitas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kendati demikian, tantangan besar masih membayangi, dan diperlukan upaya yang konsisten dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh warga Kabupaten Gorontalo dapat keluar dari kemiskinan ekstrem dan menikmati kehidupan yang lebih sejahtera.

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

2.2.2.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tabel 2.9. Capaian Dimensi IPM Kabupaten Gorontalo, 2019-2024

Indikator IPM	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IPM Kabupaten Gorontalo	**66.69**	**68.1**	**68.53**	**69.51**	**70.37**	**70.96**
Umur Harapan Hidup	67.45	67.58	67.69	67.89	68.09	68.23
Harapan Lama Sekolah	12.94	13.17	13.18	13.19	13.21	13.22
Rata-Rata Lama Sekolah	7.11	7.13	7.3	7.61	7.79	7.95
Pengeluaran Per Kapita	9,361	9,277	9,412	9,850	10,336	10,645

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gorontalo dari tahun 2019 hingga 2024 menunjukkan peningkatan yang konsisten di berbagai dimensi, mencerminkan perbaikan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Gorontalo tercatat sebesar 66,69 dan meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 70,96 pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan berbagai aspek pembangunan manusia, termasuk kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dimensi kesehatan, yang diukur melalui Umur Harapan Hidup (UHH), juga menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 67,45 tahun pada 2019 menjadi 68,23

tahun pada 2024. Meskipun peningkatannya relatif lambat, ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan dan kondisi hidup yang lebih baik bagi masyarakat. Untuk lima tahun ke depan, peningkatan UHH perlu menjadi fokus utama, terutama melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta promosi gaya hidup sehat.

Di sektor pendidikan, baik Harapan Lama Sekolah (HLS) maupun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan. HLS meningkat dari 12,94 tahun pada 2019 menjadi 13,22 tahun pada 2024, sementara RLS meningkat dari 7,11 tahun menjadi 7,95 tahun pada periode yang sama. Peningkatan ini mengindikasikan perbaikan akses dan kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo. Namun, untuk mencapai target pembangunan jangka panjang, pemerintah daerah perlu terus memperkuat sektor pendidikan, termasuk peningkatan infrastruktur pendidikan, kualitas guru, serta akses pendidikan yang lebih merata, terutama di daerah-daerah terpencil.

Dimensi ekonomi yang diukur melalui pengeluaran per kapita juga menunjukkan peningkatan, dari Rp 9,361 ribu pada 2019 menjadi Rp 10,645 ribu pada 2024. Kenaikan ini menandakan adanya pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk lima tahun ke depan, pemerintah daerah perlu fokus pada upaya diversifikasi ekonomi, peningkatan investasi, serta pengembangan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.2.2.2. Kesetaraan Gender

Perempuan memegang peran penting dalam proses pembangunan di Kabupaten Gorontalo, baik sebagai subyek maupun obyek pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kondisi dan kualitas perempuan menjadi prioritas utama. Tren positif dalam pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Gorontalo tercermin melalui pencapaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang mencapai 84,00 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) sebesar 57.53 hingga tahun 2024. Meskipun demikian, tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender masih terlihat dari Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mencapai nilai 0,242, menunjukkan bahwa ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki masih menjadi isu yang perlu diatasi.

Ke depan, dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan, upaya penguatan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kualitas hidupnya akan

menjadi salah satu fokus utama. Perencanaan ini akan mencakup strategi untuk mengurangi kesenjangan gender, baik dari aspek struktural, sosial, maupun budaya, dengan tujuan untuk menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata. Dengan memperkuat peran perempuan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang lebih baik dalam mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.

2.2.2.3. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Salah satu indikator penting yang mencerminkan tingkat pendidikan masyarakat adalah rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas. Indikator ini menggambarkan seberapa lama penduduk secara efektif mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) mencerminkan jumlah tahun standar yang dihabiskan seseorang dalam proses pendidikan, mulai dari jenjang dasar hingga menengah atau lebih tinggi. Misalnya, untuk menyelesaikan jenjang SD diperlukan waktu 6 tahun, sedangkan jenjang SMP membutuhkan 9 tahun. Dalam penghitungan rata-rata lama sekolah, tidak memperhitungkan apakah seseorang menyelesaikan jenjang pendidikan lebih cepat atau lambat dari waktu standar. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, semakin tinggi pula jenjang pendidikan yang telah ditempuh oleh penduduk, sehingga indikator ini menjadi sangat penting dalam mengukur kualitas sumber daya manusia suatu wilayah. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah di suatu wilayah cenderung stabil atau meningkat, mencerminkan perbaikan dalam akses dan pencapaian pendidikan masyarakat.

Data yang menunjukkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 hingga 2024 menggambarkan tren positif dalam perkembangan pendidikan di wilayah tersebut. Harapan Lama Sekolah, yang mencerminkan perkiraan jumlah tahun sekolah yang diharapkan akan ditempuh oleh anak-anak, mengalami peningkatan konsisten setiap tahunnya. Pada 2019, HLS berada di angka 12,94 tahun dan terus naik hingga mencapai 13,22 tahun pada 2024. Ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Gorontalo semakin optimis dalam melihat peluang pendidikan, dengan harapan penduduk dapat menyelesaikan pendidikan hingga jenjang SMA atau bahkan lebih tinggi.

Di sisi lain, Rata-Rata Lama Sekolah, yang mengukur jumlah tahun sekolah efektif yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas, juga menunjukkan peningkatan signifikan. Pada 2019, rata-rata lama sekolah penduduk adalah 7,11 tahun,

dan pada 2024 meningkat menjadi 7,95 tahun. Kenaikan ini mencerminkan bahwa semakin banyak penduduk yang berhasil menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, meskipun angka tersebut masih menunjukkan bahwa rata-rata penduduk baru mencapai pendidikan setara dengan SMP.

Peningkatan RLS dari 7,11 tahun pada 2019 menjadi 7,95 tahun pada 2024 menunjukkan adanya kemajuan nyata dalam hal akses dan partisipasi pendidikan, terutama pada tahun-tahun terakhir. Namun, terdapat kesenjangan antara harapan dan realisasi, di mana HLS mencapai lebih dari 13 tahun, sementara RLS masih berada di bawah 8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun harapan masyarakat terhadap pendidikan tinggi, realisasinya belum sepenuhnya tercapai.

Secara keseluruhan, tren peningkatan ini merupakan indikasi positif bahwa kualitas pendidikan di Kabupaten Gorontalo semakin membaik. Namun, tantangan untuk mempercepat peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah masih ada, terutama dalam upaya mengejar kesenjangan antara harapan dan realitas pendidikan. Intervensi kebijakan yang lebih intensif mungkin diperlukan untuk mendorong masyarakat menyelesaikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sehingga kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Gorontalo dapat terus meningkat sesuai dengan harapan yang ada.

Tabel 2.10. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Gorontalo, 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah	12.94	13.17	13.18	13.19	13.21	13.22
Rata-Rata Lama Sekolah	7.11	7.13	7.3	7.61	7.79	7.95

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.2.2.4. Angka Harapan Hidup

Perkembangan Usia Harapan Hidup di Kabupaten Gorontalo mencerminkan upaya pemerintah dalam memperbaiki fasilitas kesehatan, gizi, serta akses layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan menggunakan indikator ini, pemerintah dapat mengidentifikasi area-area yang memerlukan perhatian lebih, baik dalam hal kebijakan kesehatan, gizi, maupun pelayanan publik yang mendukung peningkatan kualitas hidup.

Selama periode 2019-2025, Umur Harapan Hidup di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren peningkatan yang konsisten. Pada 2019, angka Umur Harapan Hidup berada di 67,45 tahun, dan terus naik hingga mencapai 68,23 tahun pada 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam layanan kesehatan,

peningkatan gizi, serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik. Kenaikan sebesar 0,64 tahun selama lima tahun tersebut mengindikasikan bahwa kondisi kesehatan penduduk semakin membaik. Peningkatan ini juga mencerminkan hasil dari berbagai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, termasuk upaya menurunkan angka kematian bayi, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan ibu dan anak, serta memperbaiki kondisi gizi masyarakat.

Tabel 2.11. Capaian Dimensi IPM Kabupaten Gorontalo, 2019-2024

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umur Harapan Hidup	67.45	67.58	67.69	67.89	68.09	68.23

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.2.2.5. Prevalensi Kurang Gizi (underweight) Pada Anak Balita

Sasaran peningkatan status gizi pada balita dapat diukur melalui dua indikator utama, yaitu prevalensi gizi kurang dan prevalensi gizi buruk. Indikator ini penting untuk memantau kondisi kesehatan dan gizi anak-anak, terutama balita, yang sangat rentan terhadap masalah kekurangan gizi. Dalam upaya menurunkan angka gizi buruk, proses penanganan dimulai dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mendeteksi apakah ada penyakit penyerta yang mungkin memperburuk kondisi gizi balita.

Tabel 2.12. Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Gorontalo, 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase balita 0-59 bulan gizi buruk	0.9	1.4	0.7	0.4	4.6
Persentase balita 0-59 bulan gizi kurang	2.3	2.8	2.3	2.2	20.6

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, 2024.

Gizi Kurang merujuk pada kondisi balita yang memiliki berat badan menurut panjang badan atau tinggi badan yang berada di antara -2 hingga -3 standar deviasi. Kondisi ini juga dapat diidentifikasi dengan pengukuran lingkar lengan balita, yang berada dalam rentang 11,5 hingga 12,5 cm, terutama pada anak usia 6-59 bulan. Prevalensi gizi kurang dihitung dengan membandingkan jumlah balita yang mengalami kondisi tersebut terhadap jumlah total balita yang ditimbang. Indikator ini mencerminkan tingkat kekurangan gizi di antara balita dan menjadi parameter penting dalam mengukur kesejahteraan gizi masyarakat.

Sementara itu, Gizi Buruk mengacu pada kondisi yang lebih parah, ditandai dengan sangat kurusnya balita, disertai atau tanpa edema (pembengkakan) pada kedua

punggung kaki. Anak yang mengalami gizi buruk memiliki berat badan yang jauh di bawah normal, yaitu kurang dari -3 standar deviasi dibandingkan dengan panjang atau tinggi badannya. Lingkar lengan pada anak yang mengalami gizi buruk juga lebih kecil, yakni kurang dari 11,5 cm untuk anak usia 6-59 bulan. Persentase gizi buruk diukur dengan membandingkan jumlah balita yang mengalami kondisi ini terhadap total balita yang ditimbang.

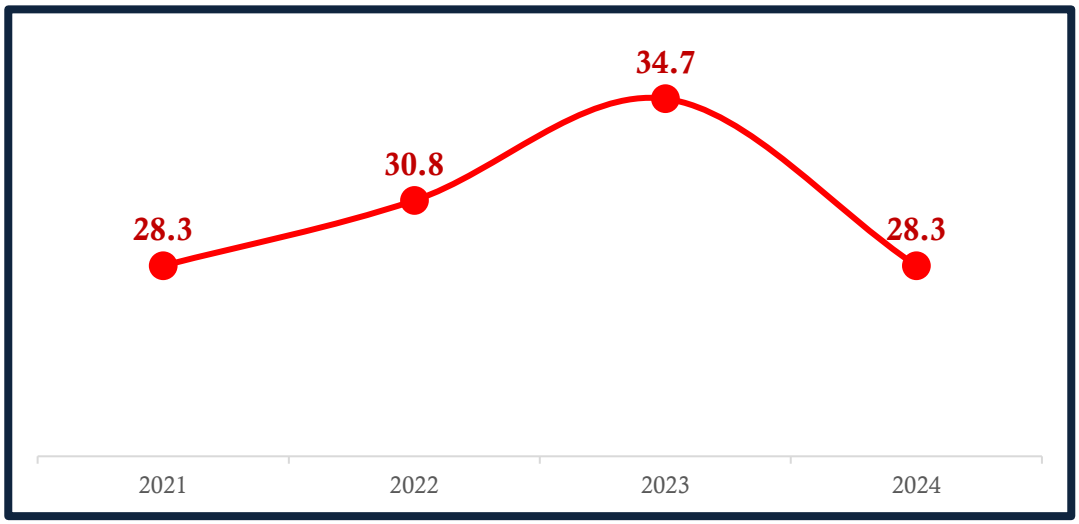

Sumber: Data SSGI, 2024.

Gambar 2.15 Prevalensi Stunting Kabupaten Gorontalo, 2021-2024

Pada tahun 2021, angka stunting di Kabupaten Gorontalo tercatat sebesar 28,3%. Angka ini meningkat menjadi 30,8% pada tahun 2022, menunjukkan kenaikan sekitar 2,5 poin persentase. Tren peningkatan ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana prevalensi stunting kembali meningkat hingga mencapai 34,7%. Kenaikan dari tahun 2022 ke 2023 adalah sebesar 3,9 poin persentase, yang menunjukkan percepatan dalam tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024 tercatat prevalensi stunting Kabupaten Gorontalo menurun hingga 28.3%.

2.2.2.6. PMKS yang ditangani

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah individu atau kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan atau gangguan yang menghambat mereka dari memenuhi kebutuhan dasar baik secara fisik, mental, maupun sosial. Faktor-faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang menjadi PMKS meliputi masalah-masalah sosial seperti kemiskinan, kecacatan, atau bahkan dampak dari bencana alam dan sosial.

Tabel 2.13. Jumlah PMKS Tertangani di Kabupaten Gorontalo, 2021-2024

Kinerja yang telah dicapai	2021	2022	2023	2024
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	98,42%	98,42	99,38	8,55

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo, 2025.

Untuk program PMKS di bidang rehabilitasi sosial dan bidang perlindungan jaminan sosial pada tahun 2024 telah diupayakan program kegiatan semaksimal mungkin yang meliputi bansos kepada Lansia, Penyandang Disabilitas dan Anak Terlantar. Namun dalam pelaksanaannya program kegiatan tersebut tidak terealisasi karena ada rasionalisasi anggaran, demikian juga untuk buffer stock bidang linjamsos. Hal ini berefek pada menurunnya capaian pada tahun tersebut.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Bidang seni, budaya, dan olahraga memiliki keterkaitan yang kuat dengan kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan masyarakat Indonesia diarahkan untuk membentuk individu yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, serta memiliki budaya dan peradaban yang baik. Selain itu, pembangunan ini juga bertujuan meningkatkan daya saing bangsa demi tercapainya masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

2.2.3.1. Seni Budaya

Seni dan budaya tidak hanya merefleksikan identitas dan jati diri masyarakat, tetapi juga berperan dalam memperkuat nilai-nilai etika, moral, dan peradaban. Di Kabupaten Gorontalo, keberadaan gedung bersejarah, objek, dan situs cagar budaya menjadi aset yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Selain itu, kebijakan di bidang seni dan budaya selaras dengan visi pembangunan dengan tetap menjaga warisan budaya sebagai dasar bagi pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.14. Potensi Seni Budaya di Kabupaten Gorontalo

Uraian	Jumlah
Museum	0
Gedung Bersejarah	1
Objek Cagar Budaya	6
Cagar Budaya	5

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, 2024.

Selain kondisi potensi pada tabel 2.14, pelaksanaan urusan kebudayaan di Kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan positif, khususnya pada aspek seni dan budaya yang telah diselaraskan

dengan dokumen Pokok-Pokok Kebudayaan Daerah (PPKD). Evaluasi terhadap program seni dan budaya mencatat adanya peningkatan tingkat partisipasi komunitas seni lokal, di mana keterlibatan sanggar seni meningkat hingga 90%. Selain itu, partisipasi pelajar juga tercatat aktif di seluruh 19 kecamatan, mencerminkan adanya antusiasme generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan seni budaya daerah.

Program seni budaya yang dijalankan selama periode evaluasi juga dinilai sesuai dengan strategi revitalisasi seni pertunjukan tradisional sebagaimana tertuang dalam PPKD. Beberapa objek kebudayaan prioritas yang telah ditetapkan dalam dokumen tersebut berhasil diakomodasi ke dalam program kegiatan pemerintah daerah, menunjukkan konsistensi arah kebijakan pembangunan kebudayaan. Dampak sosial budaya yang tercipta pun cukup signifikan, antara lain meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap budaya lokal serta semakin kuatnya identitas budaya pada generasi muda. Hal ini menjadi modal sosial penting dalam memperkuat jati diri daerah dan ketahanan budaya di era globalisasi.

Selain manfaat sosial, kegiatan seni budaya juga menimbulkan dampak ekonomi yang positif. Peluang ekonomi bagi para pelaku seni semakin terbuka melalui pelaksanaan bazar, pameran, dan kegiatan serupa, yang turut melibatkan UMKM berbasis budaya. Dengan demikian, seni budaya tidak hanya berdimensi pelestarian nilai, tetapi juga mampu memberikan manfaat ekonomi secara nyata bagi masyarakat.

Meski demikian, masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Keterbatasan dokumentasi digital membuat sejumlah aktivitas budaya belum terdokumentasi dengan baik, sehingga menyulitkan upaya promosi dan pelestarian berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan untuk mempertahankan kesinambungan program seni budaya dari tahun ke tahun.

Berdasarkan analisis kelembagaan dan dukungan kebijakan, diperlukan integrasi yang lebih erat antara para pelaku seni, pemerintah desa/kelurahan, dan sektor pendidikan dalam mendukung keberlanjutan program seni budaya. Dukungan regulasi dan pemberian insentif bagi komunitas budaya juga menjadi faktor penting untuk memperkuat ekosistem kebudayaan di Kabupaten Gorontalo pada periode mendatang.

2.2.3.2. Olahraga

Pengembangan bidang olahraga berkontribusi pada penciptaan generasi muda yang berprestasi, disiplin, dan kompetitif, sejalan dengan upaya membangun

masyarakat berdaya saing. Selain itu, olahraga juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk membangun karakter masyarakat yang sehat dan produktif.

Peningkatan jumlah atlet berprestasi, terutama dalam cabang sepak takraw, sepak bola, dan taekwondo, menunjukkan bahwa dengan pembinaan yang tepat, potensi daerah dapat dioptimalkan. Atlet yang berprestasi di tingkat lokal, nasional, atau internasional dapat menjadi duta bagi daerah, meningkatkan kebanggaan dan reputasi Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.15. Persentase Cabang Olahraga yang dibina di Kabupaten Gorontalo

Kinerja yang dicapai	2021	2022	2023	2024
Persentase cabang olahraga yang terbina	100	78,95	42,11	84,21

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, 2024.

Keberhasilan pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas. Peningkatan jumlah prasarana swasta dapat mencerminkan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung olahraga. Namun, stagnasi pada sarana pemerintah menunjukkan perlunya perhatian lebih dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai untuk memastikan pembinaan berkelanjutan dan mendorong prestasi di berbagai cabang olahraga.

Tabel 2.16. Sarana Prasana Olahraga di Kabupaten Gorontalo

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sarana prasarana olahraga milik Pemerintah	661	662	662	662	662
Sarana prasarana olahraga milik Swasta	286	286	289	291	291

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, 2024.

Olahraga berperan dalam memupuk rasa kebersamaan dan solidaritas antarwarga. Kompetisi dan kegiatan olahraga dapat memperkuat ikatan sosial dan membangun kohesi masyarakat, yang penting untuk pembangunan sosial berkelanjutan. Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga memfasilitasi aktivitas fisik masyarakat, yang berkontribusi langsung pada peningkatan kesehatan publik. Masyarakat yang sehat akan lebih produktif, yang pada akhirnya memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial. Selain itu, fasilitas olahraga baik milik pemerintah maupun swasta, dapat mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kegiatan seperti kompetisi, turnamen, dan acara olahraga lainnya yang mendorong kunjungan wisatawan dan konsumsi lokal. Partisipasi sektor swasta dalam penyediaan fasilitas

olahraga juga menunjukkan kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi daerah.

2.2.3.3. Kepemudaan

Perkembangan prestasi kepemudaan di Kabupaten Gorontalo, yang mencerminkan upaya pemerintah dan masyarakat dalam membina dan memberdayakan pemuda sebagai agen perubahan. Kegiatan kepemudaan, menjadi indikator keberhasilan program-program yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan kontribusi pemuda dalam pembangunan daerah.

Tabel 2.17. Data Perkembangan Bidang Kepemudaan di Kabupaten Gorontalo

Uraian	2021	2022	2023	2024
Persentase Organisasi Pemuda yang Terbina	100	80	80	80

Sumber: Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Fokus Daya Saing Ekonomi Daerah

Ketergantungan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tetap mendominasi PDRB, namun mengalami penurunan kontribusi dari 40,14% menjadi 38,54%, mencerminkan tantangan dalam meningkatkan produktivitas. Perubahan iklim, minimnya penerapan teknologi modern, dan pergeseran preferensi pasar menjadi beberapa kendala yang dihadapi oleh petani. Di sisi lain, pertumbuhan sektor konstruksi, yang meningkat dari 13,68% menjadi 14,38%, menunjukkan bahwa investasi dalam infrastruktur mulai menjadi fokus pemerintah daerah. Pembangunan infrastruktur yang lebih baik tidak hanya menciptakan lapangan kerja tetapi juga meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi distribusi barang, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor lainnya. Sektor perdagangan besar dan eceran juga mengalami peningkatan kontribusi dari 9,73% menjadi 11,20%, yang mencerminkan adanya peningkatan daya beli masyarakat dan pertumbuhan konsumsi domestik. Kenaikan ini didorong oleh stabilitas ekonomi dan program-program pemerintah yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, tidak semua sektor menunjukkan tren positif. Sektor transportasi dan pergudangan mengalami fluktuasi signifikan, dengan penurunan kontribusi yang tajam akibat dampak pandemi COVID-19. Meskipun sektor ini berhasil pulih, tren ini mencerminkan ketidakpastian yang dihadapi dalam mobilitas dan perdagangan. Di sisi lain, sektor jasa keuangan dan asuransi menunjukkan penurunan kontribusi dari 5,00%

pada tahun 2021 menjadi 4,09% pada tahun 2024, yang disebabkan oleh tantangan dalam stabilitas ekonomi dan ketidakpastian di pasar keuangan.

Tabel 2.18. Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto ADHB Menurut Lapangan Usaha, 2019-2024 (%)

Sektor PDRB	ADHB					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40.14	40.46	40.38	39.15	38.75	38.54
Pertambangan dan Penggalian	1.70	1.71	1.68	1.65	1.67	1.69
Industri Pengolahan	4.51	4.59	4.75	4.92	4.76	4.70
Pengadaan Listrik dan Gas	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.02
Konstruksi	13.68	13.43	13.47	13.97	14.27	14.38
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.73	9.71	9.76	10.36	10.87	11.20
Transportasi dan Pergudangan	8.86	7.91	7.65	8.37	8.84	8.83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.03	2.00	2.01	1.97	1.95	1.96
Informasi dan Komunikasi	2.63	2.71	2.68	2.67	2.63	2.69
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.17	4.64	5.00	4.74	4.18	4.09
Real Estate	1.02	1.01	0.95	0.94	0.88	0.88
Jasa Perusahaan	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.80	3.80	3.64	3.52	3.46	3.42
Jasa Pendidikan	3.48	3.64	3.61	3.50	3.41	3.23
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.88	3.08	3.14	3.01	3.13	3.18
Jasa lainnya	1.20	1.15	1.13	1.06	1.05	1.08

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.3.2. Fokus Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Upaya peningkatan daya saing infrastruktur wilayah bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan aksesibilitas, dan memperkuat konektivitas antar wilayah. Infrastruktur yang memadai dan kompetitif tidak hanya mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga menarik minat investasi serta mendukung perkembangan sektor-sektor strategis di Kabupaten Gorontalo. Dengan adanya fokus yang terarah pada pengembangan fasilitas dan infrastruktur yang unggul, diharapkan daya saing daerah akan meningkat secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Tabel 2.19. Realisasi Indikator Kinerja Utama Dinas PUPR Kabupaten Gorontalo

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2021	2022	2023	2024
Infrastruktur dasar dan ekonomi wilayah merata	Indeks Pembangunan Infrastruktur	0.86	0.86	0.86	1.06
Air minum dan sanitasi layak bagi masyarakat terpenuhi	SPM Air Minum	80.40	99.89	98.85	92.02

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gorontalo, 2025.

Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Pembangunan Infrastruktur meningkat dari 0,86 menjadi 1,06. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penyediaan infrastruktur, meskipun laju pertumbuhannya belum merata di seluruh wilayah. Ketimpangan pembangunan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan anggaran, ketersediaan sumber daya, maupun hambatan dalam pelaksanaan program. Ke depan, untuk meningkatkan indeks secara lebih signifikan, diperlukan strategi berupa perbaikan kualitas infrastruktur yang sudah ada, percepatan pembangunan baru di wilayah yang masih tertinggal, serta penguatan kemitraan dengan pihak swasta guna mempercepat pemerataan pembangunan infrastruktur.

Sementara itu, capaian SPM Air Minum mengalami perubahan yang cukup signifikan. Pada tahun 2021, persentase akses air minum mencapai 80.40%, meningkat drastis hingga 99.89% pada 2022. Namun, pada 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 92.02%. Meski penurunan ini relatif kecil, angka tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan tingkat akses air minum yang sangat tinggi. Faktor penyebab penurunan ini bisa mencakup masalah pemeliharaan dan distribusi sistem air minum atau adanya gangguan teknis yang menghambat suplai air di beberapa wilayah. Untuk menjaga dan meningkatkan kembali capaian SPM Air Minum, dinas perlu memperkuat sistem pemeliharaan jaringan air, memastikan ketersediaan sumber air yang memadai, dan meningkatkan kapasitas distribusi air minum agar seluruh wilayah tetap terlayani dengan baik.

2.3.3. Fokus Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.3.1. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan (dependency ratio) adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun, sementara penduduk non produktif mencakup mereka yang berusia di bawah 15 tahun (yang

biasanya masih bergantung pada orang tua atau pihak lain untuk memenuhi kebutuhan mereka) serta mereka yang berusia di atas 65 tahun, yang umumnya telah melewati masa kerja. Berdasarkan konsep ini, dapat diperoleh gambaran mengenai jumlah penduduk yang bergantung pada kelompok usia kerja.

Tabel 2.20. Rasio Ketergantungan Usia Produktif dan Tidak Produktif Kabupaten Gorontalo, 2024

Kategori Usia	Jenis Kelamin		Penduduk	Persentase
	L	P		
00-14 tahun (usia muda/non produktif)	52,275	49,213	101,488	24
15-64 tahun (produktif)	149,920	147,354	297,274	70
65+ tahun (usia tua/non produktif)	11,318	13,901	25,219	6
Jumlah	**213,513**	**210,468**	**423,981**	**100**

Sumber: Data BPS Kabupaten Gorontalo, 2025.

Dari data yang tertera, terlihat bahwa jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) mencapai 101,488 jiwa, yang merupakan sekitar 24% dari total populasi. Ini menunjukkan bahwa ada proporsi signifikan dari penduduk yang masih dalam tahap perkembangan dan pendidikan, yang memerlukan perhatian dalam hal penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan. Keterbatasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan bagi kelompok usia ini dapat menjadi tantangan besar, terutama dalam mempersiapkan mereka untuk masuk ke dalam angkatan kerja di masa depan.

Sementara itu, penduduk dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 297,274 jiwa atau 70% dari total populasi. Angka ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo memiliki potensi tenaga kerja yang besar, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, keberhasilan pemanfaatan potensi ini sangat bergantung pada adanya kesempatan kerja yang memadai, peningkatan kualitas pendidikan, dan pelatihan keterampilan yang relevan agar penduduk usia produktif dapat berkontribusi secara maksimal.

Kelompok usia tua (65 tahun ke atas) mencakup 25,219 jiwa atau 6% dari total populasi. Meskipun persentasenya relatif kecil, peningkatan jumlah penduduk dalam kelompok ini menjadi perhatian penting, karena mereka berpotensi mengalami penurunan kemampuan produktif dan memerlukan dukungan sosial yang lebih. Oleh karena itu, penyediaan layanan kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas untuk mendukung kualitas hidup bagi lansia harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah.

2.3.3.2. Penduduk Berdasarkan Kelompok Sekolah/Tingkat Pendidikan

Salah satu ukuran untuk menilai kualitas Sumber Daya Manusia pada suatu daerah adalah tingkat pendidikan. Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mendorong terciptanya pendidikan yang berkualitas adalah dengan penyediaan saran dan prasarana yang memadai. Berikut data tentang jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut:

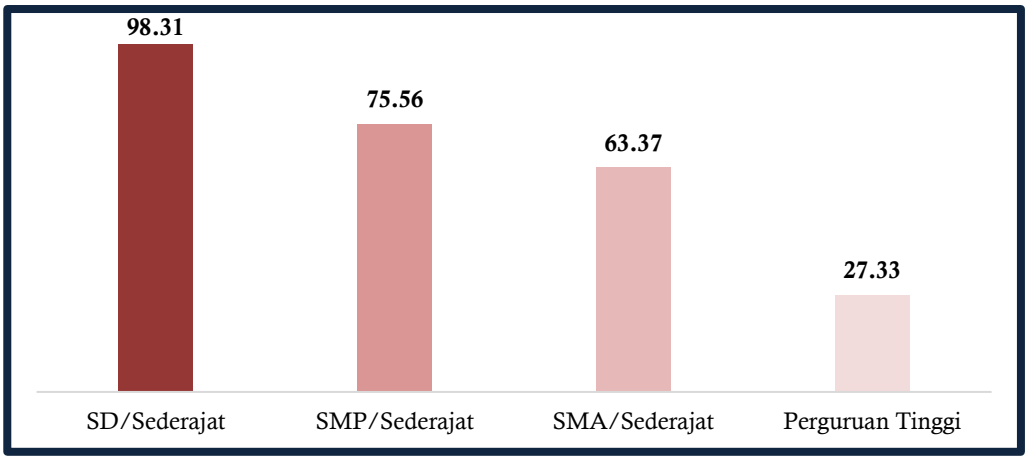

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024.

Gambar 2.16 Angka Partisipasi Murni Menurut Tingkat Pendidikan, 2023

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Gorontalo tahun 2023 menunjukkan tren yang mencerminkan berbagai tantangan sekaligus peluang dalam sektor pendidikan. APM untuk SD/sederajat mencapai 98,31%, menunjukkan bahwa 58espon seluruh anak usia sekolah dasar telah terakomodasi di tingkat ini. Namun, penurunan signifikan terjadi di jenjang SMP dengan APM sebesar 75,56%, diikuti dengan SMA/sederajat yang lebih rendah lagi pada 63,37%. Perguruan tinggi mencatat APM paling rendah, yaitu 27,33%, yang menandakan keterbatasan akses atau motivasi melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Dalam konteks RPJMD Kabupaten Gorontalo, data ini memberikan gambaran penting bagi upaya peningkatan kualitas dan akses pendidikan. Fokus perencanaan ke depan perlu diarahkan untuk memastikan kesinambungan pendidikan dari jenjang dasar hingga pendidikan tinggi, terutama melalui peningkatan akses dan kualitas di jenjang SMP dan SMA. Rendahnya APM di jenjang menengah dan atas dapat mengindikasikan adanya kendala seperti faktor ekonomi, geografis, atau minimnya insentif pendidikan.

RPJMD juga harus mempertimbangkan penguatan sinergi antara pendidikan formal dan program pelatihan vokasi bagi lulusan SMA, mengingat tantangan

pengangguran di kalangan lulusan sekolah menengah masih cukup tinggi. Selain itu, rendahnya partisipasi di perguruan tinggi menjadi tantangan yang membutuhkan intervensi berupa beasiswa dan program pendidikan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kompetensi SDM dan daya saing di tingkat regional. Agar relevansi antara pendidikan dan pasar tenaga kerja dapat dijaga, strategi pendidikan dalam RPJMD perlu dirancang untuk menjawab kebutuhan 59esponsi lokal dan tren pekerjaan masa depan. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berperan dalam peningkatan kapasitas individu tetapi juga dalam mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.

Dari sisi kualitas pemerintahan, data jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Gorontalo tahun 2023 menunjukkan potensi sekaligus tantangan dalam pengelolaan birokrasi yang efektif dan efisien. Dominasi pegawai berpendidikan tinggi, dengan 3.381 orang lulusan sarjana, magister, atau doktor, menjadi sinyal positif bagi peningkatan profesionalisme aparatur. Dengan SDM yang memiliki kompetensi akademik tinggi, peluang untuk menjalankan tata kelola berbasis data, inovasi, dan teknologi semakin besar. Ini relevan dengan kebutuhan reformasi birokrasi dan visi RPJMD untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan berdaya saing.

Pegawai dengan pendidikan tinggi dapat berperan penting dalam perumusan dan implementasi kebijakan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Mereka memiliki kapasitas untuk memahami isu-isu pembangunan dengan lebih mendalam dan menerapkan solusi yang tepat sasaran. Selain itu, kehadiran tenaga profesional di pemerintahan memungkinkan terjadinya akselerasi dalam pengembangan layanan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini mendukung pencapaian berbagai target strategis daerah, seperti peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Namun, tingginya ketergantungan pada pegawai dengan latar belakang akademis tinggi juga berpotensi menciptakan keterbatasan jika tidak diimbangi dengan diversifikasi keterampilan teknis dan vokasional. Data menunjukkan bahwa pegawai lulusan diploma hanya berjumlah 672 orang, sedangkan lulusan SMA/sederajat sebanyak 553 orang. Rendahnya jumlah pegawai dengan pendidikan vokasi dapat mempengaruhi fleksibilitas birokrasi, terutama dalam menghadapi tuntutan pelayanan yang membutuhkan keterampilan teknis praktis. Birokrasi yang terlalu berfokus pada

pendekatan akademis berisiko kurang adaptif dalam melayani kebutuhan langsung masyarakat atau mengembangkan inovasi di tingkat operasional.

Untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pemerintahan, diperlukan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi seluruh pegawai, baik melalui program pelatihan teknis maupun manajerial. Sistem merit juga perlu diterapkan dengan konsisten, sehingga jenjang karier tidak hanya bergantung pada pendidikan formal, tetapi juga pada kinerja dan kontribusi nyata. Sinergi antara pegawai berpendidikan tinggi dan tenaga dengan keahlian vokasional akan menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, adaptif, dan inovatif.

Secara keseluruhan, kualitas pemerintahan di Kabupaten Gorontalo dapat ditingkatkan dengan memaksimalkan potensi pegawai yang ada, untuk memastikan bahwa seluruh lapisan SDM mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Ini akan menciptakan birokrasi yang tidak hanya kompeten dan profesional, tetapi juga inklusif dan adaptif terhadap tantangan pembangunan daerah di masa depan.

Tabel 2.21. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kabupaten Gorontalo, 2023

Pendidikan	L	P	Jumlah
Sarjana/Magister/Doktor	1,007	2,374	3,381
Diploma III	108	462	570
Diploma I dan II	27	75	102
SMA/Sederajat	276	277	553
SMP/Sederajat	4	2	6
SD Sederajat	9	0	9
Total	**1,431**	**3,190**	**4,621**

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.3.4. Fokus Daya Saing Iklim Berinvestasi

2.3.4.1. Angka Kriminalitas

Iklim investasi yang kondusif sangat dipengaruhi oleh rasa aman dan stabilitas wilayah, sehingga rendahnya angka kriminalitas menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Tingkat kriminalitas yang rendah memberikan jaminan bagi pelaku usaha dan investor bahwa wilayah ini aman untuk menjalankan kegiatan bisnis jangka panjang tanpa gangguan yang signifikan.

Dalam konteks RPJMD, strategi untuk menurunkan angka kriminalitas meliputi peningkatan keamanan melalui kerjasama lintas sektoral antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat. Program-program seperti patroli rutin,

peningkatan kualitas infrastruktur keamanan, serta sosialisasi tentang pentingnya keamanan lingkungan dapat membantu mengurangi insiden kriminal. Selain itu, pelibatan masyarakat dalam menjaga keamanan melalui pembentukan kelompok sadar keamanan dan pengawasan lingkungan juga dapat memberikan kontribusi positif. Menjaga angka kriminalitas yang rendah akan berdampak langsung pada daya tarik investasi di Kabupaten Gorontalo. Dengan terciptanya iklim yang aman, investor lebih yakin untuk berinvestasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Angka kriminalitas menjadi salah satu indikator utama dalam menilai stabilitas sosial dan keamanan daerah, yang pada gilirannya sangat memengaruhi iklim investasi. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Gorontalo dan Polres Gorontalo, Kabupaten Gorontalo menghadapi tantangan serius dalam bentuk penyalahgunaan narkoba dan minuman keras (miras), khususnya selama tahun 2023.

Sepanjang tahun 2023, tercatat sebanyak 127 kasus penyalahgunaan narkoba dengan 84 tersangka yang berhasil ditangani aparat penegak hukum. Jenis narkoba yang paling dominan adalah sabu-sabu dan ganja, dengan kelompok usia 18–35 tahun sebagai yang paling terdampak, mencakup sekitar 75% dari total kasus. Kelompok usia ini merupakan bagian dari angkatan kerja produktif, sehingga tingginya keterlibatan mereka dalam kasus narkoba memiliki implikasi langsung terhadap produktivitas tenaga kerja dan stabilitas sosial.

Sementara itu, meskipun prevalensi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Gorontalo berdasarkan Riskesdas 2018 masih di bawah rata-rata nasional (0,8% dibandingkan 1,8%), tren peningkatan kasus di Kabupaten Gorontalo menjadi perhatian tersendiri. Pada sisi rehabilitasi, jumlah pengguna yang menjalani pemulihan di BNN Gorontalo masih sangat terbatas, yaitu sebanyak 20 orang sepanjang tahun 2023, yang menunjukkan bahwa akses terhadap layanan rehabilitasi masih perlu diperluas, terutama di daerah pinggiran.

Selain narkoba, penyalahgunaan miras ilegal juga merupakan permasalahan serius. Polres Gorontalo mencatat 56 kasus peredaran atau konsumsi miras ilegal (seperti oplosan dengan kandungan etanol tinggi) dengan 33 tersangka. Kasus-kasus ini banyak ditemukan di wilayah perdesaan dan pinggiran kota, yang umumnya memiliki keterbatasan dalam pengawasan dan edukasi. Dampak kesehatan yang ditimbulkan

pun signifikan: 12 kasus keracunan dilaporkan oleh RSUD Kabupaten Gorontalo sepanjang 2023, termasuk 2 kasus kematian akibat konsumsi miras berbahaya.

Padahal, Kabupaten Gorontalo telah menerapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol. Namun, lemahnya implementasi dan pengawasan di wilayah terpencil menunjukkan bahwa penegakan hukum belum merata dan konsisten. Hal ini dapat menurunkan persepsi keamanan dan kepastian hukum di mata pelaku usaha dan calon investor.

Untuk mengatasi permasalahan ini, BNN dan Polres Gorontalo terus melakukan operasi penertiban rutin seperti Operasi Zebra dan sosialisasi program P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di sekolah dan kampus. Namun demikian, upaya ini perlu diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor serta pendekatan yang lebih proaktif di tingkat masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kondisi di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun angka kriminalitas di Kabupaten Gorontalo belum mencapai tingkat ekstrem, namun penyalahgunaan narkoba dan miras merupakan tantangan serius yang dapat memengaruhi stabilitas sosial dan iklim investasi. Oleh karena itu, strategi penguatan penegakan hukum, peningkatan rehabilitasi, dan edukasi publik menjadi sangat penting sebagai bagian dari peningkatan daya saing daerah.

2.3.4.2. Proses Perizinan

Kemudahan dalam proses perizinan menjadi faktor krusial bagi para pengusaha dalam memutuskan untuk berinvestasi, karena perizinan sering kali menjadi tahap penentu bagi kelangsungan rencana usaha. Jika proses perizinan tidak mampu menarik minat investor, ada risiko bahwa iklim usaha di daerah tersebut akan mengalami kemunduran. Untuk memastikan kemudahan perizinan di Kabupaten Gorontalo, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) berupaya mempercepat dan menyederhanakan prosedur pengurusan izin, sehingga prosesnya lebih efisien dan cepat.

Tabel 2.22. Lama Proses Perizinan Usaha di kabupaten Gorontalo

Jenis Perizinan	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi
SIUP	7	1	0
TDP/NIB	1	1	0
IUIA/Sertifikat Standar dan Izin	Tidak Menentu Sesuai dgn PP	2	0

TDI/SS, Izin	Sesuai dengan SLA Pemerintah	2	0
IMB/PBG	28 Hari Kerja tidak terhitung libur, dan hari besar lainnya	2	Sesuai dengan Perda No 4 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung

Sumber: Dinas PMPTSP Kabupaten Gorontalo, 2024.

Beberapa izin seperti TDP/NIB dapat diselesaikan dalam satu hari, sementara SIUP membutuhkan waktu tujuh hari. Namun, izin seperti IMB/PBG memerlukan waktu hingga 28 hari kerja, tidak termasuk hari libur dan hari besar, yang dapat memperlambat proses pembangunan dan investasi di sektor properti. Selain itu, terdapat izin seperti IUIA dan TDI yang tidak memiliki waktu proses pasti karena bergantung pada Peraturan Pemerintah atau SLA (*Service Level Agreement*) pemerintah. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang membutuhkan izin industri secara cepat.

Dari segi persyaratan, sebagian besar perizinan hanya memerlukan satu hingga dua dokumen, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meminimalkan birokrasi. Hal ini tentu memudahkan pelaku usaha dalam mempersiapkan dokumen. Selain itu, kebijakan terkait biaya sangat mendukung iklim investasi karena hampir semua perizinan, kecuali IMB, tidak dikenakan biaya. Untuk IMB, biaya ditetapkan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2016 tentang bangunan gedung, yang mungkin dapat menjadi faktor pertimbangan bagi pelaku usaha di sektor konstruksi.

Meskipun beberapa aspek sudah efisien, terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Ketidakpastian dalam proses perizinan seperti IUIA dan TDI dapat mempengaruhi daya tarik investasi di sektor industri. Selain itu, waktu pengurusan IMB yang cukup panjang juga dapat menghambat realisasi proyek pembangunan. Penyempurnaan SLA untuk izin tertentu serta optimalisasi layanan digital dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala tersebut, sehingga mendorong efisiensi dan kepastian bagi para investor. Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan upaya positif dalam menyediakan layanan perizinan dengan biaya rendah dan persyaratan minimal, namun penyempurnaan di beberapa aspek dapat semakin meningkatkan daya saing dan menarik lebih banyak investasi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

2.4.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.1.1. Urusan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan di sektor pendidikan harus mampu menjamin pemerataan dan perluasan akses, meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing lulusan, serta memperkuat tata kelola, akuntabilitas, dan citra pendidikan. Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah berupaya optimal dalam mengembangkan sektor pendidikan dengan memanfaatkan potensi yang ada, mencakup pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Pendidikan Sekolah Dasar (SD), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Data terkait pendidikan menjadi elemen penting dalam menilai kualitas penduduk di suatu wilayah. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Gorontalo ditentukan oleh beberapa indikator pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan yang terjangkau, baik dari segi aksesibilitas maupun pembiayaan, serta pemenuhan kebutuhan pendidikan yang berkualitas, merupakan prioritas dasar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	%	83.00%	98.43%	94.29%	78.56%	100%	78.56%
2	Persentase muatan lokal yang tertuang dalam kurikulum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3	Rasio Guru terhadap peserta didik	Rasio	1:67	1:12	1:27	1:28	1:18	64.29%
4	Persentase satuan pendidikan yang diselenggaran masyarakat yang memiliki legalitas	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025

Dari aspek literasi, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang ditampilkan pada grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) tahun 2023 dan 2024, terlihat adanya dinamika capaian pembangunan literasi di berbagai daerah di Provinsi Gorontalo. Jika difokuskan pada Kabupaten Gorontalo, terlihat bahwa angka IPLM pada tahun 2023 berada di angka 61,21, dan justru mengalami sedikit

penurunan pada tahun 2024 menjadi 59,91. Ini menunjukkan adanya tren penurunan yang cukup mengkhawatirkan, di saat sebagian besar daerah lain justru mengalami peningkatan yang signifikan.

Sebagai perbandingan, Kabupaten Bone Bolango mengalami lonjakan yang sangat signifikan dari 70,56 di tahun 2023 menjadi 92,62 di tahun 2024. Demikian pula Kabupaten Pohuwato naik dari 68,54 menjadi 75,7, dan Kota Gorontalo naik dari 74,98 menjadi 80,94.

Fakta ini menempatkan Kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah dengan angka IPLM terendah di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024, hanya sedikit lebih tinggi dari Kabupaten Boalemo yang turun drastis dari 65,5 ke 37,13.

Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Gorontalo perlu memberikan perhatian serius terhadap peningkatan pembangunan literasi masyarakat. Penurunan indeks ini bisa menjadi indikator adanya tantangan dalam penyediaan akses terhadap bahan bacaan, fasilitas literasi seperti perpustakaan, maupun kurang optimalnya program pemberdayaan literasi di masyarakat.

Oleh karena itu, perlu langkah strategis dan kolaboratif dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, dinas perpustakaan, lembaga pendidikan, hingga komunitas literasi, untuk bersama-sama meningkatkan capaian IPLM Kabupaten Gorontalo di masa mendatang. Peningkatan kualitas literasi tidak hanya penting untuk pengembangan sumber daya manusia, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, kritis, dan berdaya saing.

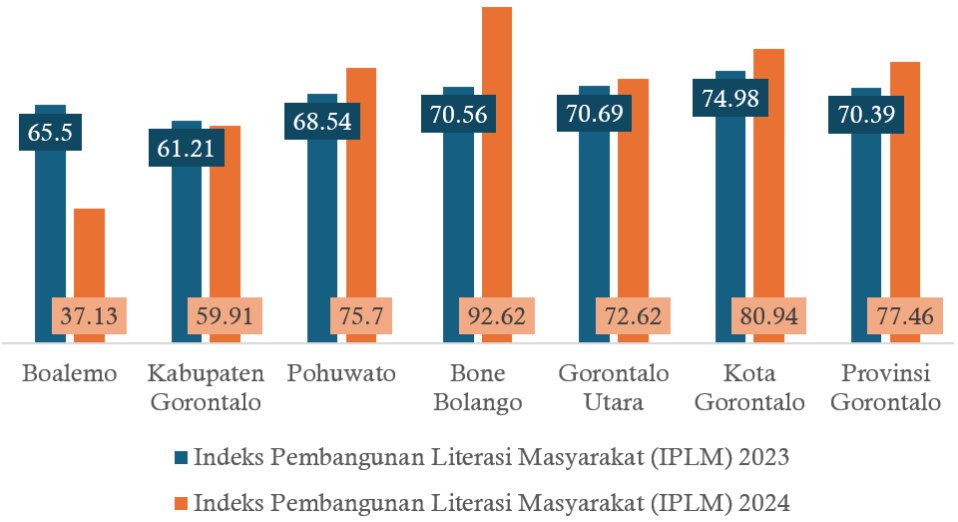

Gambar 2.17 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Gorontalo
Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo

Data mengenai indeks distribusi guru pada tahun 2025 di Kabupaten Gorontalo menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam pemerataan tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pemerataan pendidik berada pada kondisi yang memprihatinkan. Dengan capaian indeks hanya sebesar 0,14 yang diberi label "Kurang", terlihat jelas bahwa kinerja pemerintah daerah dalam memastikan distribusi guru PAUD belum optimal. Rendahnya skor ini menegaskan bahwa masih terjadi ketimpangan dalam penempatan guru PAUD di berbagai wilayah, sehingga perlu upaya lebih serius untuk menjamin anak-anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan berkualitas secara merata.

Sementara itu, pada tingkat Sekolah Dasar (SD) kondisi sedikit lebih baik meskipun tetap belum memuaskan. Nilai indeks distribusi guru SD tercatat sebesar 0,44 dengan label capaian "Kurang". Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran guru di sekolah dasar juga belum merata, terutama dilihat dari pemenuhan guru di setiap mata pelajaran. Ketidakmerataan ini berpotensi menghambat kualitas pembelajaran karena beberapa sekolah mungkin kekurangan guru spesialis di mata pelajaran tertentu, sementara sekolah lain justru memiliki kelebihan guru.

Berbeda dengan PAUD dan SD, distribusi guru di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik. Nilai indeks distribusi guru SMP mencapai 0,72 dengan label "Sedang", yang berarti bahwa penyebaran guru di jenjang SMP sudah cukup merata meskipun masih menyisakan celah untuk perbaikan. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dibandingkan jenjang sebelumnya, namun pemerintah daerah tetap perlu berupaya agar distribusi guru di tingkat SMP dapat semakin ditingkatkan menuju kategori "baik" atau "sangat baik" di masa mendatang.

Tabel 2.24 Indeks Distribusi Guru Kabupaten Gorontalo

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	Label Capaian 2025	Nilai Capaian 2025	Definisi Capaian
PAUD	Semua	Kurang	0.14	Kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pemerataan guru masih perlu penguatan. Skor indeks pemerataan pendidik PAUD di daerah masih relatif rendah
SD Umum	Semua	Kurang	0.44	Daerah memiliki sebaran guru yang kurang merata

SMP Umum	Semua	Sedang	0.72	Daerah memiliki sebaran guru yang cukup merata

Sumber Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo

2.4.1.2. Urusan Kesehatan

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Kabupaten Gorontalo telah menunjukkan perkembangan yang berarti dalam berbagai indikator kesehatan masyarakat. Peningkatan akses terhadap jaminan kesehatan, stabilitas fasilitas kesehatan dasar, serta penurunan angka kematian bayi dan balita merupakan beberapa capaian yang patut diapresiasi. Namun, sejumlah tantangan tetap perlu dihadapi, seperti pemenuhan rasio tenaga kesehatan yang ideal, penurunan prevalensi stunting, dan penanganan penyakit menular yang masih fluktuatif. Kajian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kondisi kesehatan di Kabupaten Gorontalo, yang nantinya diharapkan menjadi landasan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode 2025-2029.

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	81.54%	100.12%	89.95%	97.15%	100%	97.15%
2	Rasio Jumlah Tenaga Medis dengan Jumlah Penduduk	%	0.28	0.3	0.09	0.31	0.31	100.00%
3	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana rumah Sakit berdasarkan klasifikasi RS Tipe B.	%	90.60%	74.21%	0%	73.80%	95%	77.68%
4	Nilai Capaian Pelayanan Publik	Nilai	3.44	3.44	0	4.11	4.1	100.24%
5	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	%	52.90%	92.69%	94%	95%	100%	95.00%
6	Rasio Jumlah Tenaga Medis dengan Jumlah Penduduk	Rasio	0.11	0.17	0.17	0.16%	0.31	0.52%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.4.1.2.1. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup

Data Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, AKI berada di angka 81,2 per 100.000 kelahiran hidup, angka yang cukup rendah dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya. Namun, pada tahun 2020, terjadi lonjakan besar hingga mencapai 265 per 100.000 kelahiran hidup, yang bisa disebabkan oleh dampak

pandemi COVID-19, di mana akses layanan kesehatan menjadi lebih terbatas dan terjadi peningkatan risiko komplikasi selama persalinan.

Seiring berjalannya waktu, AKI berhasil ditekan kembali menjadi 161 pada tahun 2021 dan terus menurun hingga mencapai 140,6 pada tahun 2023. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan kesehatan ibu di Kabupaten Gorontalo, termasuk upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu hamil dan persalinan. Meski demikian, AKI di tahun 2023 masih berada di atas target nasional yang ideal. Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Gorontalo tetap menghadapi berbagai tantangan, meskipun data lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan setelah lonjakan tinggi pada tahun 2020.

Dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI), Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah melaksanakan serangkaian langkah strategis yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kesehatan ibu. Data menunjukkan bahwa angka AKI mengalami penurunan dari 265 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2020 menjadi 140,6 pada tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan efektivitas program-program kesehatan yang telah diimplementasikan.

Salah satu langkah utama adalah peningkatan cakupan kunjungan ibu hamil (K4). Pada tahun 2019, cakupan K4 mencapai 90,9%, dan meningkat menjadi 100% pada tahun 2021. Meskipun terdapat sedikit penurunan menjadi 97,6% pada tahun 2023, angka ini menunjukkan bahwa semakin banyak ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan selama masa kehamilan sangat penting untuk mendeteksi risiko yang mungkin timbul.

Pemerintah juga berfokus pada pelayanan persalinan dan nifas. Persentase pelayanan yang sesuai standar bagi ibu bersalin dan pelayanan nifas menunjukkan hasil yang sangat baik, hampir mencapai 100% setiap tahun. Ini mengindikasikan bahwa ibu yang melahirkan mendapatkan layanan kesehatan yang memadai, termasuk penanganan terhadap komplikasi yang mungkin terjadi saat persalinan.

Selanjutnya, program pemberian tablet tambah darah untuk ibu hamil telah dilaksanakan secara rutin, dengan cakupan 100% pada periode 2019 hingga 2023. Upaya ini penting untuk mengatasi anemia, yang merupakan salah satu faktor risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu dan bayi. Selain itu, pemantauan kesehatan bayi baru lahir juga dilaksanakan dengan cakupan mencapai 100%, yang menunjukkan perhatian terhadap kesehatan neonatus pasca-persalinan.

Namun, tantangan yang dihadapi dalam menurunkan AKI tetap ada. Ketersediaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan kekurangan tenaga kesehatan menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian target. Hal ini mengakibatkan akses layanan kesehatan bagi ibu hamil dan bersalin di wilayah tersebut menjadi terbatas, yang dapat berdampak pada tingginya angka kematian ibu.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi yang lebih komprehensif perlu diterapkan. Penguatan fasilitas rujukan serta peningkatan akses transportasi darurat sangat diperlukan, terutama di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, pengembangan sistem surveilans kesehatan ibu yang berbasis teknologi informasi akan memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap kesehatan ibu dan anak. Diperlukan juga alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung semua inisiatif ini, serta peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program-program kesehatan.

2.4.1.2.2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Data mencatat bahwa AKB berkurang dari 8,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi hanya 2,7 pada tahun 2023. Penurunan yang dramatis ini mencerminkan keberhasilan program-program kesehatan yang telah dilaksanakan dan meningkatkan perhatian terhadap kesehatan ibu dan anak.

Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah peningkatan cakupan pelayanan kesehatan neonatus. Pemerintah telah berfokus pada program kunjungan kesehatan bayi baru lahir, memastikan bahwa setiap bayi mendapatkan pemeriksaan kesehatan yang sesuai setelah lahir. Selain itu, upaya untuk memastikan bahwa semua persalinan ditangani oleh tenaga kesehatan yang terlatih telah dilakukan, sehingga komplikasi yang berpotensi mengancam nyawa bayi dapat diminimalkan. Persentase pelayanan yang sesuai standar untuk bayi baru lahir juga mencerminkan keberhasilan dalam menjaga kualitas layanan kesehatan, yang mencapai hampir 100% dalam beberapa tahun terakhir.

Kegiatan edukasi untuk orang tua, khususnya ibu, mengenai pentingnya perawatan neonatal dan pencegahan penyakit juga telah menjadi bagian dari strategi kesehatan. Pemberian informasi mengenai ASI eksklusif dan imunisasi juga sangat penting dalam meningkatkan kesehatan bayi, meskipun data mengenai persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif tidak tersedia. Di sisi lain, upaya pemerintah dalam

memperbaiki infrastruktur kesehatan, seperti memperkuat fasilitas kesehatan dan meningkatkan ketersediaan tenaga kesehatan di daerah terpencil, telah berkontribusi pada penurunan angka kematian bayi.

Namun, meskipun ada kemajuan yang signifikan, tantangan dalam menurunkan AKB masih ada. Akses layanan kesehatan di daerah terpencil tetap menjadi masalah, di mana banyak ibu tidak dapat menjangkau fasilitas kesehatan dengan mudah, terutama untuk pemeriksaan rutin dan perawatan pasca-persalinan. Selain itu, kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perawatan kesehatan bagi ibu dan anak masih perlu ditingkatkan, terutama di kalangan komunitas yang kurang teredukasi.

2.4.1.2.3. Angka Kelangsungan Hidup Bayi

Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan nilai berkisar antara 993,5 hingga 998,7 per 1.000 kelahiran hidup dalam periode 2019 hingga 2023. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas bayi yang lahir di daerah ini memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk bertahan hidup hingga usia satu tahun. Peningkatan AKHB ini mencerminkan keberhasilan dalam program-program kesehatan yang diimplementasikan, serta kemajuan yang signifikan dalam sistem kesehatan masyarakat.

Upaya yang telah dilakukan untuk mencapai angka kelangsungan hidup bayi yang tinggi ini termasuk peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, terutama untuk ibu dan bayi. Pemerintah daerah telah berfokus pada program peningkatan cakupan imunisasi, perawatan prenatal, dan pelayanan kesehatan pasca-persalinan yang memadai. Selain itu, program penyuluhan untuk masyarakat mengenai pentingnya perawatan kesehatan ibu dan bayi, serta manfaat ASI eksklusif, telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

Pelatihan bagi tenaga kesehatan dalam menangani perawatan neonatal juga telah ditingkatkan. Tenaga kesehatan yang terlatih mampu memberikan layanan yang lebih baik kepada ibu dan bayi, termasuk dalam hal deteksi dini komplikasi dan penanganan yang tepat. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Gorontalo juga telah ditingkatkan, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan yang berkualitas.

2.4.1.2.4. Angka Kematian Balita (AKABA) Per 1.000 Kelahiran Hidup

Data mengenai Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tren penurunan yang sangat signifikan dari 8,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi hanya 2,7 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2023. Angka ini mencerminkan kemajuan yang luar biasa dalam upaya penurunan angka kematian balita, yang merupakan indikator penting dari kesehatan anak dan kualitas pelayanan kesehatan di suatu daerah.

Upaya yang telah dilakukan saat ini untuk mencapai penurunan AKABA ini mencakup peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan anak. Pemerintah daerah telah mengimplementasikan program imunisasi yang komprehensif, memastikan bahwa semua balita mendapatkan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Selain itu, promosi ASI eksklusif selama enam bulan pertama dan perawatan gizi yang baik bagi balita juga menjadi fokus utama. Pelayanan kesehatan yang terintegrasi, seperti Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu), berfungsi sebagai sarana untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak, serta memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya perawatan kesehatan.

2.4.1.2.5. Angka Kematian Neonatal Per 1000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Neonatal (AKN) di Kabupaten Gorontalo menunjukkan variasi yang signifikan dalam periode lima tahun terakhir, dengan data mencerminkan tingkat kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2019, angka ini tercatat sebesar 4,6. Namun, terjadi lonjakan tajam pada tahun 2020, ketika AKN mencapai 15,84, yang menjadi titik tertinggi dalam kurun waktu tersebut. Sejak saat itu, upaya pemerintah dan lembaga terkait mulai menunjukkan hasil yang positif, terlihat dari penurunan angka kematian neonatal menjadi 7,3 pada tahun 2021, 2,9 pada tahun 2022, dan mencapai 2,2 pada tahun 2023. Tren penurunan yang signifikan ini menandakan adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.

2.4.1.2.6. Pola Penyakit

Beberapa penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Kabupaten Gorontalo, menurut data Dinas Kesehatan, meliputi TBC, HIV, DBD, Malaria, dan Kusta. Pada tahun 2023, tercatat 1.226 kasus TBC dan 29 kasus baru HIV. Sementara itu, angka kejadian DBD mencapai 34,54% per 100.000 penduduk. Penyakit-penyakit seperti TBC, HIV/AIDS, DBD, dan stunting juga menjadi fokus utama pemerintah

Kabupaten Gorontalo, sejalan dengan perhatian global terhadap masalah kesehatan tersebut.

Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Gorontalo berperan penting dalam menangani berbagai penyakit yang menjadi perhatian utama, seperti TBC, HIV, DBD, malaria, dan kusta. Berdasarkan data yang tersedia, fasilitas kesehatan di wilayah ini terdiri dari 4 rumah sakit umum, 17 klinik pratama, 27 apotek, dan 433 posyandu, dengan dukungan 23 puskesmas dan 79 puskesmas pembantu. Meskipun jumlah sarana kesehatan cukup memadai, terlihat adanya kekosongan pada rumah bersalin, yang dapat memengaruhi layanan kesehatan ibu dan anak, terutama dalam upaya pencegahan stunting.

Penyakit seperti TBC dan HIV membutuhkan penanganan yang berkelanjutan dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Kehadiran puskesmas dan klinik pratama berperan penting dalam layanan deteksi dan pengobatan dini, khususnya untuk TBC yang tercatat sebanyak 1.226 kasus pada tahun 2023. Selain itu, 29 kasus baru HIV juga memerlukan layanan kesehatan yang memadai agar pengobatan dan pencegahan dapat dilakukan secara efektif.

Posyandu, yang berjumlah 433 unit, menjadi ujung tombak dalam layanan kesehatan masyarakat, terutama dalam mendukung pencegahan stunting melalui pemantauan gizi anak dan kesehatan ibu. Sementara itu, penanganan DBD yang tercatat sebesar 34,54% per 100.000 penduduk memerlukan layanan cepat dan terkoordinasi di puskesmas dan rumah sakit.

Tabel 2.26. Kondisi Sarana Prasarana Kesehatan Kabupaten Gorontalo

Jenis Sarana	Jumlah
Rumah sakit umum	4
Rumah bersalin	0
Klinik pratama	17
Posyandu	433
Poliklinik	27
Puskesmas	23
Puskesmas pembantu	79
Apotek	27

Sumber: BPS Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.4.1.3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dalam upaya menyediakan infrastruktur di Kabupaten Gorontalo, pemerintah diharapkan lebih fokus pada pencapaian sasaran strategis yang sejalan dengan visi dan

misi kepala daerah. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkesinambungan setiap tahun.

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Pengelolaan Sumber daya Air	%	57.12%	69.13%	51.07%	55.55%	83%	66.92%
2	Persentase layanan air minum	%	98.06%	100%	99.62%	95.56%	90%	106.18%
3	Persentase layanan air limbah	%	84.80%	99.78%	99.87%	88.47%	80%	110.59%
4	Persentase penanganan sistem drainase	%	50.94%	52.68%	53.72%	54.93%	83%	66.18%
5	Persentase bangunan gedung yang representatif	%	17.77%	17.78%	17.78%	17.78%	83%	21.43%
6	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	%	62.33%	66.09%	66.09%	66.09%	82%	80.60%
7	Persentase penyelenggaraan kebinamargaan	%	43.00%	46.95%	46.10%	47.33%	95%	49.83%
8	Persentase bangunan konstruksi yang berkualitas	%	0.00%	33.91%	33.91%	33.91%	45%	75.35%
9	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	100.00%	100.00%	0%	0%	95%	0.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.4.1.3.1. Infrastruktur Bina Marga

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, dengan dukungan infrastruktur memiliki dampak signifikan dalam perekonomian suatu wilayah. Oleh karena itu, Kabupaten Gorontalo menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas pembangunan. Upaya ini terfokus pada pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, termasuk pembangunan jalan dan jembatan yang strategis untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi, fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pemukiman.

Jalan merupakan elemen krusial dalam sistem transportasi masyarakat, menjadi jalur utama bagi pergerakan barang dan manusia. Menurut data dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gorontalo memiliki panjang jalan sekitar 1.579 km, yang terdiri dari 787.41 km jalan aspal, 56.57 km jalan beton, 180.64 km jalan kerikil, dan 554.29 km adalah jalan tanah. Kondisi jalan dapat dilihat dari jenis permukaan, dimana sebagian besar jalan di kabupaten tersebut sudah dilapisi aspal dan kerikil. Dari total panjang jalan, sekitar 676,97 km jalan kabupaten dalam kondisi baik.

Tabel 2.28. Infrastruktur Wilayah Kabupaten Gorontalo

Uraian	Panjang Jalan
Panjang jalan berdasarkan kelas jalan	
Jalan nasional	75.42
Jalan provinsi	102
Jalan kabupaten	1,579
Kondisi Jalan	
Aspal	787.41
Kerikil	180.64
Beton	56.57
Tanah	554.29
Panjang jalan berdasarkan kondisi	
Baik	676.97
Sedang	89.7
Rusak	38.26
Rusak berat	773.99

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.4.1.3.2. Infrastruktur Sumber Daya Air

Kabupaten Gorontalo terletak di dataran tinggi dengan elevasi rata-rata 50 meter di atas permukaan laut, dan koordinat geografisnya berkisar antara 00.24" - 10.02 Lintang Utara (LU) dan 1210.59" – 1230.32 Bujur Timur (BT). Dengan kondisi topografi dan ketinggian tersebut, sekitar 71,83% wilayah kabupaten ini merupakan perbukitan. Terdapat 55 sungai besar dan kecil di Kabupaten Gorontalo yang semuanya bermuara pada Danau Limboto. Daerah aliran sungai, seperti Paguyaman dan DAS Bone Bolango yang mengarah ke Teluk Tomini, memainkan peran penting dalam irigasi dan distribusi air di wilayah tersebut.

Kabupaten Gorontalo memiliki 12 (dua belas) wilayah irigasi yang terletak di 12 kecamatan, dengan luas total irigasi 10,922 hektar, yang terbagi menjadi tiga bendung utama, yakni Bendung Alo, Bendung Alopohu, dan Bendungan Pohu. Kabupaten

Gorontalo, dengan sumber daya air dan irigasi yang dimilikinya, memiliki potensi yang signifikan untuk mendukung kegiatan pertanian dan pengembangan sektor pertanian. Melihat potensi sumber daya air di Wilayah Kabupaten Gorontalo, maka perlu pengelolaan yang baik, karena kebutuhan air yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan bertambahnya jumlah sektor yang harus dilayani. Beberapa titik irigasi terdapat bangunan liar yang dibuat oleh masyarakat sehingga dapat berefek pada berkurangnya debet air bahkan bisa berpotensi mengakibatkan masuknya sampah ke daerah irigasi. Ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya air melalui penegakan regulasi untuk mencegah dampak negatif.

Tabel 2.29 Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik Kabupaten Gorontalo 2020-2024

INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
Panjang Jaringan Irigasi dalam Kondisi Baik	Km	46,271	46,731	47,831	47,831	48,131

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo

Pada tahun 2020, panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik tercatat sebesar 46,271 km, dan angka ini terus mengalami kenaikan meskipun dengan laju yang relatif kecil dari tahun ke tahun. Pada 2021, terjadi peningkatan menjadi 46,731 km, kemudian bertambah lagi menjadi 47,831 km pada 2022. Angka ini tetap stabil di 2023, menunjukkan tidak ada penambahan jaringan yang masuk kategori "baik" selama tahun tersebut, namun kembali naik sedikit di 2024 menjadi 48,131 km.

Secara keseluruhan, selama periode 2020 hingga 2024, terdapat tambahan 1,86 km jaringan irigasi yang dikategorikan dalam kondisi baik. Meskipun penambahannya terbilang kecil, tren ini menunjukkan adanya upaya pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan irigasi yang berkelanjutan, meskipun mungkin dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran atau prioritas pembangunan daerah. Kondisi yang cenderung stagnan di tahun 2023 bisa menjadi perhatian, mengingat pentingnya fungsi jaringan irigasi dalam mendukung produktivitas pertanian, terutama di daerah yang bergantung pada sektor pertanian sebagai basis ekonomi. Keberlanjutan peningkatan kualitas jaringan irigasi akan sangat menentukan efektivitas pengelolaan air, terutama dalam menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan.

2.4.1.3.3. Infrastruktur Cipta Karya

Pada tahun 2022, PDAM Kabupaten Gorontalo mengalirkan sekitar 3.044.670 m3 air. Jika dilihat dari jenis pelanggan PDAM di Kabupaten Gorontalo, kelompok

rumah tangga A menjadi konsumen air terbesar pada tahun tersebut, mencapai 70,66 persen atau sekitar 1,651,479 juta m3. Nilai total energi air yang dijual kepada kelompok ini mencapai 5.617.826.000 juta rupiah. Kelompok rumah tangga B menduduki posisi kedua sebagai konsumen air terbesar dengan jumlah penjualan air sebesar 654.874 m3. Produksi air ini cenderung stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Sementara untuk sanitasi, di Kabupaten Gorontalo baru terdapat 69.54 persen rumah tangga yang memiliki fasilitas tempat buang air besar milik sendiri, sisanya 30.46 persen masih menggunakan fasilitas MCK umum bahkan ada yang belum terfasilitasi sama sekali. Sedangkan untuk tempat pembuangan akhir tinja, 99.34 persen rumah tangga sudah memiliki tangka septik/IPAL. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2023, sebagian besar rumah tangga di Kabupaten Gorontalo menggunakan sumber air yang memenuhi standar untuk kebutuhan mandi, mencuci, dan keperluan lainnya. Rinciannya adalah 39,72 persen menggunakan sumur/mata air terlindung sebagai sumber air utama, 42,18 persen menggunakan sumur bor/pompa, dan 8,04 persen menggunakan leding. Di sisi lain, sebanyak 9,82 persen rumah tangga menggunakan sumber air utama yang dianggap kurang layak, seperti sumur/mata air tidak terlindung dan jenis sumber air lainnya.

2.4.1.3.4. Penataan Ruang

Berdasarkan Ranperda RTRW Tahun 2012-2032 menyebutkan bahwa rencana struktur ruang wilayah kabupaten terdiri atas sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana. Adapun Pusat Pelayanan Kawasan untuk Kabupaten Gorontalo berada di Pilohayanga di Kecamatan Telaga, Pulubala di Kecamatan Pulubala, Mulyonegoro di Kecamatan Tibawa, Payunga di Kecamatan Batudaa dan Parungi di Kecamatan Boliyohuto. Untuk mendukung PKW ditetapkan Pusat Kegiatan Lokal Limboto, Tabongo dan Tolangohula. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) untuk Kabupaten Gorontalo berada di Pilohayanga di Kecamatan Telaga, Pulubala di Kecamatan Pulubala, Mulyonegoro di Kecamatan Tibawa, Payunga di Kecamatan Batudaa dan Parungi di Kecamatan Boliyohuto. Selanjutnya Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) untuk Kabupaten Gorontalo berada di Huidu di Kecamatan Limboto Barat, Talumelito di Kecamatan Telaga Biru, Biluhu Timur di Kecamatan Batudaa Pantai, Molopatodu di Kecamatan Bongomeme, Biluhu Tengah di Kecamatan Biluhu dan Paris di Kecamatan Mootilango serta Lakeya di Kecamatan Tolangohula.

Sistem jaringan prasarana dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten dan untuk melayani kegiatan yang memiliki cakupan wilayah layanan prasarana skala kabupaten meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air dan sistem jaringan prasarana lainnya. Selanjutnya, sistem jaringan transportasi darat meliputi sistem jaringan jalan meliputi jalan nasional, provinsi dan kabupaten serta jaringan kereta api meliputi jaringan jalur kereta api umum dan stasiun kereta api. Sistem jaringan transportasi laut meliputi Pelabuhan laut dan alur pelayaran. Sistem jaringan energi meliputi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi serta jaringan infrakstruktur ketenagalistrikan.

Sistem jaringan telekomunikasi mencakup sistem jaringan tetap; dan b. sistem jaringan bergerak. Sistem jaringan sumberdaya air meliputi sumber air dan prasarana sumber daya air. Terakhir yakni sistem jaringan prasarana lainnya terdiri atas sistem penyediaan air minum (SPAM), sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sistem jaringan persampahan wilayah, sistem jaringan evakuasi bencana dan sistem jaringan drainase.

Adapun rencana pola ruang wilayah kabupaten, terdiri atas kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung mencakup kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan rawan bencana dan kawasan cagar budaya.

Kawasan peruntukan budidaya mencakup kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perikanan, kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman serta kawasan pertahanan dan keamanan.

Penetapan kawasan strategis kabupaten, pertama kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan adanya Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) LAPATO meliputi Pulubala, Boliyohuto dan Bilato. Kemudian kawasan perdagangan dan jasa mencakup Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto dan Tibawa. Kedua, kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi serta kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kabupaten meliputi penetapan

dan pengembangan kawasan strategis, penyusunan master plan pengembangan kawasan strategis, penyusunan peraturan zonasi pengembangan kawasan strategis serta pemberdayaan dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis.

Dalam perencanaan daerah Kabupaten Gorontalo untuk periode 2025-2045, kawasan lindung memainkan peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, termasuk hutan lindung di dalam kawasan hutan dan kawasan lindung di luar kawasan hutan. Kawasan lindung ini juga berfungsi sebagai kawasan resapan air yang vital. Kawasan hutan lindung di Kabupaten Gorontalo mencakup area yang memiliki ketinggian lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut, kemiringan lereng lebih dari 40%, tanah yang didominasi oleh tanah lithic (bersolum sangat dangkal dan berbatu), atau yang jumlah skor faktor lereng, tanah, dan hujan lebih dari 175. Kondisi fisik wilayah, tanah, dan curah hujan di Kabupaten Gorontalo menjadikan faktor lereng sebagai penentu utama untuk arahan peruntukan kawasan hutan lindung. Di lokasi tertentu, seperti daerah tangkapan air Danau Limboto, sebagian kawasan hutan lindung ditetapkan berdasarkan kepentingan perlindungan dan usaha rehabilitasi Danau Limboto. Langkah ini penting untuk mencegah hambatan dalam usaha rehabilitasi kawasan danau dan mengurangi potensi banjir di sekitar Danau Limboto. Melalui upaya ini, diharapkan kawasan lindung dapat berfungsi optimal dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat setempat.

Rencana pengembangan juga mencakup berbagai kawasan dan obyek wisata budaya dan sejarah yang beragam. Kawasan peruntukan pariwisata budaya akan dikembangkan di Desa Bongo, Kecamatan Batudaa Pantai. Pariwisata alam akan difokuskan di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Desa Barakati, Kecamatan Batudaa, Desa Biluhu Timur, Kecamatan Batudaa Pantai, dan Desa Taulaa, Kecamatan Bilato. Selain itu, pariwisata buatan akan dikembangkan di Kecamatan Batudaa, Kecamatan Boliyohuto, dan Kecamatan Mootilango. Obyek wisata sejarah dan budaya yang akan dipertahankan dan dikembangkan mencakup Benteng Oranye di Kecamatan Kwandang, Rumah Adat Gorontalo, Menara Keagungan di Kecamatan Limboto, serta Bekas Pendaratan Pesawat Udara Katalina di Desa Iluta, Kecamatan Batudaa, dan Gelanggang Olah Raga 23 Januari di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga. Untuk mempertahankan keutuhan bangunan dan

kawasan sejarah, upaya revitalisasi dan preservasi akan terus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai pusat pendidikan seni dan budaya daerah serta menghidupkan wisata sejarah dan budaya di Kabupaten Gorontalo. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisatawan, memperkuat identitas budaya dan sejarah daerah, serta memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat setempat.

Dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo untuk periode 2025-2029, berbagai strategi kunci menjadi fokus untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu yang terpenting adalah pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) LAPATO. Sebagai motor penggerak ekonomi baru, KEK ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan infrastruktur serta dukungan kebijakan investasi yang tepat sasaran. Sinergi yang kuat antara KEK LAPATO dan sektor industri, perdagangan, serta jasa di wilayah-wilayah strategis seperti Telaga, Telaga Biru, dan Limboto akan menjadi fondasi penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

Di samping itu, penguatan infrastruktur transportasi menjadi prioritas utama dalam mengintegrasikan seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. Peningkatan jaringan transportasi darat dan laut, termasuk pembangunan jalan baru dan revitalisasi jalan yang sudah ada, sangat diperlukan untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. Selain itu, pengembangan pelabuhan laut juga harus ditingkatkan guna memperlancar arus perdagangan. Potensi pengembangan jaringan kereta api, sebagai sarana transportasi massal dan penghubung antar wilayah, juga menjadi area yang perlu dieksplorasi secara serius sebagai bagian dari pengembangan transportasi jangka panjang.

Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi bencana merupakan elemen penting lain dalam perencanaan ini. Rehabilitasi Danau Limboto, yang selama ini menjadi pusat perhatian, harus terus diprioritaskan. Langkah-langkah rehabilitasi ini harus melibatkan program-program berbasis masyarakat, yang tidak hanya memastikan keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberdayakan penduduk setempat dalam prosesnya. Selain itu, penguatan kawasan lindung, khususnya di wilayah yang rawan bencana seperti lereng curam dan daerah tangkapan air, perlu diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan jangka panjang untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi risiko bencana.

Pariwisata, sebagai sektor yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, juga menjadi fokus penting. Pengembangan kawasan wisata alam, budaya, dan buatan harus didukung oleh infrastruktur yang memadai serta strategi promosi yang efektif. Desa Bongo, yang dikenal dengan wisata budaya, perlu terus dikembangkan dengan tetap menjaga kelestarian nilai-nilai budaya lokal. Revitalisasi obyek-obyek wisata sejarah juga harus dilakukan agar tidak hanya menjadi daya tarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sarana untuk melestarikan warisan budaya setempat. Pengembangan ini harus diarahkan pada pertumbuhan ekonomi kreatif yang berbasis pada potensi lokal.

Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting. Dalam pengelolaan kawasan strategis, termasuk kawasan lindung dan kawasan wisata, keterlibatan masyarakat lokal akan menjadi kunci keberhasilan program-program pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam sektor-sektor ekonomi, lingkungan, dan budaya tidak hanya akan meningkatkan partisipasi mereka, tetapi juga memastikan bahwa manfaat dari pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan sejalan dengan potensi serta kebutuhan daerah.

2.4.1.4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bersamaan dengan pertambahan jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo, kebutuhan akan rumah bagi masyarakat juga akan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi permasalahan mendasar yang perlu diatasi di kalangan masyarakat. Sebagai respons terhadap tantangan ini, masyarakat berupaya melakukan perbaikan kondisi permukimannya secara substansial.

Tabel 2.30. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	%	0.00	80%	0%	0%	100%	0.00%
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	%	48.33%	62.50%	62.50%	62.50%	95.82%	153.31%

3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	%	6.99%	5.07%	5.07%	5.07%	6.23%	122.93%
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	%	74.63%	80.00%	80.00%	87.32%	83.41%	104.68%
5	Persentase fasilitasi layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%		0%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Dalam rangka mendukung penyediaan hunian yang layak, sehat, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah telah melaksanakan berbagai program strategis di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya dalam pemenuhan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan permukiman. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, tetapi juga sebagai bagian integral dari penanganan kawasan kumuh serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan.

Selama kurun waktu 2021 hingga 2024, realisasi pembangunan PSU jalan lingkungan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah mencapai total panjang 1.461,7 meter, sementara dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pembangunan jalan lingkungan mencapai 2.765 meter. Realisasi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menyediakan aksesibilitas dan konektivitas yang memadai di lingkungan permukiman, yang merupakan elemen penting dalam mendukung mobilitas warga serta mencegah munculnya kawasan permukiman kumuh baru.

Selain itu, penanganan sistem drainase lingkungan juga menjadi prioritas guna mengurangi risiko genangan dan banjir yang kerap menjadi pemicu degradasi kualitas lingkungan permukiman. Dalam hal ini, realisasi pembangunan drainase lingkungan melalui APBD sepanjang 160 meter menjadi langkah awal yang signifikan dalam memperbaiki infrastruktur dasar dan mewujudkan kawasan hunian yang sehat.

Dari sisi perencanaan dan legalitas pengembangan perumahan, Pemerintah Daerah juga telah memberikan pelayanan pengesahan siteplan perumahan sebanyak 96 siteplan selama periode 2021–2024. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap penyediaan perumahan oleh pengembang, serta

memastikan kesesuaian dengan rencana tata ruang dan penyediaan PSU sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai bagian dari proses pemenuhan hak masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang memadai, Pemerintah Daerah juga telah menerima penyerahan 18 aset PSU jalan lingkungan yang dibangun melalui APBN dari pengembang perumahan. Serah terima aset ini menjadi krusial untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat, serta memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan aset publik. Meskipun capaian tersebut menunjukkan kemajuan, namun tantangan di bidang PKP masih cukup besar, khususnya dalam mengatasi backlog prasarana dasar, mempercepat legalisasi aset PSU, serta memastikan terpenuhinya SPM bidang perumahan di seluruh wilayah.

2.4.1.4.1. Lingkungan Permukiman Kumuh

Data penetapan lokasi lingkungan perumahan dan permukiman kumuh di Kabupaten Gorontalo menunjukkan distribusi kawasan permukiman serta area yang dikategorikan kumuh. Berdasarkan tabel, sebagian besar kecamatan memiliki kawasan permukiman dengan status yang tidak tergolong kumuh. Namun, terdapat empat kecamatan—Tibawa, Limboto, Telaga, dan Limboto Barat—yang memiliki wilayah dengan status kumuh, dengan total luas mencapai 189,41 hektare.

Luas wilayah kumuh terbesar terdapat di Kecamatan Limboto dengan 83,6 hektare, diikuti Tibawa (55,52 hektare) dan Telaga (50,29 hektare). Kondisi ini memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah, mengingat penanganan kawasan kumuh merupakan salah satu fokus dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), terutama terkait akses terhadap infrastruktur dasar dan lingkungan permukiman layak. Kawasan kumuh memerlukan intervensi berupa program rehabilitasi dan peningkatan infrastruktur, seperti akses air bersih, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan. Selain itu, pemerintah juga perlu fokus pada pemberdayaan masyarakat setempat melalui program ekonomi agar dampak perbaikan infrastruktur dapat berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Misalnya, di Kecamatan Limboto yang memiliki kawasan kumuh paling luas, perencanaan penanganan harus terintegrasi dengan rencana pengembangan pusat kegiatan di wilayah tersebut untuk memastikan sinergi antara peningkatan permukiman dan pengembangan ekonomi.

Di sisi lain, kecamatan dengan kawasan permukiman luas, seperti Pulubala (16.249 hektare) dan Bongomeme (9.618 hektare), memerlukan kebijakan pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung pertumbuhan permukiman baru secara berkelanjutan. Aksesibilitas yang memadai serta layanan publik seperti listrik, air bersih, dan fasilitas kesehatan harus diprioritaskan agar permukiman tersebut berkembang secara layak dan tertata dengan baik.

Tabel 2.31. Penetapan Lokasi Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Kecamatan	Nama Kawasan	Luas (ha)	Status
Batudaa Pantai	Permukiman	2483	
Biluhu	Permukiman	2456	
Batudaa	Permukiman	1935	
Bongomeme	Permukiman	9618	
Tabongo	Permukiman	4401	
Dungaliyo	Permukiman	3108	
Tibawa	Kumuh	55.52	Kumuh
Pulubala	Permukiman	16249	
Boliyohuto	Permukiman	5037	
Mootilango	Permukiman	7402	
Tolangohula	Permukiman	4632	
Asparaga	Permukiman	8793	
Bilato	Permukiman	2803	
Limboto	Kumuh	83.6	Kumuh
Limboto Barat	Permukiman	4891	
Telaga	Kumuh	50.29	Kumuh
Telaga Biru	Permukiman	5239	
Tilango	Permukiman	459	
Telaga Jaya	Permukiman	586	

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gorontalo, 2024.

Berdasarkan data terakhir yang tertuang dalam Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 666/08/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, luas kawasan kumuh di Kabupaten Gorontalo tercatat mencapai 297,10 hektar. Sejak saat itu, Pemerintah Daerah telah melakukan berbagai intervensi penanganan melalui program-program perbaikan infrastruktur dasar, penguatan kelembagaan masyarakat, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar permukiman.

Hasil dari upaya penanganan tersebut menunjukkan capaian yang cukup signifikan. Hingga tahun 2021, tercatat telah terjadi pengurangan luasan kawasan kumuh seluas 96,80 hektar, atau sekitar 32,58% dari total luas kawasan kumuh awal. Dengan demikian, sisa kawasan kumuh yang masih memerlukan penanganan

berjumlah 200,30 hektar, yang tersebar di beberapa titik wilayah dan masih memerlukan pendekatan kolaboratif untuk penanganannya.

2.4.1.4.2. Rumah Layak Huni

Ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat MBR dan masyarakat miskin lainnya masih menjadi beban pemerintah daerah saat ini. Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Gorontalo sampai tahun 2024 mencapai sebanyak 63.621 Unit dari jumlah total rumah yang ada di Kabupaten Gorontalo sejumlah 88.052 Unit, namun masih terdapat Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 24.431 Unit yang harus ditangani lima tahun ke depannya.

Program BSRS justru menunjukkan peningkatan dari 55 unit pada 2022 menjadi 71 unit pada 2023, menandakan adanya perhatian yang lebih besar terhadap perbaikan rumah secara mandiri. Namun, program lain seperti CSR dari SMF dan Dana Insentif Fiskal Kabupaten Gorontalo tidak mencatatkan penanganan unit rumah selama periode tersebut. Ini menunjukkan perlunya optimalisasi berbagai sumber pembiayaan alternatif untuk mendukung program perumahan, terutama dari sektor swasta dan insentif pemerintah pusat.

Selain itu, penanganan melalui APBD Perkim Provinsi hanya mencakup 32 unit rumah pada tahun 2022, tanpa ada kelanjutan pada tahun berikutnya. Kondisi ini menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam menyusun kebijakan perumahan agar capaian pembangunan rumah layak huni dapat merata dan berkelanjutan.

Secara total, penanganan rumah layak huni di Kabupaten Gorontalo berjumlah 1.013 unit pada tahun 2022 dan menurun menjadi 658 unit pada 2023. Penurunan ini memerlukan evaluasi terkait kendala dalam pelaksanaan, baik dari aspek teknis maupun anggaran, agar target perbaikan rumah tidak terhambat di masa mendatang.

Tabel 2.32 Pembangunan Rumah Layak Huni selang tahun 2022 s/d 2023

Uraian	Satuan	Jenis Penanganan 2022		Jenis Penanganan 2023	
		PK	PB	PK	PB
BSPS	Unit	958	-	587	-
BSRS	Unit	55	-	71	-
APBD Perkim Provinsi	Unit	-	32	-	-
CSR SMF	Unit	-	-	-	-
Dana Insentif Fiskal Kab. Gorontalo	Unit	-	-	-	-

Jumlah	Unit	1013	32	658	0
Total Penanganan	Unit	-		-	
Jumlah Setelah Penanganan	Unit	-		-	

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Gorontalo, 2024.

2.4.1.4.3. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman

Data capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gorontalo pada periode 2019 hingga 2023 menunjukkan adanya peningkatan akses terhadap hunian layak, namun beberapa indikator masih memerlukan perhatian lebih. Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap penyediaan hunian layak mengalami tren positif, meningkat dari 64,63% pada 2019 menjadi 72,06% pada 2023. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam memperluas akses perumahan layak melalui program dan intervensi seperti BSPS dan BSRS. Namun, laju peningkatan yang relatif kecil antara 2022 dan 2023, yaitu hanya sebesar 0,02%, menandakan perlunya strategi baru agar program dapat lebih efektif.

Indikator pengurangan rumah tidak layak huni juga menunjukkan perbaikan. Pada 2023, persentase pengurangan mencapai 27,10%, naik signifikan dari 22,17% pada 2021. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang lebih agresif dalam memperbaiki kondisi perumahan. Namun demikian, keberlanjutan peningkatan ini akan memerlukan pengawasan ketat serta kolaborasi lintas sektor, terutama dalam hal pendanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Di sisi lain, beberapa indikator menunjukkan stagnasi. Kawasan penerangan perkotaan yang baik dan jumlah TPU yang tertata dan terpelihara belum mencatatkan progres sejak 2019. Hal ini menjadi tantangan serius, terutama karena penerangan dan pemeliharaan TPU merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan layanan publik. Ketiadaan progres ini mengindikasikan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan implementasi kebijakan terkait, agar masalah tersebut dapat segera diatasi.

Persentase warga korban bencana yang memperoleh rumah layak huni mencatatkan lonjakan signifikan pada 2022, dengan 80% korban bencana mendapat hunian yang layak. Sayangnya, tidak ada progres serupa pada 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa respons terhadap bencana bersifat situasional dan belum konsisten. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dalam

menangani kebutuhan perumahan bagi korban bencana agar capaian positif pada 2022 tidak hanya bersifat sementara.

Selain itu, relokasi warga akibat program pemerintah daerah juga belum berhasil diwujudkan dengan fasilitasi rumah layak huni, karena indikator tersebut tetap nol sepanjang periode 2019-2023. Ini menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan program relokasi yang perlu diatasi, baik dalam aspek perencanaan, anggaran, maupun sosialisasi kepada masyarakat.

2.4.1.5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut adalah capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

Tabel 2.33. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
2	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.29	0.38	0.68	0.6	0.42	142.86%
3	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran	%	90.70%	90.74%	96.08%	95.59%	100%	95.59%
4	Cakupan Desa Tanggap Bencana	%	38.05%	39.51%	40.49%	40.49%	100%	40.49%
5	Cakupan Desa Siaga Bencana	%	0%	24.39%	73.17%	68.29%	100%	68.29%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.4.1.5.1. Penanggulangan Bencana

Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan potensi bencana yang rawan, sehingga membutuhkan langkah penanggulangan dan mitigasi bencana secara dini dan terencana. Secara geografis, Kabupaten Gorontalo terletak di kawasan pesisir Teluk Tomini, dengan wilayah yang terdiri dari dataran rendah hingga perbukitan. Topografinya yang beragam mencakup wilayah pantai, pegunungan, dan lembah, menjadikannya rentan terhadap bencana seperti banjir, tanah longsor, dan abrasi pantai. Dari sisi hidrologi, sungai-sungai yang mengalir di wilayah ini, terutama pada musim penghujan, sering memicu banjir dan genangan air di daerah dataran rendah.

Kondisi klimatologi dengan pola curah hujan yang tinggi pada periode tertentu juga meningkatkan risiko banjir dan tanah longsor, terutama di daerah rawan erosi. Selain itu, secara geologi, Kabupaten Gorontalo berada di jalur tektonik aktif yang menempatkannya dalam potensi risiko gempa bumi dan tsunami, terutama di kawasan pesisir. Potensi bencana ini diperburuk dengan adanya tekanan demografis, seperti peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan permukiman di daerah rawan bencana, yang meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana alam.

Tabel 2.34. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Gorontalo

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kelas Risiko
146.4	146.4	133.01	114.92	103.21	103.21	94.04	94.04	86.55	Sedang

Sumber: Buku IRBI Provinsi Gorontalo, 2023

Dengan potensi bencana yang mengintai, seperti banjir, longsor, gempa bumi, dan tsunami, Kabupaten Gorontalo memerlukan upaya penanggulangan dan mitigasi bencana yang sistematis dan komprehensif. Langkah-langkah mitigasi sejak dini, seperti penataan ruang berbasis risiko bencana, edukasi masyarakat tentang kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, dan pemantauan cuaca secara berkala, sangat penting untuk mengurangi risiko dan dampak bencana. Integrasi kebijakan mitigasi bencana dalam perencanaan pembangunan juga menjadi krusial agar pertumbuhan wilayah ini dapat berkelanjutan sekaligus mampu melindungi masyarakat dari ancaman bencana di masa mendatang.

Tabel 2.35. Jumlah Penduduk Terpapar Bencana

Jenis Bencana	Potensi Penduduk Terpapar (Jiwa)				
	Penduduk	Kelompok Rentan			
		Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Cacat	Kelas
Gempa bumi	392,256	97,425	65,447	2,303	Tinggi
Tsunami	21,927	8,402	4,821	129	Sedang
Banjir	150,526	36,928	23,631	869	Tinggi
Banjir Bandang	1,957	567	409	-	Sedang
Tanah longsor	158,508	39,980	25,468	-	Sedang
Gelombang ekstrem dan abrasi	900	349	198	-	Rendah
Cuaca ekstrem	346,122	84,742	56,468	2,032	Sedang
Kekeringan	392,409	97,490	65,485	2,304	Tinggi
Kebakaran hutan dan Lahan	112,889	-	-	-	Sedang
Epidemi dan wabah penyakit	20,378	5,102	2,597	1	Rendah

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo, 2024.

Data jumlah penduduk terpapar bencana di Kabupaten Gorontalo menunjukkan tingkat kerentanan masyarakat terhadap berbagai jenis bencana alam dan non-alam, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga epidemi. Berdasarkan data tersebut, beberapa jenis bencana memiliki kategori risiko tinggi, terutama gempa bumi, banjir, dan kekeringan, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan masyarakat dalam upaya mitigasi serta penanggulangan.

Gempa bumi menempati posisi teratas dalam jumlah penduduk terdampak, dengan 392.256 jiwa berisiko terpapar, termasuk 97.425 kelompok rentan (seperti anak-anak dan lansia), 65.447 penduduk miskin, dan 2.303 penyandang disabilitas. Kondisi ini menunjukkan bahwa bencana gempa bumi tidak hanya berpotensi merusak infrastruktur, tetapi juga berisiko tinggi terhadap kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses dalam menghadapi situasi darurat. Kekeringan juga memiliki potensi dampak yang hampir setara dengan gempa, menunjukkan bahwa masalah akses air menjadi krusial, terutama bagi 97.490 jiwa dari kelompok rentan dan penduduk miskin yang terdampak.

Selain itu, bencana banjir dan cuaca ekstrem menunjukkan jumlah paparan yang signifikan, masing-masing dengan 150.526 dan 346.122 jiwa terdampak. Meskipun risiko cuaca ekstrem berada pada kategori sedang, dampaknya tetap besar mengingat banyaknya kelompok rentan dan penduduk miskin yang terdampak. Banjir bandang dan tanah longsor juga tidak dapat diabaikan, mengingat wilayah Gorontalo memiliki topografi yang memungkinkan terjadinya longsoran dan banjir di daerah perbukitan dan dataran rendah.

Sementara itu, potensi tsunami dan gelombang ekstrem relatif lebih rendah, dengan total paparan 21.927 dan 900 jiwa. Namun, bencana-bencana ini tetap perlu diantisipasi mengingat Kabupaten Gorontalo memiliki kawasan pesisir yang rentan terhadap fenomena alam laut, terutama di tengah perubahan iklim yang meningkatkan intensitas kejadian ekstrem.

Tabel 2.36. Potensi Kerusakan Lingkungan dan Kerugian Akibat Bencana

Jenis Bencana	Kerugian (Juta Rupiah)				Kerusakan Lingkungan (Ha)	
	Ekonomi	Fisik	Total	Kelas	Luas (Ha)	Kelas
Gempa bumi	1,493,707	967,935	2,461,642	Tinggi	-	Rendah
Tsunami	73,969	8,680	82,649	Tinggi	1,634	Tinggi
Banjir	1,172,935	470,983	1,643,918	Tinggi	20,966	Tinggi

Banjir Bandang	453,640	65,310	518,950	Tinggi	1,568	Tinggi
Tanah longsor	42,800	10,156	52,956	Sedang	58,577	Tinggi
Gelombang ekstrem dan abrasi	63,229	384	63,613	Rendah	106	Sedang
Cuaca ekstrem	25,969	7,675	33,644	Sedang	-	Rendah
Kekeringan	693,968	-	693,968	Tinggi	107,202	Tinggi
Kebakaran hutan dan Lahan	187,834	-	187,834	Tinggi	52,285	Tinggi
Epidemi dan wabah penyakit	61,453	-	61,453	Sedang	254	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo, 2024.

Data potensi kerusakan lingkungan dan kerugian akibat bencana di Kabupaten Gorontalo menunjukkan besarnya dampak yang dapat ditimbulkan, baik dari segi ekonomi, fisik, maupun lingkungan. Kerugian ekonomi dan fisik yang tinggi, khususnya dari gempa bumi, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan, menggarisbawahi perlunya perencanaan mitigasi yang komprehensif.

Gempa bumi tercatat sebagai bencana dengan total kerugian tertinggi, mencapai Rp2,46 triliun, meskipun kerusakan lingkungan akibat gempa dikategorikan rendah. Ini mengindikasikan bahwa dampak utama gempa bumi lebih terasa pada sektor ekonomi dan infrastruktur, yang memerlukan langkah penanggulangan berbasis pembangunan infrastruktur tahan bencana.

Banjir dan kekeringan juga menjadi ancaman serius, dengan masing-masing kerugian total Rp1,64 triliun dan Rp693,9 miliar. Selain kerugian ekonomi, banjir merusak 20.966 hektare lahan, dan kekeringan memengaruhi 107.202 hektare, menunjukkan bahwa dampak bencana ini meluas hingga sektor lingkungan dan ketahanan pangan. Langkah-langkah seperti pengelolaan tata air dan konservasi lahan sangat dibutuhkan untuk menekan risiko bencana di masa mendatang.

Banjir bandang dan tanah longsor juga memiliki potensi dampak lingkungan yang tinggi, dengan total kerusakan mencapai 1.568 dan 58.577 hektare lahan, masing-masing. Tingginya kerentanan wilayah perbukitan dan lereng terhadap longsor mengisyaratkan pentingnya langkah pencegahan seperti penghijauan lahan dan pemantauan geologis secara berkala.

Bencana seperti kebakaran hutan dan lahan mencatat kerugian sebesar Rp187,8 miliar dan merusak 52.285 hektare, menempatkannya dalam kategori risiko tinggi. Selain menimbulkan kerugian langsung, kebakaran lahan juga mengancam ekosistem dan memperparah perubahan iklim, sehingga upaya pengendalian dan pencegahan kebakaran menjadi prioritas penting.

Selain itu, tsunami dan gelombang ekstrem menunjukkan kerugian dengan dampak tinggi pada lingkungan pesisir, merusak total 1.634 hektare dan 106 hektare. Ini menegaskan perlunya penguatan infrastruktur pesisir dan penerapan sistem peringatan dini untuk meminimalkan kerusakan pada wilayah pesisir.

Cuaca ekstrem, meski kerugiannya relatif kecil dibanding bencana lainnya, tetap memerlukan perhatian karena dapat memicu bencana sekunder seperti banjir atau kekeringan. Sementara itu, epidemi dan wabah penyakit memiliki dampak ekonomi yang moderat, namun berpotensi mengganggu stabilitas sosial dan kesehatan masyarakat, terutama jika tidak ada langkah penanganan dini.

Tabel 2.37 Capaian Kinerja Pelayanan BPBD Kabupaten Gorontalo

Indikator Capaian Urusan dan Program (Outcome)	Satuan	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Cakupan desa tanggap bencana	%	38.05	39.51	40.49	40.49
Cakupan desa siaga bencana	%	0	24.39	73.17	68.29

Sumber: BPBD Kabupaten Gorontalo, 2024.

Capaian kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gorontalo menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa aspek layanan yang diberikan kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana. Persentase warga yang mendapatkan layanan informasi mengenai potensi rawan bencana telah mencapai angka yang sangat baik, yaitu 100% dari tahun 2021 hingga 2023. Ini mencerminkan upaya yang efektif dari BPBD dalam menyediakan informasi penting kepada masyarakat, yang merupakan langkah awal yang krusial dalam mitigasi bencana. Kesadaran masyarakat yang tinggi terhadap risiko bencana dapat membantu mereka mempersiapkan diri dan merespons lebih baik ketika bencana terjadi.

Namun, situasi berbeda terlihat pada persentase warga yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana. Realisasi untuk indikator ini menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2019, hanya 0,83% warga yang menerima layanan tersebut, tetapi meningkat tajam menjadi 68,58% pada tahun 2020. Namun, capaian ini kemudian menurun pada tahun 2021 dan 2022, masing-masing menjadi 48,95% dan 23,49%. Penurunan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam tentang strategi dan implementasi program pencegahan yang dilakukan BPBD agar layanan ini dapat lebih konsisten dan efektif di masa mendatang.

Di sisi lain, capaian kinerja untuk layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, dengan persentase mencapai 100% dari tahun 2019 hingga 2023. Ini menunjukkan bahwa BPBD telah siap dan mampu memberikan respons yang cepat dan efektif dalam situasi darurat, yang sangat penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi dampak bencana pada masyarakat.

Resiliensi Bencana Kabupaten Gorontalo dalam Konteks Kawasan Industri, Pertanian, dan Rawan Banjir-Longsor

Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki posisi strategis dalam pengembangan sektor industri dan pertanian. Kawasan-kawasan industri terus berkembang di beberapa titik wilayah, sementara sektor pertanian menjadi penopang utama perekonomian masyarakat, khususnya di daerah dataran rendah dan lereng-lereng perbukitan. Namun, kondisi geografis dan iklim tropis yang dimiliki daerah ini menjadikannya rentan terhadap bencana, terutama banjir dan tanah longsor.

Menghadapi kompleksitas ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo telah membangun pendekatan resiliensi bencana secara terintegrasi dan berkelanjutan. Resiliensi ini dirancang tidak hanya untuk merespons bencana yang terjadi, tetapi juga untuk mempersiapkan masyarakat dan infrastruktur menghadapi kemungkinan bencana di masa depan. Upaya tersebut mencakup empat komponen utama: mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana.

Dalam hal mitigasi, Kabupaten Gorontalo telah menyusun Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk memetakan daerah-daerah yang rawan terhadap banjir dan longsor. Pemetaan ini menjadi dasar dalam penataan ruang, guna mencegah pembangunan pemukiman atau kawasan industri di wilayah-wilayah berisiko tinggi. Di sektor pertanian, langkah-langkah mitigasi juga dilakukan melalui penghijauan dan reboisasi, khususnya di kawasan lereng, untuk mencegah erosi dan longsor. Selain itu, pembangunan sistem drainase yang baik turut menjadi bagian dari upaya mengurangi dampak banjir di kawasan permukiman dan lahan produktif.

Pada aspek kesiapsiagaan, masyarakat dibekali dengan berbagai pelatihan dan edukasi tentang tanggap darurat. Di sekolah-sekolah dilakukan simulasi bencana, sementara di tingkat desa dibentuk dan diperkuat relawan tangguh bencana melalui program Destana (Desa Tangguh Bencana). Peralatan darurat seperti logistik, jalur

evakuasi, serta sistem peringatan dini juga disiapkan agar masyarakat dapat mengambil tindakan cepat saat bencana terjadi.

Saat bencana benar-benar melanda, Pemerintah Daerah telah membentuk sistem tanggap darurat yang responsif, termasuk evakuasi, pendirian tempat pengungsian, serta penyaluran bantuan logistik dan medis. Fokus utama juga diberikan kepada kelompok rentan, terutama anak-anak, yang menjadi prioritas dalam perlindungan sosial saat masa krisis. Setelah fase tanggap darurat, perhatian dialihkan pada proses pemulihan pasca bencana, di mana infrastruktur diperbaiki, dan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan kembali diaktifkan secepat mungkin.

Resiliensi bencana di Kabupaten Gorontalo juga didukung oleh kebijakan anggaran yang proporsional, di antaranya melalui alokasi 2% dari APBD untuk mendukung kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), serta sinergi lintas sektor dan dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi. Namun demikian, masih terdapat tantangan, khususnya pada tingkat kesiapsiagaan masyarakat di desa-desa yang dinilai masih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan harus terus diperluas dan diperdalam.

Dengan menggabungkan pendekatan struktural dan non-struktural, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, hingga masyarakat, Kabupaten Gorontalo secara bertahap membangun ketahanan terhadap bencana. Upaya ini menjadi fondasi penting untuk menjamin keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial di tengah ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat mengganggu stabilitas wilayah. Dalam konteks ini, resiliensi bencana bukan hanya soal tanggap darurat, tetapi juga tentang menjaga kesinambungan pembangunan daerah secara menyeluruh.

2.4.1.5.2. Perlindungan Masyarakat

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlindungan masyarakat adalah kondisi dinamis di mana warga masyarakat dipersiapkan serta dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk menangani bencana, sehingga dampak bencana dapat diminimalisir, serta ikut berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat, serta kegiatan sosial. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui penegakan peraturan daerah, pencegahan

serta penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban, serta peningkatan kesadaran dan kepatuhan warga. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah, menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, agar pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, serta masyarakat dapat beraktivitas dengan aman.

Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Gorontalo, keberadaan personel Perlindungan Masyarakat (Linmas) menjadi salah satu komponen penting. Saat ini tercatat jumlah personel Linmas di Kabupaten Gorontalo sebanyak 3.444 orang yang tersebar di 19 kecamatan. Namun, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka, masih terdapat keterbatasan, terutama terkait peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan pelatihan bagi personel Linmas selama ini belum dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga berpotensi mempengaruhi kemampuan mereka dalam menjalankan tugas perlindungan masyarakat di lapangan.

Di sisi lain, penegakan ketertiban umum juga didukung oleh keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berjumlah 6 orang. Jumlah PPNS yang relatif terbatas ini menjadi tantangan tersendiri dalam menghadapi berbagai pelanggaran di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Meskipun menghadapi beberapa keterbatasan tersebut, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) yang tercatat dalam aplikasi e-SPM pada tahun 2024 mencapai 82,71%. Angka ini menunjukkan upaya maksimal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah meskipun dengan sumber daya manusia dan anggaran yang masih terbatas. Ke depan, perlu diupayakan peningkatan kapasitas personel Linmas melalui program pelatihan yang berkelanjutan, serta penguatan peran PPNS agar kualitas pelayanan perlindungan masyarakat dapat terus ditingkatkan.

2.4.1.6. Urusan Sosial

Tabel Capaian Indikator Urusan Sosial Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 – 2024 menyajikan gambaran komprehensif mengenai berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memberdayakan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, dan perempuan.

Tabel 2.38 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	53.98%	53.98%	76.23%	81.97%	75%	101.64%
2	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani	%			Tidak ada kasus		100%	
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	98.42%	98.42%	99.38%	8.55%	99.85%	8.56%
5	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
6	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%		0%	0%	0%	100%	0.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo perlu mengambil langkah-langkah strategis, seperti meningkatkan anggaran untuk program-program pemberdayaan masyarakat, melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas di lapangan, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Penguatan sistem pengawasan dan evaluasi juga menjadi penting untuk memastikan program yang dilaksanakan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan mencapai hasil yang diinginkan. Selain itu, perlu ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana bantuan sosial, agar masyarakat dapat lebih percaya dan berpartisipasi dalam program-program tersebut.

2.4.2. Fokus Layanan Urusan Wajib berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar

2.4.2.1. Urusan Tenaga Kerja

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja selama periode RPJMD, khususnya terkait aspek perencanaan ketenagakerjaan, rasio penduduk yang bekerja, tingkat partisipasi angkatan kerja, serta angka sengketa pengusaha-pekerja. Data ini menunjukkan perkembangan kinerja dari tahun 2021 hingga 2024 serta capaian terhadap target akhir periode, yang diukur menggunakan metode capaian tahun terakhir.

Tabel 2.39 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Cakupan perencanaan Ketenagakerjaan	%	0		0		100%	
2	Rasio Penduduk yang bekerja	%	97.88%	98.17%	97.52%	97.36%	96.80%	100.58%
3	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	%	65.13%	70.47%	72.89%	71.47%	69.52%	102.80%
4	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	%	24.79%	35.71%	79.37%	79.44%	21.51%	27.08%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, terlihat bahwa cakupan perencanaan ketenagakerjaan mengalami peningkatan signifikan. Pada awal periode RPJMD tahun 2021 hingga 2022, capaian indikator ini masih berada di angka 0%, kemudian melonjak menjadi 100% pada tahun 2023 dan dipertahankan hingga akhir periode tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan ketenagakerjaan telah sepenuhnya dilaksanakan sesuai target yang ditetapkan. Selanjutnya, rasio penduduk yang bekerja selama periode ini relatif stabil di angka tinggi, meskipun mengalami sedikit fluktuasi. Pada tahun 2021 tercatat sebesar 97,88%, meningkat di tahun 2022 menjadi 98,17%, kemudian menurun di tahun 2023 dan 2024 menjadi 97,52% dan 97,36%. Meski terjadi penurunan pada akhir periode, capaian ini masih melampaui target akhir dengan persentase capaian sebesar 100,58%.

Sementara itu, tingkat partisipasi angkatan kerja menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan dibanding awal periode. Dari angka 65,13% di tahun 2021,

capaian meningkat menjadi 70,47% pada 2022, kemudian naik lagi menjadi 72,89% pada 2023. Meskipun sempat turun menjadi 71,47% di tahun 2024, capaian ini tetap melebihi target akhir dengan tingkat capaian sebesar 102,80%. Kondisi ini menggambarkan adanya dorongan positif terhadap peningkatan jumlah penduduk usia kerja yang masuk dalam pasar kerja aktif sepanjang periode RPJMD.

Di sisi lain, angka sengketa pengusaha-pekerja menunjukkan kecenderungan yang kurang menggembirakan. Jika pada tahun 2021 angka sengketa masih berada di angka 24,79%, terjadi lonjakan cukup tajam pada tahun 2022 menjadi 35,71%, bahkan meningkat drastis menjadi 79,37% di tahun 2023 dan stabil di angka 79,44% pada tahun 2024. Peningkatan jumlah sengketa ini menjadi catatan penting karena capaian terhadap target akhir hanya sebesar 27,08%, menunjukkan kinerja pengendalian sengketa yang belum optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan sistem hubungan industrial yang lebih efektif, peningkatan mediasi, serta penyelesaian perselisihan hubungan kerja agar dapat meminimalisir potensi konflik antara pengusaha dan pekerja di masa mendatang.

2.4.2.2. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama periode RPJMD. Indikator yang ditampilkan mencakup partisipasi angkatan kerja perempuan, rasio kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), fasilitasi organisasi perempuan, penyusunan profil gender dan anak, penguatan Desa/Kelurahan Layak Anak, serta cakupan layanan bagi anak korban kekerasan. Data capaian tahun 2021 hingga 2024 berikut memperlihatkan dinamika hasil kinerja serta pencapaian terhadap target akhir periode.

Tabel 2.40 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	49.58%	49.58%	49.58%	60.08%	50.80%	118.27%
2	Rasio KDRT	%	0.017%	0.010%	0.007%	0.005%	0.009%	165.04%
3	Persentase Organisasi Perempuan terfasilitasi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

4	Persentase Profil Gender dan anak	%		100%	100%	100%	100%	100.00%
5	Persentase Dekela	%	0.49%	0.98%	1.46%	1.95%	9.75%	20.00%
6	Cakupan Layanan anak Korban kekerasan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terlihat adanya perkembangan positif pada beberapa indikator utama. Partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami peningkatan signifikan pada akhir periode. Setelah stagnan di angka 49,58% selama tiga tahun berturut-turut (2021-2023), terjadi lonjakan menjadi 60,08% pada tahun 2024. Kinerja ini tidak hanya menunjukkan adanya dorongan bagi peningkatan peran perempuan dalam pasar kerja, tetapi juga melampaui target akhir dengan capaian sebesar 118,27%. Hal ini menjadi indikasi keberhasilan program pemberdayaan ekonomi perempuan yang diimplementasikan sepanjang periode RPJMD.

Selanjutnya, rasio kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menunjukkan tren penurunan yang sangat baik, dari 0,017% pada tahun 2021 menjadi hanya 0,005% pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan upaya preventif dan responsif dalam perlindungan perempuan terhadap kekerasan, dengan capaian terhadap target akhir mencapai 165,04%, jauh melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Kondisi ini memperlihatkan efektivitas layanan perlindungan korban kekerasan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terkait isu kekerasan dalam rumah tangga.

Pada indikator fasilitasi organisasi perempuan dan cakupan layanan anak korban kekerasan, capaian menunjukkan angka maksimal yakni 100% secara konsisten sejak awal hingga akhir periode. Hal ini menandakan bahwa seluruh organisasi perempuan yang menjadi sasaran telah difasilitasi dengan baik dan seluruh anak korban kekerasan mendapatkan layanan sesuai kebutuhan, menjaga kesinambungan perlindungan hak anak dan penguatan kapasitas perempuan dalam pembangunan daerah.

Selain itu, penyusunan profil gender dan anak juga tercapai 100% sejak tahun 2022 hingga akhir periode, memperlihatkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi berbasis gender yang dibutuhkan untuk perencanaan program yang responsif gender dan ramah anak.

Namun demikian, indikator persentase Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) masih menunjukkan capaian yang rendah. Meskipun terjadi peningkatan bertahap dari 0,49% pada tahun 2021 menjadi 1,95% pada 2024, angka ini baru mencapai 20% dari target akhir. Kondisi ini menjadi perhatian penting, mengingat pengembangan Dekela merupakan bagian strategis dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Rendahnya capaian ini mengindikasikan perlunya percepatan program pembinaan dan fasilitasi Dekela ke depan.

2.4.2.3. Urusan Pangan

Tabel berikut menggambarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Pangan selama periode RPJMD. Indikator kinerja yang ditampilkan meliputi persentase kemandirian pangan daerah, persentase wilayah yang memiliki kawasan food estate, cakupan penanganan kerawanan pangan, serta cakupan pengawasan keamanan pangan. Data capaian tahun 2021 hingga 2024 berikut memberikan gambaran atas kondisi ketahanan pangan daerah dan upaya pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, dan berkelanjutan.

Tabel 2.41 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Pangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Kemandirian Pangan Daerah	%	31.21%	34.14%	34.14%	34.14%	100%	34.14%
2	Persentase Wilayah yang Memiliki Kawasan Food Estate	%	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	100%	57.89%
3	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pangan, terlihat bahwa kondisi kemandirian pangan daerah mengalami peningkatan pada awal periode, yaitu dari 31,21% pada tahun 2021 menjadi 34,14% pada tahun 2022, namun setelah itu tidak mengalami perkembangan hingga akhir periode RPJMD. Dengan capaian sebesar 34,14% hingga tahun 2024, target kemandirian pangan sebesar

100% belum tercapai, sehingga tingkat capaian terhadap target akhir hanya mencapai 34,14%. Stagnasi ini menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan produksi pangan lokal maupun optimalisasi pemanfaatan sumber daya pangan daerah yang perlu mendapat perhatian khusus ke depan.

Untuk indikator persentase wilayah yang memiliki kawasan food estate, capaian menunjukkan angka tetap sebesar 57,89% sepanjang periode 2021 hingga 2024. Meskipun terdapat kawasan food estate yang telah dikembangkan di sebagian besar wilayah, namun pencapaian ini belum mampu memenuhi target 100% yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan program pengembangan kawasan pangan berkelanjutan, baik melalui peningkatan kapasitas petani, perluasan areal tanam, maupun penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, pada cakupan penanganan kerawanan pangan dan cakupan pengawasan keamanan pangan, capaian menunjukkan hasil maksimal. Sejak tahun 2021 hingga 2024, kedua indikator ini berhasil mencapai angka 100%. Hal ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah mampu memberikan perlindungan penuh terhadap masyarakat dalam hal ketersediaan pangan di wilayah rawan pangan serta menjamin keamanan pangan yang beredar di masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bukti efektivitas program intervensi pangan serta pengawasan distribusi pangan yang berjalan optimal selama periode RPJMD.

2.4.2.4. Urusan Lingkungan Hidup

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup selama periode RPJMD. Indikator yang ditampilkan mencakup aspek perencanaan, kualitas lingkungan, pengawasan limbah, kepatuhan usaha, partisipasi masyarakat, hingga pengelolaan persampahan. Data capaian dari tahun 2021 hingga 2024 ini memberikan gambaran tentang sejauh mana efektivitas pelaksanaan program pelestarian lingkungan di Kabupaten Gorontalo dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Tabel 2.42 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		

1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	4%	0%	0%	2%	7%	0.00%
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	46.36	51.38	60	56.67	52.6	107.74%
3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	46.47	46.48	55.16	53.70	55.73	98.98%
4	Persentase Pengawasan Penghasil Limbah B3	%		100%	88%	100%	100%	100.00%
5	Persentase tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha.	%		25.00%	35.80%	45%	75%	60.00%
6	Persentase pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	%		58%	10%	20%	100%	88.33%
7	Persentase Aduan Lingkungan Hidup Yang Tertangani	%		100.00%	100%	133%	100%	133.00%
8	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%	21.05%	26.32%	31.58%	35.84%	47.37%	75.66%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Berdasarkan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, terlihat bahwa hasil yang diperoleh masih cukup beragam, dengan capaian optimal pada beberapa indikator, namun masih terdapat pula indikator yang belum menunjukkan perbaikan signifikan hingga akhir periode RPJMD. Indikator persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup, misalnya, mengalami capaian sangat rendah, yakni hanya mencapai 2% pada tahun 2024 dari target sebesar 7%, dengan capaian terhadap target akhir sebesar 0%. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian serius terhadap penyusunan dan pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup sebagai landasan kebijakan pengelolaan lingkungan daerah.

Untuk Indeks Kualitas Air, capaian menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik. Dari angka 46,36 pada tahun 2021 meningkat menjadi 56,67 pada tahun 2024, bahkan melampaui target akhir periode sebesar 52,6 dengan capaian terhadap target sebesar 107,74%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas air yang signifikan sebagai hasil dari penguatan pengawasan limbah cair dan peningkatan kesadaran pengelolaan air bersih. Hal serupa juga terjadi pada Indeks Tutupan Lahan yang meningkat dari 46,47 pada tahun 2021 menjadi 53,70 pada tahun 2024, meskipun sedikit di bawah target 55,73 dengan capaian akhir sebesar 98,98%, menandakan bahwa upaya rehabilitasi dan perlindungan kawasan hijau telah berjalan dengan cukup efektif.

Dalam aspek pengawasan limbah, capaian persentase pengawasan penghasil limbah B3 telah menunjukkan kinerja optimal sejak tahun 2022 dengan capaian 100% hingga akhir periode. Namun, untuk persentase tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha, meskipun mengalami peningkatan dari 25% pada tahun 2022 menjadi 45% pada 2024, capaian ini masih jauh dari target 75%, dengan capaian terhadap target akhir sebesar 60%. Hal ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam memastikan seluruh pelaku usaha menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan.

Sementara itu, indikator persentase pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup menunjukkan capaian yang masih rendah. Meski meningkat menjadi 20% pada tahun 2024, angka tersebut masih jauh dari target 100%, dengan capaian terhadap target akhir sebesar 88,33%, menandakan perlunya penguatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya pelestarian lingkungan.

Untuk persentase aduan lingkungan hidup yang tertangani, capaian justru menunjukkan kelebihan dari target. Pada tahun 2023 mencapai 133%, walaupun kembali ke 100% pada 2024, dengan capaian kumulatif terhadap target akhir mencapai 133%. Hal ini menunjukkan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani aduan lingkungan hidup berjalan cukup efektif.

Terakhir, capaian pada persentase cakupan area pelayanan persampahan mengalami tren peningkatan dari 21,05% pada 2021 menjadi 35,84% pada 2024. Meski demikian, capaian ini masih belum optimal terhadap target akhir sebesar 47,37%, dengan capaian terhadap target akhir sebesar 75,66%, sehingga perlu adanya percepatan dalam perluasan layanan persampahan, baik melalui peningkatan armada, perluasan area layanan, maupun pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah.

2.4.2.4.1. Persampahan

Dokumen Kebijakan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Pengelolaan Persampahan menetapkan fokus pada pengelolaan sampah dengan dua pendekatan utama: pengurangan sampah dari sumbernya dan pengolahan sampah di TPS3R atau pengangkutannya ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dengan strategi ini, diharapkan cakupan layanan persampahan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga pengelolaan sampah menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Tabel 2.43 Jumlah Timbulan Sampah Per Kecamatan Kabupaten Gorontalo Tahun 2020 – 2023

Kecamatan	2020	2021	2022	2023
Telaga	3393.04	3420.05	3452.608	3534.37
Telaga Biru	4379.854	4417.81	4462.928	4821.8
limboto	7270.216	7307.59	7357.378	7760.92
Limboto Barat	3701.538	3717.01	3738.33	3881.7
Tibawa	5956.508	5982.50	6017.974	6327.06
Telaga Jaya	1843.25	1871.72	1903.694	1969.69
Tilango	2386.37	2434.40	2487.11	2441.7
Batudaa	2092.18	2106.49	2124.154	2226.5
Batudaa Pantai	1735.356	1744.55	1756.38	1827.92
Bongomeme	2785.68	2802.62	2823.932	3017.09
Tabongo	2669.464	2691.95	2718.666	2832.69
Dungaliyo	2489.884	2498.35	2510.616	2622.89
Tolangohula	3318.288	3327.78	3342.378	3528.09
Mootilango	2764.072	2774.58	2789.33	2945.7
Boliyohuto	2458.056	2467.55	2480.832	2633.69
Asparaga	1908.22	1913.04	1920.922	2038.74
Pulubala	3613.792	3638.76	3669.418	3861.12
Biluhu	1206.982	1212.82	1220.706	1269.18
Bilato	1420.872	1433.14	1447.59	1522.78

Sumber: DLH dan SDA Kabupaten Gorontalo, 2024.

Data jumlah timbulan sampah per kecamatan di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan peningkatan yang konsisten di hampir seluruh wilayah, yang mengindikasikan meningkatnya aktivitas masyarakat dan konsumsi yang berdampak langsung pada jumlah sampah. Kecamatan Limboto, Tibawa, dan Telaga Biru mencatat volume sampah tertinggi di kabupaten ini, sementara kecamatan seperti Biluhu dan Bilato mencatat angka yang lebih rendah namun tetap mengalami kenaikan.

Peningkatan timbulan sampah ini menghadirkan tantangan serius dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo. Kecamatan dengan volume sampah yang tinggi memerlukan penanganan lebih intensif untuk mencegah penumpukan dan dampak lingkungan yang berpotensi memburuk. Salah satu tantangan utama adalah kapasitas infrastruktur dan fasilitas penanganan sampah di TPS atau TPA yang terbatas dan belum sebanding dengan peningkatan volume sampah. Selain itu, tingkat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah di sumbernya masih perlu ditingkatkan agar volume sampah dapat dikendalikan sejak awal.

Mekanisme penanganan sampah yang efektif harus didasarkan pada dua pendekatan utama: pengurangan sampah di sumbernya dan optimalisasi pengolahan sampah di TPS3R atau TPA. Pengurangan sampah di sumbernya dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memilah sampah organik dan anorganik serta mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengurangan sampah dan dampak positifnya juga diperlukan untuk mengubah perilaku masyarakat secara berkelanjutan.

Optimalisasi TPS3R atau TPA memerlukan peningkatan kapasitas infrastruktur serta penerapan teknologi yang lebih efektif dalam pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Dukungan anggaran dan kebijakan yang konsisten dari pemerintah daerah sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program ini serta pencapaian target pengelolaan sampah yang telah direncanakan. Dengan pendekatan ini, pengelolaan sampah di Kabupaten Gorontalo dapat lebih efektif dan berdampak positif bagi lingkungan serta kesehatan masyarakat.

Tabel 2.44 Kondisi dan Kapasitas Pengangkutan Sampah Kabupaten Gorontalo

Kendaraan Operasional	Jumlah Unit	Daya Angkut Per Hari (Ton/hari)
Dump Truck	5	10.60
Arm Roll	3	6.36 ton
Pick Up L300	0	0.00
Getor/Roda 3	6	4.02
Mega Carry Pick Up	0	0.00

Sumber: DLH dan SDA Kabupaten Gorontalo, 2024.

Dari tabel kondisi dan kapasitas pengangkutan sampah, terlihat bahwa armada pengangkutan yang tersedia sangat terbatas untuk menangani timbulan sampah yang besar di wilayah ini. Kabupaten Gorontalo hanya memiliki 5 unit dump truck, 3 unit arm roll, dan 6 unit kendaraan roda tiga (Getor), dengan total kapasitas angkut per hari sebesar 20,98 ton. Dengan jumlah kendaraan operasional yang terbatas, daya angkut ini tidak memadai untuk mengatasi total timbulan sampah harian yang semakin meningkat.

Sementara itu, tabel jumlah sampah yang terangkut ke TPA menunjukkan ketidaksesuaian antara timbulan sampah dengan jumlah sampah yang berhasil ditangani atau diangkut ke TPA. Pada tahun 2023, dari total timbulan sampah sebesar 58,224,95 ton, hanya sekitar 5,989.135 ton yang terangkut ke TPA. Hal ini mengindikasikan adanya keterbatasan dalam kapasitas pengangkutan sampah, yang

menyebabkan sebagian besar sampah tertinggal dan berpotensi mencemari lingkungan. Ketidakmampuan menangani sampah dalam jumlah yang signifikan ini menunjukkan perlunya peningkatan armada dan pengaturan ulang pola pengangkutan sampah agar lebih efisien.

Penambahan jumlah armada pengangkut sampah, terutama jenis dump truck dan arm roll yang memiliki kapasitas angkut lebih besar dapat menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, perlu adanya penjadwalan pengangkutan yang lebih terstruktur untuk memaksimalkan penggunaan armada yang ada. Dalam jangka pendek, pemerintah daerah dapat mempertimbangkan penggunaan sistem pengangkutan bergilir di kecamatan dengan timbulan sampah tinggi seperti Limboto, Tibawa, dan Telaga Biru, untuk meminimalisasi penumpukan sampah.

Di sisi lain, optimalisasi TPS3R di berbagai kecamatan dapat menjadi solusi untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut ke TPA. Pengolahan sampah di TPS3R dapat mengurangi beban pada TPA dengan memproses sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkan sampah anorganik untuk didaur ulang. Upaya penguatan fasilitas TPS3R ini perlu didukung dengan edukasi kepada masyarakat mengenai pemilahan sampah di sumbernya agar dapat mengurangi volume sampah sejak awal. Peningkatan armada, optimalisasi TPS3R, dan pengelolaan yang lebih terstruktur merupakan langkah-langkah yang perlu diambil secara segera untuk mencapai target pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.45 Cakupan area pelayanan persampahan Kabupaten Gorontalo

Uraian	2021	2022	2023	2024
Cakupan area pelayanan persampahan	6,196	7,421.00	7,144.176	5,989.135

Sumber: DLH dan SDA Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.4.2.4.2. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tabel berikut menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup Kabupaten Gorontalo selama periode pelaksanaan RPJMD, yang mencakup rentang tahun 2021 hingga 2024. Tabel ini memuat indikator-indikator utama yang menggambarkan berbagai aspek pengelolaan lingkungan hidup, mulai dari perencanaan, kualitas lingkungan, hingga pelayanan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan masyarakat. Data ini menjadi salah satu tolok ukur dalam mengevaluasi sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan

kualitas lingkungan dan pemenuhan target-target pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup.

Tabel 2.46 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	4%	0%	0%	2%	7%	0.00%
2	Indeks Kualitas Air	Indeks	46.36	51.38	60	56.67	52.6	107.74%
3	Indeks Tutupan Lahan	Indeks	46.47	46.48	55.16	53.70	55.73	98.98%
4	Persentase Pengawasan Penghasil Limbah B3	%		100%	88%	100%	100%	100.00%
5	Persentase tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha.	%		25.00%	35.80%	45%	75%	60.00%
6	Persentase pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	%		58%	10%	20%	100%	88.33%
7	Persentase Aduan Lingkungan Hidup Yang Tertangani	%		100.00%	100%	133%	100%	133.00%
8	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	%	21.05%	26.32%	31.58%	35.84%	47.37%	75.66%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Berdasarkan data tersebut, capaian persentase pemenuhan dokumen perencanaan lingkungan hidup mengalami fluktuasi, dengan capaian tertinggi hanya sebesar 4% pada tahun 2021, menurun menjadi 0% pada 2022 dan 2023, serta sedikit meningkat menjadi 2% pada 2024. Kondisi ini menunjukkan capaian yang jauh di bawah target akhir sebesar 7%, atau hanya 0% dari target yang tercapai.

Indeks Kualitas Air menunjukkan tren yang cenderung meningkat hingga tahun 2023 mencapai 60, meskipun sedikit menurun menjadi 56,67 pada 2024. Meski demikian, capaian ini telah melampaui target akhir dengan pencapaian 107,74%. Sementara itu, Indeks Tutupan Lahan menunjukkan peningkatan dari 46,47 pada 2021 menjadi 53,70 pada 2024, mendekati target akhir sebesar 55,73 dengan capaian 98,98%.

Untuk pengawasan penghasil limbah B3, capaian selalu berada pada angka 100% sejak 2022 hingga 2024, yang berarti target pengawasan ini sepenuhnya tercapai. Tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha mengalami peningkatan signifikan dari 25% pada 2022 menjadi 45% pada 2024, meskipun capaian ini baru 60% terhadap target akhir sebesar 75%.

Persentase pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup sempat turun drastis dari 58% pada 2022 menjadi 10% pada 2023, namun meningkat menjadi 20% pada 2024. Kendati demikian, capaian ini masih jauh dari target 100%, dengan pencapaian hanya 88,33%.

Adapun persentase aduan lingkungan hidup yang tertangani bahkan melampaui target, dengan capaian sebesar 133% dari target 100%. Cakupan area pelayanan persampahan juga menunjukkan tren positif, meningkat dari 21,05% pada 2021 menjadi 35,84% pada 2024, meski belum mencapai target 47,37%, dengan tingkat capaian 75,66%.

2.4.2.4.3. Inventarisasi Gas Rumah Kaca

Tabel berikut menyajikan data emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor limbah di Kabupaten Gorontalo dari tahun 2020 hingga 2023

Tabel 2.47 Inventarisasi GRK Sektor Limbah di Kabupaten Gorontalo

Uraian	2020	2021	2022	2023
Penduduk (Jiwa)	393,107	395,635	398,801	418,244
Konsumsi Protein (gram/kapita/hari) *	-	-	-	-
Data Timbulan Sampah (Ton)	57,393.62	57,762.71	58,224.95	61,063.62
Volume Sampah masuk Ke TPA (Ton/Tahun)	6,196	7,421	7,144.176	5,989.135
Persentase Sampah yang Terangkut ke TPA	10.80%	12.85%	12.27%	9.81%
Persentase pengolahan air Limbah Domestik (septi tank) *	-	-	-	-

*Sumber: DLH dan SDA Kabupaten Gorontalo, 2024. *Data tidak tersedia*

Berdasarkan data tersebut, jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan dari 393.107 jiwa pada tahun 2020 menjadi 418.244 jiwa pada tahun 2023. Peningkatan jumlah penduduk ini berdampak langsung pada timbulan sampah yang terus bertambah setiap tahunnya, dari 57.393,62 ton pada tahun 2020 menjadi 61.063,62 ton pada tahun 2023.

Namun, meskipun volume sampah yang dihasilkan terus meningkat, jumlah sampah yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) justru mengalami fluktuasi. Persentase sampah yang terangkut ke TPA meningkat dari 10,80% pada

tahun 2020 hingga mencapai 12,85% pada tahun 2021, namun kembali menurun menjadi 9,81% pada tahun 2023. Penurunan persentase ini menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengelolaan sampah, meskipun timbulan sampah semakin meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk.

Keterbatasan data pada beberapa indikator penting lainnya, seperti konsumsi protein dan pengolahan air limbah domestik, menyulitkan penilaian yang lebih komprehensif terhadap potensi emisi GRK dari sektor limbah. Ketiadaan data konsumsi protein, yang berhubungan dengan timbulan sampah organik, dan pengolahan air limbah domestik juga menunjukkan bahwa aspek-aspek pengelolaan lingkungan ini perlu perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitas pengendalian emisi di sektor limbah.

2.4.2.4. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memperlihatkan perkembangan layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Gorontalo selama periode RPJMD. Capaian indikator difokuskan pada layanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, hingga penyajian data kependudukan melalui profil kependudukan. Secara umum, capaian kinerja pada bidang ini menunjukkan hasil yang baik meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target maksimal.

Tabel 2.48 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Cakupan layanan pendaftaran penduduk	%	96.31%	97.05%	98.96%	97.19%	100%	97.19%
2	Cakupan layanan pencatatan sipil	%	92.59%	93.76%	96.00%	94.24%	100%	94.24%
3	Cakupan pengelolaan informasi adminduk	%	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%

4	Persentase data kependudukan yang tersaji melalui profil kependudukan	%	75.00%	125.00%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Capaian cakupan layanan pendaftaran penduduk menunjukkan tren peningkatan dari 96,31% pada tahun 2021 hingga mencapai angka tertinggi sebesar 98,96% di tahun 2023, meskipun kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 97,19% pada 2024. Capaian ini relatif tinggi, namun belum sepenuhnya memenuhi target akhir sebesar 100%, dengan capaian terhadap target akhir sebesar 97,19%. Hal ini menandakan bahwa sebagian kecil penduduk masih belum terlayani dalam pendaftaran administrasi kependudukan, sehingga upaya jemput bola atau pelayanan berbasis desa/kelurahan perlu terus diperkuat.

Pada indikator cakupan layanan pencatatan sipil, capaian mengalami peningkatan dari 92,59% pada tahun 2021 menjadi 96,00% di tahun 2023, tetapi kemudian sedikit menurun pada 2024 menjadi 94,24%. Sama seperti layanan pendaftaran penduduk, meskipun sudah mencapai lebih dari 90%, angka ini masih belum menyentuh target 100%, dengan capaian terhadap target akhir sebesar 94,24%. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian masih memerlukan akselerasi layanan untuk menjangkau seluruh penduduk.

Sementara itu, capaian pada cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan telah menunjukkan hasil optimal sejak 2021 dengan capaian konsisten sebesar 100% hingga akhir periode RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data kependudukan melalui sistem informasi telah berjalan baik dan terintegrasi, mendukung akurasi serta validitas data kependudukan yang dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik dan perencanaan pembangunan.

Pada indikator persentase data kependudukan yang tersaji melalui profil kependudukan, capaian menunjukkan hasil yang sangat baik, bahkan sempat mencapai 125% pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, capaian stabil di angka 100%, sesuai target yang telah ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa penyajian data kependudukan dalam bentuk profil yang informatif dan komprehensif telah sepenuhnya terimplementasi dengan baik, mendukung transparansi serta kemudahan akses informasi bagi pemangku kepentingan.

2.4.2.5. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam meningkatkan kapasitas desa dan partisipasi masyarakat di Kabupaten Gorontalo selama periode RPJMD. Fokus capaian diarahkan pada peningkatan status desa mandiri, kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan desa, serta pemberdayaan lembaga kemasyarakatan desa. Secara umum, capaian kinerja di bidang ini menunjukkan hasil yang positif, bahkan beberapa indikator mampu melampaui target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.49 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Desa mandiri	%	0.00%	6.80%	11.52%	30.89%	9.40%	122.54%
2	Indeks kepuasan layanan pemerintah desa terhadap masyarakat	%	65	84.70	88.74	88.7	88.31-100	100.00%
3	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang terberdayakan	%	50%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Indikator persentase desa mandiri mengalami peningkatan yang cukup pesat dari 0% pada tahun 2021 menjadi 30,89% pada akhir tahun 2024. Capaian ini melampaui target akhir yang ditetapkan sebesar 9,40%, dengan capaian terhadap target akhir mencapai 122,54%. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan dalam mendorong desa menuju kemandirian melalui penguatan ekonomi lokal, pengelolaan potensi desa, serta peningkatan tata kelola pemerintahan desa. Meski demikian, upaya untuk menjaga keberlanjutan status desa mandiri tetap perlu menjadi prioritas, terutama dalam aspek penguatan kapasitas kelembagaan desa dan pemanfaatan dana desa yang optimal.

Pada indikator indeks kepuasan layanan pemerintah desa terhadap masyarakat, capaian juga menunjukkan tren yang sangat baik, meningkat dari angka 65% pada tahun 2021 menjadi 88,74% pada tahun 2023, dan stabil di angka 88,7% pada tahun

2024. Dengan target akhir berada pada rentang 88,31%-100%, capaian ini telah memenuhi target, bahkan berada dalam kategori layanan sangat baik. Hal ini menandakan bahwa pelayanan pemerintah desa semakin responsif, transparan, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat desa, meskipun perlu terus didorong agar mencapai tingkat kepuasan maksimal.

Selanjutnya, capaian pada indikator persentase lembaga kemasyarakatan desa yang terberdayakan telah menunjukkan hasil optimal dengan capaian 100% sejak tahun 2022 hingga akhir periode RPJMD. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh lembaga kemasyarakatan desa, seperti LPM, PKK, Karang Taruna, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya telah berfungsi aktif dalam mendukung pembangunan desa serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan.

2.4.2.5.1. Prasarana Perkotaan dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Di Kabupaten Gorontalo, terdapat 14 Kantor Kelurahan dan 191 Kantor Desa yang menjadi pusat administrasi pemerintahan lokal. Setiap kelurahan dan desa memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua lembaga ini dibentuk atas inisiatif masyarakat sebagai mitra pemerintah untuk menampung dan menyampaikan aspirasi terkait bidang pemerintahan. Keberadaan LPM dan BPD mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Gorontalo, LPM dan BPD berkontribusi secara signifikan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, hingga tingkat kabupaten. Peran aktif ini membantu menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan partisipatif.

2.4.2.5.2. Persentase PKK Aktif

PKK adalah sebuah gerakan yang berakar dari masyarakat, dengan perempuan sebagai penggerak utamanya. Peran mereka sangat penting dalam membangun, membina, dan membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat guna mencapai kesejahteraan keluarga. Di Kabupaten Gorontalo, terdapat 14 Kelurahan, 191 Desa, dan 19 Kecamatan, sehingga terdapat sejumlah 224 organisasi PKK di masing-masing wilayah tersebut. Organisasi-organisasi ini aktif dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan. Sebagai wadah organisasi perempuan di tingkat desa dan kelurahan, PKK memainkan

peran penting dalam menciptakan kesejahteraan keluarga. Keaktifan PKK dalam menjalankan berbagai program kesejahteraan keluarga menjadi kekuatan mendasar dalam memperkuat setiap keluarga. Pembangunan dimulai dari lingkup terkecil, yaitu rumah tangga, di mana PKK berperan secara strategis dalam membantu pemerintah merealisasikan visi dan misinya pada tingkat paling dasar. Pemantauan terhadap kegiatan PKK sangat penting untuk memastikan usaha-usaha di tingkat akar rumput berjalan dengan baik dan efektif dalam mendukung program-program pembangunan. Peran perempuan melalui PKK menjadi fondasi penting dalam memperkuat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2.4.2.5.3. Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) merupakan sebuah gerakan kesehatan yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat dengan prinsip gotong royong untuk meningkatkan derajat kesehatan di lingkungan sekitarnya. UKBM hadir sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan, di mana masyarakat berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program kesehatan yang relevan dengan kebutuhan lokal.

Peran UKBM sangat strategis dalam menunjang pembangunan daerah, khususnya dalam bidang kesehatan masyarakat. Melalui UKBM, masyarakat dapat ikut serta dalam berbagai program kesehatan, seperti posyandu, posbindu, dan desa siaga, yang bertujuan meningkatkan kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit, serta pengelolaan kesehatan lingkungan. Keberadaan UKBM di tingkat desa atau kelurahan juga mampu membantu pemerintah daerah dalam mencapai target-target pembangunan kesehatan, terutama dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terpencil atau kurang terjangkau.

Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat, UKBM turut memperkuat sistem kesehatan yang berbasis komunitas, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan derajat kesehatan ini juga memiliki dampak positif pada produktivitas masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan, menjadikan UKBM sebagai pilar penting dalam pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal.

2.4.2.6. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama periode RPJMD menunjukkan dinamika

yang cukup signifikan, meskipun capaian terhadap target akhir belum sepenuhnya optimal pada beberapa indikator utama. Fokus utama dalam bidang ini diarahkan pada pengendalian laju pertumbuhan penduduk, pengaturan angka kelahiran (Total Fertility Rate/TFR), serta menjaga rata-rata jumlah anak per keluarga sesuai dengan standar ideal dua anak.

Tabel 2.50 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	0.64%	1.552%	1.667%	1.37%	0.15%	10.94%
2	Total Fertiliy Rate	%	2.30%	2.29%	2.29%		1%	43.67%
3	Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2.23	2.29	0.92	0.93	2 Anak	215.38%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Pada indikator laju pertumbuhan penduduk (LPP), capaian menunjukkan adanya tren fluktuasi selama periode 2021–2024. LPP tercatat sebesar 0,64% pada tahun 2021 dan mengalami peningkatan hingga mencapai 1,667% pada tahun 2023, sebelum turun menjadi 1,37% di tahun 2024. Namun, capaian ini masih jauh di atas target akhir RPJMD sebesar 0,15%, dengan capaian terhadap target akhir hanya sebesar 10,94%. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana dan pengendalian kelahiran masih menghadapi tantangan besar, terutama dalam penguatan edukasi keluarga berencana, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemerataan akses layanan KB di wilayah perdesaan.

Selanjutnya, indikator Total Fertility Rate (TFR) atau rata-rata jumlah kelahiran per wanita usia subur juga menunjukkan capaian yang masih cukup tinggi dibandingkan target. Selama periode 2021 hingga 2023, angka TFR berada pada kisaran 2,29% hingga 2,30%, sementara target akhir RPJMD ditetapkan sebesar 1%. Dengan capaian terhadap target akhir sebesar 43,67%, indikator ini menggambarkan bahwa penurunan angka kelahiran belum sepenuhnya berhasil ditekan sesuai harapan. Hal ini memerlukan penguatan kembali program KB melalui penyuluhan yang lebih intensif, peningkatan pelayanan kontrasepsi, serta mendorong partisipasi aktif keluarga dalam program dua anak cukup.

Adapun indikator rata-rata jumlah anak per keluarga justru menunjukkan capaian yang sangat tinggi melampaui target. Rata-rata jumlah anak per keluarga menurun signifikan dari 2,23 anak pada tahun 2021 menjadi 0,92 anak pada tahun 2023 dan sedikit meningkat menjadi 0,93 anak di tahun 2024. Dengan target akhir RPJMD sebesar 2 anak, capaian indikator ini menunjukkan persentase keberhasilan yang sangat tinggi yaitu 215,38%. Capaian ini mengindikasikan adanya perubahan pola pikir sebagian masyarakat yang mulai memilih memiliki jumlah anak lebih sedikit, meskipun perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut terhadap data ini mengingat adanya ketidaksesuaian dengan tren TFR dan LPP yang masih tinggi.

2.4.2.7. Urusan Perhubungan

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Gorontalo menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi pelaksanaan RPJMD, khususnya dalam bidang transportasi dan sarana pendukung mobilitas masyarakat. Melalui pengukuran indikator tingkat ketertiban lalu lintas dan pemenuhan persyaratan pembangunan pelabuhan, pemerintah daerah berupaya memastikan peningkatan kualitas pelayanan perhubungan yang mendukung konektivitas wilayah dan kelancaran aktivitas ekonomi.

Tabel 2.51 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Tingkat ketertiban penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diwilayah Kabupaten Gorontalo	%	73.58%	73.70%	69.31%	72.34%	100%	72.34%
2	Persentase Pemenuhan Persyaratan Pembangunan Pelabuhan Bilato	%			0%		100%	0.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Berdasarkan data capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan Kabupaten Gorontalo, indikator tingkat ketertiban penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, tingkat ketertiban tercatat sebesar 73,58%, sedikit meningkat menjadi 73,70% di tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi penurunan signifikan hingga 69,31%, sebelum kembali naik menjadi 72,34% pada tahun 2024. Dengan capaian ini, tingkat ketertiban

lalu lintas hanya mampu mencapai 72,34% dari target akhir sebesar 100%, menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketertiban lalu lintas belum optimal dan masih memerlukan perhatian lebih, terutama dalam aspek pengawasan dan penegakan aturan.

Sementara itu, capaian kinerja terkait persentase pemenuhan persyaratan pembangunan Pelabuhan Bilato menunjukkan hasil yang belum progresif. Sepanjang periode pengukuran hingga tahun 2024, capaian indikator ini tetap berada pada angka 0%, jauh dari target akhir sebesar 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan Pelabuhan Bilato masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi perencanaan, perizinan, maupun pelaksanaan fisik di lapangan, sehingga diperlukan langkah strategis untuk percepatan realisasi pembangunan pelabuhan sebagai salah satu infrastruktur pendukung konektivitas dan perekonomian daerah.

2.4.2.8. Urusan Komunikasi dan Informatika

Dalam konteks digitalisasi, indeks SPBE menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana pemerintahan daerah dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, serta sejauh mana layanan publik dapat diakses secara cepat dan mudah oleh masyarakat. Melalui pemanfaatan teknologi, diharapkan proses administrasi dan pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih efektif, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Sub bab ini akan membahas berbagai kebijakan dan langkah strategis yang perlu diambil untuk meningkatkan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik, termasuk pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan sistem informasi yang terintegrasi. Dengan demikian, tujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern dan responsif dapat tercapai, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif.

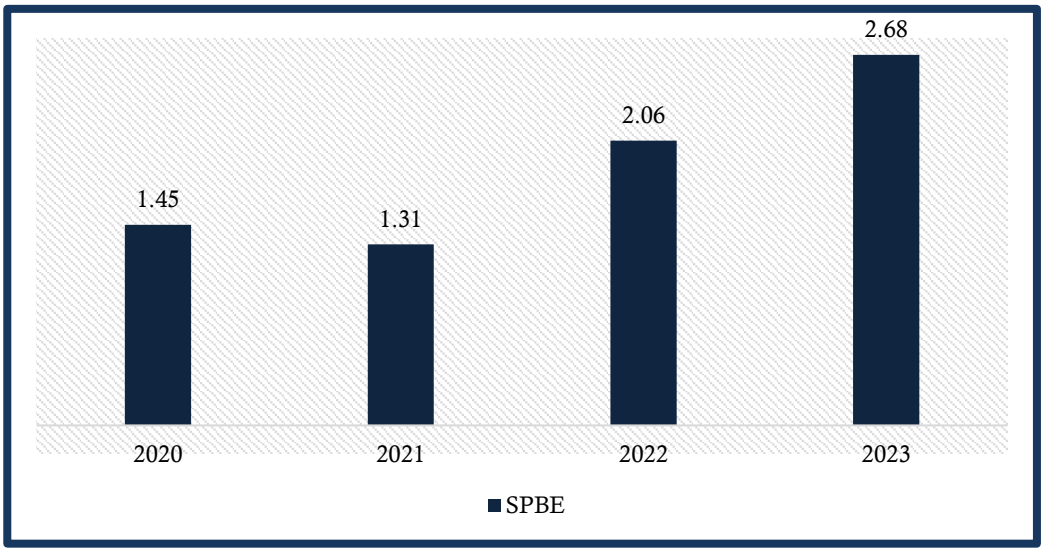

Sumber: Data BPS Kabupaten Gorontalo, 2024

Gambar 2.18 Indeks SPBE Kabupaten Gorontalo Tahun 2020–2023

Dari data yang tercantum, terlihat bahwa skor SPBE Kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2023. Pada tahun 2020, skor SPBE tercatat sebesar 1.45, kemudian menurun menjadi 1.31 pada tahun 2021. Penurunan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya dukungan infrastruktur teknologi, keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam penggunaan sistem elektronik, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya SPBE di kalangan pemerintah daerah. Namun, memasuki tahun 2022, terjadi lonjakan yang cukup signifikan menjadi 2.06, dan kembali meningkat menjadi 2.68 pada tahun 2023. Untuk meningkatkan capaian SPBE di Kabupaten Gorontalo, perlu adanya pelatihan yang berkelanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam menggunakan teknologi informasi. Selain itu, pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur teknologi, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Di sisi lain, indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah tidak bisa direalisasikan karena membutuhkan survey. Sedangkan Anggaran survey telah rasionalisasi.

Tabel 2.52 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah	Indeks	0	0	0	0	75 (A)	0.00%

2	Persentase penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	%	31.71%	17.07%	13.21%	21.00%	76.47%	27.46%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.4.2.9. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi dan UKM memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Mengingat peran penting ini, dukungan terhadap koperasi dan UKM menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah. Melalui pemberdayaan koperasi dan UKM yang berkelanjutan, diharapkan sektor ini dapat semakin kuat dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan perekonomian daerah.

Tabel 2.53 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT)	%	19.51%	40.24%	0.15%	9.35%	84.80%	11.02%
2	Persentase Pengurus Koperasi Tersertifikat	%	4.58%	11.14%	6.14%	11.14%	27.32%	40.79%
3	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Difasilitasi	%	0.90%	0.69%	6.55%	0.48%	3.18%	15.04%
4	Kontribusi Startup Terhadap UMKM	UMKM	1.51%	0.68%	0.15%	0.18%	1.80%	9.8%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan Koperasi dan UKM di Kabupaten Gorontalo selama periode 2021–2024 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, dengan sebagian besar indikator masih berada jauh di bawah target akhir RPJMD. Pada indikator persentase koperasi yang melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT), terjadi peningkatan dari 19,51% pada tahun 2021 menjadi 40,24% pada tahun 2022, namun anjlok tajam menjadi 0,15% di tahun 2023 dan sedikit membaik menjadi 9,35% pada tahun 2024. Dengan capaian ini, persentase koperasi yang melaksanakan RAT hanya mencapai 11,02% dari target akhir sebesar 84,80%, yang mencerminkan lemahnya tata kelola koperasi serta rendahnya kepatuhan koperasi dalam menjalankan kewajiban kelembagaan.

Selanjutnya, pada indikator persentase pengurus koperasi tersertifikasi, capaian relatif stagnan dengan peningkatan terbatas. Dari 4,58% pada tahun 2021 naik menjadi 11,14% di tahun 2022, turun menjadi 6,14% pada 2023, lalu kembali pada angka 11,14% pada 2024. Meski menunjukkan sedikit perbaikan, capaian akhir ini baru memenuhi 40,79% dari target sebesar 27,32%, yang menandakan bahwa program peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi masih belum berjalan optimal.

Untuk persentase UMKM yang difasilitasi, capaian juga menunjukkan ketidakkonsistenan. Pada tahun 2021 tercatat 0,90%, menurun menjadi 0,69% di tahun 2022, melonjak signifikan menjadi 6,55% di tahun 2023, namun kembali turun drastis menjadi 0,48% pada 2024. Dengan demikian, capaian terhadap target akhir sebesar 3,18% hanya terpenuhi 15,04%, menandakan bahwa pendampingan dan fasilitasi bagi UMKM masih belum merata dan berkelanjutan.

Terakhir, kontribusi startup terhadap UMKM menunjukkan tren rendah sepanjang periode evaluasi. Dari 1,51% di tahun 2021 turun menjadi 0,68% di tahun 2022, kemudian turun lagi ke 0,15% pada 2023 dan sedikit naik menjadi 0,18% pada 2024. Capaian ini baru memenuhi 9,8% dari target akhir sebesar 1,80%, menunjukkan bahwa sinergi antara startup dengan pengembangan UMKM di Kabupaten Gorontalo masih minim dan membutuhkan perhatian lebih serius, khususnya dalam hal inkubasi bisnis dan akses pasar berbasis teknologi.

2.4.2.10. Urusan Penanaman Modal

Penanaman modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menarik investor. Melalui upaya yang terencana dan berkelanjutan, urusan penanaman modal diarahkan untuk mengoptimalkan potensi lokal, memperbaiki iklim investasi, dan mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Tabel 2.54 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Pertumbuhan Investasi	%	98.67%	-13.72%	228.25%	-54.34%	5.48%	-991.58%
2	Persentase Peningkatan Investasi	%	77.40%	-112.39%	241.97%	-282.59%	14%	-2018.52%
3	Indeks Kepuasan Investor	Bobot	0	3.70	3.55	3.55	3 Bobot	118.33%

4	Nilai investasi	Rupiah	637,115,332,538	549,704,540,000	1,804,425,867,400	823,924,050,957	1,017,642,226,441	80.96%
5	Persentase Data Yang Tersaji Melalui Sistem Informasi Penanaman Modal	%		100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Capaian kinerja urusan penanaman modal Kabupaten Gorontalo sepanjang periode 2021–2024 menunjukkan ketidakstabilan yang cukup tajam, terutama pada indikator pertumbuhan investasi dan persentase peningkatan investasi yang mengalami fluktuasi ekstrem. Pertumbuhan investasi pada tahun 2021 tercatat positif sebesar 98,67%, namun turun drastis menjadi -13,72% di tahun 2022, melonjak signifikan menjadi 228,25% pada tahun 2023, sebelum kembali anjlok ke angka -54,34% pada 2024. Dengan kondisi ini, capaian terhadap target akhir sebesar 5,48% justru menunjukkan nilai negatif sebesar -991,58%, menandakan bahwa realisasi investasi tidak stabil dan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal daerah.

Hal serupa terjadi pada indikator persentase peningkatan investasi yang pada 2021 mencapai 77,40%, kemudian mengalami penurunan tajam menjadi -112,39% di 2022, melonjak tinggi pada 2023 sebesar 241,97%, lalu kembali terpuruk pada 2024 menjadi -282,59%. Akibat ketidakstabilan ini, capaian terhadap target akhir sebesar 14% justru mengalami deviasi besar hingga -2018,52%, menunjukkan bahwa penguatan iklim investasi belum berjalan secara konsisten.

Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, capaian indeks kepuasan investor justru menunjukkan hasil yang stabil dan melebihi target. Setelah tidak terdapat capaian pada 2021, indeks kepuasan investor mencapai 3,70 pada 2022, sedikit menurun ke angka 3,55 pada 2023 dan bertahan di angka tersebut hingga 2024. Dengan target akhir sebesar 3 bobot, capaian ini menunjukkan keberhasilan sebesar 118,33%, yang mengindikasikan bahwa pelayanan kepada investor relatif baik meskipun capaian investasi fluktuatif.

Untuk indikator nilai investasi, tren juga menunjukkan dinamika tajam. Nilai investasi tercatat sebesar Rp637,1 miliar pada 2021, turun menjadi Rp549,7 miliar pada 2022, melonjak tinggi menjadi Rp1,8 triliun pada 2023, dan kembali menurun menjadi Rp823,9 miliar pada 2024. Meskipun tidak stabil, capaian ini telah memenuhi 80,96% dari target akhir sebesar Rp1,01 triliun, menunjukkan bahwa meskipun belum

sepenuhnya mencapai target, terdapat potensi besar yang masih perlu dimaksimalkan dalam menarik investasi masuk ke daerah.

Terakhir, pada indikator persentase data yang tersaji melalui Sistem Informasi Penanaman Modal (SIPM), capaian sangat baik dengan realisasi penuh sebesar 100% sejak tahun 2022 hingga 2024. Capaian ini menandakan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyediakan layanan data investasi yang transparan dan akuntabel, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan investor.

2.4.2.11. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan di bidang kepemudaan dan olahraga memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk generasi muda yang sehat, produktif, dan berdaya saing tinggi, serta membangun karakter yang kuat dan berbudi pekerti luhur. Melalui berbagai program dan kegiatan yang terarah, pemerintah daerah berupaya mendorong peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan, mengembangkan bakat dan potensi olahraga, serta memperkuat sarana dan prasarana olahraga untuk masyarakat.

Tabel 2.55 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	%	100%	80.00%	80.00%	80%	100%	80.0%
2	Persentase Cabang Olahraga yang terbina	%	100%	78.95%	42.10%	84.21%	100%	84.21%
3	Persentase Kegiatan Organisasi Kepramukaan yang terfasilitasi	%				250%	100%	259.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kabupaten Gorontalo masih menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait pembinaan organisasi kepemudaan di tingkat desa/kelurahan. Persentase organisasi kepemudaan yang dibina mengalami penurunan dari kondisi semula 100% pada tahun 2021 menjadi hanya 80% sejak tahun 2022 hingga 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian organisasi kepemudaan belum memperoleh pembinaan yang optimal dalam beberapa tahun terakhir, sehingga memerlukan intervensi lebih terarah dan berkelanjutan.

Bentuk intervensi yang dapat dilakukan antara lain melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas pemuda agar memiliki keterampilan kepemimpinan, kewirausahaan, serta peran sosial yang lebih kuat. Selain itu, pengembangan program kegiatan yang relevan dengan minat dan potensi pemuda di desa/kelurahan, termasuk olahraga, seni, dan kegiatan sosial, menjadi penting agar aktivitas kepemudaan semakin aktif dan berkualitas.

Sementara itu, pada aspek olahraga, capaian persentase cabang olahraga yang terbina sempat mengalami fluktuasi signifikan, dari 78,95% pada tahun 2021 turun menjadi 42,10% di tahun 2022, kemudian meningkat kembali hingga 84,21% pada tahun 2023 dan 2024. Dinamika ini mencerminkan adanya upaya peningkatan pembinaan cabang olahraga dalam dua tahun terakhir, yang perlu dilanjutkan melalui kerja sama lintas stakeholder, penyediaan sarana prasarana olahraga yang memadai, serta pendampingan yang konsisten kepada klub dan komunitas olahraga di tingkat desa/kelurahan.

Di sisi lain, kegiatan kepramukaan menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, dengan fasilitasi kegiatan organisasi kepramukaan mencapai 259% pada tahun 2024, jauh melampaui target akhir 100%. Hal ini menandakan adanya komitmen dan dukungan yang signifikan, kemungkinan didorong oleh program strategis atau kebijakan prioritas yang diterapkan pada tahun tersebut. Pengalaman keberhasilan dalam fasilitasi kepramukaan ini dapat dijadikan contoh praktik baik untuk memperkuat pembinaan organisasi kepemudaan lainnya di masa mendatang. Dengan pendekatan intervensi yang mencakup pelatihan, program kegiatan, pembangunan infrastruktur pendukung, penggalangan dana, evaluasi, serta kemitraan multi pihak, diharapkan kualitas dan kuantitas kegiatan pemuda pelopor di desa/kelurahan dapat meningkat.

2.4.2.12. Urusan Persandian

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan persandian merupakan salah satu urusan wajib non-pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Ini berarti pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan persandian sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Salah satu kewenangan yang dimiliki adalah pengamanan informasi pemerintah daerah, terutama mengingat bahwa saat ini sistem informasi pemerintahan

sudah beralih ke format digital dan online yang dapat diakses dengan mudah oleh individu yang menguasai teknologi informasi.

Mengacu pada arahan Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN) yang tercantum dalam Peraturan Kepala Sandi Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan persandian melibatkan beberapa aspek, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembiayaan, serta pembinaan dan pengawasan di bidang persandian. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melaksanakan urusan persandian sebagai bagian dari penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah, yang mencakup berbagai aplikasi informasi yang dikembangkan, termasuk implementasi Tanda Tangan Elektronik (TTE).

Tabel 2.56 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Realisasi 2025		
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	%	7.32%	17.07%	22.64%	22.64%		91.18%	24.83%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

2.4.2.13. Urusan Kebudayaan

Kebudayaan tidak hanya mencerminkan identitas dan nilai-nilai lokal, tetapi juga berperan dalam membangun karakter masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan berdaya saing. Pengembangan sektor kebudayaan bertujuan untuk melestarikan, mengembangkan, dan mempromosikan warisan budaya daerah sebagai aset sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 2.57 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Meningkatnya mutu dan jumlah lembaga formal dan non formal yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	%				100%	100%	100.00%

2	Persentase Seni Budaya yang diakui sebagai Geoculture (Situs Budaya)	%	100%	100%	0%	100%	100%	100.00%
3	Persentase cagar Budaya yang dilestarikan	%	100%	100%	0%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Salah satu indikator utama yang mengalami perkembangan signifikan adalah peningkatan mutu dan jumlah lembaga formal dan nonformal yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, yang mencapai 100% pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen dalam memperkuat peran bahasa dan sastra sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Selain itu, pengakuan seni budaya sebagai geoculture atau situs budaya juga mencapai 100% pada sebagian besar tahun dalam periode evaluasi, kecuali pada tahun 2023, di mana capaian indikator ini tercatat 0%. Penurunan ini dapat mengindikasikan kendala dalam proses administrasi atau verifikasi pengakuan situs budaya pada tahun tersebut.

Pelestarian cagar budaya juga mengalami tren serupa, dengan pencapaian 100% pada tahun 2021, 2022, dan 2024, tetapi tidak menunjukkan hasil pada tahun 2023. Meskipun demikian, capaian pada tahun terakhir tetap menunjukkan bahwa upaya pelestarian cagar budaya telah kembali ke jalur yang sesuai dengan target akhir. Secara keseluruhan, meskipun terdapat beberapa tantangan pada tahun tertentu, capaian kinerja urusan kebudayaan menunjukkan bahwa kebijakan pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Gorontalo telah mencapai hasil yang optimal di akhir periode RPJMD.

Dalam rangka merumuskan target program pembangunan daerah yang berorientasi pada pelestarian dan penguatan identitas lokal, maka pondasi penting dalam menyusun program kebudayaan dan pendidikan yang selaras dengan nilai lokal adalah melalui dimensi ekspresi budaya. Pada tahun 2025, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo melalui Bidang Kebudayaan mengambil langkah strategis dalam upaya pelestarian dan pengembangan nilai-nilai budaya lokal. Salah satu program unggulan yang dicanangkan adalah Gerakan Seniman Masuk Sekolah, sebuah inisiatif yang bertujuan memperkuat keterkaitan antara dunia pendidikan dan praktik seni budaya secara langsung.

Program ini melibatkan tujuh sekolah dan 140 peserta didik di wilayah Kabupaten Gorontalo sebagai ruang interaksi antara para seniman lokal dan siswa.

Melalui kegiatan ini, para seniman berbagi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman kreatif mereka kepada generasi muda, baik dalam bentuk seni pertunjukan, seni rupa, musik tradisional, maupun ekspresi budaya lainnya. Harapannya, siswa tidak hanya mengenal seni sebagai mata pelajaran, tetapi juga sebagai bagian dari identitas dan warisan daerah yang hidup dan dinamis.

Selain itu, program Revitalisasi Bahasa Daerah juga menjadi fokus utama dalam agenda kebudayaan tahun ini. Bahasa Gorontalo, sebagai salah satu elemen penting pembentuk karakter dan jati diri masyarakat, mulai mengalami penurunan penggunaan di kalangan generasi muda. Melalui revitalisasi ini, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupaya menghidupkan kembali penggunaan bahasa daerah melalui pendekatan edukatif, seperti pelatihan guru, pengembangan bahan ajar berbasis lokal, dan kegiatan literasi budaya di sekolah. Program ini melibatkan 45 guru master dari 19 kecamatan, yang selanjutnya akan mengimbaskan hasil pelatihan kepada rekan sejawat dan siswa. Outcome dari program ini adalah penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu.

Dalam lima tahun ke depan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo menargetkan perluasan Program Gerakan Seniman Masuk Sekolah secara bertahap dari lima sekolah menjadi minimal delapan puluh sekolah di seluruh kecamatan. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendorong kreativitas, apresiasi seni, dan pemahaman budaya lokal sejak usia dini. Jumlah seniman yang terlibat akan terus ditingkatkan setiap tahun, dengan prioritas pada seniman tradisional khas Gorontalo. Selain itu, akan dibentuk forum kolaboratif antara seniman dan guru seni budaya untuk menyusun kurikulum tematik berbasis kearifan lokal.

Untuk Program Revitalisasi Bahasa Daerah, sasaran yang ingin dicapai mencakup pengembangan modul Bahasa Gorontalo untuk jenjang SD dan SMP yang terintegrasi dalam kurikulum muatan lokal, pelatihan seratus guru bahasa daerah agar mampu mengajarkan bahasa Gorontalo secara aktif dan komunikatif, serta penyelenggaraan Festival Bahasa Daerah tahunan sebagai ajang apresiasi dan kompetisi siswa dalam bidang sastra lisan, pidato adat, dan penulisan cerita rakyat. Diharapkan pula terjadi peningkatan penggunaan bahasa daerah di lingkungan sekolah hingga minimal 30% dalam kegiatan informal dan ekstrakurikuler, yang akan diperkuat dengan dukungan regulasi melalui Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup).

2.4.2.14. Urusan Perpustakaan

Perpustakaan tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi dan sumber pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana penting dalam mendorong pengembangan minat baca, kecakapan literasi, dan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat.

Tabel 2.58 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan per tahun	%	20.50%	14.73%	28.81%	28.83%	15%	191.08%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Jumlah pengunjung perpustakaan Kabupaten Gorontalo terus mengalami peningkatan hingga 28.83% di tahun 2024 dari 20.50% di tahun 2021. Tingkat capaian terhadap target akhir RPJMD sebesar 191.08%. Sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2024 sebesar 59.91, menurun dari tahun 2023 yang sebesar 61.21. Pada tahun terakhir yang tercatat, tingkat kegemaran membaca Kabupaten Gorontalo hanya mencapai 55,99%, yang merupakan angka terendah se-Provinsi Gorontalo. Sebagai perbandingan, kabupaten/kota lain di provinsi ini telah berhasil mencapai angka di atas 60%. Posisi Kabupaten Gorontalo yang berada di bawah rata-rata provinsi mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduknya belum menjadikan membaca sebagai bagian penting dalam kehidupan sehari-hari.

2.4.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.3.1. Urusan Kelautan dan Perikanan

Sebagai salah satu pilar ekonomi, sub sektor kelautan dan perikanan berperan penting dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Untuk itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dikelola secara berkelanjutan, dengan mengedepankan pengawasan serta pengendalian dalam pemanfaatan sumber daya yang ada. Selain itu, diperlukan pula upaya konservasi dan rehabilitasi ekosistem kelautan dan perikanan guna memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Tabel 2.59 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	Ton/Tahun	21,758.50	24,682.73	24384.21	24628.14	25374.37	97.06%
2	Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	Ton/Tahun	6,651.05	6,882.18	6978.78	6983	48229	14.48%
3	Persentase laporan kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti	%		50%	0%	0%	100%	0.00%
4	Jumlah produksi olahan ikan (ton/tahun)	Ton/Tahun	6,546.69	6,575.86	7037.9	6577.04	7111.53	92.48%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan dari 21.758,50 ton pada tahun 2021 menjadi 25.374,37 ton pada akhir periode. Tren ini menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil dengan capaian sebesar 97,06% terhadap target akhir. Sementara itu, produksi perikanan budidaya mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2024, mencapai 48.229 ton, jauh melampaui capaian tahun-tahun sebelumnya yang berkisar di angka 6.651,05 hingga 6.983 ton. Namun, persentase capaian terhadap target akhir hanya 14,48%, mengindikasikan adanya target yang jauh lebih tinggi dari tren pertumbuhan yang terjadi.

Dalam aspek penegakan hukum terhadap praktik ilegal fishing, laporan kasus yang ditindaklanjuti menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Pada tahun 2021, tercatat 50% kasus yang ditindaklanjuti, namun pada tahun 2022 dan 2023 tidak ada laporan yang ditindaklanjuti sama sekali. Baru pada tahun 2024, seluruh kasus yang dilaporkan mendapatkan tindak lanjut, tetapi secara kumulatif capaian terhadap target akhir masih 0,00%, yang kemungkinan disebabkan oleh target yang lebih besar dari jumlah kasus aktual yang ditangani.

Produksi olahan ikan mengalami fluktuasi, di mana capaian tahun 2021 sebesar 6.546,69 ton meningkat menjadi 7.037,9 ton pada tahun 2023, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 6.577,04 ton pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat menjadi 7.111,53 ton pada akhir periode. Dengan capaian sebesar 92,48% terhadap target akhir, sektor ini menunjukkan perkembangan yang cukup baik meskipun mengalami ketidakstabilan dalam beberapa tahun terakhir.

2.4.3.2. Urusan Pertanian

Urusan Pertanian merupakan salah satu sektor strategis yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian daerah, terutama di wilayah pedesaan Kabupaten Gorontalo. Pengembangan sektor pertanian tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan lokal tetapi juga meningkatkan kesejahteraan petani, memperluas lapangan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pembangunan pertanian diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta pengembangan infrastruktur dan akses pasar yang lebih baik.

Tabel 2.60 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Produktivitas Padi	Ton/Ha	4.18	5.52	5.09	5.14	4.73 Ton/Ha	108.67%
2	Produktivitas Jagung	Ton/Ha	4.27	5.02	4.71	4.949	5.00 Ton/Ha	98.98%
3	Produktivitas Cabai Rawit	Ton/Ha	9.92	6.4	4.85	5.50	4.75 Ton/Ha	115.79%
4	Produktivitas Bawang Merah	Ton/Ha	9.92	2.9	4.64	4.08	6.25 Ton/Ha	65.28%
5	Produktivitas Kelapa	Ton/Ha	1.43	1.43	1.43	1.43	1.53 Ton/Ha	93.46%
6	Produktivitas Kopi	Kg/Ha	232	232	232	232	245.74kg/ha	94.41%
7	Persentase Lahan yang terfasilitasi pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	%	100%	100%	1%	0.00%	100%	0.00%
8	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian / persentase kelompok tani berbadan hukum	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
9	Persentase Penurunan Ternak yang terinfeksi PHMS	%	0.67	0.98	1.18	1	>1	99.01%
10	Persentase Ternak yang diikutkan AUTS	%	2.10%	1.85%	0.25%	0%	2%	0.00%
11	Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia	%	2.58%	2.50%	2.59%	2.47%	2.50%	98.800%
12	Cakupan PAH ASUH	%	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%
13	Cakupan Kelompok Peternakan yang memiliki Badan Hukum	%	25.00%	50.00%	50%	25.00%	100%	25.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Dalam aspek produktivitas tanaman pangan, produktivitas padi mengalami fluktuasi dengan peningkatan signifikan pada tahun 2022 mencapai 5,52 ton/ha, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 dan 2024. Meski demikian, capaian akhir sebesar 4,73 ton/ha melampaui target dengan persentase 108,67%. Produktivitas jagung juga menunjukkan tren yang cukup stabil dengan capaian akhir sebesar 5,00 ton/ha atau 98,98% dari target.

Untuk hortikultura, produktivitas cabai rawit mengalami penurunan tajam dari 9,92 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 4,85 ton/ha pada 2023, sebelum sedikit meningkat menjadi 5,50 ton/ha pada 2024. Namun, capaian ini masih melebihi target akhir dengan persentase 115,79%. Sebaliknya, produktivitas bawang merah mengalami kendala yang cukup signifikan, hanya mencapai 65,28% dari target dengan capaian akhir sebesar 4,08 ton/ha.

Pada komoditas perkebunan, produktivitas kelapa tetap stagnan di angka 1,43 ton/ha sepanjang periode 2021-2024 dan hanya mencapai 93,46% dari target akhir. Hal yang sama terjadi pada kopi, yang tetap berada pada angka 232 kg/ha, dengan capaian 94,41% dari target akhir.

Dari aspek mitigasi bencana pertanian, pencapaian target dan realisasi pada tahun 2021-2022 pada program pengendalian dan penanggulangan bencana berkaitan dgn kegiatan pencegahan bencana pertanian dalam hal ini asuransi usaha tani padi sawah yang mencakup perlindungan lahan seluas 2000 ha dgn pagu anggaran sebesar 72.000.000. Pada tahun 2023 kegiatan pencegahan bencana tetap di targetkan dengan luasan 2000 ha, kegiatan penanggulangan pasca bencana pertanian dengan penyediaan buffer stock benih padi dan kegiatan penanganan dampak perubahan iklim berupa penyediaan benih cabai rawit, pada tahapan realisasi untuk tahun anggaran 2023 kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya penyediaan benih cabai rawit sehingga pencapaian hasil hnya pada 1 persen. Untuk tahun anggaran 2024 penyediaan anggaran terkait pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian tidak dapat dilakukan terkait ketersediaan anggaran yang terbatas sehingga pemilihan kegiatan berdasarkan prioritas dan terkait indikator RPJMD yakni peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.

Dalam bidang peternakan, hasil pelaksanaan kegiatan AUTS dimana realisasi anggaran bantuan subsidi sebesar Rp. 40.000.000 untuk 1.000 ekor tidak dapat direalisasikan karena beberapa faktor yaitu: 1). Pedoman umum terkait pelaksanaan

program AUTS untuk tahun anggaran 2024 terlambat diterbitkan oleh Kementrian Pertanian sehingga waktunya cukup singkat untuk melakukan pendataan serta pendaftaran pada aplikasi SIAP, 2). Adanya beberapa proses dan tahapan yang harus dilakukan dalam proses penginputan data pada aplikasi SIAP sehingga petugas pendaftaran memerlukan waktu untuk penyesuaian dalam penginputan pada aplikasi tersebut, 3). Dalam perjalanan waktu terkait dengan kondisi keuangan pemerintah pusat bahwa anggaran yang telah disiapkan untuk subsidi sebesar 80% masuk dalam refocusing sehingga program/kegiatan Fasilitasi Asuransi Usaha Ternak Sapi ini tidak dapat dilaksanakan.

Beberapa indikator menunjukkan keberlanjutan program, seperti cakupan Pangan Asal Hewan Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (PAH ASUH) serta pelaksanaan penyuluhan pertanian dan persentase kelompok tani berbadan hukum, yang tetap 100% sepanjang periode. Namun, persentase kelompok peternakan yang memiliki badan hukum mengalami ketidakstabilan, dengan capaian yang menurun dari 50% pada 2022-2023 menjadi 25% pada 2024, atau hanya mencapai 25% dari target akhir.

2.4.3.3. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor ini berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan melalui pengembangan destinasi wisata, budaya lokal, dan atraksi alam. Pembangunan pariwisata juga diharapkan mampu memperkuat identitas daerah serta menarik wisatawan lokal dan mancanegara.

Tabel 2.61 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Lama Kunjungan Wisata	Hari/tahun	1.41	1.3	1.57		1-3	100.00%
2	Kunjungan wisata	%	113.23%	102.78%	116.31%	121.13%	100.00%	121.13%
3	Persentase Industri (Usaha) Kreatif yang dibina dan mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Indikator lama kunjungan wisata mengalami sedikit fluktuasi selama periode 2021-2023. Pada tahun 2021, rata-rata lama kunjungan wisatawan tercatat 1,41 hari per tahun, mengalami sedikit penurunan pada 2022 menjadi 1,3 hari, dan meningkat kembali pada 2023 mencapai 1,57 hari. Meskipun tidak terdapat data untuk tahun 2024, capaian ini telah sesuai dengan target akhir yaitu 1-3 hari, sehingga persentase pencapaian mencapai 100%.

Jumlah kunjungan wisata menunjukkan tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2021, capaian kunjungan wisata mencapai 113,23% dari target, sedikit menurun menjadi 102,78% pada 2022, namun kembali meningkat menjadi 116,31% pada 2023, dan mencapai puncaknya pada 2024 dengan angka 121,13%. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik wisata di Kabupaten Gorontalo terus mengalami perkembangan positif dan berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Sementara itu, indikator yang terkait dengan pengembangan industri kreatif juga menunjukkan pencapaian yang stabil. Persentase usaha kreatif yang mendapatkan pembinaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual tercatat 100% setiap tahunnya sepanjang periode 2021-2024, menandakan adanya keberlanjutan dalam kebijakan dan program yang mendukung sektor ini.

2.4.3.4. Urusan Perdagangan

Sebagai wilayah dengan potensi perdagangan yang terus berkembang, peran urusan perdagangan tidak hanya penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta meningkatkan daya saing produk daerah di pasar yang lebih luas. Pembangunan di sektor perdagangan dirancang untuk menciptakan akses yang lebih mudah bagi pelaku usaha, memperkuat infrastruktur pasar, dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha lokal, sehingga mampu menopang perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.62 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		

1	Persentase Perusahaan dan Gudang Terdaftar dan Memiliki Izin	%	8.13%	4.32%	0.00%	15.51%	3.15%	137.00%
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	8.88%	9.33%	9.33%		8.94%	104.32%
3	Indeks Harga Implisit Sektor Perdagangan	Indeks	165.92	156.62	156.62		186	84.20%
4	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan	$	$18,745,602.00	$41,528,478.24	$14,616,954.00		$15,534,033.35	94.10%
5	Persentase Aduan Konsumen yang dituntaskan	%	78.57%	90.00%	81.63%	100.00%	35.00%	233.24'%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perdagangan di Kabupaten Gorontalo menunjukkan dinamika yang beragam selama periode RPJMD. Salah satu indikator yang mengalami fluktuasi signifikan adalah persentase perusahaan dan gudang yang terdaftar serta memiliki izin. Pada tahun 2021, capaian indikator ini sebesar 8,13%, kemudian menurun menjadi 4,32% pada 2022 dan bahkan nihil pada 2023. Namun, pada tahun 2024, capaian meningkat tajam menjadi 15,51%, melebihi target akhir yang hanya 3,15%, dengan tingkat pencapaian 137%.

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB relatif stabil, dengan realisasi sebesar 8,88% pada tahun 2021 dan mengalami sedikit peningkatan menjadi 9,33% pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun tidak terdapat data untuk tahun 2024, capaian akhir berada pada 8,94%, mencapai 104,32% dari target yang telah ditetapkan. Sementara itu, Indeks Harga Implisit (IHI) sektor perdagangan menunjukkan tren menurun dari 165,92 pada tahun 2021 menjadi 156,62 pada tahun 2022 dan 2023. Namun, kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD menunjukkan nilai indeks sebesar 186, yang hanya mencapai 84,20% dari target yang diharapkan.

Dalam hal ekspor bersih perdagangan, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 dengan nilai sebesar USD 41.528.478,24, meningkat pesat dibandingkan tahun 2021 yang hanya mencapai USD 18.745.602,00. Namun, pada tahun 2023, nilai ekspor kembali turun drastis menjadi USD 14.616.954,00. Pada akhir periode RPJMD, capaian ekspor bersih mencapai USD 15.534.033,35 atau sekitar 94,10% dari target yang ditetapkan. Indikator penyelesaian aduan konsumen menunjukkan peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, persentase aduan yang dituntaskan mencapai 78,57%, meningkat menjadi 90,00% pada tahun 2022. Namun,

pada 2023 angka ini sedikit menurun ke 81,63%. Pada tahun 2024, capaian mencapai 100%, jauh melampaui target akhir yang hanya 35%, dengan tingkat pencapaian 233,24%.

2.4.3.5. Urusan Perindustrian

Pengembangan sektor perindustrian ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk industri lokal melalui pembinaan, penguatan kapasitas, serta pemanfaatan teknologi tepat guna. Selain itu, kebijakan di bidang perindustrian bertujuan untuk mendorong peran serta industri kecil dan menengah (IKM) yang berkontribusi dalam peningkatan nilai tambah produk daerah.

Tabel 2.63 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4.39%	4.58%	4.58%		2.10%	217.87%
2	Persentase Industri yang Memiliki Izin	%		6.43%	6.28%	0.35%	24.37%	25.76%
3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINAS	%	0.16%	0.19%	0.18%	0.69%	2.10%	8.66%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menunjukkan angka yang relatif stabil dari tahun 2021 hingga 2023, yakni sebesar 4,39% pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 4,58% pada tahun 2022 dan 2023. Namun, meskipun capaian aktual pada akhir periode RPJMD ditetapkan sebesar 2,10%, realisasi capaian yang melebihi target akhir hingga mencapai 217,87% mencerminkan kinerja yang sangat baik pada aspek ini.

Sementara itu, persentase industri yang memiliki izin menunjukkan fluktuasi capaian, di mana pada tahun 2022 tercatat sebesar 6,43% dan sedikit menurun menjadi 6,28% di tahun 2023. Namun, capaian di tahun 2024 justru mengalami penurunan drastis menjadi 0,35%. Dengan kondisi ini, capaian akhir periode hanya mencapai 25,76% dari target yang direncanakan sebesar 24,37%, menandakan bahwa upaya legalisasi industri belum optimal.

Selanjutnya, persentase industri yang terdaftar dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) menunjukkan peningkatan yang lambat. Pada tahun 2021 hanya sebesar 0,16%, meningkat sedikit menjadi 0,19% pada 2022, dan menurun ke 0,18% pada 2023, sebelum akhirnya meningkat cukup signifikan menjadi 0,69% pada 2024. Meskipun demikian, capaian ini baru memenuhi 8,66% dari target akhir sebesar 2,10%, yang mengindikasikan bahwa keterhubungan industri lokal dengan sistem nasional masih sangat rendah.

2.4.4. Fokus layanan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Tabel 2.60 memuat capaian kinerja penyelenggaraan unsur pendukung urusan pemerintahan Kabupaten Gorontalo selama periode RPJMD, yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi pendukung pemerintahan dalam berbagai aspek strategis. Unsur pendukung ini meliputi ketepatan waktu penyajian dokumen pemerintahan, produk hukum daerah, pelayanan kelembagaan sosial kemasyarakatan, pelaksanaan kerjasama strategis, pengendalian perekonomian dan pembangunan, penanganan aduan pengadaan barang dan jasa, serta capaian program legislasi daerah (Prolegda). Data ini menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat sistem tata kelola pemerintahan melalui berbagai mekanisme pendukung yang bertujuan untuk memastikan pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan efektif, transparan, dan akuntabel hingga akhir masa perencanaan jangka menengah daerah.

Tabel 2.64 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase ketepatan waktu penyajian dokumen penyelenggaraan pemerintahan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
2	Persentase produk hukum yang diundangkan	%	97.01%	79.10%	100%	120.00%	100%	120.0%
3	Persentase kelembagaan adat, agama dan sosial kemasyarakatan yang terlayani	%	100%	100%	100%	0%	100%	100.00%
4	Persentase kerjasama strategis yang dilaksanakan	%	376.92%	230.77%	334.62%	210.71%	100%	210.71%

5	Cakupan pengendalian perekonomian dan pembangunan	%	100%	100.93%	100%	0%	100%	100.00%
6	Persentase aduan pengadaan barang dan jasa yang tertanggal	%	100%	100%	100%	Tidak ada Pengaduan yg masuk	100%	100.00%
7	Persentase Capaian Prolegda	%	42.86%	18.75%	39.29%	29.41%	100%	29.41%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025.

Indikator persentase ketepatan waktu penyajian dokumen penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal, dengan capaian 100% setiap tahun dari 2021 hingga 2024. Capaian ini sepenuhnya memenuhi target akhir periode, mencerminkan bahwa seluruh dokumen pemerintahan disajikan tepat waktu. Indikator persentase produk hukum yang diundangkan juga mengalami capaian yang fluktuatif, yaitu 97,01% pada 2021, menurun ke 79,10% pada 2022, namun meningkat menjadi 100% di 2023 dan bahkan melampaui 100% hingga mencapai 120% pada 2024. Kinerja ini melampaui target akhir 100%, dengan capaian total sebesar 120%, menandakan optimalisasi dalam penyusunan dan pengundangan produk hukum.
Untuk persentase kelembagaan adat, agama, dan sosial kemasyarakatan yang terlayani, capaian penuh 100% tercatat dari tahun 2021 hingga 2023. Namun, capaian ini anjlok menjadi 0% di 2024, meskipun secara akumulasi tetap memenuhi target akhir 100%. Hal ini dapat menjadi catatan penting terkait kesinambungan pelayanan kelembagaan sosial di tahun terakhir RPJMD.

Sementara itu, persentase kerjasama strategis yang dilaksanakan menunjukkan capaian sangat tinggi melebihi target, yakni 376,92% pada 2021, meskipun mengalami tren penurunan menjadi 230,77% di 2022, 334,62% pada 2023, dan 210,71% di 2024. Meski menurun, capaian ini tetap jauh melampaui target akhir 100%, dengan capaian total sebesar 210,71%.

Indikator cakupan pengendalian perekonomian dan pembangunan juga menunjukkan kinerja baik dengan capaian di atas 100% pada 2022 (100,93%), meskipun hanya 100% pada 2021 dan 2023, serta 0% di 2024. Namun, capaian keseluruhan tetap memenuhi target akhir sebesar 100%.

Untuk persentase aduan pengadaan barang dan jasa yang tertangani, capaian juga konsisten 100% pada tiga tahun pertama. Pada 2024, tidak ada aduan yang masuk, sehingga meskipun nihil kasus, indikator ini tetap dihitung tercapai penuh sesuai target 100%.

Terakhir, persentase capaian Program Legislasi Daerah (Prolegda) menunjukkan capaian yang cukup rendah dan tidak mencapai target. Tercatat hanya 42,86% pada 2021, turun drastis menjadi 18,75% pada 2022, naik sedikit menjadi 39,29% pada 2023, dan kembali turun menjadi 29,41% di 2024. Secara keseluruhan, capaian ini hanya memenuhi 29,41% dari target 100%, yang menunjukkan adanya tantangan besar dalam pelaksanaan Prolegda.

2.4.5. Fokus Layanan Urusan Penunjang Pemerintahan

Capaian kinerja penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan Kabupaten Gorontalo mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemerintahan melalui aspek perencanaan, penganggaran, administrasi aset, keuangan daerah, sumber daya aparatur, serta pemanfaatan hasil riset dan kebijakan daerah. Data ini menunjukkan perkembangan capaian indikator-indikator kinerja selama periode RPJMD hingga tahun 2024, yang menjadi cerminan kemampuan institusi pemerintah daerah dalam mengelola unsur-unsur pendukung pemerintahan secara optimal.

Tabel 2.65 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
2	Persentase kesesuian perencanaan dan penganggaran	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
3	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	%	100%	100%	100%	#REF!	100%	100.00%
4	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah	%	73.00%	94.44%	100.00%	61%	100%	61.11%
5	Rasio Kemandirian Pendapatan daerah	%	8.44%	9.72%	12.70%	11.39%	16%	71.20%

6	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	%	53.92%	59.90%	58.12%	58.12%	72.05%	80.67%
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	12.37%	15.19%	13.78%	13.78%	17.67%	77.99%
8	Persentase Penerapan Hasil Riset dan Evaluasi Pengembangan Potensi Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah	%	121.95%	123.46%	123.46%	116.28%	89%	130.65%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025

Berdasarkan data, ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan, persentase kesesuaian perencanaan dan penganggaran, serta tingkat ketepatan waktu penetapan APBD selalu tercapai 100 persen setiap tahunnya hingga akhir periode RPJMD, menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kualitas dan ketepatan waktu perencanaan serta penganggaran pembangunan daerah. Namun, untuk indikator tertib administrasi Barang Milik Daerah (BMD), capaian mengalami fluktuasi, di mana sempat mencapai 100 persen pada tahun 2023 tetapi menurun signifikan menjadi 61 persen di tahun 2024, sehingga capaian terhadap target akhir hanya sebesar 61,11 persen.

Rasio Kemandirian Pendapatan Daerah mengalami peningkatan dari 8,44 persen pada 2021 menjadi 12,70 persen pada 2023, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 11,39 persen di 2024. Namun, capaian ini masih jauh dari target 16 persen, dengan persentase pencapaian terhadap target akhir sebesar 71,20 persen, yang mencerminkan tantangan dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja mengalami kenaikan dari 53,92 persen di 2021 menjadi 59,90 persen di 2022, namun sedikit menurun di tahun-tahun berikutnya, sehingga capaian akhir hanya sebesar 58,12 persen atau sekitar 80,67 persen dari target. Demikian juga dengan rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi yang cenderung stagnan dan belum mencapai target, dengan capaian akhir sebesar 13,78 persen atau 77,99 persen dari target.

Menariknya, indikator persentase penerapan hasil riset dan evaluasi pengembangan potensi daerah dan kebijakan pemerintah daerah melampaui target, dengan capaian yang selalu melebihi 100 persen setiap tahun, dan mencapai 130,65 persen dari target akhir, mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengintegrasikan hasil riset dalam kebijakan daerah.

2.4.6. Fokus Layanan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintah

Tabel 2.62 menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten Gorontalo selama periode RPJMD, yang bertujuan untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Unsur pengawasan ini menjadi bagian penting dalam mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bebas dari praktik korupsi serta birokrasi yang melayani masyarakat dengan baik. Indikator yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja ini berfokus pada persentase pengawasan terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menuju zona bebas korupsi dan persentase pendampingan OPD dalam upaya mencapai zona birokrasi bersih melayani.

Tabel 2.66 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase pengawasan OPD yang menuju zona bebas korupsi	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
2	Persentase Pendampingan OPD menuju zona birokrasi bersih melayani	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan realisasi sebesar 100% secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2024. Hal ini berarti seluruh OPD yang menjadi sasaran pengawasan telah mendapatkan pengawasan dan pendampingan secara optimal dalam rangka menuju zona bebas korupsi dan zona birokrasi bersih melayani. Kondisi ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun pemerintahan yang berintegritas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,

sekaligus menunjukkan bahwa target akhir RPJMD untuk unsur pengawasan berhasil dicapai sepenuhnya.

2.4.7. Fokus Layanan Unsur Kewilayahan

Layanan kewilayahan mencakup upaya untuk memastikan akses pelayanan yang merata dan berkualitas hingga ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Secara normatif, penguatan unsur kewilayahan ini menuntut adanya peningkatan kapasitas pelayanan dan optimalisasi sumber daya lokal di berbagai wilayah administratif, baik di perkotaan maupun pedesaan.

Tabel 2.67 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan Urusan Pemerintahan

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	63.61%	73.84%	59.07%	49.12%	100%	49.12%
2	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	73.68%	82.73%	79.82%	47.81%	100%	47.81%
3	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	63.73%	66.88%	41.67%	48.03%	100%	48.03%
4	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	70.02%	77.89%	54.95%	48.33%	100%	48.33%
5	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	%	0.00%	21.43%	75%		100%	0.00%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025

Berdasarkan data yang ditampilkan, terdapat penurunan capaian pada hampir semua indikator pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana mengalami penurunan signifikan, dari 73,84% pada 2022 menjadi 49,12% pada 2024. Hal serupa juga terjadi pada persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan, yang menurun dari 82,73% pada 2022 menjadi hanya 47,81% pada 2024.

Indikator layanan keamanan dan ketertiban juga menunjukkan tren menurun, dari 66,88% pada 2022 menjadi 48,03% pada 2024. Sementara itu, persentase pemerintahan desa yang terbina dan terawasi menurun dari 77,89% pada 2022 menjadi 48,33% pada 2024. Sedangkan indikator sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan yang sempat mencapai 75% pada 2023, menjadi 0% di tahun 2024, menunjukkan adanya stagnasi atau kendala pelaksanaan pada tahun terakhir.

2.4.8. Fokus Layanan Unsur Pemerintahan Umum

Tabel 2.64 menyajikan capaian kinerja penyelenggaraan unsur pemerintahan umum di Kabupaten Gorontalo selama periode RPJMD. Unsur pemerintahan umum ini berfokus pada penguatan ideologi negara, stabilitas sosial-politik, serta ketertiban masyarakat yang tercermin melalui beberapa indikator utama, yakni Indeks Literasi Pancasila, Angka Melek Politik, Persentase Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) aktif, Indeks Kerukunan, dan Indeks Potensi Konflik. Data ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah berupaya menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis, inklusif, serta memperkuat wawasan kebangsaan.

Tabel 2.68 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024		
1	Indeks literasi Pancasila	Indeks	5	4.77	4.92	4.94	Scala 5	98.73%
2	Angka Melek Politik	Indeks	5	4.8	4.88	4.90	Scala 5	97.90%
3	Persentase Ormas Memiliki SKT (Aktif)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
4	Indeks Kerukunan	Indeks	5	4.78	4.91	4.92	Scala 5	98.20%
5	Indeks Potensi Konflik	Indeks	5	4.85	4.9	4.91	Scala 5	98.11%

Sumber: Bapelitbangda Kabupaten Gorontalo, 2025

Berdasarkan data capaian, terlihat bahwa sebagian besar indikator mencapai hasil yang sangat baik mendekati skala maksimal. Indeks Literasi Pancasila pada tahun 2024 mencapai nilai 4,94 dari skala 5 atau setara dengan capaian 98,73% terhadap target akhir, menunjukkan masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai Pancasila. Angka Melek Politik juga mencapai 4,90 atau 97,90% dari target,

mencerminkan tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam kehidupan politik yang cukup tinggi.

Selanjutnya, Persentase Ormas yang memiliki SKT aktif berhasil dipertahankan di angka 100% selama empat tahun berturut-turut, yang berarti seluruh organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Gorontalo telah memiliki legalitas yang diakui pemerintah. Indeks Kerukunan mencapai angka 4,92 atau 98,20%, menggambarkan hubungan antar masyarakat yang harmonis dan minim konflik. Indeks Potensi Konflik juga menunjukkan capaian positif dengan nilai 4,91 atau 98,11%, menandakan tingkat potensi konflik sosial di masyarakat berada pada posisi yang sangat rendah.

Tabel 2.69 Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Gorontalo

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Capaian Terhadap Target Akhir (Metode Tahun Terakhir)	Sumber	Interpretasi belum tercapai (<) sesuai (=) melampaui (>)
			Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024				
A.	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**							**91.78%**		
	A.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI							**84.64%**		
1	Pertumbuhan Ekonomi	PERSENTASE	2.43%	3.93%	4.51%	4.10%	4-6	100.00%	BPS	Sesuai
2	Laju inflasi (Y on Y)	PERSENTASE	2.59%	5.15%	3.88%	-0.53%	2-3	26.50%	BPS	Belum Tercapai
3	PDRB per kapita AHB (Juta Rupiah)	JUTA RUPIAH	34.57	37.14	39.70	41.75	36-38	109.87%	BPS	Melampaui
4	Indeks Gini	INDEKS	0.389	0.413	0.409	0.388	0.35	85.57%	BPS	Belum Tercapai
5	ICOR	RASIO	14.89	9.14	8.03	8.75	4.5	51.44%	Profil Pemb Daerah 2023	Belum Tercapai
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	PERSENTASE	2.12%	1.83%	2.48%	2.64%	3.00%	113.64%	BPS	Melampaui
7	Persentase Kemiskinan	PERSENTASE	17.89%	17.71%	17.48%	16.43%	< 12	72.98%	BPS	Belum Tercapai
8	Indeks Pembangunan Manusia	PERSENTASE	68.53	69.51	70.37	70.96	>70	100.00%	BPS	Sesuai
9	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik	Nilai	72.27	69.2	78.05	76.83	100	76.83%	MENPAN RB	Belum Tercapai
10	Indeks Good Governance	Indeks	7.690	7.874	7.726		8-9	85.84%	TIM PERGURUAN TINGGI	Belum Tercapai
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	62.12	63.21	63.81		>80 - 90	70.90%	MENPAN RB	Belum Tercapai
12	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79.25	79.79	80.13	79.5	80	99.38%	BAPANAS	Belum Tercapai
13	Indeks Pembangunan infrastruktur	Indeks	0.8068	0.8606	0.8675	1.0692	>2	53.19%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
14	SPM Air Minum	Persen	89.40%	99.89%	98.85%	92.02%	100.00%	92.02%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
15	Indeks kepuasan terhadap pembangunan kawasan permukiman	Indeks	81.58	81.58	88.50		100	88.50%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
16	Indeks Resiko Bencana	Indeks	94.04	94.04	86.55	88.8	88.21	99.34%	BNPB	Belum Tercapai

17	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	0.48	0.611	0.644	0.646	0.61 - 0.8	100.00%	BKKBN	Sesuai
18	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	73.8	77.1	75	78.4	100	75.00%	DKP	Belum Tercapai
19	Rasio kosumsi normatif terhadap ketersediaan bersih per kapita per hari	Rasio	< 1	< 1	< 1	< 1	< 1	100.00%	DKP	Sesuai
20	LQ Shift	Indeks (= 1 Meningkat, <1 Menurun)	0.934	0.892	0.923		1	92.32%	BPS	Belum Tercapai
	LQ Share	Indeks (= 1 Meningkat, <1 Menurun)	0.955	0.955	0.957		1	95.68%	BPS	Belum Tercapai
21	Indeks Perluasan Akses dan Kesempatan Kerja	Indeks	6.66	6.66	6.68		8-10	83.50%	BAPPENAS	Belum Tercapai
22	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak	Persen	3.90%	94.38%	94.33%	93.89%	100.00%	94.33%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
23	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak	Persen	4.35%	83.96%	84.49%	85.99%	100.00%	85.99%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
24	Persentase permukiman yang layak huni	Persen	69.19%	72.37%	72.37%	63.31%	100.00%	63.31%		Belum Tercapai
	A.2. FOKUS KESEJAHTERAAN SOSIAL							**90.70%**		Belum Tercapai
1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7.3	7.61	7.79	7.95	>9	88.24%	BPS	Belum Tercapai
2	Angka usia harapan hidup	TAHUN	70.28	70.54	70.81	70.99	70	101.41%	BPS	Melampaui
3	Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja	PERSENTASE	63.75%	69.18%	71.09%	69.58%	80.00%	86.98%	Bid Ketenaga kerjaan	Belum Tercapai
4	Prestasi Pemuda di Tingkat Nasional	Orang	2	0	0	20	20	100.00%	Bidang Kepemudaan	Sesuai
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.92	86.29	87.97	89.75	100	89.75%	BAGIAN ORGANISASI	Belum Tercapai
6	Skor Nilai LKIP	Nilai AKIP	65.17	65.70	65.76	65.99	75-85	87.99%	MENPAN RB	Belum Tercapai
7	Skor LPPD	Nilai LPPD	3.3497	2.9925			4	74.81%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Belum Tercapai
8	Opini Pemeriksaan	Statement	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	100.00%	Bidang Akuntansi	Sesuai

9	Indeks Konsistensi	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	BAPELITBANGDA	Sesuai
10	Penghargaan Adipura	Trophy	0	0	Adipura	Adipura	Adipura	100.00%	DLH	Sesuai
11	Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Ijin Lingkungan	PERSENTASE	17.69%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DLH	Sesuai
12	Indeks Pembangunan Keluarga	PERSENTASE	53.06%	53.09%	59.23%		100.00%	59.23%	BKKBN	Belum Tercapai
	A.3. FOKUS SENI BUDAYA							**100.00%**		Sesuai
1	Persentase Seni Budaya Geoculture yang dikembangkan	PERSENTASE	100%	100.00%	100.00%	100.00%	100%	100.00%		Sesuai
B	**ASPEK PELAYANAN UMUM**							**77.87%**		Belum Tercapai
	B.1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**79.32%**		Belum Tercapai
	B.1.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							**85.71%**		Belum Tercapai
1	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	PERSENTASE	83.00%	98.43%	94.29%	78.56%	100%	78.56%	DIKBUD	Belum Tercapai
2	Persentase muatan lokal yang tertuang dalam kurikulum	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DIKBUD	Sesuai
3	Rasio Guru terhadap peserta didik	RASIO	1;67	1;12	1:27	1:28	1;18	64.29%	DIKBUD	Belum Tercapai
4	Persentase satuan pendidikan yang diselenggaran masyarakat yang memiliki legalitas	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DIKBUD	Sesuai
	B.1.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							**78.43%**		Belum Tercapai
1	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	PERSENTASE	81.54%	100.12%	89.95%	97.15%	100%	97.15%	DINAS KESEHATAN	Belum Tercapai
2	Rasio Jumlah Tenaga Medis dengan Jumlah Penduduk	PERSENTASE	0.28	0.3	0.09	0.31	0.31	100.00%	DINAS KESEHATAN	Sesuai
3	Persentase Pemenuhan sarana dan Prasarana rumah Sakit berdasarkan klasifikasi RS Tipe B.	PERSENTASE	90.60%	74.21%	0%	73.80%	95%	77.68%	RSUD DUNDA	Belum Tercapai
4	Nilai Capaian Pelayanan Publik	NILAI	3.44	3.44	0	4.11	4.1	100.24%	RSUD DUNDA	Melampaui

5	Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	PERSENTASE	52.90%	92.69%	94%	95%	100%	94.95%	PKM	Belum Tercapai
6	Rasio Jumlah Tenaga Medis dengan Jumlah Penduduk	RASIO	0.11	0.17	0.17	0.16%	0.31	0.53%	PKM	Belum Tercapai
	B.1.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							**64.12%**		Belum Tercapai
1	Persentase Pengelolaan Sumber daya Air	PERSENTASE	57.12%	69.13%	51.07%	55.55%	83%	66.92%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
2	Persentase layanan air minum	PERSENTASE	98.06%	100%	99.62%	95.56%	90%	106.18%	DINAS PUPR	Melampaui
3	Persentase layanan air limbah	PERSENTASE	84.80%	99.78%	99.87%	88.47%	80%	110.59%	DINAS PUPR	Melampaui
4	Persentase penanganan sistem drainase	PERSENTASE	50.94%	52.68%	53.72%	54.93%	83%	66.18%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
5	Persentase bangunan gedung yang representatif	PERSENTASE	17.77%	17.78%	17.78%	17.78%	83%	21.43%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
6	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	PERSENTASE	62.33%	66.09%	66.09%	66.09%	82%	80.60%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
7	Persentase penyelenggaraan kebinamargaan	PERSENTASE	43.00%	46.95%	46.10%	47.33%	95%	49.83%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
8	Persentase bangunan konstruksi yang berkualitas	PERSENTASE		33.91%	33.91%	33.91%	45%	75.35%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
9	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	PERSENTASE	100.00%	100.00%	0%	0%	95%	0.00%	DINAS PUPR	Belum Tercapai
	B.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							**96.18%**		Belum Tercapai
1	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	PERSENTASE	0.00	80%	0%	0%	100%	0.00%	DINAS PERKIM	Belum Tercapai
2	Persentase lingkungan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	PERSENTASE	48.33%	62.50%	62.50%	62.50%	95.82%	153.31%	DINAS PERKIM	Melampaui
3	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	PERSENTASE	6.99%	5.07%	5.07%	5.07%	6.23%	122.93%	DINAS PERKIM	Melampaui
4	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU	PERSENTASE	74.63%	80.00%	80.00%	87.32%	83.41%	104.68%	DINAS PERKIM	Melampaui
5	Persentase fasilitasi layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	PERSENTASE		0%	100%	100%	100%	100.00%	DINAS PERKIM	Sesuai

	B.1.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							**89.45%**		Belum Tercapai
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	SATPOL	Sesuai
2	Indeks Ketahanan Daerah	INDEKS	0.29	0.38	0.68	0.6	0.42	142.86%	BNPB	Melampaui
3	Pemenuhan SPM Sub Urusan Kebakaran	PERSENTASE	90.70%	90.74%	96.08%	95.59%	100%	95.5900%	BPBD	Belum Tercapai
4	Cakupan Desa Tanggap Bencana	PERSENTASE	38.05%	39.51%	40.49%	40.49%	100%	40.4900%	BPBD	Belum Tercapai
5	Cakupan Desa Siaga Bencana	PERSENTASE	0%	24.39%	73.17%	68.29%	100%	68.2900%	BPBD	Belum Tercapai
	B.1.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							**62.04%**		Belum Tercapai
1	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	PERSENTASE	53.98%	53.98%	76.23%	81.97%	75%	101.64%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Melampaui
2	Persentase korban tindak kekerasan warga migran tertangani	PERSENTASE			Tidak ada kasus		100%		Bidang Perlindungan & Jamsos	Belum Tercapai
3	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	BIDANG RESOS	Sesuai
4	Persentase PMKS skala kabupaten yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	PERSENTASE	98.42%	98.42%	99.38%	8.55%	99.85%	8.56%	LINTAS BIDANG	Belum Tercapai
5	Persentase keluarga korban bencana mendapat bantuan sosial	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Bidang Perlindungan & Jamsos	Sesuai
6	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	PERSENTASE		0%	0%	0%	100%	0.00%	Bidang Pemberdayaan Sosial	Belum Tercapai
	B.2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							**30.96%**		Belum Tercapai
	B.2.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							**76.82%**		Belum Tercapai
1	Cakupan perencanaan Ketenagakerjaan	PERSENTASE	0		0		100%		Bid Ketenaga kerjaan	Belum Tercapai

2	Rasio Penduduk yang bekerja	PERSENTASE	97.88%	98.17%	97.52%	97.36%	96.80%	100.58%	BPS	Melampaui
3	Tingkat Partisipasi angkatan Kerja	PERSENTASE	65.13%	70.47%	72.89%	71.47%	69.52%	102.80%	BPS	Melampaui
4	Angka sengketa pengusaha pekerja pertahun	PERSENTASE	24.79%	35.71%	79.37%	79.44%	21.51%	27.08%	Bid Hubungan Industrial	Belum Tercapai
	B.2.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							**100.55%**		Melampaui
1	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	PERSENTASE	49.58%	49.58%	49.58%	60.08%	50.80%	118.27%	BPS	Melampaui
2	Rasio KDRT	PERSENTASE	0.017%	0.010%	0.007%	0.005%	0.009%	165.04%	DPPPA	Melampaui
3	Persentase Organisasi Perempuan terfasilitasi	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DPPPA	Sesuai
4	Persentase Profil Gender dan anak	PERSENTASE		100%	100%	100%	100%	100.00%	DPPPA	Sesuai
5	Persentase Dekela	PERSENTASE	0.49%	0.98%	1.46%	1.95%	9.75%	20.00%	DPPPA	Belum Tercapai
6	Cakupan Layanan anak Korban kekerasan	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DPPPA	Sesuai
	B.2.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							**73.01%**		Belum Tercapai
1	Persentase Kemandirian Pangan Daerah	PERSENTASE	31.21%	34.14%	34.14%	34.14%	100%	34.14%	DKP	Belum Tercapai
2	Persentase Wilayah yang Memiliki Kawasan Food Estate	PERSENTASE	57.89%	57.89%	57.89%	57.89%	100%	57.89%	DKP	Belum Tercapai
3	Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DKP	Sesuai
4	Cakupan Pengawasan Keamanan Pangan	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DKP	Sesuai
	B.2.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							**97.46%**		Belum Tercapai
1	Persentase pengelolaan izin lokasi	PERSENTASE	50%	50%	58.33%	58.33%	100%	58.33%	DINAS PERKIM	Belum Tercapai

2	Persentase penyelesaian kasus tanah negara	PERSENTASE	50%	50%	58.33%	58.33%	91.67%	63.63%	DINAS PERKIM	Belum Tercapai
3	Persentase luas lahan bersertifikat	PERSENTASE		17.53%	18.95%	39.04%	22.91%	170.40%	DINAS PERKIM	Melampaui
	B.2.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							**82.96%**		Belum Tercapai
1	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	PERSENTASE	4%	0%	0%	2%	7%	0.00%	DLH	Belum Tercapai
2	Indeks Kualitas Air	INDEKS	46.36	51.38	60	56.67	52.6	107.74%	Aplikasi IKLH Dirjen PPKL	Melampaui
3	Indeks Tutupan Lahan	INDEKS	46.47	46.48	55.16	53.70	55.73	98.98%	Aplikasi IKLH Dirjen PPKL	Belum Tercapai
4	Persentase Pengawasan Penghasil Limbah B3	PERSENTASE		100%	88%	100%	100%	100.00%	DLH	Sesuai
5	Persentase tingkat kepatuhan penanggung jawab usaha.	PERSENTASE		25.00%	35.80%	45%	75%	60.00%	DLH	Belum Tercapai
6	Persentase pemahaman masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	PERSENTASE		58%	10%	20%	100%	88.33%	DLH	Belum Tercapai
7	Persentase Aduan Lingkungan Hidup Yang Tertangani	PERSENTASE		100.00%	100%	133%	100%	133.00%	DLH	Melampaui
8	Persentase cakupan area pelayanan persampahan	PERSENTASE	21.05%	26.32%	31.58%	35.84%	47.37%	75.66%	DLH	Belum Tercapai
	B.2.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							**98.40%**		Belum Tercapai
1	Cakupan layanan pendaftaran penduduk	PERSENTASE	96.31%	97.05%	98.96%	97.19%	100%	97.19%	BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK	Belum Tercapai
2	Cakupan layanan pencatatan sipil	PERSENTASE	92.59%	93.76%	96.00%	94.24%	100%	94.24%	BIDANG PENCATATAN SIPIL	Belum Tercapai
3	Cakupan pengelolaan informasi adminduk	PERSENTASE	100.00%	100.00%	100%	100%	100%	100.00%	BID. PENG. INFORMASI ADM. KEPEN	Sesuai

4	Persentase data kependudukan yang tersaji melalui profil kependudukan	PERSENTASE	75.00%	125.00%	100%	100%	100%	100.00%	BID. INOVASI KEPEND	Sesuai
5	Persentase Desa mandiri	PERSENTASE	0.00%	6.80%	11.52%	30.89%	9.40%	122.54%	Kementerian Desa dan PDT	Melampaui
6	Indeks kepuasan layanan pemerintah desa terhadap masyarakat	PERSENTASE	65	84.70	88.74	88.7	88.31-100	100.00%	DINAS PMD	Sesuai
7	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang terberdayakan	PERSENTASE	50%	100%	100%	100%	100%	100.00%	DINAS PMD	Sesuai
8	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	PERSENTASE	0.64%	1.552%	1.667%	1.37%	0.15%	10.94%	OLAH DATA SUMBER DISDUKCAPIL	Belum Tercapai
9	Total Fertiliy Rate	PERSENTASE	2.30%	2.29%	2.29%		1%	43.67%	BKKBN	Belum Tercapai
10	Rata-rata jumlah anak per keluarga	ANAK	2.23	2.29	0.92	0.93	2 anak	215.38%	OLAH DATA SUMBER DISDUKCAPIL	Melampaui
	B.2.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							**36.17%**		Belum Tercapai
1	Tingkat ketertiban penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diwilayah Kabupaten Gorontalo	PERSENTASE	73.58%	73.70%	69.31%	72.34%	100%	72.34%	Dinas Perhubungan	Belum Tercapai
2	Persentase Pemenuhan Persyaratan Pembangunan Pelabuhan Bilato	PERSENTASE			0%		100%	0.00%	Dinas Perhubungan	Belum Tercapai
	B.2.8. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							**13.73%**		Belum Tercapai
1	Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah	INDEKS	0	0	0	0	75 (A)	0.00%	Bidang Informasi Komunikasi Pemerintahan	Belum Tercapai
2	Persentase penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	PERSENTASE	31.71%	17.07%	13.21%	21.00%	76.47%	27.46%	Bidang Aplikasi dan Informatika	Belum Tercapai
	B.2.9. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							**19.16%**		Belum Tercapai
1	Persentase Koperasi Yang Melaksanakan Rapat Akhir Tahun (RAT)	PERSENTASE	19.51%	40.24%	0.15%	9.35%	84.80%	11.02%	Bidang Koperasi	Belum Tercapai

2	Persentase Pengurus Koperasi Tersertifikat	PERSENTASE	4.58%	11.14%	6.14%	11.14%	27.32%	40.79%	Bidang Koperasi	Belum Tercapai
3	Persentase Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Difasilitasi	PERSENTASE	0.90%	0.69%	6.55%	0.48%	3.18%	15.04%	Bidang UKM	Belum Tercapai
4	Kontribusi Startup Terhadap UMKM	UMKM	1.51%	0.68%	0.15%	0.18%	1.80%	9.8%	Bidang UKM	Belum Tercapai
	B.2.10. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							**-542.16%**		Belum Tercapai
1	Pertumbuhan Investasi	PERSENTASE	98.67%	-13.72%	228.25%	-54.34%	5.48%	-991.58%	Bidang Penanaman Modal	Belum Tercapai
2	Persentase Peningkatan Investasi	PERSENTASE	77.40%	-112.39%	241.97%	-282.59%	14%	-2018.52%	Bidang Penanaman Modal	Belum Tercapai
3	Indeks Kepuasan Investor	BOBOT	0	3.70	3.55	3.55	3 Bobot	118.33%	Bidang Pelayanan Perizinan	Melampaui
4	Nilai investasi	RUPIAH	637,115,332,538	549,704,540,000	1,804,425,867,400	823,924,050,957	1,017,642,226,441	80.96%	Bidang Pengendalian dan Pengawasan	Belum Tercapai
5	Persentase Data Yang Tersaji Melalui Sistem Informasi Penanaman Modal	PERSENTASE		100%	100%	100.00%	100%	100.00%	Bidang Pelayanan Perizinan	Sesuai
	B.2.11. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									Belum Tercapai
1	Persentase Organisasi Kepemudaan yang dibina	PERSENTASE	100%	80.00%	80.00%	80%	100%	80.0%	Bidang Kepemudaan Disporapar	Belum Tercapai
2	Persentase Cabang Olahraga yang terbina	PERSENTASE	100%	78.95%	42.11%	84.21%	100%	84.21%	Bidang Keolahragaan Disporapar	Belum Tercapai
3	Persentase Kegiatan Organisasi Kepramukaan yang terfasilitasi	PERSENTASE				250%	100%	250.00%	Bidang Kepemudaan Disporapar	Melampaui
	B.2.12. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							**4.42%**		Belum Tercapai
1	Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral	PERSENTASE	9.76%	2.44%	3.77%	3.77%	85.29%	4.42%	Bidang Statistik dan Persandian	Belum Tercapai
	B.2.13. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							**24.83%**		Belum Tercapai
1	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	PERSENTASE	7.32%	17.07%	22.64%	22.64%	91.18%	24.83%	Bidang Statistik dan Persandian	Belum Tercapai

	B.2.14. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							**100.00%**		Sesuai
1	Meningkatnya mutu dan jumlah lembaga formal dan non formal yang terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra	PERSENTASE				100%	100%	100.00%	DIKBUD	Sesuai
2	Persentase Seni Budaya yang diakui sebagai Geoculture (Situs Budaya)	PERSENTASE	100%	100%	0%	100%	100%	100.00%	DIKBUD	Sesuai
3	Persentase cagar Budaya yang dilestarikan	PERSENTASE	100%	100%	0%	100%	100%	100.00%	DIKBUD	Sesuai
	B.2.15. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							**191.08%**		Melampaui
1	Persentase peningkatan kunjungan perpustakaan per tahun	PERSENTASE	20.50%	14.73%	28.81%	28.83%	15.08%	191.08%	Bidang Perpustakaan	Melampaui
	B.2.16. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							**88.00%**		Belum Tercapai
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip sesuai Standar	PERSENTASE	17.39%	34.78%	17.39%	9.30%	85%	92.78%	Bidang Kearsipan	Belum Tercapai
2	Persentase Arsip Vital Gorontalo yang terlindungi	PERSENTASE	17.39%	39.13%	17.39%	9.30%	100%	83.21%	Bidang Kearsipan	Belum Tercapai
	B.3. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							**76.61%**		Belum Tercapai
	B.3.1. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							**51.01%**		Belum Tercapai
1	Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	TON/TAHUN	21,758.50	24,682.73	24384.21	24628.14	25374.37	97.06%	Bidang Perikanan Tangkap	Belum Tercapai
2	Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	TON/TAHUN	6,651.05	6,882.18	6978.78	6983	48229	14.48%	Bidang Perikanan Budidaya	Belum Tercapai
3	Persentase laporan kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti	PERSENTASE		50%	0%	0%	100%	0.00%	Bidang Perikanan Tangkap	Belum Tercapai
4	Jumlah produksi olahan ikan (ton/tahun)	TON/TAHUN	6,546.69	6,575.86	7037.9	6577.04	7111.53	92.48%	Bidang Penguatan Daya Saing Perikanan	Belum Tercapai
	B.3.2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							**107.04%**		Melampaui
1	Lama Kunjungan Wisata	HARI/TAHUN	1.41	1.3	1.57		1-3	100.00%	Bidang Kepariwisataan /BPS	Sesuai
2	Kunjungan wisata	PERSENTASE	113.23%	102.78%	116.31%	121.13%	100.00%	121.13%	Bidang Kepariwisataan Disporapar	Melampaui
3	Persentase Industri (Usaha) Kreatif yang dibina dan mendapatkan perlindungan hak kekayaan intelektual	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Bidang Ekonomi Kreatif Disporapar	Sesuai
	B.3.3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							**76.88%**		Belum Tercapai

1	Produktivitas Padi	TON/Ha	4.18	5.52	5.09	5.14	4.73 Ton/Ha	108.67%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura/ BPS	Melampaui
2	Produktivitas Jagung	TON/Ha	4.27	5.02	4.71	4.949	5.00 Ton/Ha	98.98%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura/ BPS	Belum Tercapai
3	Produktivitas Cabai Rawit	TON/Ha	9.92	6.4	4.85	5.50	4.75 Ton/Ha	115.79%	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura/ BPS	Melampaui
4	Produktivitas Bawang Merah	TON/Ha	9.92	2.9	4.64	4.08	6.25 Ton/Ha	65.28%	Bid. Tanaman Pangan dan Hortikultura/ BPS	Belum Tercapai
5	Produktivitas Kelapa	TON/Ha	1.43	1.43	1.43	1.43	1.53 Ton/Ha	93.46%	Bidang Perkebunan/ BPS	Belum Tercapai

6	Produktivitas Kopi	Kg/Ha	232	232	232	232	245.74kg/ha	94.41%	Bidang Perkebunan/ BPS	Belum Tercapai
7	Persentase Lahan yang terfasilitasi pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	PERSENTASE	100%	100%	1%	0.00%	100%	0.00%	Bid.Tanaman Pangan dan Hortikultura/ PSP	Belum Tercapai
8	Persentase pelaksanaan penyuluhan pertanian / persentase kelompok tani berbadan hukum	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Bidang Penyuluhan	Sesuai
9	Persentase Penurunan Ternak yang terinfeksi PHMS	PERSENTASE	0.667	0.98	1.18	1	>1	99.01%	DINAS PETERNAKAN	Belum Tercapai
10	Persentase Ternak yang diikutkan AUTS	PERSENTASE	2.10%	1.85%	0.25%	0%	2%	0.00%	DINAS PETERNAKAN	Belum Tercapai
11	Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia	PERSENTASE	2.58%	2.50%	2.59%	2.47%	2.50%	98.800%	DINAS PETERNAKAN	Belum Tercapai
12	Cakupan PAH ASUH	PERSENTASE	100.00%	100.00%	100%	100.00%	100%	100.00%	DINAS PETERNAKAN	Sesuai
13	Cakupan Kelompok Peternakan yang memiliki Badan Hukum	PERSENTASE	25.00%	50.00%	50%	25.00%	100%	25.00%	DINAS PETERNAKAN	Belum Tercapai
	B.3.4. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL							**20.00%**		Belum Tercapai
1	Cakupan Potensi Panas Bumi yang terkelola	TITIK POTENSI	1 Titik Potensi	1 Titik Potensi	1 Titik Potensi	0	5 Titik Potensi	20.00%	Perhitungan Bidang Industri	Belum Tercapai
	B.3.5. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							**130.57%**		Melampaui
1	Persentase Perusahaan dan Gudang Terdaftar dan Memiliki Izin	PERSENTASE	8.13%	4.32%	0.00%	15.51%	3.15%	137.00%	Perhitungan Bidang Perdagangan	Melampaui
2	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	PERSENTASE	8.88%	9.33%	9.33%		8.94%	104.32%	BPS	Melampaui

3	Indeks Harga Implisit Sektor Perdagangan	INDEKS	165.92	156.62	156.62		186	84.20%	BPS	Belum Tercapai
4	Jumlah Ekspor Bersih Perdagangan	$	$18,745,602.00	$41,528,478.24	$14,616,954.00		$15,534,033.35	94.10%	Diskoperindagko Prov Gtlo	Belum Tercapai
5	Persentase Aduan Konsumen yang dituntaskan	PERSENTASE	78.57%	90.00%	81.63%	100.00%	35.00%	233.24%	Data BPSK Kab. Gorontalo	Melampaui
	B.3.6. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							**84.10%**		Belum Tercapai
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	PERSENTASE	4.39%	4.58%	4.58%		2.10%	217.87%	BPS	Melampaui
2	Persentase Industri yang Memiliki Izin	PERSENTASE		6.43%	6.28%	0.35%	24.37%	25.76%	Perhitungan Bidang Industri	Belum Tercapai
3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINAS	PERSENTASE	0.16%	0.19%	0.18%	0.69%	2.10%	8.66%	Perhitungan Bidang Industri	Belum Tercapai
	B.3.7. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI							**66.67%**		Belum Tercapai
1	Cakupan perencanaan Ketransmigrasian	PERSENTASE	0.00%		100%		100%	100.00%	Bid Transmigrasi	Sesuai
2	Kawasan Permukiman transmigrasi yang terbangun	KAWASAN	1			1	1 Kawasan	100.00%	Bid Transmigrasi	Sesuai
3	Persentase satuan permukiman yang dikembangkan	PERSENTASE	100%	100%	100%	0%	100%	0.00%	Bid Transmigrasi	Belum Tercapai
	B.4. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							**108.59%**		Melampaui

1	Persentase ketepatan waktu penyajian dokumen penyelenggaraan pemerintahan	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	Sesuai
2	Persentase produk hukum yang diundangkan	PERSENTASE	97.01%	79.10%	100%	120.00%	100%	120.0%	BAGIAN HUKUM	Melampaui
3	Persentase kelembagaan adat, agama dan sosial kemasyarakatan yang terlayani	PERSENTASE	100%	100%	100%	0%	100%	100.00%	BAGIAN KESRA	Sesuai
4	Persentase kerjasama strategis yang dilaksanakan	PERSENTASE	376.92%	230.77%	334.62%	210.71%	100%	210.71%	BAGIAN KERJASAMA	Melampaui
5	Cakupan pengendalian perekonomian dan pembangunan	PERSENTASE	100%	100.93%	100%	0%	100%	100.00%	BAGIAN EKO & ADM. PEMB	Sesuai
6	Persentase aduan pengadaan barang dan jasa yang tertanggal	PERSENTASE	100%	100%	100%	Tidak ada Pengaduan yg masuk	100%	100.00%	BAGIAN PBJ	Sesuai
7	Persentase Capaian Prolegda	PERSENTASE	42.86%	18.75%	39.29%	29.41%	100%	29.41%	SEKRETARIAT DPRD	Belum Tercapai
	B.5. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							**90.20%**		Belum Tercapai
1	Ketepatan waktu penetapan dokumen perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	BAPELITBANGDA	Sesuai
2	Persentase kesesuian perencanaan dan penganggaran	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	BAPELITBANGDA	Sesuai
3	Tingkat ketepatan waktu penetapan APBD	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Bidang Anggaran	Sesuai
4	Persentase tertib administrasi Barang Milik Daerah	PERSENTASE	73.00%	94.44%	100.00%	61%	100%	61.11%	Bidang Aset	Belum Tercapai
5	Rasio Kemandirian Pendapatan daerah	PERSENTASE	8.44%	9.72%	12.70%	11.39%	16%	71.20%	BADAN PENDAPATAN	Belum Tercapai

6	Persentase terpenuhinya kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja	PERSENTASE	53.92%	59.90%	58.12%	58.12%	72.05%	80.67%	BKPSDM	Belum Tercapai
7	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	PERSENTASE	12.37%	15.19%	13.78%	13.78%	17.67%	77.99%	BKPSDM	Belum Tercapai
8	Persentase Penerapan Hasil Riset dan Evaluasi Pengembangan Potensi Daerah dan Kebijakan Pemerintah Daerah	PERSENTASE	121.95%	123.46%	123.46%	116.28%	89%	130.65%	BAPELITBANGDA	Melampaui
	B.6. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN							**100.00%**		Sesuai
1	Persentase pengawasan OPD yang menuju zona bebas korupsi	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	INSPEKTORAT	Sesuai
2	Persentase Pendampingan OPD menuju zona birokrasi bersih melayani	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	INSPEKTORAT	Sesuai
	B.7. UNSUR KEWILAYAHAN							**38.66%**		Belum Tercapai
1	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	PERSENTASE	63.61%	73.84%	59.07%	49.12%	100%	49.12%	SELURUH KECAMATAN	Belum Tercapai
2	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	PERSENTASE	73.68%	82.37%	79.82%	47.81%	100%	47.81%	SELURUH KECAMATAN	Belum Tercapai
3	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	PERSENTASE	63.73%	66.88%	41.67%	48.03%	100%	48.03%	SELURUH KECAMATAN	Belum Tercapai
4	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	PERSENTASE	70.02%	77.89%	54.95%	48.33%	100%	48.33%	SELURUH KECAMATAN	Belum Tercapai
5	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	PERSENTASE	0.00%	21.43%	75%		100%	0.00%	SELURUH KELURAHAN	Belum Tercapai
	B.8. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM							**98.59%**		Belum Tercapai

1	Indeks literasi Pancasila	INDEKS	5	4.77	4.92	4.94	Scala 5	98.73%	Bidang BIWKKB	Belum Tercapai
2	Angka Melek Politik	INDEKS	5	4.8	4.88	4.90	Scala 5	97.90%	Bidang Politik Dalam Negeri	Belum Tercapai
3	Persentase Ormas Memiliki SKT (Aktif)	PERSENTASE	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%	Bidang KESBOK	Sesuai
4	Indeks Kerukunan	INDEKS	5	4.78	4.91	4.92	Scala 5	98.20%	Bidang KESBOK	Belum Tercapai
5	Indeks Potensi Konflik	INDEKS	5	4.85	4.9	4.91	Scala 5	98.11%	Bidang PKKN	Belum Tercapai
C.	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**							**67.50%**		Belum Tercapai
1	Indeks Ekonomi Inklusif	Indeks	5.45	5.45	5.53		8	69.13%		Belum Tercapai
2	Dependency Ratio	Rasio Non Produktif dengan Produktif	0.4324	0.4275	0.4452	0.4474	1:4	55.88%	BPS	Belum Tercapai
3	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	55.65	54.65	65.56	78.57	81-90	97.00%	BKPSDM	Belum Tercapai
4	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	82.72	83.27	83.60		93	89.89%	BPS	Belum Tercapai
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	65.66	67.42	71.89	69.44	>70	99.19%	DLH	Belum Tercapai
6	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	27.32	53.82	50.68	49.18	801-1001	61.40%	LITBANG	Belum Tercapai

7	Skor Iklim Investasi	Skor	0	0	0	0	70 -80	0.00%	Bidang Penanaman Modal	Belum Tercapai
								79.05%		Belum Tercapai

Kondisi Umum Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kabupaten Gorontalo

Dalam rangka mengintegrasikan indikator TPB yang sesuai dengan kondisi Kabupaten Gorontalo dan mendukung program Pemerintah untuk mencapai sasaran TPB, ditetapkan bahwa jumlah indikator TPB yang dievaluasi dalam dokumen RPJMD Kabupaten Gorontalo adalah sebanyak 220 indikator. Indikator ini dibagi ke dalam empat pilar utama yaitu sosial, ekonomi, hukum dan tata kelola, serta lingkungan dan dikelompokkan ke dalam 28 kategori urusan sebagai berikut;

Tabel 2.70 Jumlah Indikator TPB Berdasarkan Urusan

No	Jenis Urusan	Jumlah Indikator TPB
1	Sosial	9
2	Kesehatan	45
3	Pendidikan	17
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	17
6	Administrasi Dukcapil	4
7	Keuangan	12
8	Perumahan dan Kawasan Permukiman	4
9	Statistik	14
10	Tenaga Kerja	12
11	Pangan	5
12	Kominfo	6
13	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	14
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)	2
15	Lingkungan Hidup	14
16	Koperasi dan Usaha Mikro Kecil & Menengah	2
17	Pariwisata	4
18	Penanaman Modal	1
19	Perindustrian	4
20	Perhubungan	2
21	Kebudayaan	1
22	Kelautan dan Perikanan	2
23	Kehutanan	3
24	Penelitian dan Pengembangan	1
25	Perencanaan	1
26	Kesehatan, PPKB	5
27	Pendidikan, Litbang	1
28	Pemberdayaan Masyarakat Desa	4

Sumber: KLHS Kabupaten Gorontalo

Dari total 220 indikator, sebanyak 59 indikator atau 26,8% dari total 220 indikator TPB Kabupaten Gorontalo termasuk dalam kategori Standar Pelayanan Minimal (SPM). Oleh karena itu, pemenuhan indikator-indikator SPM ini menjadi prioritas utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Diharapkan, pada tahap awal pelaksanaan dokumen rencana pembangunan daerah, seluruh 59 indikator ini dapat mencapai target sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kebijakan nasional. SPM di bidang kesehatan memiliki jumlah indikator TPB terbanyak, yaitu 29 indikator (49% dari total indikator SPM) dan 13,2% dari total indikator TPB, sedangkan SPM di bidang perumahan rakyat memiliki jumlah indikator paling sedikit, yaitu hanya 1 indikator (2% dari total indikator SPM).

Tabel 2.71 Jumlah Indikator TPB Berdasarkan SPM

No	Jenis Urusan	Jumlah Indikator TPB
1	Sosial	3
2	Kesehatan	29
3	Pendidikan	13
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6
5	Ketenteraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	7
6	Perumahan Rakyat	1

Sumber: KLHS Kabupaten Gorontalo

Berdasarkan analisis data, capaian indikator TPB di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa 27,3% dari total indikator telah diimplementasikan dan mencapai target nasional. Sementara itu, indikator yang telah dilaksanakan namun belum mencapai target tercatat sebesar 22,3%. Indikator yang dilaksanakan tanpa target kebijakan nasional mencapai 26,4%, dan indikator yang tidak memiliki data atau belum dilaksanakan mencapai 24,1%. Dari keempat kategori tersebut, masih terdapat lebih dari 20% indikator yang belum mencapai target nasional, belum terlaksana, atau tidak memiliki data. Kondisi ini menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah, yang perlu memberikan prioritas pada program-program terkait TPB.

Tabel 2.72 Capaian Pelaksanaan TPB di Kabupaten Gorontalo

No	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Jumlah Indikator	Telah Mencapai Target Nasional (SS)	Belum Mencapai Target Nasional (SB)	Terlaksana (TT)	Belum Terlaksana/Tidak Ada Data (N/A)
1	Tanpa Kemiskinan	28	10	8	8	3

2	Tanpa Kelaparan	12	7	2	0	2
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	36	14	6	10	6
4	Pendidikan Berkualitas	13	3	6	3	1
5	Kesetaraan Gender	13	5	2	2	4
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	18	3	5	8	2
7	Menjamin Akses Energi	3	1	0	1	1
8	Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan Layak	18	3	5	5	5
9	Infrastruktur, Industri dan Inovasi	12	1	6	2	3
10	Mengurangi Kesenjangan	7	5	0	1	1
11	Kota dan Permukiman Berkelanjutan	12	1	2	5	4
12	Pola Produksi dan Konsumsi Berkelanjutan	5	0	2	0	3
13	Penanganan Perubahan Iklim	1	0	0	0	1
14	Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera, dan Maritim	2	0	1	1	0
15	Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	4	0	1	0	3
16	Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	22	4	1	8	9
17	Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	14	3	2	4	5
Total		**220**	**60**	**49**	**58**	**53**

Sumber: KLHS Kabupaten Gorontalo

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Gambaran umum keuangan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan ini mengamanatkan setiap pemerintah daerah untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab, serta disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah juga menekankan pentingnya penyusunan proyeksi keuangan dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, agar perencanaan berbasis anggaran (budget-based planning) dapat disinergikan dengan sasaran pembangunan yang ditetapkan.

Seiring dengan kebijakan pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, terdapat regulasi terkait prinsip money follow function

yang berarti bahwa setiap kewenangan baru yang dilimpahkan dari pusat akan diikuti oleh pembiayaan yang diserahkan bersama kewenangan tersebut. Berdasarkan regulasi ini, Pemerintah Daerah akan menerima alokasi anggaran yang relevan dari Pemerintah Pusat sebagai pendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan yang baru diserahkan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal.

Kondisi keuangan daerah memberikan landasan kuat dalam menentukan strategi pengalokasian sumber daya keuangan yang tersedia, sehingga perencanaan pembangunan dapat terwujud secara realistis. Dengan memahami komposisi pendapatan asli daerah, dana transfer, belanja daerah, dan pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat menetapkan program prioritas yang sesuai dengan kapasitas keuangan. Gambaran ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan pengeluaran dan pemasukan, namun juga sebagai alat untuk menganalisis risiko fiskal dan menyiapkan strategi pembiayaan alternatif yang dapat mendukung keberlanjutan pembangunan, dan akan menjadi landasan dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gorontalo selama lima tahun ke depan, dengan dukungan penuh dari pembiayaan pusat yang menyertai pelimpahan kewenangan tersebut.

2.5.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu Kabupaten Gorontalo

Melalui tinjauan terhadap realisasi pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer, serta pola belanja langsung dan tidak langsung, Pemerintah Kabupaten Gorontalo dapat melihat seberapa efektif alokasi anggaran sebelumnya dalam mencapai sasaran pembangunan. Selain itu, analisis ini juga membantu dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas fiskal daerah, seperti ketergantungan pada dana transfer, kemampuan menggali sumber PAD, dan efisiensi belanja daerah.

2.5.1.2. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Gorontalo dapat dilihat dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo dalam lima tahun terakhir menunjukkan penurunan, seperti ditunjukkan tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.73 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Rerata Pertumbuhan %
2018	1.401,59	1.457,05	103,96	0
2019	1.537,96	1.499,15	97,48	2,89
2020	1.485,58	1.408,59	94,82	-6,04
2021	1.410,92	1.351,19	95,77	-4,08
2022	1.385,65	1.255,10	90,58	-7,11
2023	1.473,40	1.352,28	91,78	-7,74
2024	1.517,61	1.471,71	96,98	8,83

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd; akses Agustus 2024.

Pada tahun 2019, realisasi pendapatan mencapai 97,48% dari anggaran yang telah ditetapkan, yang berarti ada peningkatan sebesar 2,89% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, sejak tahun 2020 hingga 2023, realisasi pendapatan daerah mengalami tren penurunan, dengan persentase realisasi yang berada di bawah 100% dan tingkat pertumbuhan yang mengalami kontraksi secara berkelanjutan. Di tahun 2024, realisasi pendapatan meningkat 8.83% dari periode sebelumnya.

Kondisi penurunan pada 2019-2023 mengindikasikan tantangan dalam pencapaian target pendapatan daerah. Penurunan tajam pada tahun tersebut, dengan realisasi yang hanya mencapai 93,82% dari anggaran, disebabkan oleh berbagai faktor ekonomi yang terdampak oleh pembatasan kegiatan dan penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu, penurunan secara berturut-turut pada tahun-tahun berikutnya mengindikasikan bahwa pemulihan pendapatan daerah berjalan lambat dan menghadapi kendala struktural serta perubahan kebijakan yang memengaruhi arus pendapatan.

Tabel 2.74 Proporsi Sumber Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo (%)

TAHUN	PAD	TKDD	LAINNYA
2019	10.37	85.59	4.04
2020	9.10	85.49	5.41
2021	9.06	86.76	4.18
2022	10.24	89.35	0.41

2023	11.20	88.14	0.66
2024	11.20	88.51	0.29

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd; akses Agustus 2024

Data ini menggambarkan peran dominan TKDD sebagai sumber pendapatan utama bagi Kabupaten Gorontalo, yang secara konsisten mencakup lebih dari 80% total pendapatan selama lima tahun terakhir. Sementara itu, kontribusi PAD cenderung berada pada kisaran rendah, meskipun ada sedikit peningkatan pada tahun 2022 - 2024 Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Gorontalo masih sangat bergantung pada dana transfer dari pusat, yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakstabilan keuangan daerah apabila terjadi perubahan kebijakan nasional terkait transfer dana. Sementara itu, meskipun proporsi PAD sedikit meningkat di tahun 2022 - 2024, angkanya masih rendah jika dibandingkan dengan kontribusi TKDD. Proporsi sumber pendapatan lain yang awalnya cukup tinggi pada tahun 2020 dengan 5.41%, mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yang pada tahun 2024 tercatat hanya 0.29%.

Tabel 2.75 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2019	1,537.96	1,499.15	97.48
2020	1,485.58	1,408.59	94.82
2021	1,410.92	1,351.19	95.77
2022	1,385.65	1,255.10	90,58
2023	1,473.40	1,352.28	91.78
2024	1,517.61	1,471.71	96.98

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd; akses Agustus 2024

Tren anggaran dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo pada Tahun Anggaran 2019 hingga 2024 mencerminkan dinamika keuangan daerah, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kebijakan fiskal nasional, pertumbuhan ekonomi, serta kondisi khusus seperti pandemi COVID-19. Pendapatan daerah merupakan salah satu elemen kunci dalam struktur APBD, karena menjadi sumber utama untuk membiayai belanja dan program pembangunan di daerah.

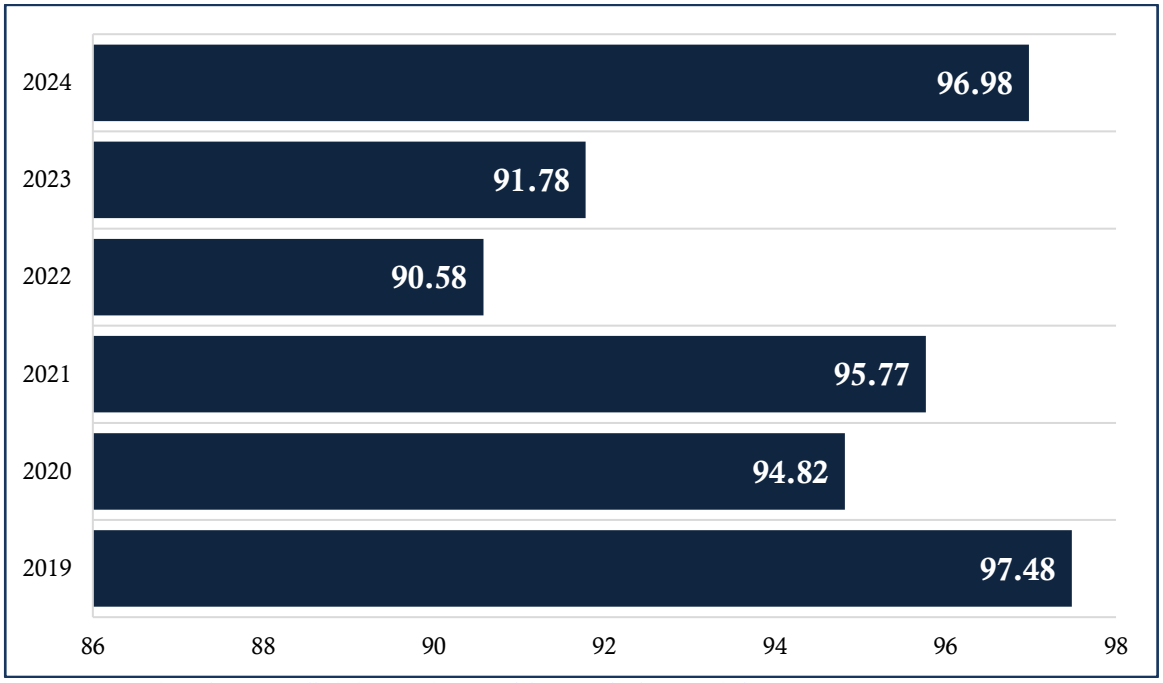

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Gambar 2.19 Persentase Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Komponen pendapatan daerah; pertama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Kedua, Dana Transfer, yang diterima dari pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Insentif Daerah (DID). Ketiga, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah termasuk hibah dari pemerintah pusat atau lembaga lain, serta penerimaan lainnya yang dapat digunakan oleh daerah.

Anggaran pendapatan 2024 terus mengalami peningkatan, seiring dengan pulihnya ekonomi daerah dan nasional. PAD semakin kuat didukung oleh perbaikan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta efisiensi dalam pengelolaan kekayaan daerah. Pada tahun 2024, realisasi pendapatan diharapkan mencapai target atau bahkan melampaui target, dengan PAD yang terus meningkat. Dana transfer dari pemerintah pusat masih tetap stabil, tetapi peran PAD dalam pendapatan daerah semakin besar, menunjukkan peningkatan kemandirian fiskal daerah.

2.5.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber pendapatan dalam wilayahnya sendiri, dan menjadi salah satu sumber utama untuk membiayai belanja daerah. PAD mencerminkan kemandirian fiskal suatu

daerah, di mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menghasilkan pendapatan tanpa bergantung sepenuhnya pada transfer dari pemerintah pusat.

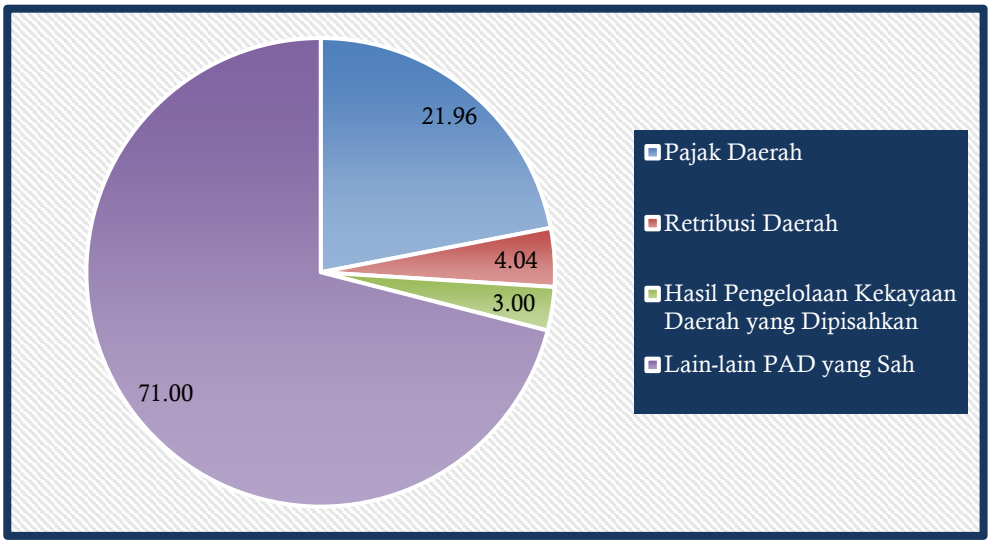

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Gambar 2.20 Persentase Komponen Pembentuk Pendapatan Asli Daerah

Selama periode 2019-2024, PAD menunjukkan tren yang berfluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020-2021 akibat pandemi, namun mulai pulih pada 2022 hingga 2024. Pajak daerah seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, restoran, dan hiburan menjadi sumber utama PAD. Retribusi daerah juga menjadi komponen penting dalam PAD.

Tabel 2.76 Realisasi Pendapatan Asli Daerah/PAD (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Realisasi PAD
2019	155,47
2020	128,16
2021	122,47
2022	128,46
2023	151,40
2024	164,77

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Fluktuasi dalam realisasi PAD, dengan jumlah tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar Rp155,47 miliar dan sempat mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun ada peningkatan signifikan pada tahun 2023 dengan realisasi Rp151,4 miliar, angka ini belum kembali ke capaian tertinggi yang diraih pada 2019. Pendapatan yang diperoleh dari pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh pajak daerah termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Tabel 2.77 Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	33,06	31,30
2020	44,95	30,72
2021	31,52	28,90
2022	57,14	32,44
2023	40,75	33,24
2024	45,00	33,97

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Pada tahun 2019, anggaran pajak daerah ditetapkan sebesar Rp33,06 miliar dengan realisasi mencapai Rp31,30 miliar atau hampir mendekati target. Namun, pada tahun 2020 meskipun anggaran meningkat signifikan menjadi Rp44,95 miliar, realisasi justru menurun menjadi Rp30,72 miliar, menunjukkan adanya deviasi antara target dan capaian.

Tahun 2021, anggaran pajak daerah menurun menjadi Rp31,52 miliar dengan realisasi sebesar Rp28,90 miliar, yang mencerminkan tren penurunan baik dari sisi target maupun realisasi dibanding tahun sebelumnya. Pada 2022, anggaran kembali melonjak menjadi Rp57,14 miliar, tetapi realisasi hanya mencapai Rp32,44 miliar atau jauh di bawah target yang ditetapkan.

Selanjutnya, pada tahun 2023, anggaran pajak daerah mengalami penurunan menjadi Rp40,75 miliar, dan realisasi mencapai Rp33,24 miliar, yang sedikit lebih baik dibanding tahun sebelumnya dari sisi realisasi. Di tahun 2024, anggaran naik menjadi Rp45,00 miliar dengan capaian realisasi hingga Rp33,97 miliar.

Tabel 2.78 Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	4,98	5,31
2020	7,03	2,59
2021	3,05	3,63
2022	9,00	5,21
2023	9,06	6,12
2024	12,16	7,94

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Pada tahun 2019, realisasi retribusi sebesar Rp5,31 miliar melampaui anggaran yang ditetapkan, yaitu Rp4,98 miliar. Namun, mulai tahun 2020 hingga 2023, realisasi retribusi menunjukkan tren ketertinggalan yang signifikan dari anggaran. Terlebih pada tahun 2020, realisasi retribusi hanya mencapai Rp2,59 miliar atau kurang dari setengah dari target anggaran sebesar Rp7,03 miliar. Meskipun ada peningkatan bertahap dalam

realisasi retribusi pada tahun-tahun berikutnya, angka tersebut tetap berada di bawah target, dengan realisasi tahun 2023 sebesar Rp6,12 miliar dari anggaran Rp9,06 miliar. Retribusi ini merupakan penerimaan yang diperoleh dari pembayaran masyarakat untuk penggunaan layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, seperti retribusi parkir, retribusi pasar, retribusi kebersihan, dan lain-lain.

Tabel 2.79 Anggaran dan Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	5,45	5,45
2020	3,08	3,08
2021	3,54	3,54
2022	3,08	3,06
2023	4,50	4,54
2024	4,10	4,10

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan mencapai Rp5,45 miliar, sesuai anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5,45 miliar, yang menunjukkan kinerja positif. Namun, pada tahun 2020, realisasi mengalami penurunan signifikan hingga Rp3,08 miliar. Penurunan ini dapat mengindikasikan dampak dari kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga mempengaruhi pendapatan dari investasi atau pengelolaan aset daerah. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi terus menunjukkan kestabilan, dengan capaian realisasi yang sesuai dengan anggaran yang ditetapkan, hingga peningkatan pada tahun 2023 yang mencapai Rp4,54 miliar, melebihi sedikit dari anggaran sebesar Rp4,50 miliar. Di tahun 2024 realisasi hanya sebesar 4,10 miliar. Sumber pendapatan lain yang sah menurut peraturan, seperti bunga bank, denda, atau hasil kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Tabel 2.80 Anggaran dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	124,86	113,41
2020	127,51	91,77
2021	107,23	86,39
2022	121,19	87,75
2023	177,83	107,51
2024	116,23	118,76

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Pada tahun 2019, realisasi penerimaan sebesar Rp113,41 miliar tidak melampaui anggaran yang ditetapkan sebesar Rp124,86 miliar. Namun, pada tahun 2020, realisasi menurun menjadi Rp91,77 miliar, di bawah anggaran yang lebih tinggi, yaitu Rp127,51 miliar. Penurunan ini dapat disebabkan oleh dampak ekonomi akibat pandemi, yang menghambat kemampuan daerah untuk mencapai target pendapatan. Tren ini berlanjut pada tahun 2021 dan 2022, dengan realisasi yang tetap berada di bawah anggaran yang ditetapkan, yaitu masing-masing Rp86,39 miliar dan Rp87,75 miliar. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi penerimaan lain-lain PAD yang sah menjadi Rp107,51 miliar, namun masih jauh dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp177,83 miliar. Di tahun 2024 realisasi penerimaan lain-lain PAD meningkat hingga 118,76 miliar melampaui anggaran 116,23 miliar. Komposisi PAD ini menunjukkan bagaimana daerah bergantung pada pajak dan retribusi sebagai sumber utama pendapatan, serta pentingnya upaya peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi daerah.

2.5.1.3 Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah salah satu sumber pendapatan utama yang diterima oleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan ini sangat penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik di daerah, khususnya bagi daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah, seperti Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.81 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	1,305.89	1,283.18
2020	1.212,31	1,204.21
2021	1,197.41	1,172.27
2022	1,182.29	1,121.43
2023	1,230.30	1,191.95
2024	1,333.69	1,302.66

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd

Dalam lima tahun terakhir, pendapatan transfer untuk Kabupaten Gorontalo telah memainkan peran penting dalam mendukung APBD daerah, terutama untuk membiayai belanja operasional dan pembangunan daerah. Pada tahun 2019, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp1.283,8 miliar, sedikit di bawah pagu yang ditetapkan sebesar Rp1.305,89 miliar. Pada tahun-tahun berikutnya, realisasi pendapatan transfer

cenderung menurun. Pada tahun 2020 hingga 2022, realisasi pendapatan tidak mencapai anggaran yang ditetapkan, yaitu masing-masing sebesar Rp1.204,21 miliar, Rp1.172,27 miliar, dan Rp1.121,43 miliar. Namun, pada tahun 2023, realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan kembali dan mencapai Rp1.191,95 miliar, dan di tahun 2024 terus meningkat hingga Rp1.302,66 miliar.

Tabel 2.82 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Pusat (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	1,258.32	1,237.48
2020	1,143.21	1,136.52
2021	1,140.62	1,119.78
2022	1,113.85	1,066.05
2023	1,147.83	1,137.72
2024	1,251.36	1,248.08

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd

Pendapatan transfer Kabupaten Gorontalo selama lima tahun terakhir menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana dari pemerintah pusat, terutama melalui DAU dan DAK. Meskipun PAD terus diupayakan untuk meningkat, kontribusi pendapatan transfer tetap dominan dalam pembiayaan APBD Kabupaten Gorontalo.

Jika dilihat dari tren anggaran, alokasi dana TAD cenderung meningkat, dimulai dari Rp 47,62 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 82,33 miliar pada tahun 2024. Puncak alokasi anggaran terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp 82,47 miliar, meskipun mengalami sedikit penurunan pada 2024. Namun, dari sisi realisasi, terdapat ketimpangan antara besaran anggaran yang direncanakan dan dana yang berhasil disalurkan atau dimanfaatkan. Meskipun anggaran meningkat, realisasi dana cenderung stagnan dan bahkan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, realisasi mencapai Rp 45,19 miliar (hampir mendekati anggaran), tetapi kemudian menurun dan berada di kisaran Rp 54 miliar pada 2023 dan 2024, jauh di bawah pagu yang disediakan.

Tingkat serapan anggaran pada tahun-tahun terakhir relatif rendah jika dibandingkan dengan alokasi. Sebagai contoh, tahun 2023 dan 2024, meskipun anggaran sekitar Rp 82 miliar, realisasi hanya sekitar 65% dari anggaran. Hal ini bisa mengindikasikan adanya kendala dalam implementasi program atau penyaluran dana antar daerah, baik dari aspek teknis, administratif, maupun koordinasi.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan kapasitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program yang dibiayai melalui TAD. Optimalisasi penyerapan anggaran menjadi penting agar tujuan transfer antar daerah untuk mendukung pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai secara efektif. Selain itu, evaluasi terhadap mekanisme transfer, efektivitas program, dan hambatan birokratis perlu dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah.

Tabel 2.83 Anggaran dan Realisasi Transfer antar Daerah (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	47,62	45,19
2020	69,10	67,70
2021	56,79	52,49
2022	68,44	55,39
2023	82,47	54,23
2024	82,33	54,58

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd

2.5.1.4. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan lain-lain yang sah ini mencakup sumber-sumber pendapatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan tidak terbatas pada pajak dan retribusi daerah. Anggaran/Pagu dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Gorontalo selama periode 2019 hingga 2024, terdapat tren penurunan yang signifikan baik dari sisi anggaran maupun realisasi dalam kurun waktu tersebut.

Pada tahun 2019, anggaran untuk pos pendapatan ini tercatat sebesar Rp 63,69 miliar dengan realisasi Rp 60,50 miliar, yang berarti tingkat realisasi mencapai sekitar 95%, mencerminkan kinerja yang cukup baik dalam optimalisasi pendapatan. Anggaran meningkat cukup tajam pada 2020 menjadi Rp 90,69 miliar, meskipun realisasinya hanya Rp 76,21 miliar, namun masih tergolong cukup tinggi (sekitar 84%).

Mulai 2021, terjadi penurunan drastis baik pada anggaran maupun realisasi. Anggaran yang sebelumnya Rp 90,69 miliar turun menjadi Rp 68,15 miliar, dan realisasi hanya Rp 56,45 miliar. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2024, di mana anggaran hanya Rp 6,40 miliar dan realisasi diproyeksikan Rp 4,27 miliar, turun lebih dari 90% dibandingkan tahun 2019.

Tabel 2.84 Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (dalam Rp Miliar) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi
2019	63,69	60,50
2020	90,69	76,21
2021	68,15	56,45
2022	12,94	5,19
2023	10,94	8,92
2024	6,40	4,27

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd

Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Gorontalo menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam periode 2017 hingga 2023, mencerminkan dinamika dalam pengelolaan keuangan daerah dan ketergantungan terhadap pendanaan dari pemerintah pusat. Pada tahun 2017, rasio kemandirian fiskal berada di angka 0,560, yang menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap sumber pendanaan luar daerah. Angka ini mengalami kenaikan pada tahun berikutnya, dengan rasio mencapai 0,623 pada tahun 2018, menggambarkan adanya sedikit perbaikan dalam hal kemampuan daerah menggali pendapatan asli daerah (PAD).

Pada tahun 2019, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gorontalo meningkat lebih signifikan menjadi 0,687, yang menunjukkan adanya upaya yang lebih efektif dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana transfer. Namun, lonjakan yang sangat besar terjadi pada tahun 2020, dengan rasio mencapai 1,567. Ini dikarenakan program bantuan langsung dari pemerintah pusat untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, yang secara tiba-tiba meningkatkan aliran pendapatan daerah. Setelah tahun 2020, rasio kemandirian fiskal Kabupaten Gorontalo kembali menurun. Pada tahun 2021, rasio ini turun lagi ke angka 0,696, dan meskipun terdapat sedikit pemulihan pada tahun 2022 dengan rasio 1,117, hal ini tetap menunjukkan bahwa ketergantungan pada pendanaan luar daerah masih cukup tinggi. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 dengan rasio kemandirian fiskal yang kembali turun menjadi 0,875.

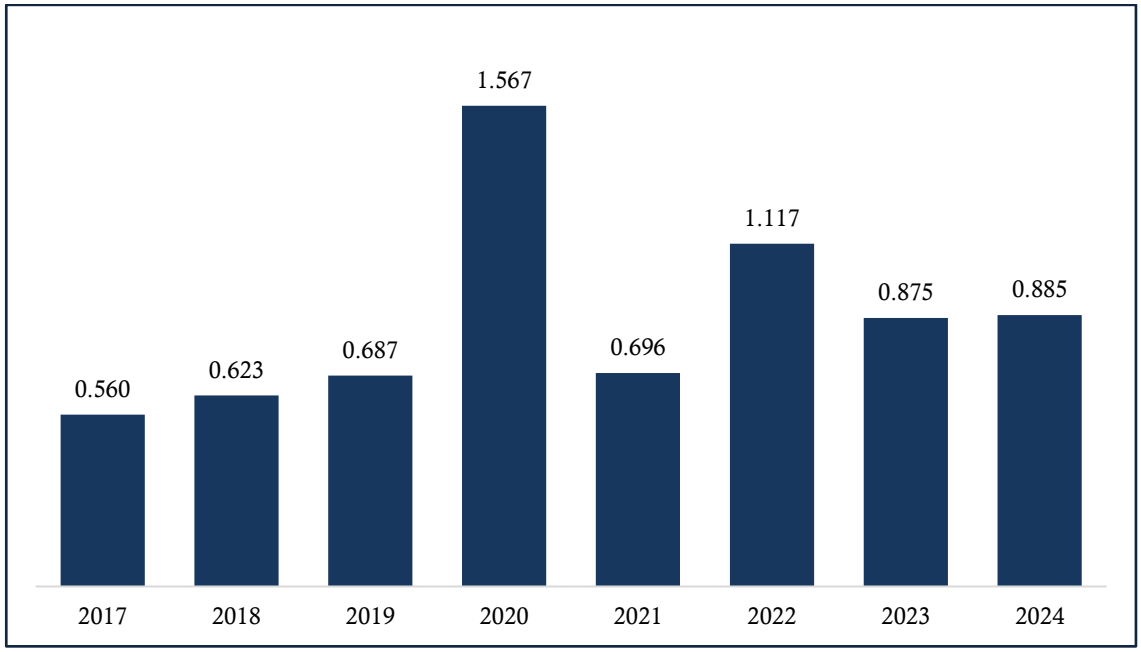

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2.21. Derajat Kemandirian dan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

2.5.1.5. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah mengacu pada jumlah dana yang benar-benar dibelanjakan oleh pemerintah daerah untuk berbagai program dan kegiatan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan realisasi belanja daerah di Kabupaten Gorontalo pada periode 2019-2024 meliputi:

1. Penerimaan Daerah: Kenaikan atau penurunan dalam pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan dana transfer dari pusat sangat mempengaruhi kemampuan daerah untuk membelanjakan anggarannya.
2. Kebijakan Pusat dan Daerah: Kebijakan fiskal nasional dan daerah, termasuk prioritas pembangunan, program stimulus, atau kebijakan terkait COVID-19, sangat memengaruhi pola belanja.
3. Pandemi COVID-19: Pada 2020 dan 2021, pandemi berdampak signifikan pada struktur anggaran, dengan banyak belanja dialihkan untuk penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi, sehingga terjadi penyesuaian belanja.
4. Perubahan Prioritas Pembangunan: Perubahan dalam prioritas pembangunan seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dapat mempengaruhi komposisi belanja dari tahun ke tahun

Tabel 2.85 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran/Pagu	Realisasi	% Realisasi	Rerata Pertumbuhan
2019	1,365.42	1,253.14	91.78	0
2020	1,223.96	1,109.77	90.67	-0.11
2021	1,811.81	1,541.30	85.07	0.38
2022	1,503.88	1,475.43	98.11	-0.04
2023	1,485.64	1,343.40	90.43	-0.08
2024	1,536.14	1,411.40	91.88	1.05

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Data kinerja belanja daerah Kabupaten Gorontalo selama tahun anggaran 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif baik dari sisi anggaran, realisasi, maupun tingkat pertumbuhan realisasi belanja. Pada tahun 2019, total anggaran belanja daerah sebesar Rp 1.365,42 miliar dengan realisasi mencapai Rp 1.253,14 miliar atau setara dengan 91,78 persen, yang menjadi titik awal dalam mengukur kinerja belanja daerah. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan baik dalam pagu anggaran maupun realisasi, masing-masing menjadi Rp 1.223,96 miliar dan Rp 1.109,77 miliar, serta tingkat realisasi sedikit menurun menjadi 90,67 persen. Penurunan ini juga tercermin dari rata-rata pertumbuhan realisasi yang mengalami kontraksi sebesar -0,11, yang dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan berbagai penyesuaian fiskal.

Memasuki tahun 2021, anggaran belanja meningkat signifikan menjadi Rp 1.811,81 miliar dengan realisasi Rp 1.541,30 miliar, meskipun tingkat realisasi menurun menjadi 85,07 persen. Meningkatnya anggaran dan realisasi pada tahun ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk merespons dampak pandemi, baik dari sisi pemulihan ekonomi maupun penanganan kesehatan, sehingga mencatatkan rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,38. Namun, pada tahun 2022 terjadi penyesuaian anggaran menjadi Rp 1.503,88 miliar dengan realisasi Rp 1.475,43 miliar, tetapi tingkat serapan anggaran meningkat signifikan menjadi 98,11 persen, mencerminkan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja daerah meskipun rata-rata pertumbuhan realisasi kembali mengalami kontraksi ringan sebesar -0,04.

Tahun 2023 kembali mencatat penurunan baik pada sisi anggaran maupun realisasi, masing-masing sebesar Rp 1.485,64 miliar dan Rp 1.343,40 miliar, dengan tingkat realisasi turun menjadi 90,43 persen dan pertumbuhan realisasi minus 0,08, menandakan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi kinerja belanja daerah. Menariknya, pada tahun 2024 terjadi peningkatan kembali pada pagu anggaran

menjadi Rp 1.536,14 miliar dengan proyeksi realisasi Rp 1.411,40 miliar dan tingkat realisasi mencapai 91,88 persen, sekaligus menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,05, yang menjadi angka tertinggi selama periode enam tahun tersebut.

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa kinerja belanja daerah Kabupaten Gorontalo menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam menyerap anggaran meskipun menghadapi tantangan fluktuasi. Tingkat realisasi yang sebagian besar berada di atas 85 persen menandakan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran, walaupun variabilitas pertumbuhan realisasi mengindikasikan perlunya penguatan dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pelaksanaan belanja agar lebih stabil dan terarah. Selain itu, kecenderungan peningkatan belanja pada tahun-tahun tertentu mencerminkan adanya kebutuhan untuk merespons situasi khusus, seperti dampak pandemi, namun harus diimbangi dengan kemampuan daerah dalam memastikan belanja tersebut benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Tabel 2.86 Proporsi Sumber Belanja Daerah (dalam %) Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Jenis Belanja	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	79.65	83.21	57.96	61.99	68.14	71.10
Belanja Modal	20.30	15.08	22.94	20.40	13.93	12.07
Belanja Tidak Terduga	0.06	1.71	0.15	0.23	0.37	0.19
Belanja Transfer	23.10	25.45	18.95	17.38	17.56	16.64

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Proporsi sumber belanja daerah Kabupaten Gorontalo selama periode tahun anggaran 2019 hingga 2024 menunjukkan dinamika yang mencerminkan pola prioritas pengeluaran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik. Secara umum, belanja operasi selalu menjadi komponen terbesar dari total belanja daerah, dengan proporsi yang cenderung meningkat dari 79,65 persen pada tahun 2019 menjadi 83,21 persen pada 2020. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam belanja operasi menjadi 57,96 persen, yang dapat dikaitkan dengan adanya pergeseran fokus belanja daerah pada saat itu, seperti upaya pemulihan dampak pandemi dan kebutuhan untuk meningkatkan investasi melalui belanja modal. Meskipun demikian, setelah 2021, proporsi belanja operasi kembali menunjukkan tren peningkatan, menjadi 61,99 persen pada 2022, 68,14 persen pada 2023, dan mencapai 71,10 persen pada 2024.

Di sisi lain, belanja modal yang mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pembangunan fisik, sarana prasarana, dan aset, mengalami fluktuasi yang cukup tajam. Pada tahun 2019 belanja modal masih mencapai 20,30 persen, namun menurun drastis menjadi 15,08 persen di 2020, meskipun sempat meningkat menjadi 22,94 persen pada 2021. Setelah itu, terjadi penurunan kembali menjadi 20,40 persen pada 2022, bahkan terus menyusut hingga 13,93 persen pada 2023 dan hanya tersisa 12,07 persen pada 2024. Tren penurunan belanja modal dalam beberapa tahun terakhir ini dapat menjadi indikasi bahwa perhatian pemerintah daerah lebih banyak terserap ke dalam belanja rutin atau operasional, sehingga alokasi untuk pembangunan fisik menjadi terbatas.

Belanja tidak terduga yang dialokasikan untuk kebutuhan darurat dan kondisi luar biasa tampak stabil dalam porsi yang sangat kecil. Proporsinya hanya berkisar antara 0,06 persen hingga 1,71 persen, dengan angka tertinggi terjadi pada 2020, yang dapat diasumsikan sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19. Setelah tahun tersebut, belanja tidak terduga kembali pada kisaran rendah, mencerminkan situasi yang lebih stabil atau pergeseran beban belanja ke dalam belanja lainnya.

Sementara itu, belanja transfer yang merupakan dana yang disalurkan kepada pemerintah desa atau pihak ketiga, meskipun angkanya cukup signifikan, cenderung mengalami penurunan secara bertahap. Dari 23,10 persen pada 2019, belanja transfer naik menjadi 25,45 persen pada 2020, tetapi setelah itu terus menurun menjadi 18,95 persen di 2021, 17,38 persen di 2022, 17,56 persen di 2023, dan turun lagi menjadi 16,64 persen pada 2024. Penurunan proporsi belanja transfer ini dapat mencerminkan upaya pengurangan ketergantungan pembiayaan kepada pihak luar atau penyesuaian alokasi berdasarkan prioritas kebijakan.

Secara keseluruhan, struktur belanja daerah Kabupaten Gorontalo cenderung menunjukkan dominasi belanja operasi yang terus meningkat, yang mengindikasikan besarnya beban rutin pemerintah daerah, seperti gaji, tunjangan, dan operasional birokrasi. Sementara alokasi belanja modal yang penting untuk pembangunan jangka panjang justru mengalami penurunan, yang bisa berdampak pada keterbatasan ruang fiskal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur.

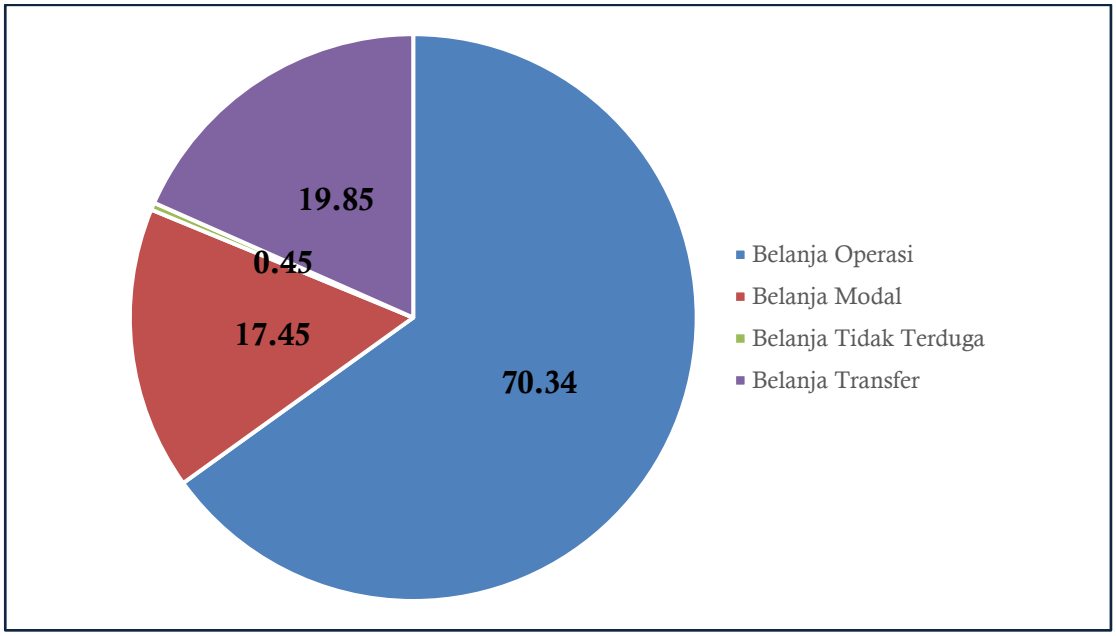

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2.22. Rata-Rata Persentase Komponen Belanja Daerah 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

2.5.1.6. Belanja Operasi

Belanja operasional adalah pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintah daerah, termasuk membiayai aktivitas pemerintahan sehari-hari dan penyelenggaraan layanan publik. Belanja operasional dalam APBD Kabupaten Gorontalo mencakup: Pertama, gaji dan tunjangan pegawai, merupakan komponen belanja terbesar, termasuk gaji pokok, tunjangan, honorarium, dan remunerasi untuk aparatur sipil negara (ASN). Kedua, alokasi dana untuk kebutuhan barang dan jasa, seperti pembelian peralatan kantor, biaya konsumsi, perawatan gedung, dan biaya operasional kantor lainnya. Ketiga, dana yang dialokasikan untuk pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, seperti gedung, jalan, dan fasilitas umum lainnya. Keempat, belanja subsidi, hibah, dan bantuan sosial berupa bantuan langsung ke masyarakat atau organisasi yang terkait dengan program pemerintah daerah.

Selama tahun anggaran 2019 hingga 2024, komposisi belanja operasional di Kabupaten Gorontalo mencerminkan berbagai prioritas daerah, termasuk fokus pada kesejahteraan pegawai, pemeliharaan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.87 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Pagu	Realisasi
2019	1,041.20	998.09

2020	990.42	923.42
2021	959.28	892.30
2022	990.12	914.64
2023	1,008.57	915.41
2024	1,090,57	1,003.53

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Belanja pegawai biasanya menjadi komponen terbesar dalam belanja operasional, mencapai lebih dari 50% dari total belanja operasional. Ini termasuk gaji, tunjangan, serta insentif bagi pegawai negeri sipil dan tenaga honorer di lingkup pemerintah daerah. Selama lima tahun ini, belanja pegawai cenderung meningkat karena adanya kenaikan gaji, penambahan jumlah pegawai, serta peningkatan tunjangan bagi aparatur sipil negara (ASN). Penyesuaian ini juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat terkait pemberian gaji ke-13 dan THR untuk ASN.

Tabel 2.88 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	612.80	594.64
2020	609.59	589.42
2021	567.30	556.11
2022	620.19	579.58
2023	583.74	559,37
2024	656.89	616.55

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran terbesar kedua dalam belanja operasional, biasanya mencakup sekitar 30%-40%. Pengeluaran ini digunakan untuk kebutuhan sehari-hari pemerintahan, termasuk pembelian alat tulis kantor, bahan bakar kendaraan dinas, konsumsi rapat, serta biaya listrik, telepon, dan internet.

Terdapat fluktuasi dalam pengeluaran belanja barang dan jasa, terutama pada tahun 2020 dan 2021 karena pandemi COVID-19. Selama pandemi, banyak belanja barang dan jasa dialokasikan untuk kebutuhan darurat kesehatan, alat pelindung diri (APD), dan operasional penanganan COVID-19. Pada tahun 2022 dan 2023, belanja barang dan jasa kembali meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi dan normalisasi kegiatan pemerintahan.

Tabel 2.89 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	381.18	358.92
2020	298.80	252.70
2021	353.47	310.65
2022	333.97	310.28
2023	384.53	324.35
2024	379.26	337.49

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Pada tahun 2019, meskipun anggaran hibah sebesar Rp 8,64 miliar, realisasinya jauh melebihi angka tersebut, yaitu Rp 24,09 miliar. Pada tahun 2020, belanja hibah mengalami lonjakan signifikan, dengan anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 57,14 miliar dan realisasinya mencapai Rp 66,82 miliar. Kenaikan realisasi ini mengindikasikan adanya peningkatan kebutuhan hibah yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah, terkait dengan pengalokasian dana untuk mendukung program pemulihan ekonomi daerah atau kebutuhan mendesak lainnya akibat pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan yang cukup tajam, baik dari sisi anggaran maupun realisasi. Anggaran hibah yang hanya sebesar Rp 5,47 miliar, dengan realisasi Rp 16,5 miliar. Pada tahun 2022, terjadi penurunan signifikan dalam realisasi belanja hibah. Anggaran hibah yang sebesar Rp 13,03 miliar hanya terealisasi sebesar Rp 1,78 miliar. Sementara itu, pada tahun 2023, realisasi belanja hibah kembali meningkat menjadi Rp 25,76 miliar, meskipun anggaran yang ditetapkan hanya sebesar Rp 13,55 miliar.

Tabel 2.90 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	26.62	24.09
2020	67.09	66.82
2021	18.35	16.49
2022	13.02	1.78
2023	30.46	25.75
2024	53.04	48.30

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Belanja hibah dan bantuan sosial umumnya berkisar antara 5%-8%. Dana ini dialokasikan untuk berbagai program hibah kepada organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta bantuan sosial untuk masyarakat miskin atau yang terdampak bencana.

Tabel 2.91 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	20.59	20.43
2020	17.93	14.47
2021	14.20	9.01
2022	21.90	17.95
2023	8.91	5.14
2024	683	498

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Pada tahun 2020 dan 2021, belanja bantuan sosial meningkat signifikan karena pandemi COVID-19. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak melalui program jaring pengaman sosial. Pada tahun-tahun berikutnya, belanja ini kembali ke tingkat yang lebih stabil, meskipun tetap difokuskan pada bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu.

2.5.1.7. Belanja Modal

Tabel 3.27 menyajikan data anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Gorontalo selama tahun anggaran 2019 hingga 2023. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan dan pengadaan aset yang diharapkan mampu memberikan manfaat dalam jangka panjang bagi daerah, seperti infrastruktur jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas publik lainnya. Belanja modal ini sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan pelayanan publik.

Tabel 2.92 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	322.87	254.33
2020	209.76	167.35
2021	555.44	353,57
2022	248.09	300,98
2023	226.52	187,1
2024	194.32	170.39

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Data yang disajikan menunjukkan anggaran dan realisasi belanja modal Kabupaten Gorontalo dari tahun anggaran 2019 hingga 2024. Secara umum, terlihat bahwa terdapat fluktuasi antara anggaran yang direncanakan dan realisasi belanja modal yang tercatat setiap tahunnya.

Pada tahun 2019, anggaran yang ditetapkan sebesar 322,87 juta, namun realisasi yang tercatat hanya 254,33 juta, yang berarti hanya sekitar 78,8% dari anggaran yang terealisasi. Hal serupa terjadi pada tahun 2020, di mana anggaran belanja modal sebesar 209,76 juta, sementara realisasi hanya 167,35 juta atau sekitar 79,9%. Penurunan realisasi dibandingkan anggaran ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti hambatan teknis atau penyesuaian anggaran yang tidak terduga, termasuk faktor eksternal seperti pandemi.

Pada tahun 2021, anggaran belanja modal meningkat signifikan menjadi 555,44 juta, namun realisasinya justru turun drastis menjadi 353,57 juta, hanya sekitar 63,7% dari anggaran yang direncanakan. Penurunan ini mengindikasikan adanya kesulitan dalam pelaksanaan belanja modal, meskipun anggaran yang lebih besar telah disiapkan.

Tahun 2022 menampilkan perbedaan yang mencolok, dengan realisasi yang melebihi anggaran. Anggaran sebesar 248,09 juta terealisasi menjadi 300,98 juta, yang mencapai 121,4% dari anggaran. Hal ini menunjukkan adanya percepatan dalam pelaksanaan belanja modal atau mungkin adanya tambahan anggaran yang tidak tercatat dalam perencanaan awal.

Namun, pada tahun 2023, realisasi kembali lebih rendah dari anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran sebesar 226,52 juta hanya terealisasi 187,1 juta atau sekitar 82,7%. Tahun 2024 juga mencatatkan hal yang serupa, dengan anggaran sebesar 194,32 juta dan realisasi 170,39 juta, yang mencapai 87,6% dari anggaran yang ditetapkan.

2.5.1.8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga (BTT) adalah jenis pengeluaran yang dianggarkan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan yang sifatnya mendesak, tidak terduga, dan tidak direncanakan sebelumnya, seperti bencana alam, keadaan darurat, atau kebutuhan mendesak lainnya yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam konteks Kabupaten Gorontalo, Belanja Tidak Terduga memiliki peran penting untuk menangani situasi darurat atau krisis, terutama selama pandemi COVID-19.

Tabel 2.93 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo (miliar rupiah)

Tahun	Anggaran	Realisasi
2019	1,348.38	725.29
2020	1,000.00	19,000.03
2021	2,460.81	2,314.044
2022	3,500.00	3,331.89

2023	5,000.00	4,999.74
2024	4,000.00	2,637.54

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Pada tahun 2019, anggaran belanja tidak terduga ditetapkan sebesar 1.348,38 miliar rupiah, namun realisasinya hanya mencapai 725,29 miliar rupiah, yang berarti hanya sekitar 53,8% dari anggaran yang terealisasi. Ini menunjukkan adanya penurunan yang signifikan antara anggaran dan realisasi pada tahun tersebut.

Tahun 2020 menunjukkan angka yang sangat berbeda, dengan anggaran yang hanya 1.000,00 miliar rupiah, sementara realisasi mencapai 19.000,03 miliar rupiah. Peningkatan realisasi anggaran yang drastis pada tahun ini disebabkan oleh kebutuhan anggaran yang sangat besar, terutama terkait dengan penanganan pandemi COVID-19, yang memerlukan belanja tidak terduga yang signifikan.

Pada tahun 2021, anggaran belanja tidak terduga tercatat sebesar 2.460,81 miliar rupiah, dengan realisasi sebesar 2.314,04 miliar rupiah, yang mencapai sekitar 94,1% dari anggaran. Realisasi ini menunjukkan bahwa belanja tidak terduga lebih sesuai dengan anggaran yang direncanakan pada tahun tersebut.

Tahun 2022 mencatatkan anggaran sebesar 3.500,00 miliar rupiah dan realisasi 3.331,89 miliar rupiah, yang mencapai sekitar 95,2% dari anggaran. Ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pelaksanaan belanja tidak terduga relatif efisien dan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, anggaran belanja tidak terduga tercatat sebesar 5.000,00 miliar rupiah, dengan realisasi mencapai 4.999,74 miliar rupiah, yang hampir 100% dari anggaran yang direncanakan. Ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam hal realisasi belanja tidak terduga, di mana hampir seluruh anggaran yang ditetapkan terealisasi.

Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan anggaran menjadi 4.000,00 miliar rupiah, dan realisasinya hanya sebesar 2.637,54 miliar rupiah, yang hanya sekitar 65,9% dari anggaran. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang cukup besar antara anggaran yang direncanakan dan pelaksanaannya pada tahun tersebut.

2.5.1.9. Belanja Transfer

Belanja transfer terdiri dari 2 jenis, yaitu belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan. Belanja transfer dalam bentuk bantuan keuangan ini penting untuk

memperkuat peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan layanan publik di berbagai wilayah administratif.

Pada tahun 2019, pagu anggaran belanja bantuan keuangan ditetapkan sebesar 286,30 miliar rupiah, dan realisasi yang tercatat adalah 286,31 miliar rupiah, yang menunjukkan pencapaian hampir 100% dari anggaran yang direncanakan. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan anggaran yang sangat sesuai dengan perencanaan.

Tahun 2020 menunjukkan sedikit penurunan dengan pagu anggaran sebesar 285,78 miliar rupiah dan realisasi 279,68 miliar rupiah, mencapai sekitar 97,9% dari anggaran yang ditetapkan. Penurunan realisasi ini, meskipun tidak signifikan, dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti penyesuaian kebutuhan atau kondisi yang memengaruhi pelaksanaan belanja pada tahun tersebut.

Pada tahun 2021, anggaran sedikit meningkat menjadi 291,44 miliar rupiah, dengan realisasi mencapai 290,83 miliar rupiah atau sekitar 99,8% dari anggaran. Kesesuaian yang tinggi antara anggaran dan realisasi menunjukkan bahwa anggaran belanja bantuan keuangan pada tahun tersebut dapat dikelola dengan baik.

Tahun 2022 mencatatkan anggaran sebesar 255,56 miliar rupiah dan realisasi sebesar 255,61 miliar rupiah, yang hampir sepenuhnya tercapai, dengan tingkat pencapaian sekitar 100%. Kesesuaian yang baik ini menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan belanja bantuan keuangan.

Pada tahun 2023, pagu anggaran turun menjadi 237,95 miliar rupiah, dengan realisasi sebesar 232,12 miliar rupiah, yang berarti hanya 97,5% dari anggaran yang terealisasi. Penurunan ini relatif kecil dan masih dalam batas toleransi yang wajar. Pada tahun 2024, pagu anggaran kembali sedikit naik menjadi 239,78 miliar rupiah, namun realisasi tercatat lebih rendah, yaitu 228,98 miliar rupiah, yang hanya sekitar 95,5% dari anggaran. Meskipun terdapat sedikit ketidaksesuaian, perbedaannya masih tidak terlalu besar dan menunjukkan bahwa belanja bantuan keuangan tetap dikelola dengan cukup baik.

Tabel 2.94 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Provinsi/Kabupaten/Kota/Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun	Pagu	Realisasi
2019	286.30	286.31
2020	285.78	279.68
2021	291.44	290.83
2022	255.56	255.61

2023	237.95	232.12
2024	239.78	228.98

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Belanja operasi terlihat mendominasi pengeluaran setiap tahun, dengan proporsi yang terus meningkat. Pada tahun 2019, belanja operasi mencapai 64,7% dari total belanja, kemudian naik menjadi 66,3% pada tahun 2020 dan mencapai puncaknya di tahun 2023 dengan persentase sebesar 70,97%. Sebaliknya, belanja modal mengalami penurunan secara bertahap. Dari 18,56% pada tahun 2019, belanja modal terus menurun hingga mencapai 16,92% pada tahun 2023. Sementara itu, belanja tidak terduga memiliki proporsi yang kecil, namun mengalami peningkatan dari 0,05% di tahun 2019 menjadi 0,36% pada tahun 2023. Selain itu, belanja transfer yang merupakan komponen penting dalam mendukung pendapatan daerah lain serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah juga mengalami variasi. Angka ini berubah dari 16,48% pada tahun 2019, mengalami sedikit kenaikan pada 2020 sebesar 20,09%, kemudian kembali turun pada tahun 2021 hingga 2023 dengan nilai 17% dan 16,92% berturut-turut.

Dalam kondisi ideal, proporsi belanja operasi yang terlalu tinggi sebaiknya diimbangi dengan alokasi belanja modal yang memadai. Belanja modal berperan penting dalam pengembangan dan perbaikan infrastruktur, yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Penurunan proporsi belanja modal dalam grafik menunjukkan keterbatasan pada investasi infrastruktur baru, yang bisa berdampak pada kemampuan daerah untuk berkembang dalam jangka panjang.

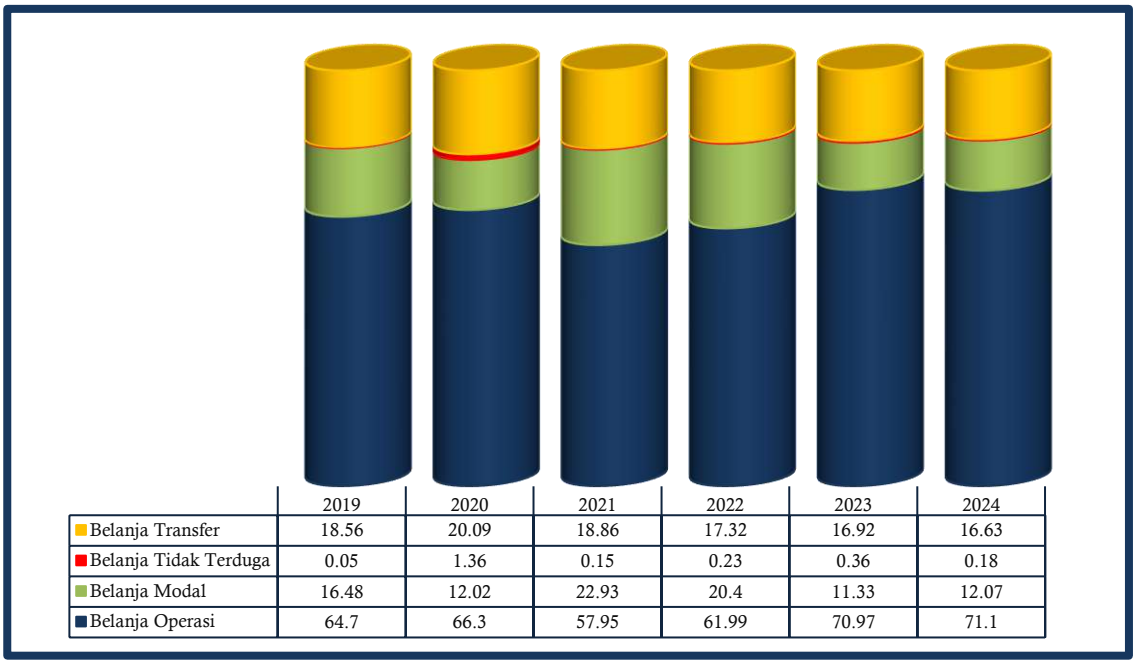

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Transfer	18.56	20.09	18.86	17.32	16.92	16.63
Belanja Tidak Terduga	0.05	1.36	0.15	0.23	0.36	0.18
Belanja Modal	16.48	12.02	22.93	20.4	11.33	12.07
Belanja Operasi	64.7	66.3	57.95	61.99	70.97	71.1

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2.23. Persentase Rasio Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer Terhadap Total Belanja (%)

Komposisi anggaran belanja operasi yang terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja subsidi, serta belanja bunga. Dari tahun 2019 hingga 2023, belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mendominasi anggaran belanja operasi, dengan persentase yang stabil dan tinggi. Belanja pegawai memiliki proporsi terbesar, yang meningkat dari 59,47% pada tahun 2019 menjadi 63,46% pada tahun 2023. Perlu diperhatikan bahwa alokasi belanja pegawai yang tinggi dapat menyebabkan ketergantungan besar pada belanja rutin, yang berefek pada kurang optimalnya dukungan untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang.

Belanja barang dan jasa, yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa operasional pemerintah, memiliki proporsi yang signifikan meskipun menunjukkan sedikit penurunan, dari 35,96% pada tahun 2019 menjadi 34,08% pada tahun 2023. Belanja ini penting untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, tetapi jika terlalu tinggi, dapat mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada aspek pembangunan dan investasi lainnya. Di sisi lain, belanja hibah berfluktuasi dari tahun ke tahun, dengan puncaknya pada 2020 di angka 7,23%, namun menurun drastis pada tahun-tahun berikutnya, hanya sebesar 1,39% pada 2023. Sementara itu, belanja bantuan sosial mengalami penurunan, dari 2,04% pada 2019 menjadi hanya 0,96% pada 2023. Penurunan alokasi untuk bantuan sosial dapat

menjadi indikasi bahwa pemerintah berupaya mengurangi pengeluaran langsung ke masyarakat atau terjadi penurunan kebutuhan bantuan langsung, namun ini juga bisa berdampak pada masyarakat yang rentan terhadap kesulitan ekonomi. Komponen belanja lainnya, seperti belanja bunga dan subsidi, memiliki proporsi yang sangat kecil, hampir mendekati nol, dengan belanja bunga sempat mencapai 0,54% pada tahun 2022. Rendahnya proporsi belanja bunga mengindikasikan bahwa beban utang daerah tidak terlalu besar.

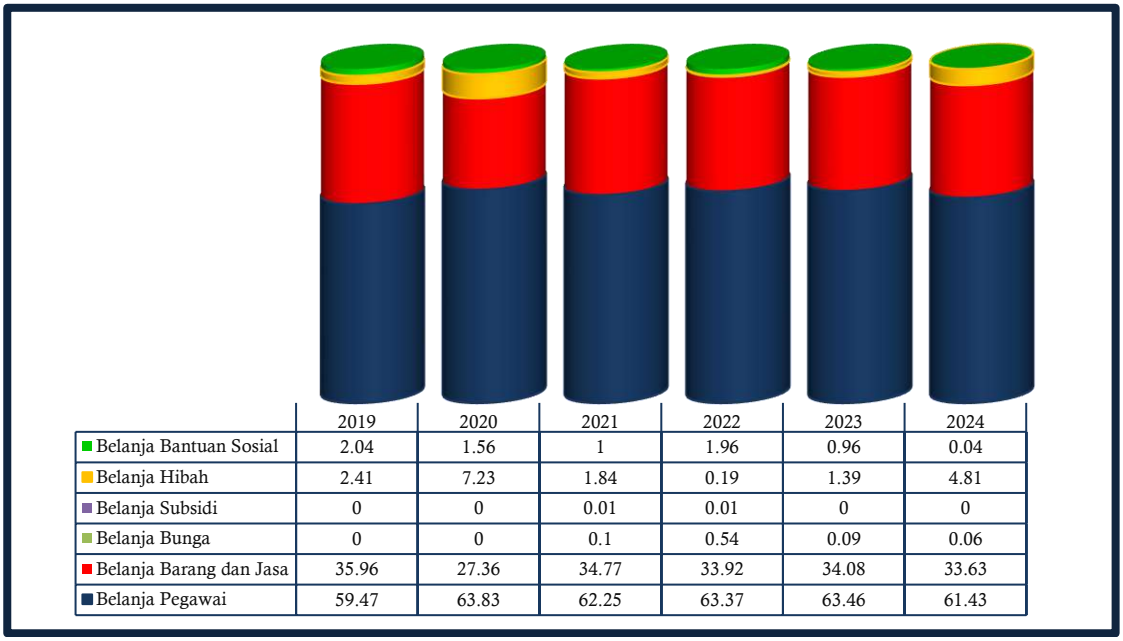

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Bantuan Sosial	2.04	1.56	1	1.96	0.96	0.04
Belanja Hibah	2.41	7.23	1.84	0.19	1.39	4.81
Belanja Subsidi	0	0	0.01	0.01	0	0
Belanja Bunga	0	0	0.1	0.54	0.09	0.06
Belanja Barang dan Jasa	35.96	27.36	34.77	33.92	34.08	33.63
Belanja Pegawai	59.47	63.83	62.25	63.37	63.46	61.43

Sumber: Data diolah, 2024

Gambar 2.24. Persentase Rasio Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Belanja Operasi (%)

2.6. Neraca Daerah

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pemerintah daerah wajib menyusun Neraca Daerah sebagai salah satu laporan keuangan utama. Neraca Daerah menyajikan informasi tentang posisi keuangan pemerintah daerah, termasuk aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana, yang diperinci pada tanggal tertentu ketika laporan tersebut disusun. Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi keuangan daerah, yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perencanaan keuangan di masa mendatang.

Tabel 2.95 Neraca Daerah Kabupaten Gorontalo, 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
1	ASET	1.673.144.639.810,25	1.941.333.679.972,39	1.988.497.057.157,58	2.016.026.971.668,94	1.913.903.997.476,68
	A. Aset Lancar	72.771.683.382,35	138.010.326.258,08	101.095.070.090,74	60.700.003.571,32	82.890.770.846,97
	B. Investasi Jangka Panjang	75.984.301.181,76	73.047.290.793,30	71.217.258.048,11	70.014.300.751,23	67.504.738.568,98
	C. Aset Tetap	1.430.460.409.849,88	1.634.840.810.466,51	1.721.386.296.234,82	1.740.875.572.618,82	1.642.869.913.147,82
	D. Aset Lainnya	93.928.245.396,26	95.435.252.454,50	94.798.432.783,91	144.437.094.727,57	120.638.574.912,91
	JUMLAH ASET	1.673.144.639.810,25	1.941.333.679.972,39	1.988.497.057.157,58	2.016.026.971.668,94	1.913.903.997.476,68
2	KEWAJIBAN	45.717.044.376,95	278.206.145.398,07	556.384.934.765,91	463.135.191.205,00	371.528.471.118,47
	A. Kewajiban Jangka Pendek	45.717.044.376,95	42.586.504.886,66	89.520.722.806,68	152.715.388.569,45	126.925.645.574,92
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	235.619.640.511,41	466.864.211.959,23	310.419.802.635,55	244.602.825.543,55
	JUMLAH KEWAJIBAN	45.717.044.376,95	278.206.145.398,07	556.384.934.765,91	463.135.191.205,00	371.528.471.118,47
3	EKUITAS	1.627.427.595.433,31	1.663.127.534.574,32	1.521.632.835.198,35	1.554.772.447.513,94	1.545.547.898.931,86
	A. Ekuitas	1.627.427.595.433,31	1.663.127.534.574,32	1.521.632.835.198,35	1.554.772.447.513,94	1.545.547.898.931,86
	JUMLAH EKUITAS	1.627.427.595.433,31	1.663.127.534.574,32	1.521.632.835.198,35	1.554.772.447.513,94	1.545.547.898.931,86
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0,03	0,17	0,37	0,30	0,24

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo

2.6.1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Keuangan daerah meliputi seluruh hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara finansial, termasuk berbagai aset yang terkait dengan kewajiban daerah dalam menjalankan pemerintahan. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara disiplin dan mematuhi peraturan, serta berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab. Asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan ini.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah bagian integral dari pelaksanaan otonomi daerah. Paradigma baru dalam pengelolaan otonomi daerah mendorong penerapan keuangan daerah yang tertib, transparan, akuntabel, konsisten, dan tepat sasaran. Tujuan utamanya adalah untuk mendukung stabilitas dan kemandirian fiskal di tingkat daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memegang enam fungsi utama, yaitu otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

Setiap fungsi ini berperan untuk memastikan anggaran digunakan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, efisiensi ekonomi, serta menjaga keseimbangan perekonomian daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Gorontalo periode 2019-2023 didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan berbagai peraturan lainnya yang memberikan pedoman teknis bagi tata kelola keuangan daerah. Kebijakan ini menitikberatkan pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan atas APBD, sehingga keuangan daerah dapat digunakan dengan efisien dan berfokus pada kepentingan masyarakat.

2.6.1.2. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat dan tepat. Pemerintah daerah diharapkan mampu membangun sistem yang memastikan seluruh penerimaan dapat terkumpul dan tercatat dengan baik dalam kas daerah, sesuai dengan standar akuntansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengendalian internal yang memadai untuk menjamin kepatuhan terhadap prosedur dan kebijakan manajemen yang berlaku.

Dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Gorontalo berupaya meningkatkan pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD), melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. Tujuan utama peningkatan pengelolaan PAD adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Kebijakan untuk meningkatkan PAD dilakukan melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

1) Intensifikasi Pendapatan Daerah

Intensifikasi ini merupakan upaya untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah. Pendekatan ini dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari PAD dengan memaksimalkan potensi yang ada serta menggali potensi yang belum tersentuh. Sumber-sumber pendapatan daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. PAD adalah porsi pendapatan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dari upaya dan sumber yang dimiliki sendiri. Kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun sesuai dengan potensi yang ada di daerah.

Pendapatan transfer dari pusat mencakup dana dari APBN yang dialokasikan untuk daerah guna mendukung kebutuhan dalam pelaksanaan desentralisasi, seperti Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Fiskal. Meskipun kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara keseluruhan masih relatif rendah, sektor ini tetap menjadi indikator penting dari kapasitas keuangan daerah, sehingga optimalisasi penerimaan PAD perlu terus diupayakan.

Kontribusi PAD terhadap APBD juga mencerminkan perkembangan ekonomi daerah. Besaran PAD menunjukkan tingkat aktivitas ekonomi masyarakat sebagai objek pungutan. Dengan demikian, pencapaian target PAD merupakan indikator penting bagi kemajuan pembangunan di daerah. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, pengelolaan administrasi pajak dan retribusi daerah dilaksanakan dengan cara yang mudah, cepat, dan tepat sehingga mendorong pemerataan pendapatan.

Kebijakan pendapatan Kabupaten Gorontalo diarahkan pada:

a. Penggalian sumber-sumber pendapatan pada sektor pajak dan retribusi daerah, baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi yang dilakukan secara selektif agar tidak menghambat perkembangan ekonomi masyarakat.
b. Intensifikasi PAD yang meliputi upaya untuk meningkatkan penerimaan dengan memperketat dan memaksimalkan pemungutan. Aspek yang diperhatikan mencakup kelembagaan, keteladanan, personalia, dan penerapan sanksi hukum melalui kegiatan berikut:
    1. Mengoptimalkan kinerja Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan.
    2. Menyempurnakan administrasi dan operasional pungutan, termasuk penyederhanaan prosedur dan penyesuaian regulasi yang ada.
    3. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian dari segi yuridis, teknis, dan administrasi.
    4. Meningkatkan kapasitas SDM pengelola PAD.
    5. Memberikan penyuluhan kepada masyarakat, wajib pajak, dan wajib retribusi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak dan retribusi.
c. Ekstensifikasi PAD yang mencakup upaya untuk menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru. Langkah-langkah yang dilakukan termasuk penambahan objek pajak dan retribusi, serta pengawasan perizinan yang meliputi penerapan denda jika diperlukan.

d. Peningkatan koordinasi dan akurasi data untuk mendukung proses penghitungan, penetapan alokasi, serta ketepatan waktu penyaluran Dana Bagi Hasil, sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan efektif.

Proporsi pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo menunjukkan dominasi pendapatan transfer yang konsisten di atas 85% dari total pendapatan, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami peningkatan, terutama pada tahun 2023 mencapai 14,24%. Pajak dan retribusi daerah secara bertahap meningkat, meskipun kontribusinya tetap kecil. Pendapatan dari hibah juga berfluktuasi, sementara sumber lain seperti dana darurat dan pendapatan sesuai peraturan perundang-undangan hanya tercatat pada tahun-tahun tertentu dan dengan proporsi yang sangat kecil.

Tabel 2.96 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2024 Kabupaten Gorontalo

Uraian	Proporsi (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	**10.37**	**9.09**	**9.06**	**10.24**	**14.24**	**11.19**
Pajak Daerah	2.08	2.18	2.14	2.58	3.15	2.3
Retribusi Daerah	0.35	0.18	0.27	0.41	0.77	0.53
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0.36	0.21	0.26	0.24	0.22	0.27
Lain-Lain PAD yang Sah	7.56	6.51	6.39	6.99	10.11	8.06
Pendapatan Transfer	**85.59**	**85.49**	**86.76**	**89.35**	**85.29**	**88.51**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	82.54	80.68	82.87	84.94	79.53	84.8
Pendapatan Transfer Antar Daerah	3.04	4.81	3.88	4.41	5.76	3.7
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	**4.03**	**5.41**	**4.18**	**0.41**	**0.46**	**0.29**
Pendapatan Hibah	4.03	5.41	0.31	0.41	0.46	0.29
Dana Darurat	0	0	0	0	0	0
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	3.87	0	0	0

Sumber: https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd diakses Agustus 2024

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo, beberapa upaya dapat diterapkan. Optimalisasi pemungutan pajak dapat dilakukan dengan memperluas basis pajak dan memanfaatkan teknologi digital yang mempermudah wajib pajak serta meningkatkan transparansi. Pengelolaan retribusi juga perlu diperbaiki dengan memperkenalkan sistem pembayaran digital dan meningkatkan kualitas layanan publik, seperti di pasar atau tempat parkir, agar lebih efektif. Selain itu, aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat didayagunakan melalui

kerja sama dengan pihak swasta. Potensi sumber pendapatan lain juga dapat digali, misalnya dengan memanfaatkan teknologi untuk layanan digital serta mengembangkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata lokal. Sosialisasi mengenai pentingnya pajak dan retribusi kepada masyarakat juga menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat PAD dan mengurangi ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat.

Apabila Pemerintah mampu memaksimalkan potensi pendapatan daerah, diprediksi pendapatan Kabupaten Gorontalo akan mengalami tren peningkatan bahkan mencapai 1,710 triliun di tahun 2030. Untuk itu pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk memastikan bahwa proyeksi kenaikan ini dapat direalisasikan.

Tabel 2.97 Proyeksi Kerangka Pendanaan Kabupaten Gorontalo 2026-2030

NO	URAIAN	BASELINE TAHUN 2024	REALISASI TAHUN				
			2026	2027	2028	2029	2030
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
1	PENDAPATAN	1.489.282.844.071,00	1.571.948.882.633,00	1.679.680.941.269,57	1.751.412.112.580,84	1.809.494.897.723,93	1.773.889.437.665,72
	A. Pendapatan Asli Daerah	161.498.614.149,00	191.529.560.817,00	193.360.935.755,35	200.996.131.924,42	209.401.191.047,39	217.311.611.900,46
	B. Pendapatan Transfer	1.321.152.666.260,00	1.378.690.821.816,00	1.486.320.005.514,22	1.550.415.980.656,42	1.600.093.706.676,54	1.556.577.825.765,26
	C. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	6.631.563.662,00	1.728.500.000,00	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	1.489.282.844.071,00	1.571.948.882.633,00	1.679.680.941.269,57	1.751.412.112.580,84	1.809.494.897.723,93	1.773.889.437.665,72
2	BELANJA	1.429.762.183.489,00	1.506.131.905.541,00	1.613.863.964.177,36	1.685.595.135.488,63	1.743.677.920.631,70	1.773.889.437.665,78
	A. Belanja Operasi	1.020.343.922.164,00	1.054.528.796.084,00	1.134.210.575.488,93	1.164.826.903.416,45	1.201.658.656.670,91	1.269.747.118.394,87
	B. Belanja Modal	171.132.788.450,00	190.832.971.663,00	222.301.564.381,97	260.659.428.223,31	280.498.009.611,90	243.838.787.008,67
	C. Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.260.000.000,00	7.986.000.000,00	8.784.600.000,00	9.663.060.000,00
	D. Belanja Transfer	233.285.472.875,00	254.770.137.794,00	250.091.824.306,46	252.122.803.848,87	252.736.654.348,89	250.640.472.262,24
	JUMLAH BELANJA	1.429.762.183.489,00	1.506.131.905.541,00	1.613.863.964.177,36	1.685.595.135.488,63	1.743.677.920.631,70	1.773.889.437.665,78
	SURPLUS/DEFISIT	59.520.660.582,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,21	65.816.977.092,21	65.816.977.092,23	(0,06)
3	PEMBIAYAAN	72.113.305.706,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	-
	A. Penerimaan	6.296.328.614,00	-	-	-	-	-
	B. Pengeluaran	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN	72.113.305.706,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	65.816.977.092,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(59.520.648.478,00)	(65.816.977.092,00)	(65.816.977.092,00)	(65.816.977.092,00)	(65.816.977.092,00)	-

Sumber: Badan Keuangan Kabupaten Gorontalo, 2025

Pendapatan utama dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah umumnya berasal dari SILPA tahun anggaran sebelumnya serta penerimaan melalui pinjaman daerah.

Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien idealnya mengarah pada nilai SILPA yang minimal atau mendekati nol. Namun, berbagai kendala seperti tertundanya pencairan dana sering kali menghasilkan SILPA dengan nilai positif yang tidak dapat dielakkan. Kendati SILPA yang meningkat merupakan tren yang masih terjadi, pemerintah daerah perlu mengambil langkah untuk meningkatkan sumber lain dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah, seperti melalui pengembalian pinjaman yang pernah diberikan serta pengelolaan piutang daerah yang lebih intensif. Artinya, sumber-sumber ini sebaiknya dimanfaatkan sebagai modal pembiayaan yang produktif, digunakan untuk program atau kegiatan yang memiliki dampak positif dan strategis bagi pembangunan daerah ke depan.

1. Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2019, anggaran penerimaan pembiayaan ditetapkan sebesar Rp 127.240.560.864, namun realisasi yang tercatat hanya Rp 87.046.674.393. Ini menunjukkan defisit penerimaan pembiayaan sebesar Rp 47.046.674.393 atau sekitar 68,41% dari anggaran yang direncanakan. Hal ini menandakan bahwa penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut jauh lebih rendah dari yang diharapkan. Tahun 2020 menunjukkan realisasi yang lebih baik, dengan anggaran sebesar Rp 33.270.541.821 dan realisasi sebesar Rp 33.093.538.725, hanya terdapat kekurangan sebesar Rp 177.003.095, yang mencapai 99,47% dari anggaran. Meskipun ada sedikit penurunan, perbedaan antara anggaran dan realisasi hampir tidak signifikan.

Pada tahun 2021, anggaran penerimaan pembiayaan melonjak menjadi Rp 400.892.362.139, namun realisasi hanya mencapai Rp 296.027.183.007, menghasilkan kekurangan sebesar Rp 104.865.179.132 atau sekitar 73,84% dari anggaran. Penurunan signifikan ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan pada tahun tersebut jauh lebih rendah daripada yang direncanakan. Tahun 2022 mencatatkan lonjakan besar, di mana anggaran sebesar Rp 130.228.000.000 terealisasi lebih tinggi, yaitu Rp 305.859.290.661. Penerimaan pembiayaan tercatat berlebih sebesar Rp 175.631.290.661, atau sekitar 234,86% dari anggaran yang ditetapkan. Ini menunjukkan adanya penerimaan yang jauh melebihi target anggaran, yang bisa disebabkan oleh faktor-faktor tertentu seperti pendapatan tambahan atau perubahan kebijakan.

Pada tahun 2023, anggaran penerimaan pembiayaan adalah Rp 65.991.615.082, sementara realisasinya mencapai Rp 69.064.770.999, menghasilkan kelebihan

penerimaan sebesar Rp 3.073.155.917 atau sekitar 104,66% dari anggaran yang direncanakan. Ini menunjukkan pencapaian yang lebih baik dan penerimaan yang sedikit melebihi anggaran. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam realisasi penerimaan pembiayaan. Anggaran sebesar Rp 84.346.844.342 hanya terealisasi sebesar Rp 22.659.696.768, menghasilkan kekurangan yang cukup besar sebesar Rp 61.687.147.573 atau sekitar 26,86% dari anggaran. Ini menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang direncanakan.

Tabel 2.98 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Berkurang	
			Rp	%
2019	127,240,560,864	87,046,674,393	-47,046,674,393	68.41
2020	33,270,541,821	33,093,538,725	-177,003,095	99.47
2021	400,892,362,139	296,027,183,007	-104,865,179,132	73.84
2022	130,228,000,000	305,859,290,661	175,631,290,661	234.86
2023	65,991,615,082	69,064,770,999	3,073,155,917	104.66
2024	84,346,844,342	22,659,696,768	-61,687,147,573	26.86

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2025.

Sumber Penerimaan Pembiayaan Daerah mencakup beberapa komponen, yaitu: (a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) dari tahun sebelumnya, (b) pencairan dana cadangan, (c) pendapatan dari penjualan aset milik daerah yang dipisahkan, (d) penerimaan melalui pinjaman daerah, (e) pengembalian dari pinjaman yang pernah diberikan daerah, serta (f) penerimaan pembiayaan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.99 Estimasi dan Realisasi SILPA Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Berkurang	
			Rp	%
2019	87,240,560,864	87,046,674,393	193,886,471	0.22
2020	33,270,541,821	33,093,538,725	177,003,096	0.53
2021	39,041,923,330	48,407,542,496	-9,365,619,166	-19.35
2022	-	105,913,882,594	-	-
2023	65,991,615,082	69,064,770,999	-3,073,155,917	-4.65
2024	84,346,844,342	22,659,696,768	61,687,147,574	73.13

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2025.

Pada tahun 2019, terdapat SILPA positif sebesar Rp 193,886,471 dengan persentase 0,22%, yang mengindikasikan realisasi anggaran hampir sesuai dengan

estimasi awal. Kondisi serupa terjadi pada tahun 2020, dengan selisih surplus Rp 177,003,096 (0,53%), meskipun tahun ini menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Tahun 2021 menunjukkan anomali, dengan defisit SILPA sebesar Rp 9,365,619,166 atau -19,35%. Defisit ini disebabkan oleh penambahan belanja tak terduga atau belanja prioritas untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi.

Tahun 2022 mencatat realisasi SILPA yang sangat besar, yakni Rp 105,913,882,594, meskipun data estimasi anggaran tidak tersedia. Hal ini mengindikasikan peningkatan signifikan, yang berasal dari optimalisasi penerimaan daerah atau efisiensi belanja. Pada tahun 2023, terjadi defisit Rp 3,073,155,917 (-4,45%), menunjukkan adanya pengeluaran yang melampaui perkiraan awal. Sementara itu, tahun 2024 menunjukkan surplus SILPA sangat besar, yakni Rp 61,687,147,574 atau 73,13%.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2019, anggaran pengeluaran pembiayaan daerah sebesar Rp 10,300,000,000 direalisasikan sepenuhnya, dengan persentase pencapaian 100%. Ini menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan yang akurat, tanpa adanya sisa atau kekurangan dana. Tahun 2020 menunjukkan penurunan realisasi yang signifikan. Dari anggaran sebesar Rp 6,000,000,000, yang terealisasi hanya Rp 1,000,000,000, sehingga terjadi selisih Rp 5,000,000,000 dengan persentase penyerapan sebesar 16,67% (-83,33%). Tahun 2022 mencatat realisasi yang melebihi anggaran. Dari anggaran Rp 12,000,000,000, realisasinya mencapai Rp 16,462,279,705, sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp 4,462,279,705 dengan persentase negatif (-37,19%). Tahun 2023 menunjukkan situasi serupa, meskipun perbedaannya tidak sebesar tahun 2022. Dari anggaran Rp 53,759,269,721, realisasi mencapai Rp 54,865,977,042, menyebabkan kekurangan sebesar Rp 1,106,707,321 (-2,06%). Kekurangan ini masih relatif kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, anggaran dan realisasi hampir identik, yaitu Rp 65,816,989,196 dan Rp 65,816,977,092. Selisihnya sangat kecil, yakni Rp 12,104, dengan persentase mendekati nol (0,00002%). Hal ini menunjukkan akurasi tinggi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

Tabel 2.100 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019 – 2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Berkurang	
			Rp	%
2019	10,300,000,000	10,300,000,000	0	0
2020	6,000,000,000	1,000,000,000	5,000,000,000	83.33
2021		-	-	-
2022	12,000,000,000	16,462,279,705	-4,462,279,705	-37.19
2023	53,759,269,721	54,865,977,042	-1,106,707,321	-2.06
2024	65,816,989,196	65,816,977,092	12,104	0.00002

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2025.

Komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Gorontalo selama Tahun Anggaran 2019-2024 terdiri dari: (a) Penyertaan Modal Daerah, dan (b) Pembayaran Ccilan Pokok Utang yang jatuh tempo. Berikut ini secara berturutturut dijelaskan tentang kinerja masa lalu masing-masing komponen Pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut.

Pada tahun 2019, anggaran penyertaan modal sebesar Rp 10,300,000,000 terealisasi sepenuhnya dengan selisih Rp 0 dan persentase pencapaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran terkait penyertaan modal berjalan sesuai rencana tanpa ada sisa atau kekurangan dana. Tahun 2020 mencatat realisasi yang jauh di bawah anggaran. Dari anggaran Rp 6,000,000,000, yang terealisasi hanya Rp 1,000,000,000, menyebabkan kekurangan sebesar Rp 5,000,000,000 dengan persentase penyerapan hanya 16,67% (kekurangan 83,33%). Penyerapan rendah ini disebabkan oleh pandemi COVID-19, yang berdampak pada kebijakan fiskal dan mendorong pemerintah untuk melakukan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan pandemi.

Tabel 2.101 Anggaran dan Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Berkurang	
			Rp	%
2019	10,300,000,000	10,300,000,000	0	0
2020	6,000,000,000	1,000,000,000	5,000,000,000	83.33
2021	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2024	-	-	-	-

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah: 2025

Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 12,000,000,000, tetapi realisasi pembayaran mencapai Rp 16,462,279,705. Selisih kekurangan sebesar Rp 4,462,279,705 dengan persentase negatif (-37,19%). Tahun 2023 mencatat hal serupa, dengan anggaran Rp 53,759,269,721 dan realisasi sebesar Rp 54,865,977,042. Kekurangan sebesar Rp 1,106,707,321 (-2,06%) terjadi, namun persentasenya jauh lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, anggaran dan realisasi hampir identik, yaitu Rp 65,816,989,196 dan Rp 65,816,977,092. Selisihnya sangat kecil, hanya Rp 12,104 dengan persentase mendekati nol (0,00002%).

Tabel 2.102 Anggaran dan Realisasi Pembayaran Cicilan Utang yang Jatuh Tempo Tahun Anggaran 2019-2024 Kabupaten Gorontalo

Tahun Anggaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Berkurang	
			Rp	%
2019	-	-	-	-
2020	-	-	-	-
2021	-	-	-	-
2022	12,000,000,000	16,462,279,705	-4,462,279,705	-37.19
2023	53,759,269,721	54,865,977,042	-1,106,707,321	-2.06
2024	65,816,989,196	65,816,977,092	12,104	0.00002

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah: 2025

2.7. Kebijakan Belanja dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). KUA dan PPAS merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Dalam perencanaan, penganggaran, serta alokasi belanja daerah, anggaran diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek belanja, yang disesuaikan dengan prioritas program atau kegiatan dalam satu tahun anggaran. Kebijakan pengeluaran daerah bertujuan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, meliputi empat kategori utama: belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi mencakup pengeluaran anggaran untuk mendukung kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek, seperti belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial. Belanja modal diarahkan untuk memperoleh aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja tak terduga disediakan untuk kebutuhan darurat atau keperluan mendesak yang sulit diprediksi. Sementara itu, belanja transfer digunakan untuk mengalirkan dana dari atau ke pemerintah daerah lain dan pemerintah desa.

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi alokasi dana daerah, diperlukan analisis terhadap Belanja Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Berikutnya, akan dijelaskan secara bertahap analisis terkait Belanja Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

2.7.1. Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Analisis Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kebijakan belanja serta pengeluaran pembiayaan daerah pada tahun anggaran sebelumnya. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan belanja dan pengeluaran pembiayaan di masa mendatang untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Analisis ini mencakup beberapa aspek utama, yaitu: (a) evaluasi proporsi realisasi belanja daerah terhadap anggarannya, (b) analisis proporsi belanja yang dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan aparatur, (c) analisis terhadap belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang sifatnya wajib dan mengikat serta menjadi prioritas utama, serta (d) proyeksi belanja daerah di masa yang akan datang.

Data proporsi realisasi belanja daerah Kabupaten Gorontalo pada periode 2019-2023 mencerminkan alokasi anggaran yang berfokus pada beberapa kategori utama seperti belanja operasi, belanja modal, dan belanja transfer, dengan porsi terbesar terlihat pada belanja operasi. Belanja operasi, yang meliputi pengeluaran rutin pemerintah daerah seperti belanja pegawai, barang dan jasa, serta bantuan sosial, menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 yang mencapai 68.14% dari total belanja. Belanja pegawai menjadi komponen terbesar dalam belanja operasi, stabil di sekitar 36% - 42% selama lima tahun terakhir, menunjukkan bahwa kebutuhan akan pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai sangat mendominasi. Di sisi lain, belanja barang dan jasa menunjukkan fluktuasi yang mencolok, dengan penurunan tajam di tahun 2021 hingga 0.2% dan kemudian kembali

meningkat di tahun-tahun berikutnya. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian dalam pengalokasian belanja yang mungkin berkaitan dengan kebijakan penyesuaian pada saat pandemi, yang mengutamakan alokasi pada kebutuhan prioritas yang mendesak.

Belanja modal, yang berfungsi untuk investasi daerah dalam bentuk aset jangka panjang, menunjukkan proporsi yang berfluktuasi, mencapai titik tertinggi di tahun 2021 sebesar 22.94%, tetapi menurun drastis di tahun 2023 menjadi hanya 13.93%. Penurunan belanja modal ini berpotensi menekan pertumbuhan pembangunan daerah dalam jangka panjang, mengingat investasi pada infrastruktur dan aset tetap sangat penting untuk menunjang kebutuhan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Belanja transfer juga menunjukkan tren yang stabil, sekitar 17%-20% dari total belanja, yang sebagian besar diarahkan pada bantuan keuangan untuk desa. Proporsi ini relatif stabil setiap tahun, menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung kegiatan desa dalam pembangunan lokal. Namun, belanja hibah dan bantuan sosial relatif kecil, dengan proporsi kurang dari 5% per tahun, yang mencerminkan keterbatasan alokasi untuk bantuan langsung masyarakat, yang dapat berperan penting dalam menjaga kesejahteraan sosial, terutama dalam masa krisis.

Dari analisis ini, tampak bahwa struktur belanja daerah Kabupaten Gorontalo belum sepenuhnya proporsional untuk mendorong pembangunan daerah secara optimal. Alokasi yang tinggi pada belanja operasi, khususnya belanja pegawai, mengurangi ruang bagi peningkatan belanja modal yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Idealnya, belanja daerah yang proporsional adalah yang memberikan keseimbangan antara belanja operasi dan belanja modal, di mana belanja modal sebaiknya memiliki porsi lebih besar untuk mendukung pembangunan fisik dan non-fisik yang mampu menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Mengurangi ketergantungan pada belanja operasi dan meningkatkan investasi dalam belanja modal akan menjadi langkah strategis untuk menciptakan fondasi pembangunan yang lebih kuat dan berkelanjutan di Kabupaten Gorontalo.

Tabel 2.103 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Terhadap Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019–2024 Kabupaten Gorontalo

Uraian	Proporsi (%)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Belanja Operasi	**64.7**	**66.33**	**57.96**	**61.99**	**68.14**	**71.10**
Belanja Pegawai	38.55	42.34	36.08	39.28	41.64	43.68
Belanja Barang Jasa	23.27	18.15	0.2	21.03	24.14	23.91
Belanja Bunga	-	-	0.06	0.33	0.06	0.04
Belanja Subsidi	-	-	0.01	0.01	-	-
Belanja Hibah	1.56	4.8	1.07	0.12	1.92	3.42
Belanja Bantuan Sosial	1.33	1.04	0.58	1.22	0.38	0.03
Belanja Modal	**16.49**	**12.02**	**22.94**	**20.4**	**13.93**	**12.07**
Belanja Modal	16.48	12.02	22.94	20.4	13.93	12.07
Belanja Tidak Terduga	**0.05**	**1.36**	**0.15**	**0.23**	**0.37**	**0.18**
Belanja Tidak Terduga	0.04	1.36	0.15	0.23	0.37	0.18
Belanja Transfer	**18.77**	**20.29**	**18.95**	**17.38**	**17.56**	**16.63**
Belanja Bagi Hasil	0.21	0.2	0.08	0.06	0.28	0.41
Belanja Bantuan Keuangan	18.56	20.09	18.87	17.32	17.28	16.22

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2025.

2.8. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dirancang untuk mengoptimalkan efisiensi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi, baik dalam aspek kinerja aparatur maupun efisiensi anggaran di tingkat pemerintah daerah, termasuk pengurangan anggaran insentif. Analisis terhadap kerangka pendanaan ini berfungsi untuk menentukan kapasitas keuangan riil daerah yang akan dialokasikan bagi program pembangunan daerah jangka menengah selama lima tahun ke depan. Kapasitas riil tersebut merupakan total pendapatan daerah setelah dikurangi dengan berbagai jenis belanja yang bersifat wajib, mengikat, dan prioritas utama.

Setelah seluruh penerimaan daerah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan pengalokasian sumber pendapatan tersebut ke dalam berbagai pos belanja dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pengalokasian penerimaan ini memperhatikan beberapa aspek, antara lain: penerimaan dari retribusi pajak diarahkan pada program atau kegiatan yang mendukung peningkatan layanan terkait retribusi dan pajak; penerimaan dari hasil pengelolaan aset daerah dialokasikan untuk pengembangan kapasitas dengan tujuan mendapatkan pengembalian investasi yang optimal bagi kas daerah; dana alokasi umum diprioritaskan untuk belanja pegawai dan operasional rutin pemerintahan; dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan spesifik yang mendasari alokasi tersebut; dan penerimaan dana bagi hasil disalurkan

untuk peningkatan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai dengan jenis penerimaan tersebut.

2.8.1. Ruang Fiskal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan fiskal yang digunakan pemerintah daerah untuk mengarahkan perekonomian melalui komposisi belanja yang diharapkan mampu mendorong kegiatan ekonomi produktif, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Kemampuan APBD untuk memperluas dampak ekonominya sangat dipengaruhi oleh ruang fiskal yang dimilikinya. Dalam hal ini, ruang fiskal adalah fleksibilitas yang dimiliki pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pada kegiatan prioritas pembangunan tanpa mengorbankan kesinambungan fiskal. Ruang fiskal yang cukup tidak hanya mendukung efektivitas belanja tetapi juga menjaga keberlanjutan fiskal di masa mendatang, seiring dengan peningkatan kapasitas pemerintah untuk memobilisasi pendapatan serta mengoptimalkan pembiayaan dan efisiensi anggaran.

Sebagaimana dijelaskan oleh United Nations Development Programme (UNDP), ruang fiskal adalah kapasitas pemerintah dalam menyediakan sumber daya untuk prioritas publik tanpa menimbulkan risiko bagi stabilitas fiskal jangka panjang. Pendekatan ini menunjukkan bahwa reformasi pajak, efisiensi belanja, serta penggunaan utang secara bijak untuk investasi produktif adalah beberapa strategi yang dapat memperluas ruang fiskal daerah (UNDP, 2019). Sejalan dengan itu, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) menegaskan pentingnya kebijakan ruang fiskal yang inklusif dan terencana untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat dan berkelanjutan, termasuk dalam peningkatan kapasitas fiskal yang dapat mendukung program-program prioritas seperti penanggulangan kemiskinan dan pengendalian inflasi.

Dalam analisis ini, ruang fiskal diperoleh dari pendapatan umum setelah dikurangi dengan pendapatan earmarked dan belanja mengikat, seperti belanja pegawai dan belanja bunga. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, maka semakin besar pula keleluasaan dalam menentukan prioritas belanja, yang memungkinkan daerah untuk menyusun program yang lebih responsif dan terarah, khususnya dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa perencanaan dan penganggaran APBD yang efektif sangat

penting dalam menciptakan ruang fiskal yang memadai guna mendukung berbagai program pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Tabel 2.104 Perkembangan Ruang Fiskal Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 – 2024 (miliar rupiah)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PAD	155.47	128.16	122.47	128.46	151.4	164.77
Pendapatan Transfer	1,237.49	1,136.52	1,119.78	1,066.05	1,137.72	1,302.66
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	60,507	76,218	56,454	5,198	8,925	4,277
Total Pendapatan	1,499.15	1,408.59	1,351.19	1,255.10	1,352.28	1,471.71
Belanja Pegawai	594.64	589.42	556.11	579.58	559.37	616,552
Ruang Fiskal (Rp)	904.51	819.17	795.08	675.52	792.91	855.16
Ruang Fiskal (%)	60.33	58.16	58.84	53.82	58.64	58.11

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2024.

Ruang fiskal dalam bentuk nilai rupiah mengalami penurunan signifikan dari Rp904,51 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp675,52 miliar pada tahun 2022, meskipun pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali menjadi Rp792,91 miliar. Persentase ruang fiskal juga mengikuti pola yang serupa, dengan persentase tertinggi pada tahun 2019 sebesar 60,33% dan terendah pada tahun 2022 sebesar 53,82%. Fluktuasi ini mencerminkan variabilitas dalam kapasitas fiskal yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai prioritas pembangunan tanpa mengganggu kewajiban fiskal utamanya, seperti belanja pegawai.

Teori ruang fiskal menekankan bahwa kemampuan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk belanja prioritas bergantung pada kapasitas fiskal yang tersedia setelah kewajiban utama dipenuhi. Penurunan ruang fiskal, terutama yang terjadi dari tahun 2021 ke 2022, dapat menunjukkan tantangan dalam efisiensi anggaran dan kemungkinan meningkatnya kebutuhan belanja wajib, seperti belanja pegawai, yang menyerap sebagian besar pendapatan daerah. Meskipun belanja pegawai Kabupaten Gorontalo cenderung stabil, variabilitas dalam penerimaan transfer dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan dampak pada besaran ruang fiskal setiap tahun. Pada tahun 2023, PAD Kabupaten Gorontalo mengalami kenaikan hingga Rp151,40 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, namun peningkatan ini belum cukup untuk mencapai tingkat ruang fiskal seperti pada tahun 2019.

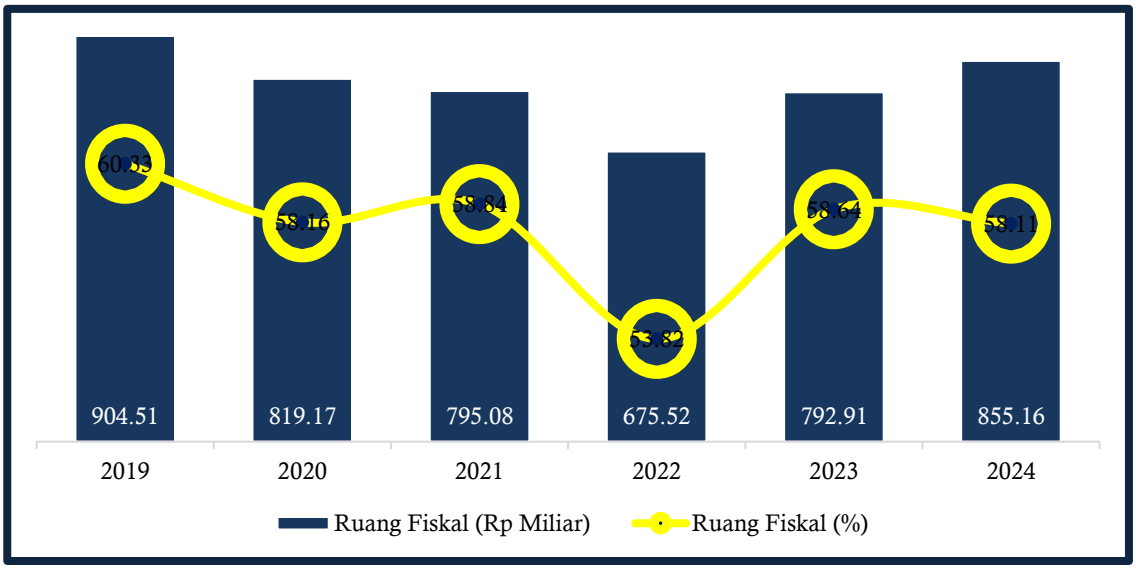

Sumber: Data diolah, 2025

Gambar 2.25 Perkembangan Ruang Fiskal Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 – 2024

2.8.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun untuk menganalisis kapasitas riil kemampuan keuangan daerah yang dapat dialokasikan untuk belanja langsung pembangunan dalam periode 2025-2029. Dalam proses ini, perlu diperhatikan estimasi penerimaan dan pengeluaran daerah yang mungkin terjadi selama kurun waktu tersebut. Penerimaan daerah mencakup pendapatan dan penerimaan pembiayaan, sementara pengeluaran daerah terdiri dari belanja wajib yang mengikat, seperti belanja pegawai, dan pengeluaran pembiayaan daerah.

Selisih antara total penerimaan dan pengeluaran inilah yang akan menentukan kapasitas riil keuangan daerah. Untuk Kabupaten Gorontalo, proyeksi kapasitas riil keuangan dari tahun 2026 hingga 2030 menunjukkan kecenderungan peningkatan. Namun, tren ini mungkin mengalami fluktuasi akibat pengaruh ekonomi nasional dan tantangan ketidakpastian ekonomi global, yang berpotensi mempengaruhi penerimaan negara dan pada gilirannya memengaruhi besaran transfer ke daerah. Rincian kapasitas riil keuangan Kabupaten Gorontalo dalam periode tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.105 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Gorontalo (miliar rupiah)

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan	1,411.50	1,472.50	1,475.70	1,478.60	1,482.30	1,484.50
SILPA	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01	23.01
Pencairan dana cadangan	0	0	0	0	0	0
Total penerimaan	1,434.51	1,434.51	1,434.51	1,434.51	1,434.51	1,434.51

Belanja pegawai	624.9	624.9	624.9	624.9	624.9	624.9
Pengeluaran pembiayaan	65.81	65.81	65.81	65.81	65.81	65.81
Kapasitas riil kemampuan keuangan	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2025.

2.8.3. Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran adalah serangkaian aturan yang dirancang untuk memaksimalkan penggunaan dana publik demi kesejahteraan masyarakat serta untuk memastikan program-program berjalan secara efektif. Karena keterbatasan anggaran, pengalokasian dana dilakukan berdasarkan prioritas dan kebutuhan, dengan prinsip "money follows program" atau alokasi dana mengikuti program prioritas. Sebelum anggaran didistribusikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, terdapat kebijakan spesifik terkait alokasi untuk setiap sumber penerimaan, antara lain:

1. Dana dari retribusi diutamakan untuk mendanai program atau kegiatan yang secara langsung berhubungan dengan peningkatan layanan dari sektor yang dikenakan retribusi atau pajak.
2. Pendapatan dari pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk meningkatkan kapasitas terkait, guna mencapai pengembalian investasi yang optimal bagi kas daerah.
3. Penerimaan dari sumber pendapatan asli daerah lainnya, termasuk dana kapitasi, dialokasikan khususnya untuk belanja di bidang kesehatan melalui Dinas Kesehatan.
4. Dana Alokasi Umum (DAU) difokuskan pada belanja pegawai dan kegiatan operasional pemerintahan sehari-hari.
5. Penerimaan dari DAU dengan *specific grant* disalurkan sesuai tujuannya, yaitu memenuhi layanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum, serta mendukung kegiatan di tingkat kelurahan dan menggaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
6. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan sesuai peruntukannya, sebagaimana ditetapkan dalam program spesifik yang disasar oleh dana tersebut.
7. Dana bagi hasil dialokasikan untuk meningkatkan layanan atau perbaikan lingkungan, sesuai dengan jenis dana bagi hasil yang diterima.

Prioritas pengalokasian kapasitas riil keuangan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

1. Prioritas I: Penggunaan dana difokuskan untuk belanja pemenuhan kewajiban mandatory serta standar pelayanan minimal sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. Prioritas II: Dialokasikan untuk membiayai belanja yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah serta program-program prioritas yang telah ditetapkan.

Dengan kebijakan ini, daerah diharapkan dapat mengelola anggaran secara efektif, mencapai target layanan dasar, dan mendukung program strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

Tabel 2.106 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Gorontalo

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80	743.80
Prioritas I	595.04	595.04	595.04	595.04	595.04	595.04
Prioritas II	438.86	438.86	438.86	438.86	438.86	438.86

Sumber: APBD Kab. Gorontalo, Data diolah, 2025.

2.9 Permasalahan dan Isu Strategis

Permasalahan pembangunan merupakan pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan yang terjadi dari kondisi ideal yang diharapkan dengan capaian/realisasi. Hasil evaluasi terhadap gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Gorontalo sebelumnya menjadi dasar identifikasi sejumlah permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan. Selain itu memperhatikan isu strategis yang merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Selanjutnya, analisis isu-isu strategis dapat menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solusi atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Gorontalo. Perkembangan terkini, permasalahan dan tantangan pembangunan Kabupaten Gorontalo, regional, nasional maupun internasional semakin bertambah sebagai implikasi terjadinya ketidakstabilan ekonomi global, gejolak dan perang Rusia-Ukraina maupun peristiwa di belahan dunia lainnya.

2.9.1. Permasalahan Pembangunan

Beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029 dapat disajikan sebagai berikut:

2.9.1.1. Permasalahan dari Aspek Geografi dan Demografi

- Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
- Menurunnya kualitas lingkungan hidup
- Tingginya alih fungsi lahan untuk kegiatan pertanian pada dataran tinggi dan lahan kemiringan
- Belum optimalnya cakupan pelayanan persampahan perkotaan
- Rendahnya akses rumah tangga terhadap sanitasi aman
- Masih rendahnya ketahanan air dan masih rendahnya rumah tangga memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan
- Penataan sistem drainase yang belum optimal
- Masih rendahnya mitigasi bencana serta tingginya kerentanan bencana, terutama bencana banjir dan longsor
- Masih rendahnya ketahanan pangan dan energi
- Kondisi Danau Limboto yang mengalami penurunan kedalaman dan luasan secara signifikan

2.9.1.2. Permasalahan dari Aspek Kesejahteraan dan Sosial Budaya

- Ketimpangan pembangunan wilayah yang lebar
- Ketimpangan distribusi pendapatan masih tinggi
- Tingginya inflasi dari kelompok makanan
- Rendahnya produktivitas tenaga kerja dan didominasi pada lapangan usaha (sektor) pertanian
- Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah dan tingginya kelompok setengah pengangguran
- Angka kemiskinan yang masih tinggi, terutama di wilayah perdesaan
- Tingginya ketidakstabilan harga komoditas pangan
- Tingginya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan miras
- Belum optimalnya cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional dan jaminan kesehatan ketenagakerjaan
- Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi
- Masih tingginya angka kesakitan dan belum optimalnya layanan kesehatan
- Belum optimalnya penanganan prevalensi stunting

- Masih rendahnya angka keberhasilan pengobatan tuborkulosis dan penyakit menular lainnya
- Belum optimalnya penyandang disabilitas mendapatkan layanan dan pekerjaan di sektor formal
- Keseanjangan partisipasi angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin (ketimpangan gender)
- Belum optimalnya pembangunan kepemudaan dan kegiatan keolahragaan
- Makin menurunnya nilai-nilai budaya sebagai kearifan lokal untuk menunjang pembangunan daerah
- Terbatasnya intensitas event budaya yang diselenggarakan

2.9.1.3. Permasalahan dari Aspek Daya Saing Ekonomi Daerah

- Pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kurang berkualitas
- Masih dominannya sektor pertanian dalam pembentukan ekonomi daerah dan transformasi ekonomi berjalan lambat
- Rendahnya produktivitas dan daya saing daerah
- Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif dan digitalisasi UMKM
- Terjadinya kondisi deindustrialisasi dini
- Belum optimalnya infrastruktur jalan dan irigasi menunjang sektor ekonomi lokal
- Sektor pariwisata cukup potensial namun masih belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi biru
- Belum optimalnya perikanan tangkap dan budidaya perikanan
- Masih terbatasnyaa investasi swasta dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia
- Rendahnya jumlah koperasi sehat dan belum optimalnya pengembangan UMKM
- Rendahnya persentase PAD terhadap pendapatan daerah
- Rendahnya rasio pajak daerah terhadap PDRB
- Belum tersedianya database potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2.9.1.4. Permasalahan dari Aspek Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kualitas sumber daya manusia masih rendah diukur dari tingkat IPM di bawah rata-rata provinsi dan nasional
- Kualitas mutu dan layanan pendidikan masih belum optimal
- Rendahnya angka Rata rata Lama Sekolah
- Rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) ditingkat sekolah menengah.
- Masih tingginya angka putus sekolah
- Rendahnya minat baca masyarakat atau indeks literasi yang rendah
- Rendahnya proporsi penduduk yang melanjutkan pendidikan tinggi
- Belum merata kualitas pendidikan antar daerah
- Belum meratanya distribusi guru dan tenaga pendidik

2.9.1.5. Permasalahan dari Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

- Infrastruktur jalan dalam kondisi rusak berat cukup panjang
- Aksesibilitas antar wilayah belum optimal, terutama dari kantong produksi pertanian
- Terbatasnya sarana angkutan umum untuk menunjang aksesibilitas dari wilayah perdesaan ke perkotaan dan sebaliknya
- Rendahnya rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan
- Banyaknya irigasi teknis tidak berfungsi optimal
- Kapasitas jaringan internet belum terlayani secara optimal di seluruh wilayah
- Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
- Belum optimalnya pengelolaan sistem profil potensi desa sebagai basis data dalam perencanaan dan percepatan pembangunan di perdesaan

2.9.1.6. Permasalahan dari Aspek Pelayanan Umum

- Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik belum optimal (*Smart Governance)*
- Belum optimalnya kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan
- Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi
- Belum optimalnya penataan dan peningkatan kompetensi ASN
- Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah

- Belum optimalnya inovasi daerah
- Kurangnya sumber daya manusia yang memenuhi standar kompetensi khususnya pada jabatan fungsional dan keahlian teknis tertentu
- Akuntabilitas kinerja dan keuangan belum optimal terutama dalam menghasilkan *outcome*
- Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP
- Belum tersedianya Standar Kompetensi Jabatan yang menjadi acuan dalam proses penempatan ASN
- Kapasitas dan kemandirian fiskal Kabupaten Gorontalo sangat rendah
- Belum optimalnya pemanfaatan barang milik daerah dan belum terinvetarisasi secara akurat

2.9.2. Isu Strategis

2.9.2.1. Isu Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo lima tahun kedepan antara lain:

1. **Perubahan Iklim dan Lingkungan:** Perubahan iklim global menghadirkan tantangan signifikan dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Namun ini juga menjadi peluang untuk mengadopsi teknologi ramah lingkungan dan memperkuat inisiatif hijau di Kabupaten Gorontalo.
2. **Teknologi dan Digitalisasi:** Revolusi digital global mendorong adopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai sektor, termasuk pelayanan publik dan ekonomi lokal. Tantangan ini juga memberikan peluang bagi Kabupaten Gorontalo untuk menjadi kota yang lebih cerdas dan terhubung melalui transformasi digital.
3. **Dinamika Ekonomi Global:** Fluktuasi ekonomi global, termasuk perubahan dalam perdagangan internasional dan pasar keuangan, dapat mempengaruhi ekonomi lokal. Namun, ini juga membuka peluang bagi Kabupaten Gorontalo untuk memperluas pasar ekspor produk unggulan dan menarik investasi asing.
4. **Perubahan Demografi Global:** Perubahan demografi global, seperti peningkatan populasi usia produktif dan migrasi internasional, mempengaruhi kebutuhan

tenaga kerja dan sumber daya manusia. Kabupaten Gorontalo dapat memanfaatkan peluang ini dengan mengembangkan kapasitas SDM dan menciptakan lapangan kerja baru.

5. **Geopolitik dan Keamanan Global:** Perubahan dalam lanskap geopolitik global dapat membawa ketidakpastian, tetapi juga peluang untuk memperkuat hubungan internasional dan kerjasama regional yang dapat mendukung pembangunan daerah.

2.9.2.2. Isu Nasional

Lingkungan strategis nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo lima tahun kedepan, antara lain:

1. **Isu Strategis Transformasi Sosial:** Transformasi Sosial berfokus pada pemenuhan layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan melahirkan manusia sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Namun, tantangan utama masih ada di ketiga bidang tersebut. Dalam kesehatan, tantangan meliputi rendahnya cakupan dan kualitas pelayanan, serta pengendalian penyakit yang belum optimal. Penyakit menular dan tidak menular tinggi, penyakit tropis belum teratasi, dan perilaku hidup sehat belum membudaya. Disparitas kapasitas sistem kesehatan juga mempengaruhi kualitas layanan. Di bidang pendidikan, tantangan termasuk ketidakmerataan akses dan partisipasi, kualitas pendidikan yang rendah, serta keterbatasan sarana, prasarana, dan guru berkualitas. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi juga masih rendah. Dalam perlindungan sosial, tantangan utama adalah rendahnya akurasi dan integrasi program bantuan sosial, risiko bencana, perubahan iklim, dan keterbatasan layanan bagi kelompok rentan. Kesempatan kerja untuk penyandang disabilitas dan lansia belum merata, akses terhadap hunian layak masih rendah, dan penyelenggaraan program jaminan sosial belum optimal.
2. **Isu Strategis Transformasi Ekonomi:** Pembangunan ekonomi Indonesia menghadapi tantangan struktural signifikan dalam upaya keluar dari jebakan negara pendapatan menengah dan mengejar pertumbuhan berbasis produktivitas. Industrialisasi mengalami stagnasi dan penurunan peran, dengan masalah pada inefisiensi faktor produksi, rendahnya nilai tambah produk, serta adopsi teknologi dan standardisasi yang terbatas. Produktivitas tenaga kerja yang rendah, sebagian

besar berpendidikan menengah ke bawah dan bekerja di sektor bernilai tambah rendah, juga menghambat laju peningkatan nilai tambah. Sektor pertanian menghadapi tantangan serupa dengan rendahnya adopsi teknologi, regenerasi petani yang lambat, dan degradasi lahan. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mengalami kendala dalam kualitas pengembangan karena keterbatasan SDM, fasilitas, dan prasarana. UMKM dan koperasi kesulitan dalam meningkatkan kapasitas, terutama dalam hal permodalan dan teknologi, sedangkan BUMN perlu bersinergi dengan UMKM untuk mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah belum optimal, dengan pasar domestik dan global yang terbatas serta kelembagaan yang belum sepenuhnya berkembang. Transisi energi menghadapi ketergantungan pada energi fosil, rendahnya pemanfaatan energi terbarukan, dan tingginya emisi GRK, serta keterbatasan infrastruktur dan pendanaan. Ekonomi hijau dan biru belum kuat karena biaya dan teknologi tinggi. Digitalisasi perlu didorong secara kolaboratif mengingat perbedaan geografi dan karakteristik daerah. Kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan perdesaan serta akses hunian yang rendah berdampak pada kualitas urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi.

3. **Isu Strategis Transformasi Tata Kelola:** Tata kelola merupakan elemen kunci dalam pembangunan yang mencakup aspek politik, administrasi, dan hukum. Tata kelola yang efektif melibatkan pengelolaan sumber daya secara transparan, akuntabel, inklusif, dan berdampak sosial-ekonomi. Dalam RPJMN 2025-2029, transformasi tata kelola diperlukan untuk menghadapi tren global dan perubahan lingkungan strategis, seperti revolusi teknologi dan meningkatnya kesadaran masyarakat. Transformasi ini juga penting untuk memastikan kesinambungan dan sinkronisasi kebijakan pembangunan. Namun, tata kelola menghadapi berbagai masalah, termasuk integritas partai politik yang rendah karena standar etika yang tidak jelas, demokrasi internal yang belum optimal, dan transparansi keuangan yang kurang. Di sisi birokrasi, reformasi masih bersifat prosedural dan belum efektif mencegah korupsi, dengan penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dalam dua tahun terakhir. Masalah lainnya termasuk tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, dan intervensi politik dalam birokrasi, yang menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

4. **Isu Strategis Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia:** Untuk menjamin kepastian hukum melalui pemerintahan yang efektif dan responsif, perlu memperhatikan dinamika lingkungan strategis. Dalam bidang hukum, kelembagaan dan penegakan hukum masih belum terpadu, efisien, atau berlandaskan HAM. Kepatuhan hukum masyarakat rendah akibat minimnya literasi dan akses keadilan yang terbatas. Di bidang pertahanan dan keamanan, perkembangan teknologi informasi membawa tantangan dan peluang. Dalam demokrasi, kebebasan sipil, kesetaraan, dan internalisasi Pancasila masih kurang, dengan kelembagaan demokrasi yang sering terpengaruh politik uang dan SARA serta fungsi lembaga perwakilan yang belum optimal. Dalam politik luar negeri, ketidakpastian meningkat akibat konflik, disrupsi rantai pasok global, dan perubahan geopolitik, sementara perundingan batas wilayah dan diplomasi Indonesia belum ideal. Stabilitas ekonomi makro menghadapi tantangan dari perlambatan ekonomi global, tekanan inflasi, dan kebijakan suku bunga tinggi, serta tantangan domestik seperti rendahnya penerimaan perpajakan dan imbal hasil obligasi yang tinggi. Di sektor keuangan, tantangan termasuk pendalaman sektor keuangan yang dangkal, fungsi intermediasi yang belum optimal, keterbatasan sektor keuangan non-bank, ketimpangan inklusi dan literasi keuangan, serta perlindungan konsumen dan investor yang masih lemah.
5. **Isu Strategis Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi:** Keseimbangan antara nilai-nilai agama, kearifan lokal, dan konservasi lingkungan adalah kunci dalam pembangunan. Agama dan budaya harus menjadi dasar spiritual, etika, dan moral untuk memperkuat ketahanan sosial, budaya, dan ekologi. Sumber daya manusia, didukung oleh keluarga, berperan penting dalam transformasi pembangunan dan pembangunan karakter. Kebijakan pemerintah harus ramah gender dan inklusif bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia untuk memastikan pemerataan dan layanan dasar yang optimal. Dengan meningkatnya populasi, Indonesia menghadapi penurunan kualitas lingkungan, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam. Konversi lahan hutan untuk pertanian dan perkebunan mengurangi fungsi lingkungan hutan, sementara petani dan nelayan mengalami stagnasi kesejahteraan. Pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, dengan daya tampung tempat pemrosesan akhir (TPA) diprediksi penuh pada 2028. Indonesia berusaha mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di sektor

energi, lahan, kelautan, industri, dan pengelolaan limbah. Sektor energi menghadapi tantangan dalam penyediaan, akses, dan harga, dengan pengembangan energi baru terbarukan (EBT) diharapkan dapat menggantikan energi fosil. Perubahan iklim berpotensi meningkatkan kerugian ekonomi, kerentanan masyarakat, dan bencana lingkungan, terutama dalam sektor air, laut, pertanian, dan kesehatan. Ancaman kelangkaan air dan akses buruk terhadap sanitasi juga dapat memicu penyakit menular dan masalah pertumbuhan anak

2.9.2.3. Isu Wilayah (Regional)

Berdasarkan identifikasi permasalahan lokalitas daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal maka ditetapkan isu strategis pembangunan, sebagai berikut:

1. Ketahanan dan transformasi ekonomi berjalan lambat
2. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi
3. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
4. Pembangunan belum berwawasan lingkungan
5. Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
6. Rendahnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah
7. Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal

2.9.2.4. Isu Kabupaten Gorontalo

Isu strategis adalah faktor atau kondisi yang harus diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan karena potensi dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa depan. Keberadaan isu strategis dapat menimbulkan kerugian besar atau menghilangkan peluang yang berharga apabila tidak ditangani atau dimanfaatkan secara optimal. Ciri-ciri isu strategis meliputi urgensinya, fundamental, bersifat jangka panjang, mendesak, terkait dengan struktur organisasi, dan menentukan arah tujuan di masa yang akan datang. Identifikasi isu strategis pembangunan daerah dapat dilakukan melalui berbagai sumber informasi.

1. **Akselarasi transformasi ekonomi:** Struktur perekonomian Kabupaten Gorontalo didominasi oleh pertanian (primer) yang minim nilai tambah, dimana sektor ini sangat rentan terhadap perubahan iklim yang dapat mengakibatkan produktivitas tidak stabil. Disaat yang sama angkatan kerja menumpuk di sektor pertanian mengakibatkan beban pada lapangan usaha ini menjadi makin berat, sehingga

berdampak terhadap rendahnya produktivitas tenaga kerja. Akibatnya wilayah perdesaan menjadi kantong kemiskinan, dalam hal ini diperlukan perubahan struktur (transformasi) ekonomi. Transformasi ekonomi merupakan faktor penentu percepatan pembangunan dan penciptaan *multiplier effect* ekonomi, meskipun daerah memiliki sumber daya yang melimpah bilamana belum dilakukan pengolahan maka ketersediaan sumber daya kurang memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat, sekaligus menyulitkan menurunkan angka kemiskinan karena pergeseran struktur tenaga kerjapun tidak terjadi ke sektor yang lebih produktif.

2. **Peningkatan kualitas dan pembangunan infrastruktur:** Ketersediaan infrastruktur merupakan modal dasar dalam pembangunan, keberadaannya dapat menunjang kelancaran kegiatan ekonomi terutama untuk pengangkutan barang dari kantong produksi ke pusat pemasaran. Selain itu ketersediaan infrastruktur seperti akses air bersih, konektivitas jaringan jalan, jembatan, pelabuhan, listrik dan telekomunikasi (internet) yang memadai dan lengkap akan mendorong produktivitas, memudahkan aktivitas ekonomi sehigga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata penting dilaksanakan sehingga kualitas hidup masyarakat makin meningkat. Di lain sisi keterbatasan infrastruktur dapat mengakibatkan ekonomi biaya tinggi sehingga mengurangi daya saing ekonomi, dapat menghambat investasi sebagai *engine of growth* pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, infrastruktur permukiman terutama rumah layak huni bagi masyarakat masih menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Kabupaten Gorontalo. Bertambahnya luasan kumuh sebesar 96.8Ha menuntut adanya pendekatan yang lebih terintegrasi dan komprehensif dalam penanganan rumah tidak layak huni dan kawasan kumuh. Sejalan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendukung program nasional 3 juta rumah dengan memastikan penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR). Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk pemenuhan hak dasar atas papa, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup yang berdampak pada ketahanan pangan daerah.
3. **Kemiskinan dan ketimpangan:** Tantangan utama yang dihadapi pembangunan yaitu masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan, keduanya bahkan dijadikan sebagai isu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Angka kemiskinan yang tinggi memberikan dampak luas, munculnya berbagai macam

penyakit sosial, mutu sumber daya manusia rendah serta akan menghambat kemajuan apalagi dibarengi dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang lebar. Maka sekalipun ada kemajuan yang dicapai dalam proses pembangunan, kue ekonomi tidak akan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Kondisi ini akan menyulitkan mengentaskan kemiskinan, sebab antara kemiskinan dan ketimpangaan distribusi pendapatan keduanya memiliki hubungan kausalitas yang perlu dibereskan. Berbagai kebijakan strategis yang telah dilaksanakan untuk mengentaskan kemiskinan tren penurunannya semakin melambat, karena itu diperlukan strategi lain yang lebih efektif dalam rangka mengurangi kemiskinan sekaligus memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan, tidak itu saja diperlukan intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mengurangi ketimpangan wilayah agar pemeraatan pembangunan di Kabupaten Gorontalo terwujud.

4. **Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan mutu SDM:** Penurunan angka kemiskinan terus mengalami perlambatan dibanding periode-periode sebelumnya, tantangannya cukup beragam salah satunya adalah produktivitas tenaga kerja yang rendah. Hal ini lahir karena sektor paling dominan dalam pembentukan ekonomi adalah sektor primer minim *value added*, sementara sektor produktif seperti industri pengolahan kontribusinya kecil dengan tingkat pertumbuhan yang melambat setiap tahun. Sejalan dengan itu mutu SDM yang diukur dari tingkat *human capital* atau IPM lebih rendah dari rata-rata nasional dan tingkat provinsi. Komponen pembentukan IPM di Kabupaten Gorontalo seluruhnya masih bermasalah, rata-rata pengeluaran perkapita yang rendah, rata-rata lama sekolah dengan harapan lama sekolah gapnya sangat lebar dan derajat kesehatan masyarakat, terutama diukur dari usia harapan hidup bayi pada saat lahir terhitung rendah. Kondisi ini memerlukan strategi jitu lima tahun kedepan untuk memperbaikinya agar IPM dapat meningkat melampaui rata-rata nasional maupun provnisi. Dengan mutu SDM yang tinggi akan menciptakan produktivitas yang tinggi pula, selanjutnya akan berdampak terhadap perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat.
5. **Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak:** Upaya mengurangi ketimpangan gender menjadi prioritas untuk memastikan perempuan memiliki kesempatan yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, baik di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun keterlibatan sosial-politik. Hal ini diiringi dengan peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan

keputusan dan penempatan pada posisi strategis, sehingga suara dan peran mereka dapat berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah. Penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak juga menjadi perhatian penting, terutama dalam mencegah kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Pemberdayaan ekonomi perempuan diarahkan melalui pendekatan berbasis inklusi, yang memastikan akses terhadap sumber daya, pelatihan, dan peluang usaha dapat dirasakan secara merata oleh seluruh kelompok perempuan, termasuk yang berada di daerah terpencil dan rentan. Selain itu, integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan data gender dalam perencanaan serta penganggaran daerah menjadi strategi kunci untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat. Pemenuhan hak dan perlindungan anak juga menjadi pilar utama, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

6. **Ketahahan Pangan, Lingkungan hidup dan Kebencanaan:** Kabupaten Gorontalo setiap tahun mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, kebutuhan akan lahan, air bersih, dan ruang hidup pun semakin meningkat. Berbagai aktivitas sosial ekonomi yang menyertainya berdampak langsung terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup, khususnya akibat alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan belum optimalnya pengelolaan lingkungan. Sektor pertanian yang menjadi mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Gorontalo turut mendorong pembukaan lahan baru yang berdampak pada penyusutan kawasan hutan dan resapan air. Di sisi lain, pertumbuhan pemukiman dan ekspansi kawasan ekonomi yang masif menambah tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kombinasi dari semua aktivitas ini menyebabkan meningkatnya potensi bencana hidrometeorologis, seperti banjir dan longsor, terutama di musim hujan. Pada saat yang sama, ketersediaan air bersih bagi masyarakat mengalami penurunan, dan kualitas tanah sebagai media produksi pertanian semakin terdegradasi. Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak hanya menimbulkan risiko bencana, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap ketahanan pangan. Kualitas tanah yang menurun, berkurangnya pasokan air, serta ketidakseimbangan ekosistem menyebabkan produktivitas lahan pertanian tidak lagi optimal meskipun secara

luas lahan tidak berkurang. Akibatnya, hasil pangan menurun, biaya produksi meningkat, dan risiko gagal panen semakin tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga pada kualitas dan keberlanjutan fungsi ekologis lingkungan. Di tengah kondisi tersebut, urgensi pembangunan berkelanjutan menjadi semakin nyata. Diperlukan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui kebijakan tata ruang yang berwawasan ekologis, pengendalian alih fungsi lahan, dan penerapan teknologi pertanian ramah lingkungan. Edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) juga menjadi penting untuk menurunkan pencemaran air, udara, dan tanah. Di sisi lain, konservasi lingkungan hidup serta penguatan mitigasi bencana harus menjadi prioritas lintas sektor, termasuk dalam pengembangan kawasan wisata berkelanjutan seperti Geopark yang memadukan pelestarian alam, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Dengan integrasi kebijakan lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, Kabupaten Gorontalo diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan hidup, sekaligus membangun ketangguhan terhadap risiko bencana di masa depan.

7. **Tata kelola pemerintahan dan daya saing daerah:** Tata kelola pemerintahan harus terus dilakukan perbaikan demi terwujudnya pemerintahan yang baik, salah satu ciri tata kelola pemerintahan yang baik yakni melayani untuk kepentingan masyarakat dengan cekatan dengan menjalankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasif dan akuntabel. Tata kelola pemerintaahan Kabupaten Gorontalo yang diukur dari Indeks Reformasi Birokrasi setiap tahun terus meningkat, namun masih terhitung rendah dibandingkan dengan beberapa daerah lainnya. Rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi karena diperhadapkan beberapa permasalahan, yaitu: a) Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik belum berjalan optimal, b) Layanan publik belum dikelola dengan optimal, c) Keterbatasan ASN, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, ditandai dari Indeks Profesionalitas ASN masih rendah, d) Akuntabilitas kinerja masih perlu ditingkatkan karena nilai SAKIP belum mencapai kategori A. e) Akuntabilitas keuangan masih perlu ditingkatkan terus, meskipun dalam beberapa tahun terakhir telah memperoleh WTP, f) Belum optimalnya penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam

penyelenggaraan pemerintah daerah karena maturitas SPIP rendah, g) Belum optimalnya penataan dan kompetensi ASN karena belum terwujudnya *merit system* secara penuh; dan h) Belum optimalnya tingkat kapabilitas APIP. Perbaikan tata kelola pemerintahan selamaa ini terus dilakukan perbaikan yang didukung oleh berbagai *stakeholders*. Adanya sinergi dengan *stakeholders*, diharapkan tata kelola pemerintahan terus mengalami peningkatan agar dapat mewujudkan pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat secara optimal. Oleh sebab itu tata kelola pemerintahan akan menjadi fokus dan tujuan pembangunan berkelanjutan, sebab lahirnya pemerintahaan yang baik akan menjadikan daerah memiliki daya saing yang tinggi, sehingga menjadi daya tarik investasi. Dimana investasi sangat diperlukan untuk mengakselarasi pertumbuhan ekonomi untuk meningkat kesejahteraan masyarakat.

BAB 3 VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. Visi

Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024, yang menggambarkan arah pembangunan yang hendah dicapai selama lima tahun kedepan. Sekaligus sebagai dasar perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Gorontalo sesuai misi yang diemban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dokumen RPJMD disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dalam menjabarkan visi dan misi dari kepala daerah terpilih. Dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa RPJMD harus ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka selain merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati terpilih, RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029, mengacu pula pada visi dan misi yang ada dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 – 2045. Adapun visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Gorontalo yaitu:

“KABUPATEN GORONTALO SEJAHTERA, MANDIRI, MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Sejahtera, menggambarkan cita-cita Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo agar rakyatnya hidup aman sentosa terlepas dari segala macam gangguan keamanan, baik dari aspek ekonomi, sosial, politik dan hukum yang berkeadilan sehingga lingkungan menjadi kondusif bagi masyarakat untuk berkembang, berkreasi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah. Kabupaten Gorontalo memberikan jaminan agar masyarakat dapat hidup makmur (berkecukupan) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, indikator sejahtera yang lain dapat diukur dari tingkat kemiskinan rendah dan angka pengangguran nol (zero unemployment).

Mandiri, pada tahun 2045, Kabupaten Gorontalo merupakan daerah yang memiliki kemampuan mengatasi masalah secara mandiri, mengendalikan lingkungan

strategis, otonom mengelola potensi, tidak bergantung dalam memenuhi kebutuhannya dari pihak lain, seperti pangan, produk-produk industri kebutuhan primer, memiliki kemampuan fiskal yang besar untuk membiayai pembangunan, mampu mengambil keputusan dan bertindak untuk kepentingan masyarakat, daerah dan bangsa. Kabupaten Gorontalo juga memiliki ketahanan ekonomi yang kuat dan berdaya saing yang tinggi. Kemudian masyarakat Kabupaten Gorontalo memiliki kemampuan mengkompensasi dirinya untuk tidak bergantung kepada bantuan pemerintah, mandiri memenuhi kebutuhannya dengan mengedepankan solidaritas, kesetaraan dan keterbukaan (demokratis). Masyarakatnya memiliki akhlak, budi pekerti yang baik, mentalitas dan etos kerja yang tinggi.

Maju, pada tahun 2045 Kabupaten Gorontalo perekonomiannya setara dengan daerah yang telah maju, masyarakatnya menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), memiliki kemampuan beradaptasi dengan kehidupan modern namun tetap menjunjung nilai budaya dan kearifan lokal, inovatif dan kuat menghadapi segala perubahan (goncangan). Indikator kemajuan juga dapat diukur dari makin meningkatnya derajat pendidikan dan kesehatan, sarana prasarana yang canggih untuk menunjang aktifitas ekonomi, aksesibilitas antar wilayah makin lancar, disparitas wilayah makin berkurang, investasi berkembang pesat didukung oleh sistem yang baik dan pelayanan publik yang sangat efisien.

Berkelanjutan, secara umum pembangunan di Kabupaten Gorontalo terus mengalami kemajuan, namun ketergantungan terhadap ekonomi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif tidak dapat dielakkan, maka perlu dilakukan keseimbangan dengan memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri dan kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Gorontalo memiliki komitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan pembangunan sosial yang adil untuk semua, lingkungan yang sehat dan nyaman, pemukiman yang layak dan asri, bebas polusi udara, ketersediaan air bersih yang cukup, hutan yang lestari, sungai, danau dan laut terjaga dari pencemaran.

Untuk merealisasikan visi, perlu ditetapkan misi sebagai amanat yang diemban demi suksesnya visi yang telah ditetapkan. Adapun misi untuk mewujudkan visi jangka panjang Kabupaten Gorontalo menderivasi dari misi RPJPN, diantaranya;

1) Mewujudkan transformasi sosial masyarakat;

2) Mewujudkan transformasi ekonomi;
3) Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan;
4) Mewujdkan penegakan hukum yang adil, menempatkan hukum sebagai kontrol sosial, stabilitas politik dan ekonomi makro yang kuat, serta kepemimpinan daerah yang efektif;
5) Memantapkan ketahanan sosial budaya, kearifan lokal dan ekologi;
6) Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
7) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan;
8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas;

RPJMD Kabupaten Gorontalo periode tahun 2025 - 2029 merupakan pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 - 2045 yaitu **tahap penguatan fondasi transformasi**, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi diperkirakan pada kisaran 4,5 – 5,7 persen per tahun. **Transformasi sosial** kemasyarakatan dititikberatkan pada pemenuhan secara merata pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta mempercepat peningkatan kualitas SDM untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, sebab lemahnya produktivitas menjadi tantangan menurunkan angka kemiskinan. **Transformasi ekonomi** fokus pada penciptaan nilai tambah komoditi serta melakukan hilirisasi sumber daya alam unggulan daerah, penguatan riset dan inovasi untuk menunjang peningkatan produksi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, mengoptimalkan ekonomi biru dan pemenuhan aksesibilitas digital diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo, penataan kota dan percepatan infrastruktur penunjang produksi di perdesaan. **Tranformasi tata kelola** pemerintahan difokuskan pada penataan kelembagaan agar fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan optimal, penyempurnaan dan penyesuaian regulasi, peningkatan kualitas ASN dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan efektif difokuskan pada penegakan hukum yang berkeadilan, stabilitas politik daerah, stabilitas ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kepercayaan investor. **Ketahanan sosial budaya dan ekologi** difokuskan pada penguatan nilai-nilai religi dan budaya untuk membangun karakter manusia, menjadikan modal sosial untuk menghadapi goncangan (bencana)

dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi aktifitas manusia. Serta memperkuat instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengakselarasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menurunkan emisi gas. **Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan** difokuskan pembangunan wilayah yang memiliki potensi ekonomi dengan dukungan infrastruktur yang telah tersedia, memperkuat koneksivitas antar wilayah, pemenuhan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), perbaikan dan pembangunan irigasi baru dan penguatan jaringan digital di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo. **Kesinambungan pembangunan** difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, mobilisasi pembiayaan dari pihak ketiga dan mengoptimalkan pembiayaan di luar APBN/APBD. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis, maka visi tahun 2025 - 2029 yaitu:

Visi

"RESTORASI KABUPATEN GORONTALO BERKEMAJUAN DAN BERKELANJUTAN"

Visi "**Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan"** mencerminkan tekad untuk membangun daerah dengan pendekatan yang inovatif, berlandaskan nilai-nilai fundamental, serta memastikan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Penjabaran visi ini terdiri atas tiga pokok utama, yaitu restorasi, berkemajuan, dan berkelanjutan, yang memiliki makna serta arah kebijakan yang saling terkait dalam mendorong kemajuan Kabupaten Gorontalo.

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan	**Restorasi**	Restorasi yang dimaksud menegaskan semangat pemulihan dan penguatan kembali nilai-nilai fundamental daerah, dengan tujuan menjadikan Kabupaten Gorontalo sebagai daerah yang semakin maju, mandiri, dan berkelanjutan dalam berbagai aspek pembangunan
	Berkemajuan	Berkemajuan dapat diartikan sebagai upaya untuk menciptakan pembangunan yang inovatif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan zaman, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah

	Berkelanjutan	Berkelanjutan berarti mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan pembangunan sosial yang adil untuk semua, lingkungan yang sehat dan nyaman, pemukiman yang layak dan asri, bebas polusi udara, ketersediaan air bersih yang cukup, hutan yang lestari, sungai, danau dan laut terjaga dari pencemaran.

Konsep **restorasi** menegaskan pentingnya pemulihan dan penguatan kembali nilai-nilai fundamental daerah, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun tata kelola pemerintahan. Restorasi dalam konteks ini bukan sekadar upaya mengembalikan kondisi sebelumnya, tetapi juga memperbaiki, memperkuat, dan membangun kembali sistem yang lebih baik agar Kabupaten Gorontalo dapat tumbuh menjadi daerah yang lebih maju dan mandiri. Semangat restorasi mencakup peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, penguatan karakter dan budaya lokal, serta revitalisasi sektor-sektor strategis yang menjadi pilar utama pembangunan daerah.

Sementara itu, konsep **berkemajuan** menegaskan perlunya pembangunan yang inovatif, progresif, dan adaptif terhadap dinamika zaman. Kabupaten Gorontalo harus mampu menghadapi tantangan global dengan mengembangkan kebijakan berbasis inovasi, digitalisasi, serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor. Pembangunan yang berkemajuan berarti mendorong daya saing daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui layanan publik yang efektif dan efisien. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Gorontalo tidak hanya berkembang dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi.

Konsep **berkelanjutan** menjadi landasan dalam memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tetap memberikan manfaat bagi generasi mendatang. Secara umum pembangunan di Kabupaten Gorontalo terus mengalami kemajuan, namun ketergantungan terhadap ekonomi sumber daya alam yang bersifat ekstraktif tidak dapat dielakkan, maka perlu dilakukan keseimbangan dengan memperhatikan keberlangsungan sumber daya alam itu sendiri dan kualitas lingkungan hidup. Kabupaten Gorontalo memiliki komitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi diiringi dengan pembangunan sosial yang adil untuk semua, lingkungan yang sehat dan nyaman, pemukiman yang layak dan asri, bebas polusi udara, ketersediaan air

bersih yang cukup, hutan yang lestari, sungai, danau dan laut terjaga dari pencemaran.

Melalui visi **"Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan"**, diharapkan Kabupaten Gorontalo dapat menjadi model pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan. Restorasi menjadi fondasi, berkemajuan menjadi arah, dan keberlanjutan menjadi tujuan utama dalam mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang lebih baik bagi seluruh masyarakatnya.

3.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan factor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah maka sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk memperjelas langkah dalam mewujudkan visi. Perumusan rancangan Misi RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 dilakukan dengan mengacu rumusan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tanggal 27 November 2024 yang diselaraskan dengan misi yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 sebagai perwujudan pelaksanaan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2045.

Tabel 3.1 Perumusan Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Misi RPJPD Tahun 2025 – 2029	Misi Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2025 - 2029	Rancangan Teknokratik Misi RPJMD Tahun 2025 – 2029
1. Mewujudkan transformasi sosial masyarakat	1. Membangun sumber daya yang beragama, berbudaya, unggul, dan kompetitif	Mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang agamis, berbudaya, cerdas dan sehat (Misi 1 janji kampanye; Misi 1 dan 5 RPJPD)
2. Mewujudkan transformasi ekonomi	2. Mentransformasikan ekonomi kerakyatan berbasis teknologi berorientasi nilai tambah dan berkelanjutan	Meningkatkan kemandirian ekonomi masayarakat, berbasis teknologi tepat guna, menciptakan nilai tambah komoditi unggulan lewat kegiatan hilirisasi serta berkelanjutan (Misi 2 janji kampanye; misi 2 dan 8 RPJPD)
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan	3. Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik	Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan akuntabel disertai

		tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih (Misi 3 janji kampanye; Misi 3 dan 4 RPJPD)
4. Mewujdkan penegakan hukum yang adil, menempatkan hukum sebagai kontrol sosial, stabilitas politik dan ekonomi makro yang kuat, serta kepemimpinan daerah yang efektif		Mewujudka pembangunan dengan menyeimbangkan antara pertumbuhan ekoomi yang tinggi dan kelestarian lingkungan (Misi 4 janji kampanye; Misi 5 dan 7 RPJPD)
4. Memantapkan ketahanan sosial budaya, kearifan lokal dan ekologi		Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan serta kemantapan infrastruktur sesuai daya dukung dan fungsi ruang (Misi 6 RPJPD)
5. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan		
6. Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan		
7. Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas		

1. Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul dan Kompetitif.
2. Mentransformasikan Ekonomi Kerakayatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan
3. Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik

Pernyataan Visi	Misi	Penjelasan Misi
Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan	**Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif**	Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif, selaras dengan visi jangka panjang dalam aspek pembangunan manusia. Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat hanya dapat terwujud jika kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun karakter yang berlandaskan nilai agama dan budaya.
	Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan	Mentransformasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan, menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang mandiri dan maju. Dengan mendorong pemanfaatan teknologi dalam sektor ekonomi, terutama berbasis potensi lokal, masyarakat dapat lebih produktif dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi juga sejalan dengan visi RPJPD yang menekankan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan.

	Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik	Melaksanakan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, merupakan fondasi penting dalam memastikan efektivitas pembangunan daerah. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya Kabupaten Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera.

Misi pertama, "Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif", selaras dengan visi jangka panjang dalam aspek pembangunan manusia". Kesejahteraan dan kemandirian masyarakat hanya dapat terwujud jika kualitas sumber daya manusia terus ditingkatkan, baik dari sisi pendidikan, keterampilan, maupun karakter yang berlandaskan nilai agama dan budaya.

Misi kedua, "Mentransformasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan", menjadi bagian dari upaya mewujudkan Kabupaten Gorontalo yang mandiri dan maju. Dengan mendorong pemanfaatan teknologi dalam sektor ekonomi, terutama berbasis potensi lokal, masyarakat dapat lebih produktif dan memiliki daya saing yang lebih tinggi. Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan ekonomi juga sejalan dengan visi RPJPD yang menekankan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Implementasi misi ini diarahkan untuk memastikan bahwa setiap aktivitas pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam jangka panjang.

Misi ketiga, "Melaksanakan Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik", merupakan fondasi penting dalam memastikan efektivitas pembangunan daerah. Pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional menjadi kunci dalam menciptakan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung terwujudnya Kabupaten Gorontalo yang lebih maju dan sejahtera.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengusung program sebagai berikut;

1. **Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul dan Kompetitif.**
   Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan tercipta ketika masyarakat hidup dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, berbudaya yang baik, sehat dan memiliki pendidikan yang bermutu. Pemerintah Daerah berkomitmen

untuk membangun infrastruktur saran dan prasarana yang berkualitas Untuk membangun SDM Kabupaten Gorontalo, tanpa perbedaan antara masyarakat kota maupun desa melalui program-program berikut ini:

a) Program penguatan lembaga-lembaga keagamaan dan memakmurkan nilai-nilai keagamaan;
b) Program penguatan lembaga-lembaga kebudayaan dan restorasi nilai-nilai budaya;
c) Program peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
d) Program peningkatan standar pendidikan masyarakat.

2. Mentransformasi Ekonomi Kerakayatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan secara ekonomi juga memiliki posisi strategis sebagai pusat lalu lintas darat dan udara di Provinsi Gorontalo. Anugerah ini jika dikelola dengan baik akan berdampak kesejahteraan bagi masyarakat. Pemerintah Daerah berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memastikan kelangsungan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial dalam jangka panjang Panjang. Mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan sebagai basis ekonomi. Peningkatan produksi ekonomi melalui transformasi teknologi serta industrialisasi.

a) Program penurunan kemiskinan dan jaminan sosial yang berkeadilan;
b) Program peningkatan sektor unggulan berbasis kewilayahan;
c) Program perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar;
d) Program dukungan finansial dan teknis kepada UMKM;
e) Program pengurangan angka pengangguran;

3. Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik

Pemerintah Daerah berkomimen untuk mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Menciptakan birokrasi bersih dan berwibawa dengan memperhatikan kesejahteraan ASN. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat serta profesional terintegrasi dalam sistem teknologi informasi. Kami berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima masyarakat.

a) Program restrukturisasi birokrasi dan pemerintahan yang partisipatif;
b) Program peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisen;

c) Program pemerintahan kolaboratif, harmonis dan produktif.

3.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan dalam RPJMD adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang dirumuskan secara melalui penelaahan arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2045, kebijakan pembangunan jangka menengah nasional maupun Provinsi Gorontalo dan isu-isu strategis pembangunan Kabupaten Gorontalo yang telah ditetapkan pada bab sebelumnya. Selanjutnya, tujuan tersebut dikolaborasi dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo terpilih untuk menghasilkan rumusan tujuan pembangunan Kabupaten Gorontalo sampai dengan Tahun 2030. Sementara itu, sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Tabel 3.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan Misi 1 - Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul dan Kompetitif	Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan berkualitas untuk semua		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	71,55	72,14	72,73	73,32	73,91	74,5	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	8,13	8,31	8,5	8,68	8,87	9,05	
			Harapan lama sekolah (Tahun)	13,24	13,26	13,28	13,3	13,32	13,34	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	68,75	68,92	69,01	69,23	69,55	69,87	
		Meningkatnya Kualitas dan Cakupan Jaminan Sosial	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	97	98	98	98	98	98	
			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) (%)	27,5	24,2	20,9	17,6	15,8	14,2	
	Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	73,58	74,45	75,32	76,19	77,06	77,93	
		Meningkatnya Moderasi Beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) ((%))	73,58	74,45	75,32	76,19	77,06	77,93	
		Meningkatnya Dimensi Ekspresi Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) ((%))	53,14	53,47	53,8	54,13	54,46	54,79	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
Misi 2 - Mentransformasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan	Menciptakan nilai tambah komoditi unggulan		Indeks LQ Komoditi Unggulan (Padi, Jagung, Kelapa) (Indeks)	1	1	1	1	1	1	
		Meningkatnya Produk Olahan (Hilirisasi) Komoditi Unggulan	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%)	4,86	4,9	4,95	5	5,04	5,1	
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar		Indeks Pembangunan infrastruktur (Indeks)	0,87	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	
		Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas pada Pusat-Pusat Kawasan Pengembangan Wilayah	Indeks Aksesibilitas Kawasan (Indeks)	78,01	80,08	82,14	84,21	86,28	88,35	
		Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum	Cakupan akses layanan air minum dan sanitasi (%)	92	93	94	95	96	96	
	Meningkatkan daya saing UMKM		Rasio Kewirausahaan (Persentase)	2,97	3	3,03	3,06	3,09	3,12	
		Meningkatnya Kualitas Produk UMKM	Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDRB (%)	15,26	15,31	15,36	15,41	15,46	15,5	
		Inovasi Layanan Publik	Indeks Inovasi Daerah (Angka)	49.20-51.00	51.01-53.00	53.01-55.00	55.01-57.00	57.01-59.00	59.01-61.00	
	Restorasi lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	77,02	77,19	77,37	77,54	77,71	77,71	
		Konservasi dan Ketahanan Ekologi	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,7	0,71	0,72	0,74	0,75	0,76	
		Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Pengolahan Sampah	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah (%)	14,54	15,54	16,62	17,77	19	20,32	
Misi 3 - Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Baik	Meningkatkan kualitas layanan publik		Indeks Pelayanan Publik. (Indeks)	3,65	3,82	3,99	4,16	4,33	4,5	
		Meningkatnya Aksesibilitas Layanan Publik secara Digital	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik ()	79,47	81,57	83,07	84,57	86,07	87,57	
	Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	70	73	76	80	83	85	
		Meningkatnya Profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	82,05	84,01	86,07	88,09	90,07	91,05	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Nilai AKIP ()	B	B	BB	BB	BB	BB	

3.4 Program Prioritas Daerah

Perumusan program prioritas RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025-2029 dilakukan untuk mengimplementasikan janji-janji kampanye Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo dan program strategis untuk dilaksanakan pada tahun 2025–2029. Program prioritas ini salah satu pendukungan terhadap pencapaian visi dan misi. Program prioritas 2025-2029, meliputi:

Misi 1: Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) akan tercipta ketika masyarakat hidup dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat, berbudaya yang baik, sehat dan memiliki pendidikan yang bermutu. Kami berkomitmen untuk membangun infrastruktur saran dan prasarana yang berkualitas Untuk membangun SDM Kabupaten Gorontalo, tanpa perbedaan antara masyarakat kota maupun desa melalui program-program berikut ini:

1. Program penguatan lembaga-lembaga keagamaan dan memakmurkan nilai-nilai keagaman;
2. Program penguatan lembaga-lembaga kebudayaan dan restorasi nilai-nilai budaya;
3. Program peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
4. Program peningkatan standar pendidikan masyarakat.

Misi 2: Mentransformasikan Ekonomi Kerakayatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan

Kabupaten Gorontalo memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan secara ekonomi juga memiliki posisi strategis sebagai pusat lalu lintas darat dan udara di Provinsi Gorontalo. Anugerah ini jika dikelola dengan baik akan berdampak kesejahteraan bagi masyarakat. Kami berkomitmen membangun ekonomi kerakyatan yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan memastikan kelangsungan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial dalam jangka Panjang Panjang. Mengoptimalkan potensi pertanian, perkebunan, perternakan dan perikanan sebagai basis ekonomi. Peningkatan produksi ekonomi melalui transformasi teknologi serta industrialisasi.

1. Program penurunan kemiskinan dan jaminan sosial yang berkeadilan;
2. Program peningkatan sektor unggulan berbasis kewilayahan;
3. Program perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar;
4. Program dukungan finansial dan teknis kepada UMKM;
5. Program pengurangan angka pengangguran;

Misi 3: Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik

Permasalahan pembangunan begitu kompleks dan keterbatasan sarana serta prasaranan dapat menghambat dalam pemberian layanan publik, disaat yang sama daerah memiliki keterbatasan anggaran. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan anggaran secara efektif dan efisien. Menciptakan birokrasi bersih dan berwibawa dengan memperhatikan kesejahteraan ASN. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, tepat dan akurat serta profesional terintegrasi dalam sistem teknologi informasi. Kami berkomitmen untuk mewujudkan pelayanan prima masyarakat.

1. Program restrukturisasi birokrasi dan pemerintahan yang partisipatif;
2. Program peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisen;
3. Program pemerintahan kolaboratif, harmonis dan produktif.

3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pembangunan daerah tahun 2025 - 2029 secara efektif dan efisien. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi

pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan dilakukan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif serta Pendekatan Kewilayahan. Selanjutnya dirumuskan program pembangunan daerah dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

3.5.1. Strategi Pembangunan Kabupaten Gorontalo

Strategi merupakan upaya pemanfaatan sumber daya secara optimal guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam konteks perencanaan strategis, strategi menempati posisi penting sebagai keputusan yang diambil setelah mempertimbangkan kondisi lingkungan internal meliputi kekuatan dan kelemahan, serta lingkungan eksternal—yang mencakup peluang dan tantangan. Perumusan strategi menjadi elemen kunci dalam menentukan arah langkah untuk mencapai tujuan dan meraih sasaran. Berdasarkan analisis SWOT yang dilakukan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, maka strategi telah dirancang sebagaimana dijabarkan dalam poin-poin berikut.

3.5.1.1. Rumusan Strategi Pembangunan

Misi 1 berfokus pada pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi pilar utama dalam pencapaian kemajuan daerah. Pembangunan SDM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kompetensi dan daya saing, tetapi juga pada

penguatan karakter berbasis nilai-nilai agama dan budaya lokal. Hal ini mencerminkan bahwa kemajuan yang diharapkan tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek moral, spiritual, dan sosial budaya.

Visi: Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 1: Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif		
1.1 Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Refokusing Pemenuhan standar pelayanan minimal
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Restorasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan
	Meningkatnya kualitas dan cakupan jaminan sosial	Penyehatan tata kelola layanan jaminan sosial
1.2 Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan	Meningkatnya moderasi beragama	Penguatan peran lembaga keagamaan
	Meningkatnya dimensi ekspresi budaya	Integrasi budaya dalam pendidikan dan pariwisata

Untuk mewujudkan misi tersebut, tujuan utama yang ditetapkan adalah meningkatkan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan daerah. Tujuan ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, berdaya saing tinggi, dan berkarakter, yang nantinya akan menjadi motor penggerak bagi pembangunan Kabupaten Gorontalo yang berkelanjutan.

Dalam mencapai tujuan ini, dirumuskan beberapa sasaran strategis yang berfokus pada peningkatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan, peningkatan kualitas jaminan sosial, serta penguatan moderasi beragama dan ekspresi budaya lokal. Sasaran ini memberikan arah yang lebih spesifik untuk mengukur keberhasilan dari tujuan yang ingin dicapai. Misalnya, peningkatan pemenuhan SPM di bidang pendidikan diarahkan untuk memastikan semua warga Kabupaten Gorontalo memiliki akses yang setara terhadap pendidikan yang berkualitas, mulai dari distribusi guru yang merata hingga pengembangan Sekolah Dasar dan SMP berbasis daring (online). Hal ini sejalan dengan upaya untuk

memperluas akses pendidikan di wilayah pedesaan yang mungkin mengalami keterbatasan infrastruktur.

Strategi yang dirumuskan dalam RPJMD ini menunjukkan sinergi yang kuat antara sasaran pembangunan dan langkah-langkah implementasi yang konkret. Pada sektor pendidikan, strategi refokusing alokasi anggaran pendidikan menunjukkan komitmen terhadap penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga pendidik, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta pengembangan core competencies siswa menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa lulusan pendidikan di Kabupaten Gorontalo memiliki kemampuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja.

Di sektor kesehatan, strategi memperkuat sistem manajemen pelayanan kesehatan, memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta meningkatkan jumlah dokter dan spesialis menjadi prioritas utama untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Penerapan hospital information system juga mencerminkan upaya digitalisasi layanan kesehatan yang akan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi layanan.

Selanjutnya, untuk memperkuat dimensi sosial dan budaya, strategi penguatan moderasi beragama dan pelestarian budaya lokal dirumuskan dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama dan budaya ke dalam sistem pendidikan dan pariwisata. Ini mencerminkan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pembangunan karakter masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai adat dan agama. Pengembangan atraksi budaya yang terintegrasi dengan kalender pariwisata, misalnya, diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian budaya sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya lokal.

Hubungan antara visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2025-2029 ini menunjukkan kesinambungan yang kuat dan arah yang jelas menuju pencapaian pembangunan berkelanjutan. Visi restorasi yang berkemajuan dan berkelanjutan menjadi dasar dari misi pembangunan SDM yang unggul dan berkarakter. Tujuan meningkatkan layanan dasar dan memperkuat nilai-nilai budaya serta agama mengarahkan pada pencapaian sasaran yang lebih terukur, yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai strategi implementasi yang konkret dan realistis. Dengan sinergi ini, Kabupaten Gorontalo diharapkan mampu mencapai

kemajuan yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, budaya, dan spiritual, menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing tinggi di masa depan.

Misi 2 yaitu "Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan" sebagai langkah untuk mengembangkan ekonomi yang berbasis potensi lokal, inovasi, dan prinsip keberlanjutan. Transformasi ekonomi yang dicanangkan bertujuan menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing UMKM, serta memperbaiki infrastruktur dasar dan ekosistem lingkungan hidup.

Visi: Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 2: Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan		
2.1 Menciptakan nilai tambah komoditi unggulan	Meningkatnya produk olahan (hilirisasi) komoditi unggulan	Pengembangan Daya Saing UMKM
		Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus
2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya aksesbilitas dan konektivitas pada pusat-pusat kawasan pengembangan wilayah	Integrasi Zona, Kawasan dan Wilayah Admnistrasi pengembangan wilayah
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum	Melakukan penyesuaian terhadap dokumen RTRW
2.3 Meningkatkan daya saing UMKM	Meningkatnya kualitas produk UMKM	Pemanfaatan Teknologi Industri Pengolahan
2.4 Restorasi lingkungan hidup	Konservasi dan ketahanan ekologi	Penegakan Regulasi
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah	Pencegahan timbulan sampah

Tujuan utama yang dirumuskan dalam misi 2 adalah meningkatkan nilai tambah pada komoditi unggulan, memperbaiki aksesibilitas dan konektivitas wilayah, mendorong daya saing UMKM, dan memulihkan lingkungan hidup. Setiap tujuan ini mengandung elemen transformasi dan restorasi yang selaras dengan kebutuhan daerah. Pada aspek nilai tambah, tujuan untuk menciptakan produk olahan dari komoditi unggulan diarahkan melalui strategi pengembangan daya saing UMKM. Hal ini diimplementasikan melalui berbagai kebijakan seperti meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi dan pasar, memberikan pelatihan peningkatan kualitas

produk, dan memanfaatkan Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) sebagai inkubator bisnis. Kebijakan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mendorong hilirisasi produk sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi dan meningkatkan pendapatan pelaku usaha lokal.

Selain itu, untuk mendukung pertumbuhan industri berbasis potensi wilayah, dibahas pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Strategi ini melibatkan langkah-langkah konkret seperti melakukan identifikasi potensi kawasan, menyusun regulasi tata kelola KEK, membangun infrastruktur dasar, dan mengembangkan konsep food estate untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis agrobisnis. Selanjutnya, tujuan meningkatkan kualitas infrastruktur dasar dirumuskan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah. Pembangunan fasilitas transportasi dan infrastruktur yang mendukung integrasi zona dan kawasan pengembangan wilayah menjadi strategi utama. Upaya ini bertujuan menciptakan konektivitas yang kuat antara pusat-pusat ekonomi sehingga distribusi hasil produksi, jasa, dan informasi bisa berjalan lebih efisien. Selain itu, dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan lebih terarah dan sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan.

Transformasi ekonomi juga diarahkan pada peningkatan daya saing UMKM dengan cara mempercepat pertumbuhan sektor hilirisasi berbasis produk unggulan. Pemanfaatan teknologi industri pengolahan dan diversifikasi produk olahan menjadi kunci dalam strategi ini. Diversifikasi produk, terutama yang berbasis teknologi tepat guna, memungkinkan UMKM menghasilkan produk dengan variasi yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik, sehingga mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Selain aspek ekonomi, misi ini juga berkomitmen untuk melakukan restorasi lingkungan hidup guna menjaga keseimbangan ekologi. Hal ini diwujudkan melalui tujuan konservasi dan peningkatan ketahanan ekologi. Strategi yang diambil mencakup penegakan regulasi lingkungan dengan memberikan sanksi kepada pihak yang merusak lingkungan dan mendorong kolaborasi dengan multipihak, termasuk perguruan tinggi, NGO, dan komunitas filantropi. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ekosistem pembangunan yang ramah lingkungan dan memperkuat daya tahan ekologi Kabupaten Gorontalo. Kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah juga menjadi prioritas dengan tujuan mengurangi timbulan sampah melalui

penerapan teknologi digital dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Pengembangan ekonomi sirkular berbasis prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Refuse, dan Repair) diarahkan untuk menciptakan nilai tambah dari pengolahan limbah dan mendukung ekonomi berkelanjutan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo 2025-2029 menunjukkan integrasi yang kuat. Transformasi ekonomi yang berorientasi pada teknologi, nilai tambah, dan keberlanjutan tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan ekosistem pembangunan yang inklusif. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Gorontalo diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan berakar pada potensi serta kearifan lokal.

Misi 3, yaitu "Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Baik," bertujuan menciptakan birokrasi yang profesional, akuntabel, dan inovatif, serta memastikan layanan publik yang efektif dan berbasis teknologi digital.

Visi: Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**
Misi 3: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Baik		
3.1 Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya aksesibilitas layanan publik secara digital	Membangun Infrastruktur Digital
		Membangun talenta digital dikalangan ASN
	Inovasi layanan publik	Membangun Ekosistem Inovasi
3.2 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Meningkatnya profesionalisme aparatur	Restorasi Manajemen Kepegawaian
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Memperkuat Rentang Kendali SAKIP

Tujuan pertama dalam misi ini adalah meningkatkan kualitas layanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, sasaran yang ditetapkan adalah memperluas aksesibilitas layanan publik melalui digitalisasi. Strategi yang dipilih adalah membangun infrastruktur digital sebagai fondasi utama transformasi layanan publik. Salah satu arah kebijakan utama adalah menyusun dokumen peta rencana yang mengintegrasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Implementasi SPBE bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam

penyelenggaraan pelayanan publik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan melalui platform digital yang andal.

Selain membangun infrastruktur digital, upaya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam birokrasi juga menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, sasaran lain yang ditetapkan adalah membangun talenta digital di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara). Pengembangan talenta ini bertujuan menciptakan ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan inovasi dalam layanan publik. Kebijakan ini akan membantu mempercepat proses digitalisasi pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Inovasi layanan publik juga menjadi pilar penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan. Untuk mewujudkannya, strategi membangun ekosistem inovasi pada unit penyelenggara pelayanan publik diterapkan. Hal ini bertujuan menciptakan budaya inovasi yang berkelanjutan di dalam birokrasi, mendorong ASN untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan, serta mempercepat penyelesaian permasalahan pelayanan yang dihadapi masyarakat.

Selain aspek layanan publik, misi reformasi tata kelola pemerintahan juga diarahkan pada peningkatan kualitas reformasi birokrasi. Salah satu tujuan utamanya adalah meningkatkan profesionalisme aparatur, yang diwujudkan melalui strategi restorasi manajemen kepegawaian. Dalam hal ini, arah kebijakan yang ditempuh meliputi penentuan indikator penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur, dan aplikatif. Dengan indikator yang jelas, ASN akan memiliki pedoman yang lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kebijakan ini juga didukung oleh penerapan sistem reward dan punishment yang transparan dan berbasis kinerja, sehingga menciptakan budaya kerja yang produktif dan akuntabel. Promosi dan penjenjangan karir juga diarahkan berdasarkan prinsip meritokrasi yang sesungguhnya. Meritokrasi bertujuan memastikan bahwa promosi dan jenjang karir ASN didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan pada faktor lain seperti hubungan pribadi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas pelayanan publik.

Tujuan berikutnya dalam reformasi birokrasi adalah meningkatkan akuntabilitas kinerja birokrasi. Untuk mencapai sasaran ini, strategi yang diterapkan adalah memperkuat rentang kendali Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Salah satu arah kebijakan utama adalah memperkuat peran Inspektorat

dalam melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SAKIP. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai dengan perencanaan dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, kebijakan lain yang diambil adalah mengembangkan platform digital untuk pelaporan dan evaluasi kinerja OPD. Penggunaan platform ini akan membuat proses pelaporan dan evaluasi lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau langsung kinerja pemerintah daerah melalui laporan yang dipublikasikan secara berkala. Untuk meningkatkan sinergitas dalam pelaksanaan SAKIP, koordinasi antar-ASN di Kabupaten Gorontalo juga ditingkatkan. Hal ini bertujuan memastikan konsistensi dalam pelaksanaan program dan kebijakan yang telah dirumuskan. Kebijakan terakhir yang ditempuh adalah mewajibkan setiap perangkat daerah mempublikasikan perencanaan dan laporan kinerja mereka sebagai bentuk akuntabilitas publik.

3.5.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan berfungsi sebagai pedoman utama untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih, sehingga dapat lebih terfokus dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun ke depan. Rumusan ini membantu merasionalkan pilihan strategi agar selaras dengan pengaturan pelaksanaan yang telah ditetapkan.

Sebagai bagian dari penjabaran strategi, arah kebijakan mengandung kerangka pikir atau kerangka kerja yang dirancang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan serta mengantisipasi isu-isu strategis di daerah. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan berorientasi pada prioritas-prioritas yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian, arah kebijakan menjadi turunan langsung dari strategi pembangunan daerah, yang menitikberatkan fokus pada langkah-langkah konkret untuk mewujudkan pembangunan yang terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Perumusan arah kebijakan jangka menengah Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 selain sebagai penjabaran visi dan misi Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029, juga dilakukan dalam upaya pencapaian sasaran pokok RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2029 pada tahap pertama, yaitu:

1. Transformasi sosial kemasyarakatan dititikberatkan pada pemenuhan secara merata pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial, serta

mempercepat peningkatan kualitas SDM untuk menghasilkan produktivitas yang tinggi, sebab lemahnya produktivitas menjadi tantangan menurunkan angka kemiskinan. Arah kebijakan pendidikan menekankan pada penguatan kualitas pendidikan dasar dan menengah melalui peningkatan kompetensi guru dan mutu pembelajaran di SD dan SMP. Inovasi pendidikan juga diarahkan pada pembangunan Sekolah Rakyat, yaitu model pendidikan berbasis masyarakat untuk memperluas akses dan partisipasi pendidikan masyarakat di pedesaan. Di bidang kesehatan, pembangunan diarahkan pada peningkatan layanan dasar yang merata dan berkeadilan. Kebijakan pembangunan aspek kesehatan mengarah pada pengembangan RSU Boliyohuto menjadi rumah sakit rujukan khusus untuk pelayanan narkoba dan kesehatan jiwa. Disamping itu, layanan kesehatan preventif dan promotif diperkuat melalui revitalisasi Posyandu, optimalisasi PHBS dan GERMAS, dan pengembangan layanan kesejahteraan sosial. Pemerataan tenaga medis juga didorong melalui program beasiswa kedokteran guna menjamin akses kesehatan yang setara di seluruh wilayah. Arah kebijakan bidang sosial menempatkan penajaman pensasaran kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, sebagai prioritas penting. Upaya ini diawali dengan memperkuat mekanisme pensasaran program perlindungan sosial melalui integrasi dan pemutakhiran data berbasis by name by address (BNBA), sehingga bantuan dan layanan sosial dapat diberikan secara tepat sasaran sesuai kebutuhan individu. Peningkatan cakupan layanan sosial menjadi langkah strategis berikutnya, dengan menyediakan fasilitas pelayanan sosial yang memadai, memperluas rehabilitasi berbasis masyarakat, dan mendorong layanan berbasis keluarga. Kebijakan ini juga diarahkan pada pengembangan program pemberdayaan ekonomi dan keterampilan kerja yang inklusif, bagi penyandang disabilitas dan lansia yang masih potensial produktif, melalui kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pelatihan, dan komunitas lokal. Optimalisasi skema jaminan sosial dan bantuan sosial dilakukan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar serta peningkatan kualitas hidup kelompok rentan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dan jejaring kemitraan multi pihak yang mencakup pemerintah, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan terus didorong agar tercipta dukungan berkelanjutan dalam membangun kemandirian lansia dan penyandang disabilitas.

2. Transformasi ekonomi fokus pada penciptaan nilai tambah komoditi serta melakukan hilirisasi sumber daya alam unggulan daerah, penguatan riset dan inovasi untuk menunjang peningkatan produksi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, mengoptimalkan ekonomi hijau, ekonomi biru dan pemenuhan aksesibilitas digital diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo, penataan kota dan percepatan infrastruktur penunjang produksi di perdesaan. Pada aspek ekonomi, Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan dengan mendorong pemberdayaan petani melalui penyediaan alat dan sarana produksi pertanian seperti traktor roda empat serta bantuan bibit jagung dan padi. Selain itu, penguatan sektor UMKM menjadi prioritas melalui dukungan inkubasi bisnis di PLUT, fasilitasi digitalisasi UMKM berbasis pembayaran non tunai, serta penciptaan ekosistem usaha lokal yang lebih produktif.
3. Pengurangan ketimpangan gender menjadi prioritas strategis, dengan memastikan perempuan memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta partisipasi sosial-politik. Hal ini dilakukan melalui perluasan ruang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan peningkatan keterwakilan perempuan dalam posisi strategis di pemerintahan, lembaga publik, maupun organisasi masyarakat. Kebijakan pemberdayaan perempuan difokuskan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian ekonomi melalui akses pelatihan keterampilan, permodalan, dan pembukaan peluang usaha yang adil, terutama bagi kelompok perempuan yang hidup di daerah terpencil, miskin, atau tergolong rentan. Pendekatan pemberdayaan ini juga memperhatikan dimensi inklusi sosial, agar semua kelompok perempuan termasuk disabilitas, lansia, dan perempuan kepala keluarga mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya pembangunan. Sementara itu, penguatan sistem perlindungan terhadap perempuan dan anak dilakukan dengan memperkuat regulasi, mekanisme pengaduan, serta layanan pendampingan korban kekerasan dan eksploitasi. Pemerintah daerah perlu memastikan adanya layanan yang terintegrasi, mulai dari pencegahan, penanganan kasus, hingga rehabilitasi, yang mudah diakses oleh masyarakat. Kampanye sosial dan edukasi publik juga menjadi strategi penting dalam membentuk kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Untuk menjamin efektivitas kebijakan yang responsif gender, integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) menjadi strategi utama. Hal ini

mencakup penggunaan data terpilah menurut jenis kelamin dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan daerah. Penganggaran yang responsif gender (Gender Responsive Budgeting/GRB) juga harus dikembangkan sebagai instrumen nyata untuk menjamin keadilan distribusi manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. Di sisi lain, pemenuhan hak anak diprioritaskan melalui penciptaan lingkungan yang aman, inklusif, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Kebijakan diarahkan pada peningkatan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial bagi anak-anak, termasuk anak-anak dari kelompok rentan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kebijakan ramah anak dengan mendorong partisipasi anak dalam pembangunan serta pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

4. Tranformasi tata kelola pemerintahan difokuskan pada penataan kelembagaan agar fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berjalan optimal, penyempurnaan dan penyesuaian regulasi, peningkatan kualitas ASN dan peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Untuk mendorong reformasi birokrasi, pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan berbagai hak ASN, termasuk TPP, TPG, dan hak-hak lainnya, guna meningkatkan kinerja aparatur dan kualitas pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
5. Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan efektif difokuskan pada penegakan hukum yang berkeadilan, stabilitas politik daerah, stabilitas ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat dan memperkuat kepercayaan investor.
6. Ketahanan sosial, budaya, pangan dan ekologi difokuskan pada penguatan nilai-nilai kearifan lokal, budaya, dan agama sebagai dasar pembentukan karakter masyarakat yang tangguh, inklusif, dan berintegritas untuk membangun karakter manusia, menjadikan modal sosial untuk menghadapi goncangan (bencana) dan perkembangan teknologi informasi yang mendisrupsi aktifitas manusia. Serta memperkuat instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mengakselarasi pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan menurunkan emisi gas. Lebih lanjut, arah kebijakan juga mencakup pengembangan destinasi wisata berkelanjutan, seperti Geopark, yang tidak hanya menjadi daya tarik ekonomi tetapi juga sebagai wahana edukasi dan pelestarian alam. Pengelolaan destinasi wisata ini harus memperhatikan daya dukung lingkungan,

pelibatan masyarakat lokal, serta standar pengelolaan yang menjunjung tinggi prinsip keberlanjutan.

7. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan difokuskan pembangunan wilayah yang memiliki potensi ekonomi dengan dukungan infrastruktur yang telah tersedia, memperkuat koneksivitas antar wilayah, pemenuhan layanan dasar (pendidikan dan kesehatan), perbaikan dan pembangunan irigasi baru dan penguatan jaringan digital di seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.
8. Kesinambungan pembangunan difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah, mobilisasi pembiayaan dari pihak ketiga melalui kerja sama antar daerah, kerjasama multi pihak, sister city, dan kemitraan dengan pihak dalam dan atau luar negeri, serta mengoptimalkan pembiayaan di luar APBN/APBD.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah memiliki nilai yang sangat strategis sebab menjadi prioritas pembangunan tahunan. Rumusan prioritas pembangunan tahunan selama periode pembangunan jangka menengah Kabupaten Gorontalo, meliputi:

1. Penguatan lembaga-lembaga keagamaan dan memakmurkan nilai-nilai keagaman;
2. Penguatan lembaga-lembaga kebudayaan dan restorasi nilai-nilai budaya;
3. Peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat;
4. Peningkatan standar pendidikan masyarakat.
5. Penurunan kemiskinan dan jaminan sosial yang berkeadilan;
6. Peningkatan sektor unggulan berbasis kewilayahan;
7. Perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar;
8. Peningkatan kualitas dan kapasitas UMKM;
9. Pengurangan angka pengangguran;
10. Peningkatan kualitas SDM aparatur dan pemerintahan yang partisipatif;
11. Peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisen;
12. Pemerintahan kolaboratif, harmonis dan produktif.

Perumusan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gorontalo merinci langkah-langkah strategis yang menjadi penjabaran teknis dari tiga misi pembangunan daerah. Setiap misi diikuti oleh rangkaian arah kebijakan yang menyeluruh dan komprehensif, untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan dapat tercapai secara terukur,

partisipatif, dan berkelanjutan. **Pada Misi 1 (Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif)**, arah kebijakan lebih difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal. Di bidang pendidikan, diarahkan pada penguatan alokasi anggaran SPM secara tepat, perbaikan sarana prasarana, peningkatan kualitas dan distribusi guru, hingga pengembangan pendidikan berbasis partisipatif dan internasional. Pendidikan berbasis digital juga diperkuat melalui rintisan SD dan SMP online, serta pengembangan kompetensi unggulan siswa.

Pada sektor kesehatan, arah kebijakan mencakup peningkatan sistem manajemen layanan, reformasi layanan RSUD sebagai BLUD, peningkatan standar jasa profesional medis, ketersediaan obat, dokter spesialis, hingga penggunaan sistem informasi rumah sakit berbasis digital. Di sisi lain, jaminan sosial diarahkan pada pemangkasan birokrasi, pendanaan inovatif melalui crowd funding, serta penguatan monitoring dan evaluasi. Dalam dimensi keagamaan dan budaya, penguatan dilakukan dengan melibatkan lembaga keagamaan dalam pembinaan akhlak dan kampanye moderasi beragama, serta pencegahan radikalisme melalui dialog dan deteksi dini. Budaya lokal dipromosikan melalui integrasi atraksi budaya dalam pariwisata, pengembangan industri kreatif, dan fasilitasi rumah komunitas kreatif. Nilai-nilai adat Gorontalo dilestarikan melalui kurikulum yang mengadopsi falsafah lokal.

Pada Misi 2 (Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi, Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan), arah kebijakan mencakup penguatan UMKM melalui pelatihan, akses teknologi, pemanfaatan PLUT sebagai inkubator bisnis, dan sinergi antar sektor. Kebijakan juga diarahkan pada pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan tata kelola regulasi yang jelas, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pengembangan wilayah berbasis potensi lokal dan food estate. Sinkronisasi perencanaan tata ruang dan konektivitas wilayah diupayakan melalui pembangunan transportasi, pengembangan interchange, dan optimalisasi forum penataan ruang. Dalam konteks lingkungan hidup, pemerintah menetapkan arah kebijakan mitigasi risiko bencana melalui peningkatan jumlah PPNS, penguatan sistem peringatan dini, dan integrasi tata ruang dalam dokumen perencanaan. Selain itu, hilirisasi produk unggulan, sanksi atas perusakan lingkungan, serta pengelolaan sampah berbasis teknologi dan partisipasi masyarakat

menjadi fokus utama. Konsep ekonomi sirkular berbasis prinsip 5R (Reduce, Reuse, Recycle, Replace, Replant) turut diarusutamakan.

Pada Misi 3 (Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik), diarahkan pada penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), pembangunan talenta digital ASN, dan penciptaan ekosistem inovasi pelayanan publik. Penataan manajemen ASN dilakukan dengan sistem meritokrasi melalui indikator kinerja objektif, penerapan sistem reward and punishment, serta promosi berbasis kinerja. Penguatan akuntabilitas dilakukan melalui optimalisasi peran inspektorat, pengembangan platform digital untuk pelaporan dan evaluasi kinerja, serta peningkatan koordinasi antar-OPD untuk konsistensi pelaksanaan SAKIP. Pemerintah juga mendorong keterbukaan publik melalui kewajiban publikasi dokumen perencanaan dan laporan kinerja.

Tabel 3.3 Perumusan Arah Kebijakan RPJMD

Visi: Restorasi Kabupaten Gorontalo Berkemajuan dan Berkelanjutan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1: Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif			
1.1 Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Refokusing Pemenuhan standar pelayanan minimal	Memastikan alokasi anggaran penanganan SPM pendidikan tepat peruntukan, tepat jumlah
			Monev sistematis dan berkelanjutan
			Perbaikan Sarana prasarana kependidikan
			Peningkatan Kualitas guru dan tenaga kependidikan
			Distribusi guru secara seimbang berdasarkan zona kota dan desa
			Replacementasi sesuai kualifikasi
			Penguatan Manajemen Sekolah
			Penyelenggaraan pendidikan berbasis partisipatif, sekolah bertaraf internasional
			Akses dan kesetaraan pendidikan

			Rintisan Sekolah Dasar dan SMP Online
			mengembangkan kompetensi unggulan dan kemampuan khusus (core competencies)
	Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Restorasi Manajemen Perencanaan dan Penganggaran Bidang Kesehatan	Memastikan alokasi anggaran penanganan SPM kesehatan tepat peruntukan, tepat jumlah dan tepat hasil
			Memperkuat sistem manajemen pelayanan kesehatan
			Optimalisasi PHBS dan GERMAS
			Membangun bisnis proses RSUD (BLUD) yang sehat dengan Dinas Kesehatan
			melakukan penyesuaian standar jasa profesional medis (dokter)
			Memulihkan pelayanan kesehatan di faskes tingkat pertama
			memperbaiki sistim rujukan untuk memastikan pasien mendapatkan pelayanan yang tepat terutama pada penanganan kegawatdaruratan
			memastikan ketersediaan obat dan alat kesehatan
			Peningkatan jumlah dokter dan dokter spesialis
			mendorong pemanfaatan hospital information systim
	Meningkatnya kualitas dan cakupan jaminan sosial	Penyehatan tata kelola layanan jaminan sosial	Ketersediaan data yang valid dan mutakhir
			memangkas birokrasi pelayanan jaminan sosial
			Memfasilitasi Crowd Funding Multi pihak untuk pendanaan jaminan sosial
			Perlindungan kesehatan dan kesejahteraan kelompok rentan, khususnya lansia dan penyandang disabilitas, melalui pendekatan inklusif, berbasis hak, dan berkeadilan.
			Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi layanan jaminan sosial
1.2 Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam	Meningkatnya moderasi beragama	Penguatan peran lembaga keagamaan	memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembinaan akhlak

penyelenggaraan pembangunan			Memberikan imbal swadaya kepada lembaga-lembaga keagamaan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
			mendorong pemanfaatan Flatform Digital dalam penyebaran konten moderasi beragama
			Mengembangkan personal branding tokoh agama yang menguasai substansi keagamaan
			Pemberantasan Radikalisme
			Mengoptimalkan deteksi dini potensi radikalisme
			mengintensifkan dialog kelompok-kelompok potensial radikal
			pelibatan lembaga keagamaan dalam kampanye anti radikalisme
	Meningkatnya dimensi ekspresi budaya	Integrasi budaya dalam pendidikan dan pariwisata	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian adat dan budaya
			mengintegrasikan atraksi-atraksi budaya dengan kalender pariwisata
			Pengembangan Industri Kreatif berbasis budaya
			Meningkatkan dukungan terhadap industri kreatif lokal
			fasilitasi rumah komunitas kreatif
			melestarikan falsafah adat bersendikan sara',sara' bersendikan kitabullah
			penguatan kurikulum pendidikan yang mencakup nilai-nilai budaya lokal
Misi 2: Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan			
2.1 Menciptakan nilai tambah komoditi unggulan	Meningkatnya produk olahan (hilirisasi) komoditi unggulan	Pengembangan Daya Saing UMKM	Meningkatkan akses UMKM terhadap teknologi dan pasar
			Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas produk
			Matching program UMKM dengan Vendor Teknologi

			Tepat guna
			Pelibatan sektor terkait perngembangan produk UMKM
			Memanfaatkan PLUT sebagai inkubator bisnis
		Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus	Melakukan identifikasi potensi kawasan peruntukan KEK
			Penyusunan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai tata kelola KEK termasuk insentif fiskal, perizinan dan kepastian hukum
			pembangunan infrastruktur dasar di kawasan ekonomi khusus
			Pengembangan Ekonomi Berbasis Potensi Wilayah
			Pengembangan Food Estate
2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar	Meningkatnya aksesbilitas dan konektivitas pada pusat-pusat kawasan pengembangan wilayah	Integrasi Zona, Kawasan dan Wilayah Admnistrasi pengembangan wilayah	Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah
			Membangun infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas antar wilayah
			Meningkatkan koordinasi antar wilayah dalam pengembangan ekonomi
			Pengembangan Interchange dalam mendukung konektivitas antar wilayah (telaga-limboto)
	Meningkatnya pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pekerjaan umum	Melakukan penyesuaian terhadap dokumen RTRW	mengoptimalkan peran forum penataan dan ruang daerah
			melakukan Identifikasi lokasi rawan bencana
			Peningkatan jumlah PPNS tata ruang
			mengoptimalkan Early Warning System kebencanaan
			memastikan dokumen perencanaan daerah berbasis review tata ruang
			Menerapkan standar kompetensi teknis dan etika bagi pelaksana proyek pembangunan

2.3 Meningkatkan daya saing UMKM	Meningkatnya kualitas produk UMKM	Pemanfaatan Teknologi Industri Pengolahan	Mempercepat pertumbuhan sektor hilirisasi yang berbasis produk unggulan
			Diversifikasi produk olahan berbasis teknologi tepat guna
2.4 Restorasi lingkungan hidup	Konservasi dan ketahanan ekologi	Penegakan Regulasi	Memberlakukan sanksi pidana kepada yang merusak dan merubah fungsi lingkungan
			mendorong Kolaborasi dan kemitraan dengan multipihak (Perguruan Tinggi, NGO dan filantropi)
	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah	Pencegahan timbulan sampah	Memfasilitasi pengelolaan sampah melalui teknologi digital
			Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
			Pengembangan Ekonomi Sirkular (5R)
Misi 3: Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik			
3.1 Meningkatkan kualitas layanan publik	Meningkatnya aksesibilitas layanan publik secara digital	Membangun Infrastruktur Digital	Dokumen Peta Rencana
			Penerapan SPBE
		Membangun talenta digital dikalangan ASN	Membangun talenta digital di kalangan ASN (Aparatur Sipil Negara)
	Inovasi layanan publik	Membangun Ekosistem Inovasi	Mendorong ekosistem inovasi pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan publik
3.2 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi	Meningkatnya profesionalisme aparatur	Restorasi Manajemen Kepegawaian	Penentuan indikator penilaian kinerja pegawai yang lebih objektif, terukur dan aplikatif
			Pemberlakuan reward dan punishment yang transparant dan berbasis kinerja
			Promosi dan Penjenjangan karir yang objektif, terstruktur berdasarkan sistem Meritokrasi yang sesungguhnya
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Memperkuat Rentang Kendali SAKIP	Memperkuat peran Inspektorat untuk melakukan pengawasan internal terhadap pelaksanaan SAKIP

			Mengembangkan platform digital untuk pelaporan dan evaluasi kinerja OPD sehingga proses lebih efisien
			meningkatkan koordinasi dan sinergitas ASN KAB.Gorontalo untuk memastikan konsitensi dalam pelaksanaan SAKIP
			Mewajibkan Perangkat daerah mempublikasikan perencanaan dan laporan kinerja sebagai bentuk akuntabilitas publik

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan diatas, maka dapat disimpulkan tema atau fokus pembangunan. Tema atau fokus pembangunan akan memberi arah yang jelas bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan di RPJMD setiap tahun. Penetapan tema atau fokus RPJMD Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari tema atau fokus pembangunan tahap pertama pada RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025 - 2045, yaitu mewujudkan "Kabupaten Gorontalo Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berkelanjutan". Untuk mewujudkan tema pembangunan tahap pertama pada RPJPD Kabupaten Gorontalo, maka tema atau fokus pembangunan lima tahunan (2025-2029) disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4 Pentahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Tema:	Tema:	Tema:	Tema:	Tema:
Mengokohkan Restorasi Tata Kelola dan Infrastruktur Dasar Untuk Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani	Memacu Ekonomi Rakyat dan Meningkatkan Kualitas SDM Menuju Daya Saing Daerah	Menguatkan Daya Saing Daerah dan Mendorong Pertumbuhan Berkelanjutan	Mengakselerasi Inovasi dan Pemerataan Pembangunan untuk Kesejahteraan Berkelanjutan	Menuntaskan Janji Restorasi Pembangunan dan Menata Keberlanjutan untuk Generasi Mendatang

3.5.2.1. Program Pembangunan Daerah

Perencanaan strategis dalam dokumen RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam perencanaan operasional. Program pembangunan daerah merupakan agenda strategis kepala daerah selama periode RPJMD yang menjadi fokus utama atau prioritas dalam jangka waktu lima tahun, dengan tujuan utama untuk mencapai

sasaran pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, program ini dijalankan melalui pengelolaan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Tabel 3.5 Sinkronisasi Prioritas RPJMD Kabupaten Gorontalo dengan RPJMD Provinsi Gorontalo dan RPJMN 2025-2029

PRIORITAS RPJMN 2025-2029	PRIORITAS RPJMD PROVINSI GORONTALO 2025-2029	PRIORITAS RPJMD KABUPATEN GORONTALO 2025-2029
Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Pembangunan Manusia
Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Penguatan Sektor Agromaritim	Transformasi Ekonomi dan Infrastruktur Kewilayahan
Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Pengembangan UMKM Berbasis Kelas	Pemerintahan Bersih
Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Integrasi Pariwisata dan Infrastruktur	
Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;		
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		
Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		

Tabel 3.6 Penentuan Prioritas Daerah

ISU STRATEGIS	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN
Produktivitas Tenaga Kerja dan Mutu SDM	PD 1: Pembangunan Manusia	Program Penguatan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Memakmurkan Nilai-Nilai Keagamaan
		Program penguatan lembaga-lembaga kebudayaan dan restorasi nilai-nilai budaya
Kemiskinan dan Ketimpangan		Program peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat
		Program peningkatan standar pendidikan masyarakat
Penguatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	PD 2: Transformasi Ekonomi dan Infrastruktur Kewilayahan	Program penurunan kemiskinan dan jaminan sosial yang berkeadilan;
Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Infrastruktur		Program peningkatan sektor unggulan berbasis kewilayahan;
		Program perbaikan dan peningkatan infrastruktur dasar;
Akselerasi Transformasi Ekonomi		Program dukungan finansial dan teknis kepada UMKM;
Ketahanan Pangan, Lingkungan Hidup dan Kebencanaan		Program pengurangan angka pengangguran
Tata Kelola Pemerintahan dan Daya Saing Daerah	PD 3: Pemerintahan Bersih	Program restrukturisasi birokrasi dan pemerintahan yang partisipatif;
		Program peningkatan pelayanan publik yang efektif dan efisen;
		Program pemerintahan kolaboratif, harmonis dan produktif

Tabel 3.7 Keterkaitan Tujuan, sasaran dan Prioritas Daerah

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PRIORITAS DAERAH	PROGRAM UNGGULAN
VISI: RESTORASI KABUPATEN GORONTALO BERKEMAJUAN DAN BERKELANJUTAN					
Misi 1: Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif	**1.1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua**		**Indeks Pembangunan Manusia**	PD 1: Pembangunan Manusia	
		1.1.1 Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah		Program Peningkatan Standar Pendidikan Masyarakat
			Harapan Lama Sekolah		
		1.1.2 Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	Usia Harapan Hidup		Program Peningkatan Kualitas Hidup & Kesehatan Masyarakat
		1.1.3 Meningkatnya	Cakupan Kepesertaan JKN		Program Penurunan

		kualitas dan cakupan jaminan sosial		PD 2: Transformasi Ekonomi dan Infrastruktur Kewilayahan	Kemiskinan dan Jaminan Sosial yang berkeadilan
			Prevalensi Stunting		Program Peningkatan Kualitas Hidup & Kesehatan Masyarakat
	1.2. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan		**Indeks Kerukunan umat Beragama**		
		1.2.1 Meningkatnya moderasi beragama	Indeks Kerukunan umat Beragama		Program Penguatan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Memakmurkan Nilai-Nilai Keagamaan
		1.2.2 Meningkatnya dimensi ekspresi budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	PD 2: Transformasi Ekonomi dan Infrastruktur Kewilayahan	Program Penguatan Lembaga-Lembaga Kebudayaan dan Restorasi Nilai Nilai Budaya
Misi 2: Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan	**2.1 Menciptakan nilai tambah komoditi unggulan**		**Indeks LQ Komoditi Unggulan (Padi Jagung Kelapa)**		
		2.1.1 Meningkatnya produk olahan (hilirisasi) komoditi unggulan	Rasio PDRB Industri Pengolahan		Program Peningkatan Sektor Unggulan Berbasis Kewilayahan
			Tingkat Pengangguran Terbuka		Program pengurangan angka pengangguran
	2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar		**Indeks Pembangunan Infrastruktur**		
		2.2.1 Meningkatnya aksesbilitas dan konektivitas pada pusat-pusat kawasan pengembangan wilayah	Indeks Aksesibilitas Kawasan		Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
		2.2.2 Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum	Cakupan akses layanan air minum dan sanitasi		Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
	2.3 Meningkatkan daya saing UMKM		**Rasio Kewirausahaan**		
		2.3.1 Meningkatnya kualitas produk UMKM	Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDRB		Program Dukungan Finansial dan Teknis kepada UMKM
	2.4 Restorasi lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**		
		2.4.1 Konservasi dan ketahanan ekologi	Indeks Ketahanan Daerah		Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
		2.4.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah		Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar
Misi 3: Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik	**3.1 Meningkatkan kualitas layanan publik**		**Indeks Pelayanan Publik**	PD 3: Pemerintahan Bersih	
		3.1.1 Meningkatnya aksesibilitas layanan publik secara digital	Nilai Kepatuhan Layanan Publik		Program Peningkatan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien
		3.1.2 Inovasi layanan publik	Indeks Inovasi Daerah		Program Pemerintahan Kolaboratif, Harmonis, dan produktif
	3.2 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi		**Indeks Reformasi Birokrasi**		
		3.2.1 Meningkatnya profesionalisme aparatur	Indeks Profesionalitas ASN		Program Restrukturisasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Partisipatif

		3.2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	Nilai AKIP		Program Restrukturisasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Partisipatif

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat keterkaitan yang erat antara misi, isu strategis, dan prioritas daerah. Masing-masing misi diturunkan ke dalam isu-isu strategis dioperasionalisasikan ke dalam prioritas pembangunan daerah yang konkret. Pola ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo dirancang secara sistematis dan terintegrasi, guna mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Perumusan Prioritas Daerah (PD) disusun dengan mempertimbangkan urgensi dalam menjawab isu-isu strategis yang dihadapi daerah yang diselaraskan dengan penyajian lokus pembangunan provinsi berdasarkan pembagian wilayah kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045 dan RTRW Provinsi Gorontalo. Di sisi lain, penyajian lokus pembangunan kabupaten disusun berdasarkan wilayah kecamatan sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2045 dan RTRW Kabupaten Gorontalo Tahun 2012–2032.

Dalam konteks pengembangan kewilayahan provinsi Gorontalo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta mengoptimalkan pembangunan diwilayah Kabupaten dan Kota yang terintegrasi, maka dirumuskan beberapa arahan kebijakan pembangunan, dengan memperhatikan arahan RTRW Provinsi Gorontalo, pengembangan kewilayahan di Kabupaten Gorontalo sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi, didorong sebagai **Sentra Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam serta pusat konektivitas antar wilayah**, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Dukungan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Limboto
2. Pengembangan Kawasan Terpadu Industri Terpadu Tibawa –Pulubala, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Geopark Gorontalo.
3. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tibawa, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Limboto dan Tolangohula
4. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Isimu –Batudaa, Tenilo – Iluta, Pilohayanga –Dulamayo Selatan, Pangadaa –Bakti

5. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, seperti Daerah Irigasi Huludupitango, Daerah Irigasi Bongo, Daerah Irigasi Buliya, Daerah Irigasi Pilohayanga
6. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
7. Fasilitasi Pengembangan Terminal Tipe A Isimu dan Pembangunan Terminal Tipe B Limboto
8. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Bilato
9. Fasilitasi pengembangan Bandar Udara Djalaludin
10. Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Jaringan Telekomunikasi
11. Fasilitasi pengembangan dan penerapan Sumber Energi Baru Terbarukan
12. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
13. Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, KawasanKonservasi, dan Kawasan Hutan Produksi
14. Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman.
15. Pengembangan Kawasan Pariwisata seperti Pendaratan Soekarno, Pentadio Resort, juga Desa Wisata seperti Desa Bongo
16. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Tibawa-Pulubala, Kawasan Pertahanan dan Keamanan
17. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
18. Peningkatan layanan Pendidikan termasuk pendidikan vokasi
19. Peningkatan layanan Kesehatan seperti Pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie serta penuntasan Stunting
20. Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
21. Pengembangan TPA Talumelito, Pembangunan dan Pengembangan Limbah B3
22. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
23. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan.

Mengacu pada dokumen rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gorontalo 2012-2032, Pada wilayah Kabupaten Gorontalo kawasan strategi nasional ditetapkan berada pada Kawasan Danau Limboto dengan fungsi strategsi kepentingan lingkungan hidup. Danau Limboto memiliki daya dukung dan daya tampung lingkungan yang luas. Kawasan strategis Danau Limboto bukan hanya urusan Provinsi Gorontalo, namun juga masuk dalam program strategis nasional dan menjadi urusan pemerintah pusat. Sedangkan kawasan strategis di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut;

1. KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu pengembangan kawasan terpadu industri, perdagangan dan simpul transportasi darat, udara dan kereta api berupa KSP Isimu.
2. KSP dari kepentingan Sosial Budaya yaitu kawasan pendidikan Limboto di Kabupaten Gorontalo. KSP dari kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ramah lingkungan di blok pertambangan di Kabupaten Gorontalo.
3. KSP dari sudut Kepentingan Daya Dukung Lingkungan yaitu kawasan strategis danau Limboto dan Kawasan strategis penanggulangan banjir di DAS Limboto-Bolango-Bone yang bermuara pada Danau Limboto.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi terdiri dari:

1. Kawasan permukiman, perdagangan dan jasa yang meliputi: Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Tilango, Kecamatan Talaga Jaya, Kecamatan Batudaa.
2. Kawasan pengembangan agro industri, perdagangan dan jasa yang meliputi: Kecamatan Tibawa, Kecamatan Dungaliyo dan Kecamatan Pulubala.
3. Kawasan Pelabuhan yang meliputi: Pelabuhan Kayubulan di Kecamatan Batudaa Pantai, Pelabuhan Luluo di Kecamatan Biluhu, dan Pelabuhan Bilato di Kecamatan Bilato.
4. Kawasan Peruntukan Pariwisata Budaya yang terletak di: Desa Bongo Kecamatan Batudaa Pantai, Pariwisata Alam yang terletak di Desa Pentadio Timur Kecamatan Telaga Biru, Desa Barakati Kecamatan Batudaa, Desa Biluhu Timur Kecamatan Batudaa Pantai dan Desa Taulaa Kecamatan Bilato, Pariwisata Buatan yang terletak di Kecamatan Batudaa, Kecamatan Boliyohuto dan Kecamatan Mootilango.

5. Kawasan Peruntukan Industri Besar yang meliputi daerah: Tibawa dan Pulubala, Industri Sedang yang meliputi daerah: Boliyohuto, Mootilango dan Tolangohula dan Industri Kecil meliputi wilayah: Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Dungaliyo, Batudaa dan Tibawa.
6. Kawasan Bandara Udara yang meliputi wilayah Kecamatan Tibawa.
7. Kawasan Peruntukan Jaringan Kereta Api yang meliputi wilayah Isimu - Marisa, Isimu - Kwandang, Isimu – Bone.
8. Kawasan Peruntukan Terminal penumpang tipe A dan terminal Barang yang berada di wilayah Isimu, Terminal penumpang tipe B terdapat di wilayah Limboto dan Telaga dan Terminal penumpang tipe C terdapat di daerah Dungaliyo dan Boliyohuto.
9. Kawasan Pertambangan meliputi wilayah Kecamatan: Telaga, Telaga Biru, Limboto, Batudaa Pantai, Biluhu, Tibawa, Pulubala, Mootilango, Boliyohutu, Bilato, Tolangohula dan Asparaga
10. Kawasan Pusat Kegiatan Lokal yang meliputi wilayah Kecamatan Telaga dan Limboto Barat
11. Kawasan Peruntukan Pertanian untuk lahan basah dan lahan kering yang meliputi: Kecamatan Asparaga, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Bilato, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Limboto, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Telaga Biru, Kecamatan Telaga, Kecamatan Telaga Jaya, dan Kecamatan Tilango.
12. Kawasan Peruntukan Perkebunan meliputi daerah: Kecamatan Asparaga, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Mootilango, Kecamatan Bilato, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Batudaa, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Dungaliyo, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Limboto, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Telaga Biru, dan Kecamatan Telaga.
13. Kawasan Peruntukan Peternakan meliputi wilayah: Kecamatan Mootilango, Kecamatan Boliyohuto, Kecamatan Tolangohula, Kecamatan Asparaga, Kecamatan Pulubala, Kecamatan Tibawa, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu, Kecamatan Bilato, Kecamatan Bongomeme, Kecamatan

Dungaliyo, Kecamatan Tabongo, Kecamatan Limboto Barat, Kecamatan Limboto, Kecamatan Telaga Biru, dan Kecamatan Telaga.

14. Kawasan Peruntukan Perikanan Tangkap meliputi: wilayah, Kecamatan Batudaa Pantai, Kecamatan Biluhu dan Kecamatan Bilato
15. Kawasan Peruntukan Perikanan Budidaya meliputi daerah: Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Batudaa, Pulubala, Tibawa, Mootilango, Boliyohuto, Bilato, Batudaa Pantai, Tolangohula dan Asparaga.
16. Kawasan Peruntukan Pengolahan Perikanan terdapat di wilayah: Biluhu, Bilato, Telaga dan Dungaliyo.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya diarahkan pada Pusat Kegiatan Lokal Kota Limboto yang sekaligus sebagai pusat tumbuh berkembangnya sosial budaya. **Kawasan strategis dari sudut kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi** terdiri dari:

1. Kawasan Pertambangan Mineral Logam:
   a. Emas: Kecamatan Asparaga, Pulubala, Tolangohula, Mootilango, dan Boliyohuto.
   b. Tembaga: Kecamatan Telaga, Boliyohuto, dan Pulubala.
2. Kawasan Pertambangan Non Logam:
   a. Granit: Kecamatan Batudaa.
   b. Batugamping: Kecamatan Tibawa, Limboto, dan Batudaa
   c. Lempung: Kecamatan Boliyohuto, Tibawa, dan Limboto
   d. Pasir dan Batu (golongan C): Kecamatan Telaga, Batudaa, dan Limboto.
3. Kawasan Potensi Energi Panas Bumi (Hydrothermal): Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.
4. Kawasan Potensi Energi Terbarukan (PLTMH): Penyebaran di Kecamatan Telaga (hulu Sungai Dulamayo) dan Kecamatan Asparaga (Air Terjun Mohiyolo).

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup: Kawasan Penanganan Khusus Danau Limboto dalam perencanaan tata ruang Kabupaten Gorontalo merupakan area yang memerlukan perhatian khusus karena adanya ancaman kerusakan yang signifikan. Hal ini berdampak pada lingkungan dan wilayah sekitarnya, baik secara positif maupun

negatif. Danau Limboto adalah sumber daya alam yang penting di Kabupaten Gorontalo dan Provinsi Gorontalo secara keseluruhan, karena berperan sebagai penyangga utama untuk mengurangi banjir yang sering melanda daerah tersebut. Namun, setiap tahunnya, kondisi fisik dan biologis danau ini mengalami penurunan baik dalam kuantitas maupun kualitasnya. Jumlah dan jenis ikan menurun, ekosistem rusak, dan terjadi penyempitan serta penurunan muka air danau. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penanganan, masalah Danau Limboto tetap menjadi permasalahan utama yang belum terpecahkan di Gorontalo.

3.5.2.2. Program Prioritas

Setelah menetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, langkah berikutnya adalah merumuskan Program Prioritas (PP). Dalam hal ini, Program Prioritas tidak hanya sekadar merupakan penjabaran dari Prioritas Pembangunan Daerah, tetapi juga dirancang sebagai program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, memiliki nilai strategis, berdampak besar, lintas sektor, dan berskala luas. Program ini juga memiliki tingkat urgensi yang tinggi dan mampu memberikan pengaruh signifikan bagi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, Program Prioritas berfungsi sebagai instrumen utama dalam pencapaian tujuan strategis pembangunan. Adapun hasil perumusan Program Prioritas ini merupakan kelanjutan dari Prioritas Pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Gorontalo tahun 2025–2029.

Misi pertama menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang beragama, berbudaya, unggul, dan kompetitif. Tujuan utamanya adalah peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan secara merata serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah menetapkan sasaran seperti meningkatnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di sektor pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kualitas dan cakupan jaminan sosial. Indikator kinerjanya antara lain adalah rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, usia harapan hidup, cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dan prevalensi stunting. Untuk mendukung sasaran tersebut, disusun berbagai program prioritas, seperti Program Peningkatan Standar Pendidikan Masyarakat, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Kesehatan Masyarakat, serta Program Penurunan Kemiskinan dan Jaminan Sosial yang Berkeadilan.

Selain aspek layanan dasar, misi ini juga memuat upaya untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan budaya. Hal ini tercermin dalam sasaran meningkatnya moderasi beragama dan ekspresi budaya, yang diukur melalui indikator seperti Indeks Kerukunan Umat Beragama dan Indeks Pembangunan Kebudayaan. Program-program yang mendukungnya termasuk Program Penguatan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Program Restorasi Nilai-Nilai Budaya.

Misi kedua mengusung semangat transformasi ekonomi kerakyatan berbasis teknologi dengan orientasi nilai tambah dan keberlanjutan. Tujuan dari misi ini meliputi penciptaan nilai tambah pada komoditas unggulan, peningkatan infrastruktur dasar, penguatan daya saing UMKM, serta restorasi lingkungan hidup. Sasaran yang dirumuskan untuk mendukung tujuan tersebut mencakup peningkatan hilirisasi produk unggulan, peningkatan aksesibilitas kawasan dan layanan dasar publik, serta peningkatan kontribusi UMKM terhadap PDRB. Indikator kinerjanya mencakup antara lain rasio PDRB sektor industri pengolahan, indeks aksesibilitas kawasan, cakupan air minum dan sanitasi, rasio kewirausahaan, serta kontribusi UMKM terhadap PDRB. Beberapa program prioritas yang dirancang antara lain Program Peningkatan Sektor Unggulan Berbasis Kewilayahan, Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar, serta Program Dukungan Finansial dan Teknis kepada UMKM.

Dalam upaya pelestarian lingkungan, misi ini juga menggarisbawahi pentingnya konservasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah. Indikator seperti Indeks Ketahanan Daerah dan Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah digunakan untuk memantau pencapaian sasaran tersebut, yang ditindaklanjuti melalui program-program peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Misi ketiga mengarah pada reformasi tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan utama dalam misi ini adalah peningkatan kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi. Sasaran-sasaran spesifiknya meliputi peningkatan aksesibilitas layanan publik secara digital, peningkatan inovasi pelayanan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaiannya adalah Indeks Pelayanan Publik, Nilai Kepatuhan Layanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Profesionalitas ASN, serta Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Program prioritas yang

diimplementasikan antara lain Program Peningkatan Pelayanan Publik yang Efektif dan Efisien, Program Pemerintahan Kolaboratif dan Produktif, serta Program Restrukturisasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Partisipatif.

Tabel 3.8 Perumusan Program Prioritas RPJMD

Misi 1: Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGULAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL (2024)	TARGET				
								2026	2027	2028	2029	2030
VISI: RESTORASI KABUPATEN GORONTALO BERKEMAJUAN DAN BERKELANJUTAN												
Misi 1: Membangun Sumber Daya yang Beragama, Berbudaya, Unggul, dan Kompetitif	**1.1. Meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan untuk semua**		**Indeks Pembangunan Manusia**									
		1.1.1 Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	**Rata-Rata Lama Sekolah**	**Program Peningkatan Standar Pendidikan Masyarakat**	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase anak usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	98%	100	100	100	100	100
					Program Pembinaan Perpustakaan	Presentase Pembinaan Perpustakaan Daerah	13.41%	15.08%	15.08%	15.41%	15.86%	16.21%
					Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	51.43	55.06	53.55	52.06	50.03	50.16
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	100%	100%	100%	100%	100%
			Harapan Lama Sekolah	**Program Peningkatan Standar Pendidikan Masyarakat**	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	-	0	100	100	100	100
					Program Pengelolaan Arsip	Persentase Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintah Daerah	53%	53%	58.00%	60.00%	62.00%	63%
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	74.30	56.10	57.98	59.84	62.37	64.59
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	-	100%	100%	100%	100%	100%

		1.1.2 Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan	**Usia Harapan Hidup**	**Program Peningkatan Kualitas Hidup & Kesehatan Masyarakat**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	145	117	104	91	77	77
						Angka Kematian Bayi	3.8	12	11	10	9	9
						Angka Kematian Balita	4	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang MKJP	24.7	25.03	25.05	25.09	30.01	30.03
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15%	10.53	15.79	21.05	26.32	26.32
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penyelengaraan layanan Sistem Penyediaan Air Minum		75	78	81	83	85
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyelenggaraan Layanan Sistem Air Limbah		65	68	71	73	75
		1.1.3 Meningkatnya kualitas dan cakupan jaminan sosial	**Cakupan Kepesertaan JKN**	**Program Penurunan Kemiskinan dan Jaminan Sosial yang berkeadilan**	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	145	117	104	91	77	77
						Angka Kematian Bayi	3.8	12	11	10	9	9
						Angka Kematian Balita	4	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
					Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang Menjadi Peserta Jaminan Sosial Kesehatan (%)	0.01	45	50	55	60	65
					Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	97.19%	97.70	98	98.5	98.7	99.1
			Prevalensi Stunting	**Program Peningkatan Kualitas Hidup &**	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presentase Kebutuhan Ber Kb Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need), dan ratio akseptor KB	5.4	5.1	5	4.8	4.5	4.3

				Kesehatan Masyarakat	(KS)							
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	145	117	104	91	77	77
						Angka Kematian Bayi	3.8	12	11	10	9	9
						Angka Kematian Balita	4	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5
					Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Anak Usia 5-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	98%	100	100	100	100	100
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 Ha	13,25%	13,25%	33,11%	52,98%	72,85%	100%
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni Di Kawasan Kumuh Perdesaan Sesuai Persyaratan Teknis Bangunan	20%	20%	40%	60%	80%	100%
					Program Rehabilitasi Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Gelandang /Pengemis Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Diluar Panti.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15%	10.53	15.79	21.05	26.32	26.32
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Penyelengaraan Layanan Sistem Penyediaan Air Minum		75	78	81	83	85
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyelenggaraan Layanan Sistem Air Limbah		65	68	71	73	75
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	100	100	100	100	100	100
						Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan	100	100	100	100	100	100

						segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota						
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1	1	1	1	1	1
						Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara		10	10	10	10	10
					Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Persentase fasilitasi kerja sama antar desa	18.85	21.5	24.1	26.7	29.3	31.9
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan urusan pemerintahan daerah	95	97%	98%	98%	99%	99%
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	0	100	100	100	100	100
					Program Perlindungan Perempuan	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan yang Komprehensif	0	100	100	100	100	100
					Program Perlindungan Khusus Anak	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	60.86	61.72	62.58	63.44	64.3	65.16
						Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	100	100	100	100
						Indeks Pemenuhan Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	65.17	72.33	75.91	79.49	83.07	86.65
					Program Penyuluhan Pertanian	Presentase Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Pertanian/ Persentase Kenaikan Kelas kelompok Tani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah bibit ternak Sapi/Kerbau/Kambing/Unggas yang diadakan (ekor)	0	300	400	500	600	600
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi Olahan Ikan	6577,04	6642,97	6676,19	6709,57	6743,12	6776,83

						Angka Konsumsi Ikan	62,5	65	67	69	71	73
	1.2. Memperkuat nilai-nilai agama dan budaya dalam penyelenggaraan pembangunan		**Indeks Kerukunan umat Beragama**									
		1.2.1 Meningkatnya moderasi beragama	Indeks Kerukunan umat Beragama	Program Penguatan Lembaga-Lembaga Keagamaan dan Memakmurkan Nilai-Nilai Keagaman	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	26%	70%	78%	89%	100%	100%
					Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	25%	40%	45%	60%	70%	85%
					Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	52%	65%	70%	80%	90%	100%
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	75%	82%	85%	90%	95%	100%

					Penanganan Konflik Sosial							
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	80%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	100	100
					Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	45%	100	100	100	100	100
		1.2.2 Meningkatnya dimensi ekspresi budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Program Penguatan Lembaga-Lembaga Kebudayaan dan Restorasi Nilai Nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	45%	100	100	100	100	100
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	25%	100	100	100	100	100
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya dan warisan budaya dan tak benda yang dilestarikan		0	50	50	50	50
						Persentase warisan budaya yang dilestarikan		100	100	100	100	100
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		1.85	2.18	2.49	2.78	3.04
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	0.41	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang Terberdayakan	40.00	60.00	80.00	100.00	100.00	100.00
					Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Misi 2: Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi, Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL (2024)	TARGET				
								2026	2027	2028	2029	2030
VISI: RESTORASI KABUPATEN GORONTALO BERKEMAJUAN DAN BERKELANJUTAN												
Misi 2: Mentransformasikan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Teknologi Berorientasi Nilai Tambah dan Berkelanjutan	**2.1 Menciptakan nilai tambah komoditi unggulan**		**Indeks LQ Komoditi Unggulan (Padi Jagung Kelapa)**									
		2.1.1 Meningkatnya produk olahan (hilirisasi) komoditi unggulan	**Rasio PDRB Industri Pengolahan**	**Program Peningkatan Sektor Unggulan Berbasis Kewilayahan**	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	4.7	4.9%	4.95%	5%	5.04%	5.1%
					Program Pengurangan Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	2.64	2.13	2.07	2.03	1.98	1.94
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase Industri yang Memiliki Izin	0.35%	4.35%	6.35%	8.35%	10.35%	12.35%
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan dan Gudang Terdaftar dan Memiliki Izin	15,51%	17,06%	18,76%	20,63%	22,69%	17,06%
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,33%	10.09%	10.47%	10.85%	11.23%	11,61%
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indeks Harga Implisit Sektor Perdagangan	156.62%	159%	162%	165%	168%	171%

					Program Pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang	1461695400$	17686514$	19455165$	21400682$	23540750$	25894825$
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	6%	7%	7%	7%	7%	7%
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas Padi	5.14	5.24	5.29	5.34	5.5	5.5
						Produktivitas Jagung	4.95	5.55	5.85	6.15	6.45	6.45
						Produktivitas Cabai Merah	5.5	5.58	5.62	5.66	5.7	5.7
						Produktivitas Kelapa	1.43	1.444	1.472	1.486	1.5	1.5
						Presentase Terciptanya Promosi, Informasi Hasil Pertanian dan Kerjasama Global	0	5%	7%	9%	11%	11%
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas Padi	5.14	5.24	5.29	5.34	5.5	5.5
						Produktivitas Jagung	4.95	5.55	5.85	6.15	6.45	6.45
						Produktivitas Cabai Merah	5.5	5.58	5.62	5.66	5.7	5.7
						Produktivitas Kelapa	1.43	1.444	1.472	1.486	1.5	1.5

					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Lahan yang terfasilitasi pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian/ Persentase Kenaikan Kelas kelompok Tani	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap (ton/tahun)	24628.14	24875,04	24999,41	25124,41	25250,03	25376,28
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi perikanan budidaya (ton/tahun)	6983	7053,00	7088,27	7123,71	7159,33	7195,13
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase laporan kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti	100%	100	100	100	100	100
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Produksi olahan ikan (ton/tahun)	6577.04	6642,97	6676,19	6709,57	6743,12	6776,83
						Angka Konsumsi Ikan	62.5	65	67	69	71	73
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pertumbuhan Populasi Ternak Ruminansia (%)	2.47%	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (PAH ASUH)	100.00%	100	100	100	100	100

						(%)						
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat veteriner	Persentase Pelayanan Ternak yang terinfeksi PHMS	100	100	100	100	100	100
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	0%	100	100	100	100	100
					Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan lokasi penyuluhan	100	100	100	100	100	100
					Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	100	100	100	100	100	100
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	10.49%	10.51%	10.53%	10.55%	10.57%	10.59%
					Program Pengembangan UMKM	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan Dan Ekspor	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Investasi	-1202.18%	23	28	36	46	49

					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi		48	52	57	63	66
					Program Kerjasama Penanaman Modal	Persentase Kerja Sama Penanaman Modal yang Ditindaklanjuti		10	10	10	10	10
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase jumlah Cadangan pangan	100	100	100	100	100	100
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor pola pangan harapan	78.40	81.20	82.60	84.00	84.90	86.30
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan		2.44	4.88	4.88	7.32	7.42
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu kemanan pangan		20	20	24	24	25
	2.2 Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar		**Indeks Pembangunan Infrastruktur**									
		2.2.1 Meningkatnya aksesbilitas dan konektivitas pada pusat-pusat kawasan pengembangan wilayah	**Indeks Aksesibilitas Kawasan**	**Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar**	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Penyelenggaraan Jalan		50	53	56	60	63

					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penyelengaraan layanan Sistem Penyediaan Air Minum		75	78	81	83	85
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyelenggaraan Layanan Sistem Air Limbah		65	68	71	73	75
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Penanganan Sistem Drainase		65	67	69	71	73
					Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase penyelengaraan Penataan Bangunan Gedung		70	73	76	79	83
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik		70	73	76	79	83
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	13,25%	13,25%	33,11%	52,98%	72,85%	100%
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh Perdesaan sesuai persyaratan teknis Bangunan	20%	20%	40%	60%	80%	100%
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan dan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan	20%	20%	40%	60%	80%	100%

						Perumahan						
					Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Peningkatan Pelayanan Penerbitan Sertifikasi Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	20%	20%	40%	60%	80%	100%
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0%	20%	40%	60%	80%	100%
					Program Penanggulangan Bencana	Persentase penanganan pasca bencana	20.00	21.05	26.32	31.58	36.84	42.11
						Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	64.66	100	100	100	100	100
						Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50.44	100	100	100	100	100

						Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
					Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	70%	80%	85%	90%	95%	100%
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian		5	5	5	5	5	5
		2.2.2 Meningkatnya Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum	**Cakupan akses layanan air minum dan sanitasi**	**Program Perbaikkan dan Peningkatan Infrasturtur Dasar**	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penyelengaraan layanan Sistem Penyediaan Air Minum		75	78	81	83	85
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penyelenggaraan Layanan Sistem Air Limbah		65	68	71	73	75
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha	13,25%	13,25%	33,11%	52,98%	72,85%	100%
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh Perdesaan sesuai persyaratan teknis Bangunan	20%	20%	40%	60%	80%	100%

					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Penyediaan dan Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan	20%	20%	40%	60%	80%	100%
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara Korban Bencana Yang Memperoleh Rumah Layak Huni	0%	20%	40%	60%	80%	100%
					Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase Transmigran Yang Dibina Dan Diberdayakan	100	100	100	100	100	100
					Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi Yang Dilaksanakan	-	100	100	100	100	100
					Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase Luas Kawasan Transmigrasi Yang Berkembang	-	100	100	100	100	100
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	145	117	104	91	77	77
						Angka Kematian Bayi	3.8	12	11	10	9	9
						Angka Kematian Balita	4	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5

					Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penyelengaraan layanan Sistem Penyediaan Air Minum	69.44	77,19	77,37	77,54	77,71	> 77,71
	2.3 Meningkatkan daya saing UMKM		**Rasio Kewirausahaan**									
		2.3.1 Meningkatnya kualitas produk UMKM	**Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDRB**	**Program Dukungan Finansial dan Teknis kepada UMKM**	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	10.49%	10.51%	10.53%	10.55%	10.57%	10.59%
					Program Pengembangan UMKM	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan Dan Ekspor	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%	0.02%
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	7.50%	9.44%	11.39%	13.61%	15.56%	17.50%
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%	8.33%
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pertumbuhan Investasi		23	28	36	46	49
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks kepuasan masyarakat		3	3	3	3	3
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Nilai investasi		853,924,050,957	883,924,050,957	913,924,050,957	943,924,050,957	973,924,050,957

					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB		5 objek	5 objek	5 objek	5 objek	5 objek
					Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Perusahaan dan Gudang Terdaftar dan Memiliki Izin	15,51%	17,06%	18,76%	20,63%	22,69%	17,06%
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	9,33%	10%	10%	11%	11%	11,61%
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Indeks Harga Implisit Sektor Perdagangan	157%	159%	162%	165%	168%	171%
					Program Pengembangan ekspor	Nilai Ekspor Barang	1461695400$	17686514$	19455165$	21400682$	23540750$	25894825$
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	100%	100	100	100	100	100
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	100	100
					Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktifitasnya	0.00	100	100	100	100	100

					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yag ditempatkan dalam negeri	2.93	3	3	3	3	3
					Program Hubungan Industrial	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak hak pekerja dan dialog sosial	11577	12,435	12,864	13,293	13,722	14,151
	2.4 Restorasi lingkungan hidup		**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**									
		2.4.1 Konservasi dan ketahanan ekologi	**Indeks Ketahanan Daerah**	**Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar**	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	64.66	100	100	100	100	100
						Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	50.44	100	100	100	100	100
						Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100	100
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95.59	100	100	100	100	100

					Non Kebakaran							
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69.44	77,19	77,37	77,54	77,71	> 77,71
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	0.0451%	0.0452%	0.0454%	0.0456%	0.0457%	0.0458%
					Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya	Kawasan TAHURA yang terkelola	0	1	1	1	1	1
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten Gorontalo	7.56%	7.87%	8.02%	8.18%	8.33%	8.49%
					Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Cakupan Potensi Panas Bumi yang terkelola	0	1 Titik Pootensi	1 Titik Pootensi	1 Titik Pootensi	1 Titik Pootensi	1 Titik Pootensi
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Presentase Lahan yang terfasilitasi pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	100	100	100	100	100	100

					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase laporan kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
					Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	100	100	100	100	100	100
		2.4.2 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah	**Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah**	**Program Perbaikan dan Peningkatan Infrastruktur Dasar**	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	14.54	15.54	16.62	17.77	19.00	20.32
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	15%	10.53	15.79	21.05	26.32	26.32
					Program Pengembangan Permukiman	Persentase Penyediaan Prasarana Persampahan		50%	52%	54%	56%	60%
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Kawasan Permukiman	Persentase Rumah Layak Huni di Kawasan Kumuh Perkotaan sesuai persyaratan teknis Bangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Misi 3: Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	PROGRAM UNGGULAN	PROGRAM PRORITAS	INDIKATOR PROGRAM	KONDISI AWAL (2024)	TARGET				
								2026	2027	2028	2029	2030
VISI: RESTORASI KABUPATEN GORONTALO BERKEMAJUAN DAN BERKELANJUTAN												
Misi 3: Terwujudnya Reformasi tata kelola pemerintahan baik	**3.1 Meningkatkan kualitas layanan publik**		**Indeks Pelayanan Publik**									
		3.1.1 Meningkatnya aksesibilitas layanan publik secara digital	**Nilai Kepatuhan Layanan Publik**	**Program Peningkatan Pelayanan Publik yang efektif dan efisien**	Pengelolaan Aplikasi dan Informatika	Indeks SPBE	2.68	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah terlaksana dengan baik	50%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Pemanfaatan Data Dari Informasi Penanaman Modal	0	21	28	34	45	50
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	100	100	100	100	100
		3.1.2 Inovasi layanan publik	**Indeks Inovasi Daerah**	**Program Pemerintahan Kolaboratif, Harmonis, dan produktif**	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase produk inovasi yang dimanfaatkan	30%	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase Rekomendasi Hasil Penelitian Yang Dijadikan Landasan	50%	55.56	57.14	58.33	59.26	60.00

						Kebijakan Pembangunan Daerah						
					Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Presentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses Dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah	75	75	75	75	75	75
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Indeks SPBE	2.68	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru dan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100%	100	100	100	100	100
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	100	100	100	100	100
	3.2 Meningkatkan kualitas reformasi birokrasi		**Indeks Reformasi Birokrasi**									
		3.2.1 Meningkatnya profesionalisme ASN	**Indeks Profesionalitas ASN**	**Program Restrukturisasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Partisipatif**	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	51.43	55.06	53.55	52.06	50.03	50.16
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	74.30	56.10	57.98	59.84	62.37	64.59

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	115.34	100	100	100	100	100
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Persentase Pendampingan OPD dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi secara ekonomis, efektif dan efisien	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	100	100	100	100	100	100
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	91,67%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks pemerataan guru dan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	100%	100	100	100	100	100
		3.2.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi	**Nilai AKIP**	**Program Restrukturisasi Birokrasi dan Pemerintahan yang Partisipatif**	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan sesuai PKPT	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan	50%	100%	100%	100%	100%	100%

						pemerintahan daerah terlaksana dengan baik						
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD 2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB 4 PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Kerangka pendanaan pembangunan daerah merupakan representasi dari kapasitas riil keuangan daerah yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pada periode 2025–2029. Kapasitas riil ini diperoleh dari total penerimaan daerah yang telah dikurangi dengan berbagai belanja wajib dan pengeluaran yang bersifat mengikat. Dana yang tersedia dari kapasitas riil tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai program-program pembangunan yang menjadi tanggung jawab masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan urusan pemerintahan yang diemban. Indikasi program pembangunan Kabupaten Gorontalo dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis daerah, dengan rincian kebutuhan pendanaan yang disusun berdasarkan pagu indikatif.

Pagu indikatif ini menggambarkan estimasi dana yang diperlukan untuk mencapai target indikator kinerja program yang telah ditetapkan. Dalam kerangka ini, disajikan pula target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan, sebagai tolok ukur pencapaian pembangunan. Dana yang dialokasikan mencakup berbagai jenis belanja daerah, antara lain belanja operasional, belanja modal, belanja tak terduga, dan belanja transfer. Alokasi tersebut berdasarkan prioritas pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD.

Program-program yang telah dilengkapi dengan pagu indikatif ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen rencana strategis. Selanjutnya, program tersebut dijabarkan ke dalam kegiatan dan subkegiatan prioritas lengkap dengan kebutuhan pendanaannya, yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya. Pagu indikatif ini juga menjadi dasar dalam penyusunan KUA-PPAS dan RAPBD.

Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Gorontalo

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					437.145.614.555		442.826.677.381		456.308.334.287		470.072.545.739		484.158.511.183	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					362.981.151.469		357.502.433.722		362.451.630.848		373.281.944.915		381.106.801.368	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan (%)	115,34	100	100	362.981.151.469	100	357.502.433.722	100	362.451.630.848	100	373.281.944.915	100	381.106.801.368	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					74.011.384.306		84.971.046.162		93.410.129.861		96.279.348.329		102.471.112.045	
Meningkatnya Partisipasi anak usia sekolah	Persentase anak usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah (%)	98	100	100	74.011.384.306	100	84.971.046.162	100	93.410.129.861	100	96.279.348.329	100	102.471.112.045	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					31.266.680		102.289.760		118.661.060		139.829.810		163.141.070	
Meningkatnya Kualitas Kurikulum Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	0	100	100	31.266.680	100	102.289.760	100	118.661.060	100	139.829.810	100	163.141.070	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					121.812.100		139.117.977		212.975.318		250.969.435		292.808.970	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan Tenaga kependidikan	Indeks pemerataan guru dan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik (Indeks)	100	100	100	121.812.100	100	139.117.977	100	212.975.318	100	250.969.435	100	292.808.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					0		9.500.000		9.690.000		10.450.280		10.814.180	
Meningkatnya kualitas dan distribusi dan distribusi institusi pendidikan	Persentase izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui (%)	100	100	100	0	100	9.500.000	100	9.690.000	100	10.450.280	100	10.814.180	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					0		102.289.760		105.247.200		110.002.970		113.833.550	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	100	100	100	0	100	102.289.760	100	105.247.200	100	110.002.970	100	113.833.550	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					346.231.984.349		375.694.501.012		386.958.085.914		398.568.175.563		410.510.709.122	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					223.536.411.698		195.556.200.887		205.967.675.085		211.304.969.213		218.247.951.161	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100	223.536.411.698	100	195.556.200.887	100	205.967.675.085	100	211.304.969.213	100	218.247.951.161	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	0	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	1	1	1		1		1		1		1		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan (%)	0	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					120.187.225.741		179.063.795.010		179.858.732.345		186.102.092.571		191.017.520.186	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	1,9	1,9	1,8	120.187.225.741	1,7	179.063.795.010	1,6	179.858.732.345	1,5	186.102.092.571	1,5	191.017.520.186	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) (Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun)	0	1-19	1-18		1-17		1-16		1-15		1-15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	(a) Angka Kematian Balita (AKBa); (b) Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup. (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	0	19	18		17		16		15		14		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	8.078	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	0	19	18		16		17		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	55	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (%)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	-	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar (%)	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		90		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna (Persentase)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,5		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	55	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	90	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) ((%))	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) ()	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,87	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	87,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	13	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	1,9	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Total Fertility Rate (TFR). (Orang)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66	85	87		90		93		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun (Rata-rata Anak per Wanita)	0	19	18		17		16		15		15		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	145	130	117		104		91		77		77		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Balita (Per 1.000 Kelahiran)	4	1,9	1,8		1,7		1,6		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup (Orang)	3,8	13	12		11		10		9		9		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis (Persentase)	0	55	60		65		70		75		75		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Cakupan imunisasi bayi lengkap (Persentase)	66%	85%	87%		90%		93%		95%		95%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	92	93	94		94		95		95		95		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	87,12	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan (%)	80,78	80	80		80		80		80		80		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional (%)	50	50	60		70		80		85		85		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Puskesmas Terakreditasi Paripurna (%)	82	82	82		82		90		90		90		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Persentase Rumah Sakit Terakreditasi Paripurna (%)	60	60	60		60		60		60		60		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Penemuan Kasus TBC (%)	82	85	90		91		92		93		93		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.365.872.870		491.383.515		517.442.141		531.038.421		569.079.876	
Meningkatnya Mutu dan Distribusi tenaga kesehatan	Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi (Rasio)	3,7	3,7	3,8	1.365.872.870	3,9	491.383.515	4	517.442.141	4,1	531.038.421	4,1	569.079.876	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar (Persentase)	43	43	47		47,5		48		52		52		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
														Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					815.636.978		449.930.589		474.002.877		486.208.375		521.803.306	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	50	50	50	815.636.978	60	449.930.589	71	474.002.877	85	486.208.375	85	521.803.306	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					326.837.062		133.191.011		140.233.466		143.866.983		154.354.593	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	0	100	100	326.837.062	100	133.191.011	100	140.233.466	100	143.866.983	100	154.354.593	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesehatan
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					86.247.269.140		82.044.585.222		85.169.922.778		87.668.020.463		90.741.061.075	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.396.950.906		6.258.208.052		6.445.954.294		6.639.332.923		6.838.512.910	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (%)	100	100	100	7.396.950.906	100	6.258.208.052	100	6.445.954.294	100	6.639.332.923	100	6.838.512.910	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					3.700.841.440		2.865.322.683		2.951.282.364		3.039.820.835		3.131.015.460	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air (%)	67,16	84	60	3.700.841.440	63	2.865.322.683	65	2.951.282.364	67	3.039.820.835	70	3.131.015.460	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.200.000.000		961.112.552		989.945.928		1.019.644.306		1.050.233.635	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistim penyediaan air minum	Persentase penyelenggaraan layanan sistem penyediaan air minum (%)	76,00	100	75	1.200.000.000	78	961.112.552	81	989.945.928	83	1.019.644.306	85	1.050.233.635	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.200.000.000		742.030.884		764.291.810		787.220.565		810.837.182	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase penyelenggaraan layanan sistem air limbah (%)	60	100	65	1.200.000.000	68	742.030.884	71	764.291.810	73	787.220.565	75	810.837.182	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					686.411.678		848.720.000		874.181.600		900.407.048		927.419.259	
Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Penanganan Sistem Drainase (%)	54,30	100	65	686.411.678	67	848.720.000	69	874.181.600	71	900.407.048	73	927.419.259	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.07 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN					800.000.000		800.000.000		1.500.000.000		1.500.000.000		2.000.000.000	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase penyediaan prasarana persampahan (%)	0	0	50	800.000.000	52	800.000.000	54	1.500.000.000	56	1.500.000.000	60	2.000.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					1.000.000.000		2.678.560.320		2.758.917.129		2.841.684.643		2.926.935.182	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan gedung (%)	69,00	100	70	1.000.000.000	73	2.678.560.320	76	2.758.917.129	79	2.841.684.643	83	2.926.935.182	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					800.000.000		1.667.984.792		1.718.024.336		1.769.565.066		1.822.652.018	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik (%)	200	100	60	800.000.000	63	1.667.984.792	66	1.718.024.336	69	1.769.565.066	73	1.822.652.018	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					68.563.065.116		64.763.235.539		66.706.132.605		68.707.316.584		70.768.536.081	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Persentase penyelenggaraan jalan (%)	67,25	90	50	68.563.065.116	53	64.763.235.539	56	66.706.132.605	60	68.707.316.584	63	70.768.536.081	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					200.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000		400.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase bangunan konstruksi yang berkualitas (%)	0	35	15	200.000.000	20	400.000.000	25	400.000.000	30	400.000.000	35	400.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					700.000.000		59.410.400		61.192.712		63.028.493		64.919.348	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	100	90	70	700.000.000	72	59.410.400	75	61.192.712	77	63.028.493	80	64.919.348	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					3.834.948.248		5.530.637.486		5.704.806.610		5.883.750.808		6.067.613.333	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.411.178.248		3.308.986.555		3.408.256.152		3.510.503.837		3.615.818.952	
Meningkatnya layanan urusuan penunjang kinerja perangkat daerah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)	100	100	100	3.411.178.248	100	3.308.986.555	100	3.408.256.152	100	3.510.503.837	100	3.615.818.952	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					98.770.000		274.411.417		290.893.760		307.420.572		323.993.190	
terpenuhinya rumah layak huni bagi korban bencana	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	9	10	20	98.770.000	40	274.411.417	60	290.893.760	80	307.420.572	100	323.993.190	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					200.000.000		180.459.090		185.872.862		191.449.048		197.192.520	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha (%)	50	7,24	13,25	200.000.000	33,11	180.459.090	52,98	185.872.862	72,85	191.449.048	100	197.192.520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					57.500.000		530.450.000		546.363.500		562.754.405		579.637.037	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Persentase rumah layak huni di kawasan kumuh perdesaan sesuai persyaratan teknis bangunan (%)	70	6,43	20	57.500.000	40	530.450.000	60	546.363.500	80	562.754.405	100	579.637.037	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					65.000.000		1.231.025.924		1.267.956.701		1.305.995.402		1.345.175.264	
Meningkatnya penyediaan PSU di Permukiman	Persentase penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan (%)	100	100	20	65.000.000	40	1.231.025.924	60	1.267.956.701	80	1.305.995.402	100	1.345.175.264	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					2.500.000		5.304.500		5.463.635		5.627.544		5.796.370	
Meningkatnya pelayanan sertikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	Persentase peningkatan pelayanan penerbitan sertifikasi registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman (%)	100	100	20	2.500.000	40	5.304.500	60	5.463.635	80	5.627.544	100	5.796.370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					9.454.379.920		12.006.636.935		12.124.507.381		12.050.414.062		12.434.597.879	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.684.399.920		8.047.494.065		8.314.431.765		8.552.682.258		8.880.132.116	
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan	94,79	100	100	4.924.754.326	100	4.721.213.365	100	4.862.849.765	100	5.008.735.258	100	5.158.997.316	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Masyarakat pada BPBD	Masyarakat pada BPBD (%)													Perlindungan Masyarakat
Meningkatnya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada Satpol PP	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (%)	100	100	100	3.759.645.594	100	3.326.280.700	100	3.451.582.000	100	3.543.947.000	100	3.721.134.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					282.000.000		802.698.000		801.266.000		836.486.500		790.711.700	
Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	282.000.000	100	802.698.000	100	801.266.000	100	836.486.500	100	790.711.700	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					403.950.000		2.807.620.000		2.497.620.000		2.322.620.000		2.447.620.000	
Menurunnya risiko dan dampak kerusakan akibat bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (%)	64,66	100	100	403.950.000	100	2.807.620.000	100	2.497.620.000	100	2.322.620.000	100	2.447.620.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (%)	50,44	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					84.030.000		348.824.870		511.189.616		338.625.304		316.134.063	
Meningkatnya kesiapsiagaan dan kapasitas aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat kebakaran dan non kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	95,59	100	100	84.030.000	100	348.824.870	100	511.189.616	100	338.625.304	100	316.134.063	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					5.763.728.843		4.319.555.567,021		4.449.142.233,321		4.582.616.501,423		4.720.094.995,776	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.177.528.843		2.264.043.087,99		2.572.229.786,5		2.639.657.556,07		2.989.085.207,66	
Terpenuhinya penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Sosial (%)	100	100	100	4.177.528.843	100	2.264.043.087,99	100	2.572.229.786,5	100	2.639.657.556,07	100	2.989.085.207,66	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					890.000.000		258.605.568,251		238.295.348,881		246.990.741,223		218.322.780,869	
Meningkatnya Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial (%)	0	50	52	890.000.000	68	258.605.568,251	78	238.295.348,881	89	246.990.741,223	100	218.322.780,869	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		10.957.863		10.097.260		10.465.709		9.250.965	
Meningkatnya Layanan Penanganan Warga Negera Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	0	100	100	0	100	10.957.863	100	10.097.260	100	10.465.709	100	9.250.965	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					341.200.000		1.154.958.766,68		1.030.593.726,37		1.033.314.372,18		882.542.088,767	
Meningkatnya rehabilitasi Sosial	Presentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Gelandang	100	100	100	341.200.000	100	1.154.958.766,68	100	1.030.593.726,37	100	1.033.314.372,18	100	882.542.088,767	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	/Pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti. (%)													
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					240.000.000		399.962.001		368.550.009		381.998.392		337.660.233	
Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penduduk Miskin yang Menjadi Peserta Jaminan Sosial Kesehatan (%)	0,01	40	45	240.000.000	50	399.962.001	55	368.550.009	60	381.998.392	65	337.660.233	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					105.000.000		212.765.175		212.547.335		252.746.882		267.815.445	
Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	100	100	100	105.000.000	100	212.765.175	100	212.547.335	100	252.746.882	100	267.815.445	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					10.000.000		18.263.105,1		16.828.767,57		17.442.848,95		15.418.275,48	
Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik (%)	100	100	100	10.000.000	100	18.263.105,1	100	16.828.767,57	100	17.442.848,95	100	15.418.275,48	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sosial
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					4.827.850.316		3.255.023.787		3.402.943.794		3.620.724.400		3.888.986.547	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.607.850.316		2.482.717.512		2.589.031.999		2.763.209.784		2.887.279.728	
tersedianya Program penunjang urusan pemerintah daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi (%)	100	100	100	3.607.850.316	100	2.482.717.512	100	2.589.031.999	100	2.763.209.784	100	2.887.279.728	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					70.000.000		0		0		0		61.463.662	
tersedianya perencanaan tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	0	0	100	70.000.000	100	0	100	0	100	0	100	61.463.662	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					715.000.000		487.898.546		512.293.473		537.908.147		564.803.555	
meningkatnya produktifitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya (%)	0	100	100	715.000.000	100	487.898.546	100	512.293.473	100	537.908.147	100	564.803.555	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					255.000.000		245.685.622		257.979.122		270.435.540		321.351.580	
meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri (%)	2,93	2,99	3,05	255.000.000	3,11	245.685.622	3,17	257.979.122	3,23	270.435.540	3,30	321.351.580	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					180.000.000		38.722.107		43.639.200		49.170.929		54.088.022	
Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak hak pekerja dan dialog sosial (Angka)	11,557	12,006	12,435	180.000.000	12,864	38.722.107	13,293	43.639.200	13,722	49.170.929	14,151	54.088.022	Dinas/Badan yang menangani Bidang Tenaga Kerja
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					7.147.442.102		6.355.737.390,002		6.335.824.939,033		6.470.004.179,72		6.482.700.487,994	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.058.296.912		2.649.195.948,74		2.619.530.528,4		2.645.211.553,59		2.645.211.553,59	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	95	97	97	3.058.296.912	98	2.649.195.948,74	98	2.619.530.528,4	99	2.645.211.553,59	99	2.645.211.553,59	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					1.167.923.370		2.348.372.199		2.322.067.827		2.344.832.625		2.344.832.625	
Meningkatnya Kualitas dan efektifitas Penyelenggaraan PUG dan Peran Perempuan dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	56,83	56,83	56,84	1.167.923.370	56,85	2.348.372.199	56,86	2.322.067.827	56,87	2.344.832.625	56,88	2.344.832.625	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	68,36	6.836	68,46		68,56		68,66		68,76		68,86		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					149.269.537		73.202.012		151.688.985		69.185.123		153.176.094	
Menurunnya kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO dan Pornografi	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan yang Komprehensif (%)	100	100	100	149.269.537	100	73.202.012	100	151.688.985	100	69.185.123	100	153.176.094	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					209.472.781		209.472.781		151.688.986		209.157.054		209.157.054	
Meningkatnya kualitas Keluarga dalam mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan Hak Anak sesuai Standarisasi (%)	100	100	100	209.472.781	100	209.472.781	100	151.688.986	100	209.157.054	100	209.157.054	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK					131.494.703		131.693.197		130.218.088		131.494.703		131.494.703	
Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan (%)	0	0	50	131.494.703	55	131.693.197	60	130.218.088	65	131.494.703	70	131.494.703	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					109.969.575		126.763.506,086		157.000.000		130.478.999,181		130.478.999,181	
Terjaminnnya Pemenuhan Hak Anak secara komprhensif	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (Indeks)	59,14	60,86	61,72	109.969.575	62,58	126.763.506,086	63,44	157.000.000	64,3	130.478.999,181	65,16	130.478.999,181	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					2.321.015.224		817.037.746,176		803.630.524,633		939.644.121,949		868.349.459,223	
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, Pornografi perkawinan anak dan perlakuan	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Indeks)	65,17	68,75	72,33	2.321.015.224	75,91	817.037.746,176	79,49	803.630.524,633	83,07	939.644.121,949	86,65	868.349.459,223	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
salah lainnya terhadap anak														
	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					4.359.524.958		3.215.048.686		3.311.500.146		3.410.845.149		3.513.170.504	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.564.524.958		3.186.139.161		3.281.723.336		3.380.175.036		3.481.580.287	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	3.564.524.958	100	3.186.139.161	100	3.281.723.336	100	3.380.175.036	100	3.481.580.287	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					5.000.000		1.060.900		1.092.727		1.125.508		1.159.274	
Tersedianya Jumlah Cadangan Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (Persentase)	0	100	100	5.000.000	100	1.060.900	100	1.092.727	100	1.125.508	100	1.159.274	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					355.000.000		7.426.300		7.649.089		7.878.561		8.114.918	
Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan (Skor)	78,4	78,55	78,7	355.000.000	78,85	7.426.300	79	7.649.089	79,15	7.878.561	79,3	8.114.918	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					240.000.000		17.239.625		17.756.813		18.289.518		18.838.203	
Penanganan Daerah Rawan Pangan yang di Tangani	Presentase daerah rawan pangan (%)	0	1,95	1,95	240.000.000	1,95	17.239.625	1,95	17.756.813	1,95	18.289.518	1,95	18.838.203	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					195.000.000		3.182.700		3.278.181		3.376.526		3.477.822	
Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan	Presentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%) (%)	0	12	12	195.000.000	12	3.182.700	20	3.278.181	20	3.376.526	24	3.477.822	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					10.000.000		39.147.210		40.321.624		41.531.274		42.777.213	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					5.000.000		32.569.630		33.546.718		34.553.120		35.589.714	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan (%)	100	100	20	5.000.000	40	32.569.630	60	33.546.718	80	34.553.120	100	35.589.714	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					2.500.000		3.925.330		4.043.089		4.164.382		4.289.314	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap tanah objek reforma agraria (TORA)	Persentase jumlah penerima tanah obyek Landreform (TOL) yang berasal dari tanah kelebihan maksimum (%)	50	21,5	19,84	2.500.000	39,86	3.925.330	59,52	4.043.089	79,37	4.164.382	100	4.289.314	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.10.09 - PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH					2.500.000		2.652.250		2.731.817		2.813.772		2.898.185	
Meningkatnya pelayanan izin membuka tanah	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan (%)	100	100	20	2.500.000	40	2.652.250	60	2.731.817	80	2.813.772	100	2.898.185	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanahan
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					6.472.369.560		6.890.557.467		7.145.774.190		7.407.147.416		7.624.861.840	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					3.812.069.560		3.914.000.342		4.031.420.352		4.152.362.963		4.276.933.852	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH KABUPATEN/KOTA														
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup (%)	90	99	99	3.812.069.560	99	3.914.000.342	99	4.031.420.352	99	4.152.362.963	99	4.276.933.852	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					0		50.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000	
Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun (%)	0	0	100	0	100	50.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					20.000.000		174.760.253		180.003.061		185.403.152		190.965.247	
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas air (Indeks)	56,67	74,6	74,8	20.000.000	75	174.760.253	75,2	180.003.061	75,4	185.403.152	75,41	190.965.247	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara (Indeks)	89,81	82,82	83,03		83,22		83,42		83,63		83,64		Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					20.000.000		109.879.534		113.175.920		116.571.198		120.068.334	
Indeks Tutupan Lahan	Persentase Ruang Terbuka Hijau (%)	0,0451	0,0451	0,0452	20.000.000	0,0453	109.879.534	0,0456	113.175.920	0,0457	116.571.198	0,0458	120.068.334	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					5.000.000		10.973.631		11.302.840		11.641.925		11.991.183	
Terlaksananya Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Pengawasan Penghasil Limbah B3 (%)	100	100	100	5.000.000	100	10.973.631	100	11.302.840	100	11.641.925	100	11.991.183	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					5.000.000		12.802.941		13.187.029		13.582.640		13.990.119	
Meningkatnya Tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (%)	45	45	52,38	5.000.000	54,54	12.802.941	56,52	13.187.029	58,33	13.582.640	60	13.990.119	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					10.000.000		11.457.720		11.801.451		12.155.495		12.520.160	
Meningkatnya Pemahaman Masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat (%)	15	15	10,53	10.000.000	15,79	11.457.720	21,05	11.801.451	26,32	12.155.495	26,32	12.520.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					2.500.000		2.652.250		2.731.817		2.813.772		2.898.185	
Persentase aduan yang tertangani	Persentase Aduan Yang Tertangani (%)	100	100	100	2.500.000	100	2.652.250	100	2.731.817	100	2.813.772	100	2.898.185	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					2.597.800.000		2.604.030.796		2.682.151.720		2.762.616.271		2.845.494.760	
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah (%)	13,59	14,54	15,54	2.597.800.000	16,62	2.604.030.796	17,77	2.682.151.720	19	2.762.616.271	20,32	2.845.494.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Lingkungan Hidup
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI					3.831.027.528		3.858.809.115		3.974.573.390		4.093.810.591		4.216.624.910	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL														
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.831.027.528		2.949.607.342		2.965.408.536		2.959.898.625		3.054.497.191	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (%)	100	100	100	3.831.027.528	100	2.949.607.342	100	2.965.408.536	100	2.959.898.625	100	3.054.497.191	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					0		350.918.245		383.425.124		420.098.415		418.520.900	
Meningkatnya kecepatan pelayanan dan peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur	Cakupan Pelayanan pendaftaran penduduk (%)	62	0	65,1	0	66,34	350.918.245	67,58	383.425.124	68,82	420.098.415	70,37	418.520.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					0		335.712.063		371.869.761		420.050.799		434.090.575	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil (%)	95	0	96.3	0	97	335.712.063	97.5	371.869.761	98	420.050.799	98.5	434.090.575	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					0		198.431.393		226.335.265		261.901.282		275.946.152	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan (%)	100	0	100	0	100	198.431.393	100	226.335.265	100	261.901.282	100	275.946.152	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					0		24.140.072		27.534.704		31.861.470		33.570.092	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	0	100	0	100	24.140.072	100	27.534.704	100	31.861.470	100	33.570.092	Dinas/Badan yang menangani Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					4.079.484.469		4.268.340.965		4.396.391.194		4.528.282.929		4.664.131.417	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.949.484.469		3.388.955.103		2.550.680.359		3.642.081.785		2.472.144.198	
Terlaksananya Urusan Pemerintah Daerah	PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA (%)	100	0	100	3.949.484.469	100	3.388.955.103	100	2.550.680.359	100	3.642.081.785	100	2.472.144.198	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					5.000.000		33.028.577		29.817.623		48.119.519		36.576.664	
Meningkatnya Efektivitas Kerjasama Desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	18,8	21,5	24,1	5.000.000	26,7	33.028.577	29,3	29.817.623	31,9	48.119.519	34,6	36.576.664	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					60.000.000		598.642.958		1.625.060.428		581.444.190		1.946.401.047	
Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	20	40	60	60.000.000	80	598.642.958	100	1.625.060.428	100	581.444.190	100	1.946.401.047	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					65.000.000		247.714.327		190.832.784		256.637.435		209.009.508	
Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang Terberdayakan (%)	13	25	50	65.000.000	75	247.714.327	100	190.832.784	100	256.637.435	100	209.009.508	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					17.822.859.123		19.672.259.144		20.406.553.772		21.402.683.618		20.664.036.849	
2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.627.199.123		5.068.109.144		5.169.728.572		5.298.938.918		3.602.387.449	
Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Nilai)	75,76	75,76	75,79	3.627.199.123	75,8	5.068.109.144	75,82	5.169.728.572	75,85	5.298.938.918	75,87	3.602.387.449	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					1.396.350.000		1.342.400.000		1.345.400.000		1.349.487.900		1.354.087.900	
Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk					1.396.350.000		1.342.400.000		1.345.400.000		1.349.487.900		1.354.087.900	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					10.115.710.000		10.852.330.000		11.382.005.200		12.144.836.800		12.998.141.500	
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Presentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang MKJP, dan Cakupan ketersediaan dan distrinbusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat (%)	24,7	25	25,2	10.115.710.000	25,5	10.852.330.000	25,9	11.382.005.200	30,1	12.144.836.800	30,3	12.998.141.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					2.683.600.000		2.409.420.000		2.509.420.000		2.609.420.000		2.709.420.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Presentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need),dan Ratio Akseptor KB (%)	5,4	5,4	5	2.683.600.000	4,8	2.409.420.000	4,6	2.509.420.000	4,5	2.609.420.000	4,3	2.709.420.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					6.097.216.728		5.632.474.665		5.797.328.904		5.971.248.771		6.150.386.234	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.958.008.476		4.723.792.190		4.865.505.955		5.011.471.134		5.161.815.268	
Meningkatnya Layanan Kinerja Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pada Dinas Perhubungan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (%)	100	100	100	4.958.008.476	100	4.723.792.190	100	4.865.505.955	100	5.011.471.134	100	5.161.815.268	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.139.208.252		908.682.475		931.822.949		959.777.637		988.570.966	
Meningkatnya aksesibiltas dan konektivitas	Persentase kelengkapanjalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal (%)	70	100	80	1.139.208.252	85	908.682.475	90	931.822.949	95	959.777.637	100	988.570.966	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perhubungan
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.356.369.510		7.892.965.718		8.129.754.689		8.624.856.749		8.624.856.749	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.396.719.510		4.600.084.179		4.738.086.704		5.026.636.184		5.026.636.184	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah pada kantor Dinas Komunikasi dan Informatika	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kominfo, Statistik dan Persandian (%)	94,33	100	100	4.396.719.510	100	4.600.084.179	100	4.738.086.704	100	5.026.636.184	100	5.026.636.184	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					1.097.650.000		1.273.080.000		1.311.272.400		1.391.128.889		1.391.128.889	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualias informasi publik pemerintah daerah (survey) (%)	50,41	70	75	1.097.650.000	75	1.273.080.000	75	1.311.272.400	75	1.391.128.889	75	1.391.128.889	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.862.000.000		2.019.801.539		2.080.395.585		2.207.091.676		2.207.091.676	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Indeks SPBE (Indeks)	2,68	70,59	1,25	1.862.000.000	1,5	2.019.801.539	1,75	2.080.395.585	2	2.207.091.676	2,25	2.207.091.676	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					4.687.771.911		5.925.179.407		6.664.434.789		7.406.367.833		8.151.058.868	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.289.761.911		2.940.580.267		3.028.797.675		3.119.661.606		3.213.251.454	
MENINGKATNYA CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (%)	100	100	100	3.289.761.911	100	2.940.580.267	100	3.028.797.675	100	3.119.661.606	100	3.213.251.454	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					200.000.000		600.000.000		700.000.000		800.000.000		900.000.000	
MENINGKATNYA PEMBINAAN & PENGAWASAN KOPERASI	Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (%)	7,50	7,78	9,44	200.000.000	11,39	600.000.000	13,61	700.000.000	15,56	800.000.000	17,50	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					261.510.000		350.000.000		400.000.000		450.000.000		500.000.000	
MENINGKATNYA KUALITAS SDM PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	8,33	0	8,33	261.510.000	8,33	350.000.000	8,33	400.000.000	8,33	450.000.000	8,33	500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					686.500.000		34.599.140		35.637.114		36.706.227		37.807.414	
MENINGKATNYA KAPASITAS USAHA MIKRO YANG TANGGUH DAN MANDIRI	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal (%)	10,49	10,49	10,51	686.500.000	10,53	34.599.140	10,55	35.637.114	10,57	36.706.227	10,59	37.807.414	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					250.000.000		2.000.000.000		2.500.000.000		3.000.000.000		3.500.000.000	
MENINGKATNYA DAYA SAING USAHA MIKRO	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan Dan Ekspor (%) (%)	0,02	0	0,02	250.000.000	0,02	2.000.000.000	0,02	2.500.000.000	0,02	3.000.000.000	0,02	3.500.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					4.035.841.035		6.656.000.000		6.358.000.000		7.285.000.000		7.239.000.000	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.160.841.035		3.696.000.000		3.633.000.000		4.425.000.000		4.244.000.000	
Meningkatnya kapasitas perangkat daerah dalam urusan pelayanan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan PTSP (%)	75,5357	100	100	3.160.841.035	100	3.696.000.000	100	3.633.000.000	100	4.425.000.000	100	4.244.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					150.000.000		995.000.000		685.000.000		745.000.000		805.000.000	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Pertumbuhan Investasi (%)	-54,34	3,31	3,33	150.000.000	3,37	995.000.000	3,43	685.000.000	3,51	745.000.000	3,61	805.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					120.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000		320.000.000	
meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	20	21	21,5	120.000.000	22	320.000.000	22,5	320.000.000	23	320.000.000	23,5	320.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					175.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000		600.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	3,55	3,56	3,57	175.000.000	3,57	600.000.000	3,58	600.000.000	3,58	600.000.000	3,59	600.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					200.000.000		845.000.000		895.000.000		945.000.000		995.000.000	
terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Nilai investasi (Rupiah)	823.924.050.957	851.220.050.957	879.590.591.443	200.000.000	909.258.537.489	845.000.000	940.472.716.736	895.000.000	973.510.834.055	945.000.000	1.008.683.067.056	995.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					230.000.000		200.000.000		225.000.000		250.000.000		275.000.000	
Meningkatnya Informasi Penanaman Modal	Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	92	93	93	230.000.000	94	200.000.000	94	225.000.000	95	250.000.000	95	275.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penanaman Modal
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					6.603.467.253		7.377.869.061		7.595.325.926		7.818.568.702		8.184.280.191	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.403.467.253		4.950.810.680		5.099.335.000		5.252.315.050		5.409.884.500	
Tersedianya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	5.403.467.253	100	4.950.810.680	100	5.099.335.000	100	5.252.315.050	100	5.409.884.500	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					25.000.000		298.791.631		314.517.506		330.243.382		482.485.151	
Meningkatnya Daya saing kepemudaan	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat (%)	0,67	0,67	0,77	25.000.000	0,87	298.791.631	0,97	314.517.506	1,07	330.243.382	1,17	482.485.151	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA					1.125.000.000		983.653.960		1.008.245.310		1.033.451.450		1.059.287.740	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
SAING KEOLAHRAGAAN														
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi (%)	100	100	100	1.125.000.000	100	983.653.960	100	1.008.245.310	100	1.033.451.450	100	1.059.287.740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					50.000.000		1.144.612.790		1.173.228.110		1.202.558.820		1.232.622.800	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (%)	0.41	0.42	0.43	50.000.000	0.44	1.144.612.790	0.45	1.173.228.110	0.47	1.202.558.820	0.48	1.232.622.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					18.085.115		63.654.000		65.563.620		67.530.528		69.556.444	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					18.085.115		63.654.000		65.563.620		67.530.528		69.556.444	
Meningkatnya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Indeks pembangunan statistik (IPS) (Indeks)	2,11	2,11	2,15	18.085.115	2,15	63.654.000	2,25	65.563.620	2,25	67.530.528	2,55	69.556.444	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					25.545.731		10.609.000		10.927.270		11.255.088		11.592.740	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					25.545.731		10.609.000		10.927.270		11.255.088		11.592.740	
Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)	65	20	20	25.545.731	15	10.609.000	18	10.927.270	20	11.255.088	22	11.592.740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Persandian
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					893.504.092		1.571.011.343		1.207.742.583		1.879.629.413		1.130.521.519	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					511.367.500		947.037.030		761.989.739		1.495.147.663		718.294.404	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	45	100	100	511.367.500	100	947.037.030	100	761.989.739	100	1.495.147.663	100	718.294.404	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					182.136.592		393.822.335		105.763.110		110.542.200		69.750.950	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	25	100	100	182.136.592	100	393.822.335	100	105.763.110	100	110.542.200	100	69.750.950	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					200.000.000		230.151.978		339.989.734		273.939.550		342.476.165	
Meningkatkan warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan (%)	0	0	0	200.000.000	50	230.151.978	50	339.989.734	50	273.939.550	50	342.476.165	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					4.251.861.571		3.832.527.185		3.969.003.002		4.043.973.092		4.167.542.286	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.939.861.571		3.761.027.185		3.865.503.002		3.870.473.092		3.994.042.286	
Terpenuhinya Layanan Penunjang Bidang Perpustakaan dan Kearsipan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan (%)	100	100	100	3.939.861.571	100	3.761.027.185	100	3.865.503.002	100	3.870.473.092	100	3.994.042.286	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					310.000.000		61.500.000		83.500.000		129.500.000		129.500.000	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Presentase pembinaan perpustakaan Daerah (%)	13,41	15	15,08	310.000.000	15,1	61.500.000	15,4	83.500.000	15,8	129.500.000	16	129.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					2.000.000		10.000.000		20.000.000		44.000.000		44.000.000	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki (Persentase)	0	13	13	2.000.000	13,61	10.000.000	14	20.000.000	15	44.000.000	15	44.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perpustakaan
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					47.200.000		50.000.000		30.000.000		75.000.000		75.000.000	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					47.200.000		50.000.000		30.000.000		75.000.000		75.000.000	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Pengelolaan Arsip daerah	Presentase Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (%)	53	53	53	47.200.000	58	50.000.000	60	30.000.000	62	75.000.000	64	75.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kearsipan
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					5.277.071.929		3.712.424.079		3.823.796.802		3.938.510.705		4.056.666.026	
3.25.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.866.359.009		3.540.457.378		3.646.671.099		3.756.071.232		3.868.753.369	
Meningkatnya Kapasitas Perangkat Daerah Dalam Urusan Pelayanan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan (%)	100	100	100	3.866.359.009	100	3.540.457.378	100	3.646.671.099	100	3.756.071.232	100	3.868.753.369	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP					833.612.190		62.643.373		64.522.675		66.458.355		68.452.106	
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	24.628,14	24.751,28	24.875,04	833.612.190	24.999,41	62.643.373	25.124,41	64.522.675	25.250,03	66.458.355	25.376,28	68.452.106	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					370.350.000		21.218.000		21.854.540		22.510.176		23.185.481	
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	6.983	7.017,92	7.053	370.350.000	7.088,27	21.218.000	7.123,71	21.854.540	7.159,33	22.510.176	7.195,13	23.185.481	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN					20.000.000		10.609.000		10.927.270		11.255.088		11.592.740	
Meningkatnya kelestarian laut dan keanekaragaman hayati	Persentase laporan kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti (%)	100	100	100	20.000.000	100	10.609.000	100	10.927.270	100	11.255.088	100	11.592.740	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					186.750.730		77.496.328		79.821.218		82.215.854		84.682.330	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Konsumsi Ikan oleh Masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg)	62,5	63	65	186.750.730	67	77.496.328	69	79.821.218	71	82.215.854	73	84.682.330	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kelautan Dan Perikanan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					715.000.000		1.079.455.400		1.104.283.000		1.129.681.700		1.155.664.600	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					165.000.000		564.672.900		577.660.400		590.946.600		604.538.400	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (%)		1.50	1.85	165.000.000	2.18	564.672.900	2.49	577.660.400	2.78	590.946.600	3.04	604.538.400	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					0		166.520.500		170.350.500		174.268.600		178.276.800	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (%)	38	54	62	0	69	166.520.500	77	170.350.500	100	174.268.600	100	178.276.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					550.000.000		151.537.000		155.022.400		158.588.000		162.235.600	
Meningkatnya Kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual (%)	100	100	100	550.000.000	100	151.537.000	100	155.022.400	100	158.588.000	100	162.235.600	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					0		196.725.000		201.249.700		205.878.500		210.613.800	
Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan Tervalidasi (%)	100	100	100	0	100	196.725.000	100	201.249.700	100	205.878.500	100	210.613.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					33.672.225.137		35.754.575.206,95		36.716.066.963,06		37.706.403.471,08		38.726.450.075,29	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					25.878.331.137		25.563.062.576,59		26.329.954.453,88		27.119.853.087,07		27.933.448.680,32	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian pada Dinas Pertanian	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (%)	100	100	100	19.506.038.596	100	19.374.722.700	100	19.955.964.381	100	20.554.643.312	100	21.171.282.612	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Terpenuhinya layanan penunjang urusan pemerintahan bidang pertanian pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian (%)	100	100	100	6.372.292.541	100	6.188.339.876,59	100	6.373.990.072,88	100	6.565.209.775,07	100	6.762.166.068,32	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					3.235.500.000		6.255.651.655,36		6.443.321.205,18		6.636.620.841,33		6.835.719.466,89	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Presentase Terciptanya Promosi, Informasi Hasil Pertanian dan Kerjasama Global (%)	0	0	5	3.028.500.000	7	6.219.707.027,36	9	6.406.298.238,18	11	6.598.487.185,33	11	6.796.441.800,89	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Cabai Rawit (Ton)	5,5	5,54	5,58		5,62		5,66		5,7		5,7		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Jagung (Ton)	4,95	5,25	5,55		5,85		6,15		6,45		6,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Kelapa (Ton)	1,43	1,44	1,444		1,472		1,486		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Padi (Ton)	5,14	5,19	5,24		5,29		5,34		5,5		5,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian di dinas peternakan					207.000.000		35.944.628		37.022.967		38.133.656		39.277.666	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Pertumbuhan Populasi Ternak Rumunansia (%)	2,5	2,5	2,5		2,5		2,5		2,5		2,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					375.000.000		3.125.000.000		3.125.000.000		3.125.000.000		3.125.000.000	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Produktivitas Cabai Rawit (Ton)	5,5	0	5,58	375.000.000	5,62	2.775.000.000	5,66	2.775.000.000	5,7	2.775.000.000	5,7	2.775.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Jagung (Ton)	4,95	0	5,55		5,85		6,15		6,45		6,45		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Produktivitas Kelapa (Ton)	1,43	0	1,444		1,472		1,486		1,5		1,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Produktivitas Padi (Ton)	5,14	0	5,24		5,29		5,34		5,5		5,5		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian di dinas peternakan	Cakupan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (PAH ASUH) (%)	100	100	100	0	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	100	350.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Cakupan PAH ASUH (%)	100	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					212.500.000		24.400.700		25.132.721		25.886.702,63		26.663.303,71	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner					212.500.000		24.400.700		25.132.721		25.886.702,63		26.663.303,71	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	5%	5%	5%		5%		5%		5%		5%		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					422.164.000		583.828.375		583.947.726		584.070.658		584.197.277	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di dinas Pertanian	Persentase Lahan yang terfasilitasi pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian (%)	0	100	100	369.664.000	100	579.850.000	100	579.850.000	100	579.850.000	100	579.850.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian di dinas peternakan					52.500.000		3.978.375		4.097.726		4.220.658		4.347.277	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (%)	100	0	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					3.548.730.000		202.631.900		208.710.857		214.972.182,05		221.421.347,37	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meniingkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian / Persentase Kenaikan Kelas kelompok Tani (%)	100	100	100	3.453.730.000	100	197.327.400	100	203.247.222	100	209.344.638	100	215.624.977	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian di dinas peternakan					95.000.000		5.304.500		5.463.635		5.627.544,05		5.796.370,37	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
	Cakupan lokasi penyuluhan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pertanian
3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN					60.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		25.000.000	
3.28.04 - PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA					60.000.000		25.000.000		30.000.000		30.000.000		25.000.000	
Terpeliharanya Keanekaragaman Hayati	Kawasan Tahura yang terkelola (Kawasan)	0	0	1	60.000.000	1	25.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	25.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kehutanan
3.29 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL					0		2.121.800		2.185.454		2.251.017		2.318.548	
3.29.05 - PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN					0		2.121.800		2.185.454		2.251.017		2.318.548	
Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Cakupan Potensi Panas Bumi yang terkelola (%)	0	50	50	0	50	2.121.800	50	2.185.454	50	2.251.017	50	2.318.548	Dinas/Badan yang menangani Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					6.335.355.560		7.747.045.232		8.095.018.313		8.457.875.886		8.813.785.555	
3.30.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.070.355.560		5.565.888.132		5.844.182.500		6.136.391.600		6.443.211.200	
Terpenuhinya Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang	100	100	100	5.070.355.560	100	5.565.888.132	100	5.844.182.500	100	6.136.391.600	100	6.443.211.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Bidang Perindustrian dan Perdagangan	Perindustrian dan Perdagangan (%)													
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					0		6.365.400		6.556.362		6.753.052		6.955.644	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Perusahaan dan Gudang Terdaftar dan Memiliki Izin (%)	15,51	15,82	16,14	0	16,46	6.365.400	16,78	6.556.362	17,11	6.753.052	17,45	6.955.644	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					0		1.496.654.500		1.544.554.135		1.593.890.759		1.644.707.482	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	9,33	9,42	9,51	0	9,61	1.496.654.500	9,7	1.544.554.135	9,8	1.593.890.759	9,89	1.644.707.482	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					1.250.000.000		533.632.700		549.641.681		566.130.931		583.114.859	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Indeks Harga Implisit Sektor Perdagangan (%)	156,62	159,8	161,39	1.250.000.000	162,98	533.632.700	164,57	549.641.681	166,16	566.130.931	167,75	583.114.859	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					0		39.200.000		44.620.000		49.082.000		30.000.000	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	7.999.063	8.159.044	8.160.675	0	8.323.888	39.200.000	8.490.365	44.620.000	8.660.172	49.082.000	8.833.375	30.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					15.000.000		105.304.500		105.463.635		105.627.544		105.796.370	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (%)	54,4	55	56	15.000.000	57	105.304.500	58	105.463.635	59	105.627.544	60	105.796.370	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					250.000.000		150.553.400		157.847.672		165.499.596		173.527.014	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					250.000.000		138.883.500		145.827.675		153.119.000		160.775.000	
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB (Persentase)	4,58	4,67	4,76	250.000.000	4,85	138.883.500	4,95	145.827.675	5,05	153.119.000	5,15	160.775.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					0		3.182.700		3.278.181		3.376.526		3.477.822	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah (%)	7,56	7,71	7,87	0	8,02	3.182.700	8,18	3.278.181	8,33	3.376.526	8,49	3.477.822	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					0		8.487.200		8.741.816		9.004.070		9.274.192	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINAS (%)	2,15	2,19	2,44	0	2,48	8.487.200	2,53	8.741.816	2,62	9.004.070	2,66	9.274.192	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI					130.000.000		592.093.625		688.929.556		655.838.534		851.555.461	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		142.718.625		199.854.556		157.347.284		265.214.648	
meningkatnya pelaksanaan transmigrasi	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan (Persentase)	0	100	100	0	100	142.718.625	100	199.854.556	100	157.347.284	100	265.214.648	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI					0		251.500.000		259.075.000		256.991.250		285.840.813	
meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang (%)	100	100	100	0	100	251.500.000	100	259.075.000	100	256.991.250	100	285.840.813	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI					130.000.000		197.875.000		230.000.000		241.500.000		300.500.000	
meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi	persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan (%)	100	100	100	130.000.000	100	197.875.000	100	230.000.000	100	241.500.000	100	300.500.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Transmigrasi
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					40.606.427.476		45.602.066.340		46.970.128.329		48.379.232.180		49.830.609.145	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					36.128.182.281,2		39.805.191.463		40.511.275.206		42.211.890.494		43.467.789.283	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum (%)	100	100	100	36.128.182.281,2	100	39.805.191.463	100	40.511.275.206	100	42.211.890.494	100	43.467.789.283	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					3.489.027.213,91		4.402.412.509		4.840.877.871		4.667.610.193		4.864.859.181	
meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan otonomi daerah serta kebijakan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Kerja Sama Daerah (Persentase)	100	100	30	3.489.027.213,91	30	4.402.412.509	30	4.840.877.871	30	4.667.610.193	30	4.864.859.181	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	100	100	35		35		35		35		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	100	100	35		35		35		35		35		Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					989.217.980,89		1.394.462.368		1.617.975.252		1.499.731.493		1.497.960.681	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	100	100	100	989.217.980,89	100	1.394.462.368	100	1.617.975.252	100	1.499.731.493	100	1.497.960.681	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat Daerah
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					39.538.203.517		39.794.110.852		40.987.934.178		42.217.572.203		43.484.099.369	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					24.437.035.332		21.237.753.498		21.556.816.942		22.438.101.534		23.009.951.942	
Persentase layanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD (%)	100	100	100	24.437.035.332	100	21.237.753.498	100	21.556.816.942	100	22.438.101.534	100	23.009.951.942	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					15.101.168.185		18.556.357.354		19.431.117.236		19.779.470.669		20.474.147.427	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100	15.101.168.185	100	18.556.357.354	100	19.431.117.236	100	19.779.470.669	100	20.474.147.427	Dinas/Badan yang menangani Bidang Sekretariat DPRD
5.01 - PERENCANAAN					7.652.822.562		7.992.798.000		8.417.093.400		8.974.683.850		9.108.870.000	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.992.835.191		5.855.780.000		6.196.980.000		6.660.380.000		6.779.980.000	
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (%)	100	100	100	5.992.835.191	100	5.855.780.000	100	6.196.980.000	100	6.660.380.000	100	6.779.980.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					514.556.000		927.563.000		963.006.400		1.103.406.850		1.058.295.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	100	100	100	514.556.000	100	927.563.000	100	963.006.400	100	1.103.406.850	100	1.058.295.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					1.145.431.371		1.209.455.000		1.257.107.000		1.210.897.000		1.270.595.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	1.145.431.371	100	1.209.455.000	100	1.257.107.000	100	1.210.897.000	100	1.270.595.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)													
5.02 - KEUANGAN					303.463.529.450		332.868.351.534		342.854.402.080		353.140.034.143		363.734.235.168	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					32.845.743.476		44.739.413.796		52.951.783.060		62.610.541.043		75.353.500.256	
Meningkatnya Kualitas Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	100	26.249.579.400	100	39.107.275.971	100	47.377.187.608	100	56.825.367.072	100	69.412.294.224	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota					6.596.164.076		5.632.137.825		5.574.595.452		5.785.173.971		5.941.206.032	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					268.357.116.586		282.761.779.335		283.904.608.782		284.200.679.117		281.575.691.688	
Meningkatnya Tata Kelola Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	Persentase Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (%)	100	100	100	268.357.116.586	100	282.761.779.335	100	283.904.608.782	100	284.200.679.117	100	281.575.691.688	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					1.398.779.388		2.967.036.603		3.299.378.276		3.592.563.717		3.969.182.292	
Meningkatnya Tata Kelola Aset Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	100	100	100	1.398.779.388	100	2.967.036.603	100	3.299.378.276	100	3.592.563.717	100	3.969.182.292	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					861.890.000		2.400.121.800		2.698.631.962		2.736.250.266		2.835.860.932	
Tercapainya realisasi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan target yang telah ditetapkan	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD (%)	75,49	76,02	76,44	861.890.000	76,86	2.400.121.800	77,27	2.698.631.962	77,69	2.736.250.266	78,11	2.835.860.932	Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan
	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah yang telah	65,17	67,67	68,19		68,71		69,23		69,75		70,27		Dinas/Badan yang menangani Bidang Keuangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	ditetapkan dalam APBD (%)													
5.03 - KEPEGAWAIAN					17.054.237.276		11.296.526.960		11.702.904.662		12.122.321.612		12.552.366.092	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.504.237.276		10.788.779.000		11.182.000.000		11.570.142.000		11.985.612.000	
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (%)	100	100	100	16.504.237.276	100	10.788.779.000	100	11.182.000.000	100	11.570.142.000	100	11.985.612.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					550.000.000		507.747.960		520.904.662		552.179.612		566.754.092	
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik (%)	51,43	52	55,06	550.000.000	53,55	507.747.960	52,05	520.904.662	50,03	552.179.612	50,16	566.754.092	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	51,43	0	55,06		53,55		52,06		50,03		50,16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepegawaian
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					50.000.000		1.069.287.344		1.053.384.710		1.036.156.054		1.020.365.819	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					50.000.000		1.069.287.344		1.053.384.710		1.036.156.054		1.020.365.819	
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional (%)	74,30	65,35	56,10	50.000.000	57,98	1.069.287.344	59,84	1.053.384.710	62,37	1.036.156.054	64,59	1.020.365.819	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pendidikan Dan Pelatihan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					325.000.000		500.491.000		537.350.100		574.912.900		612.684.000	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					255.000.000		340.333.900		362.398.900		385.250.900		410.355.800	
Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dijadikan landasan kebijakan pembangunan daerah (%)	50	53,33	55,56	255.000.000	57,14	340.333.900	58,33	362.398.900	59,26	385.250.900	60	410.355.800	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					70.000.000		160.157.100		174.951.200		189.662.000		202.328.200	
Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah Dalam Pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	30	30	35	70.000.000	40	160.157.100	45	174.951.200	50	189.662.000	55	202.328.200	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					19.633.210.156		19.301.459.400		19.880.503.182		20.476.918.278		21.091.225.826	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					14.743.083.051		13.387.877.788		14.075.387.767		14.716.379.897		15.470.073.889	
Terselenggaranya dukungan administratif, keuangan, dan operasional yang efektif dan efisien	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pengawasan (%)	100	100	100	14.743.083.051	100	13.387.877.788	100	14.075.387.767	100	14.716.379.897	100	15.470.073.889	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					3.500.413.773		4.654.256.335		4.539.115.630		4.438.679.552		4.343.562.022	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan sesuai PKPT (%)	100	100	100	3.500.413.773	100	4.654.256.335	100	4.539.115.630	100	4.438.679.552	100	4.343.562.022	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					1.389.713.332		1.259.325.277		1.265.999.785		1.321.858.829		1.277.589.915	
Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi	Persentase Pendampingan OPD dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi secara ekonomis, efektif dan efisien (%)	67	100	100	1.389.713.332	100	1.259.325.277	100	1.265.999.785	100	1.321.858.829	100	1.277.589.915	Dinas/Badan yang menangani Bidang Inspektorat Daerah
7.01 - KECAMATAN					53.722.281.252		57.036.916.380		60.936.487.220		63.285.906.560		65.883.696.870	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					50.027.481.252		52.679.416.380		56.275.187.220		58.404.206.560		60.855.696.870	
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	6.350.652.729	100	5.933.610.600	100	6.230.291.130	100	6.541.805.690	100	6.868.895.970	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Kewilayahan Kecamatan Limboto														
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Mootilango	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.008.720.961	100	1.825.068.010	100	1.916.321.410	100	2.012.137.480	100	2.112.744.350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Telaga	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	2.573.243.849	100	2.774.468.530	100	2.913.191.960	100	3.058.851.560	100	3.211.794.130	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Batudaa	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.456.147.194	100	2.324.143.410	100	2.440.350.580	100	2.562.368.100	100	2.690.486.510	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Tibawa	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.718.816.304	100	2.739.496.910	100	2.876.471.750	100	3.020.295.340	100	3.171.310.110	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Batudaa Pantai	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.422.465.802	100	2.232.148.680	100	2.343.756.120	100	2.460.943.920	100	2.583.991.120	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Boliyohuto	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	1.852.115.115	100	1.700.806.690	100	1.785.847.030	100	1.875.139.380	100	1.968.896.350	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Telaga Biru	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.778.710.308	100	2.529.416.650	100	2.655.887.480	100	2.788.681.850	100	2.928.115.940	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bongomeme	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	2.625.990.163	100	2.412.401.790	100	2.533.021.880	100	2.659.672.980	100	2.792.656.630	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Tolangohula	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	2.160.995.552	100	2.268.208.010	100	2.381.618.410	100	2.500.699.330	100	2.625.734.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Pulubala	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.088.879.109	100	2.013.048.120	100	2.113.700.530	100	2.219.385.560	100	2.330.354.830	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Limboto Barat	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.129.176.590	100	2.083.215.200	100	2.187.375.960	100	2.296.744.750	100	2.411.581.990	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Tilango	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.400.536.568	100	2.247.366.210	100	2.359.734.530	100	2.477.721.250	100	2.601.607.310	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Tabongo	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.078.731.056	100	2.066.480.440	100	2.169.804.460	100	2.278.294.680	100	2.392.209.420	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Biluhu	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	1.853.316.882	100	1.780.632.900	100	1.869.664.550	100	1.963.147.780	100	2.061.305.160	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Kayubulan	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	242.264.600	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Asparaga	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	1.770.206.865	100	1.914.007.110	100	2.009.707.470	100	2.110.192.840	100	2.215.702.480	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Talaga Jaya	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	2.547.130.151	100	2.374.188.790	100	2.492.898.230	100	2.617.543.140	100	2.748.420.300	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Bilato	Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100	100	100	1.906.402.567	100	1.801.728.070	100	1.891.814.470	100	1.986.405.190	100	2.085.725.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Kayumerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100%	100%	100%	238.600.000	100%	550.000.000	100%	646.200.000	100%	629.600.000	100%	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kecamatan Dungaliyo	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	2.019.391.225	100	1.958.980.260	100	2.056.929.270	100	2.159.775.740	100	2.267.764.520	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Hunggaluwa	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100%	100%	100%	279.560.000	100%	550.000.000	100%	646.200.000	100%	629.600.000	100%	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Bolihuangga	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	231.313.160	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Hepuhulawa	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	218.880.000	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Hutuo	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100%	100%	100%	264.680.000	100%	550.000.000	100%	646.200.000	100%	629.600.000	100%	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Dutulanaa	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	210.460.000	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Tenilo	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	235.820.817	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Biyonga	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	225.673.880	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Bongohulawa	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	222.800.000	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya layanan penunjang unsur kewilayahan kelurahan bulota	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	239.100.000	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Malahu	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100%	100%	100%	215.700.000	100%	550.000.000	100%	646.200.000	100%	629.600.000	100%	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Tilihuwa	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100	100	100	238.199.805	100	550.000.000	100	646.200.000	100	629.600.000	100	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Kewilayahan Kelurahan Polohungo	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100%	100%	100%	222.800.000	100%	550.000.000	100%	646.200.000	100%	629.600.000	100%	627.600.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					76.600.000		522.500.000		570.000.000		636.500.000		665.000.000	
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Mootilango	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Telaga	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Batudaa	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tibawa	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	8.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Batudaa Pantai	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Boliyohuto	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Limboto	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	22.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Telaga Biru	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	3.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Bongomeme	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tolangohula	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	2.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Pulubala	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Limboto Barat	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	6.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tilango	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Tabongo	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Biluhu	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	5.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Asparaga	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	6.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Talaga Jaya	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.600.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Bilato	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terselenggaranya Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Kecamatan Dungaliyo	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	27.500.000	100	30.000.000	100	33.500.000	100	35.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					3.511.600.000		3.550.000.000		3.755.000.000		3.869.000.000		3.945.000.000	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Limboto	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	38.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Mootilango	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	23.500.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Telaga	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	61.000.000	100	36.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Batudaa	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	40.500.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tibawa	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	57.000.000	100	36.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Batudaa Pantai	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	49.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Boliyohuto	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	15.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Telaga Biru	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	40.900.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bongomeme	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	45.500.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tolangohula	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	51.000.000	100	134.000.000	100	145.000.000	100	151.000.000	100	155.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Pulubala	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	19.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Limboto Barat	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	25.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tilango	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	40.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Tabongo	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	43.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Biluhu	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	35.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayubulan	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Asparaga	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	39.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Talaga Jaya	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	27.100.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Bilato	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	17.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kayumerah	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan Dungaliyo	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan (%)	100	100	100	40.000.000	100	34.000.000	100	45.000.000	100	51.000.000	100	55.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Hunggaluwa	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bolihuangga	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Hepuhulawa	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Hutuo	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kewilayahan (%)	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Dutulanaa	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tenilo	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Masyarakat di Kelurahan Biyonga	Masyarakat Kelurahan (%)													
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bongohulawa	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulota	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Malahu	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100%	100%	100%	205.100.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tilihuwa	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100	100	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Polohungo	Persentase Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (%)	100%	100%	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	100%	200.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					48.900.000		142.500.000		165.300.000		176.700.000		190.000.000	
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Limboto	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	5.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Mootilango	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Telaga	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Batudaa	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Tibawa	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	5.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Batudaa Pantai	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Boliyohuto	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Telaga Biru	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	3.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Bongomeme	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Tolangohula	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	2.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Pulubala	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Limboto Barat	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	2.500.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Tilango	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	2.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Ketertiban di Kecamatan Tabongo														
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Biluhu	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	5.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Asparaga	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	3.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Talaga Jaya	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	2.400.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Bilato	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan Dungaliyo	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana (%)	100	100	100	4.000.000	100	7.500.000	100	8.700.000	100	9.300.000	100	10.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					57.700.000		142.500.000		171.000.000		199.500.000		228.000.000	
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Mootilango	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Limboto	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	6.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Telaga	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	4.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pemerintahan Desa di Kecamatan Batudaa														
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tibawa	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	5.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Batudaa Pantai	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Boliyohuto	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Telaga Biru	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	3.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa di Kecamatan Bongomeme	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tolangohula	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	2.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Pulubala	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Limboto Barat	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	3.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tilango	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	6.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Tabongo	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	4.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Biluhu	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	7.500.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Asparaga	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	3.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Talaga Jaya	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	3.200.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Bilato	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	1.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
Terlaksananya Pembinaan dan Pengwasan Pemerintahan Desa di Kecamatan Dungaliyo	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi (%)	100	100	100	4.000.000	100	7.500.000	100	9.000.000	100	10.500.000	100	12.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kecamatan
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					6.401.195.169		7.677.763.025		26.392.837.600		35.667.842.294		9.211.777.025	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.096.622.927		3.815.723.025		3.920.655.400		4.028.473.430		4.139.256.450	
Terpenuhinya Layanan Penunjang Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik	Cakupan Layanan Penunjang Unsur Pemerintahan Umum Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (%)	90	95	97	4.096.622.927	100	3.815.723.025	100	3.920.655.400	100	4.028.473.430	100	4.139.256.450	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					545.000.000		907.200.000		1.054.064.000		1.117.670.400		1.289.790.848	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat akan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	26	67	70	545.000.000	78	907.200.000	89	1.054.064.000	100	1.117.670.400	100	1.289.790.848	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					884.572.242		1.252.160.000		19.507.968.000		28.384.521.600		1.392.381.760	
Meningkatnya Etika dan Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	25	30	40	884.572.242	45	1.252.160.000	60	19.507.968.000	70	28.384.521.600	85	1.392.381.760	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					20.000.000		98.560.000		109.536.000		120.489.000		132.538.000	
Meningkatnya Ketertiban Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	52	60	65	20.000.000	70	98.560.000	80	109.536.000	90	120.489.000	100	132.538.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					25.000.000		217.560.000		247.667.000		277.387.000		309.793.000	
Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	100	100	100	25.000.000	100	217.560.000	100	247.667.000	100	277.387.000	100	309.793.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					830.000.000		1.386.560.000		1.552.947.200		1.739.300.864		1.948.016.967	
Meningkatnya Penanganan Konflik Sosial yang Diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	75	80	82	830.000.000	85	1.386.560.000	90	1.552.947.200	95	1.739.300.864	100	1.948.016.967	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik
TOTAL KESELURUHAN					1.506.131.905.541		1.581.192.847.323,973		1.649.907.916.256,414		1.710.945.623.852,223		1.733.868.568.980,06	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sebagai dasar pengukuran kinerja pembangunan Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 2025–2029, ditetapkan sejumlah target indikator kinerja pembangunan daerah. Penetapan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang terukur terhadap tingkat keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah. Indikator-indikator tersebut terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merepresentasikan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah, serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang digunakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

4.2.1. Indikator Kinerja Utama

Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah secara bertahap akan didukung oleh kontribusi IKU masing-masing Perangkat Daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Perangkat Daerah yang memiliki IKU dengan keterkaitan langsung terhadap IKU Daerah merupakan institusi yang memiliki tugas dan fungsi strategis serta peran dominan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan misi RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029. Sebagai instrumen untuk menilai kinerja terhadap sasaran strategis dalam dokumen RPJMD tersebut, IKU Daerah dirinci lebih lanjut dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73	76	80	83	85	
2.	Indeks Pembangunan infrastruktur	Indeks	0,88	0,89	0,9	0,91	0,92	
3.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	77,19	77,37	77,54	77,71	77,71	
4.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,14	72,73	73,32	73,91	74,5	
5.	Rasio Kewirausahaan	Persentase	3	3,03	3,06	3,09	3,12	
6.	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,82	3,99	4,16	4,33	4,5	
7.	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	74,45	75,32	76,19	77,06	77,93	
8.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,31	8,5	8,68	8,87	9,05	
9.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,9	4,95	5	5,04	5,1	
10.	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	53,47	53,8	54,13	54,46	54,79	
11.	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	68,92	69,01	69,23	69,55	69,87	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					KETERANGAN
			2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*
12.	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98	98	98	98	98	
13.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	24,2	20,9	17,6	15,8	14,2	
14.	Harapan lama sekolah	Tahun	13,26	13,28	13,3	13,32	13,34	
15.	Indeks Aksesibilitas Kawasan	Indeks	80,08	82,14	84,21	86,28	88,35	
16.	Cakupan akses layanan air minum dan sanitasi	%	93	94	95	96	96	
17.	Kontribusi Usaha Mikro terhadap PDRB	%	15,31	15,36	15,41	15,46	15,5	
18.	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,71	0,72	0,74	0,75	0,76	
19.	Persentase Kinerja Pengelolaan Sampah	%	15,54	16,62	17,77	19	20,32	
20.	Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik		81,57	83,07	84,57	86,07	87,57	
21.	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51.01-53.00	53.01-55.00	55.01-57.00	57.01-59.00	59.01-61.00	
22.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,01	86,07	88,09	90,07	91,05	
23.	Nilai AKIP		B	BB	BB	BB	BB	

4.2.2. Indikator Kinerja Daerah

Dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah, diperlukan suatu ukuran yang objektif dan terstruktur, yaitu melalui penetapan indikator kinerja utama (IKU) untuk setiap program pembangunan daerah. IKU Daerah berfungsi sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Penetapan indikator tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain memiliki keterkaitan yang erat dengan pencapaian sasaran pembangunan, mampu mencerminkan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program, fokus pada hal-hal yang bersifat strategis dan menjadi prioritas pembangunan, serta relevan dengan kebutuhan pertanggungjawaban pemerintah daerah atas kinerja pembangunan yang dilaksanakan.

Adapun indikator kinerja utama program pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo untuk periode 2025–2029 disusun sebagai target capaian yang mencerminkan arah dan prioritas pembangunan daerah. Penetapan indikator ini tidak dilakukan secara terpisah dari kondisi sebelumnya, melainkan dengan mempertimbangkan capaian indikator pada periode tahun-tahun sebelumnya, sehingga

mampu menunjukkan keberlanjutan dan konsistensi pembangunan yang direncanakan. IKU Daerah ini nantinya menjadi dasar dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (LKPJ, LPPD, SAKIP). Seluruh indikator tersebut dirangkum dan disajikan secara sistematis dalam Tabel 4.3 pada dokumen RPJMD. Indikator ini sekaligus menjadi dasar dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah ke depan, serta menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra, Renja, dan evaluasi kinerja pembangunan tahunan.

Tabel 4.3 Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**									
1	Rasio Kewirausahaan	Persentase	2,94	2,97	3	3,03	3,06	3,09	3,12	
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	4,7	4,86	4,9	4,95	5	5,04	5,1	
3	Indeks Inovasi Daerah	Angka	49,18	49.20-51.00	51.01-53.00	53.01-55.00	55.01-57.00	57.01-59.00	59.01-61.00	
4	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	(%)	0,33	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	
5	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	5,511.59	5,666.05	5,895.00	6,123.94	6,352.89	6,581.84	6,810.79	
6	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,96	1.96 - 2.01	1.96 - 2.01	1.96 - 2.01	1.96 - 2.01	1.96 - 2.01	1.96 - 2.01	
7	Indeks Infrastruktur	Angka	0,86	0,88	0,91	0,93	0,95	0,98	1	
8	Tingkat Inflasi	(%)	-0.53%	2 - 4	2% - 4%	2% - 4%	2% - 4%	2% - 4%	2% - 4%	
9	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,47	71,89	73,35	74,81	76,27	77,73	79,13	
10	Angka Ketergantungan	%	55,88	54,58	53,28	51,98	50,68	49,38	48,08	
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak		72	74,83	74,94	75,06	75,17	75,28	75,4	
12	Persentase Desa Mandiri	%	30,89	46,6	51,83	57,07	59,69	62,03	64,92	
13	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	14,616,954.15	23,132,771.93	23,398,691.26	23,664,610.59	23,930,529.92	24,196,449.25	24,462,368.58	
14	Angka Konsumsi Ikan	Kg	62,5	63	65	67	69	71	73	
II	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	69,44	77,02	77,19	77,37	77,54	77,71	77,71	
2	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,6	0,7	0,71	0,72	0,74	0,75	0,76	
3	Rumah tangga dengan akses Sanitasi Aman	%	1,97	2,3	6	7	8	10	11	
4	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	%	8,369,500.00	9,039,060.00	9,762,184.80	10,543,159.58	11,386,612.35	12,297,541.34	13,281,344.65	
5	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	0,35	0,36	0,4	0,44	0,47	0,5	0,54	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
6	Indeks Risiko Bencana	Indeks	88,8	120,86	118,93	117	115,07	113,14	111,21	
7	Rasio Penduduk	%	101,49	101,17	101,12	101,06	101	100,95	100,89	
8	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum Aman	%	26,13	26,55	27,17	28,01	29,06	30,93	33,01	
9	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	194	197	200	203	206	208	211	
10	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	18,12	16,58	15,04	13,5	11,96	10,42	8,88	
11	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	79,5	79,75	80	80,25	80,5	80,75	81	
12	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,31	1,004	0,99	0,976	0,958	0,952	0,932	
III	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**									
1	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70,96	71,55	72,14	72,73	73,32	73,91	74,5	
2	Usia Harapan Hidup (UHH)	(tahun)	68,23	68,75	68,92	69,01	69,23	69,55	69,87	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	(%)	72,71	73,58	74,45	75,32	76,19	77,06	77,93	
4	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,13	8,31	8,5	8,68	8,87	9,05	
5	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	(%)	52,48	53,14	53,47	53,8	54,13	54,46	54,79	
6	Harapan lama sekolah	Tahun	13,22	13,24	13,26	13,28	13,3	13,32	13,34	
7	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	28,3	27,5	24,2	20,9	17,6	15,8	14,2	
8	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,95	8,13	8,31	8,5	8,68	8,87	9,05	
9	Indeks pembangunan literasi masyarakat	Indeks	59,91	58,61	57,31	56,01	54,71	53,41	52,11	
10	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,21	0,22	0,23	0,24	0,25	0,26	0,27	
11	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	61,06	64,51	64,56	64,61	64,66	64,72	65,36	
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,1	4,12	4,45	4,73	4,98	5,21	5,41	
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	67,22	67,22	68,22	68,72	69,22	69,72	70,22	
14	Rasio Gini	Indeks	0,388	0,374	0,372	0,371	0,369	0,367	0,365	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
15	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,17	65,17	66	68	71	74	77	
16	Tingkat Kemiskinan	(%)	16,43	16,4	16,35	16,08	15,81	15,55	15,28	
17	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	(Rp Juta)	41,75	42,67	44,34	46,02	47,7	49,38	51,06	
18	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	57,53	57,54	57,55	57,56	57,57	57,58	57,59	
19	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,64	2,59	2,54	2,39	2,36	2,33	2,3	
20	Persentase laporan kasus ilegal fishing yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**									
1	Indeks Pelayanan Publik.	Indeks	3,48	3,65	3,82	3,99	4,16	4,33	4,5	
2	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	3,67	3,73	3,78	3,85	3,92	3,99	4,01	
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	2,68	2,78	2,87	2,97	3,07	3,16	3,26	
4	Persentase Capaian Aksi HAM	%	88,9	89,4	89,9	90,5	91	91,5	92	
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan	%	100	100	100	100	100	100	100	
V	**INDIKATOR KINERJA KUNCI**									
AA	**1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	%	57,485	61,4	63,2	65	88,8	68,6	70,4	
2	Skor Literasi/Numerasi	Skor	59,61	61,4	63,2	65	66,8	68,6	70,4	
3	Persentase Pencapaian SPM Pendidikan	%	70,46	100	100	100	100	100	100	
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,95	8,13	8,31	8,5	8,68	8,87	9,05	
5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
6	Persentase izin satuan pendidikan yang diterbitkan/diperbaharui	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase anak usia 5-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	%	98	100	100	100	100	100	100	
8	Indeks pemerataan guru dan persentase guru yang memiliki sertifikat pendidik	Indeks	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase pengembangan bahasa dan sastra	%	100	100	100	100	100	100	100	
AB	**1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**									
1	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran	4	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	
2	Rasio Nakes dan Named Terhadap Populasi	Rasio	3,7	3,7	3,8	3,9	4	4,1	4,1	
3	Presentase puskesmas dengan jenis dan jumlah SDM kesehatan sesuai standar	Persentase	43	43	47	47,5	48	52	52	
4	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran	1,9	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	
6	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	0	1-19	1-18	1-17	1-16	1-15	1-15	
7	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	0	55	60	65	70	75	75	
8	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	66	85	87	90	93	95	95	
9	Cakupan imunisasi bayi lengkap	Persentase	66	85	87	90	93	95	95	
10	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	(%)	92	93	94	94	95	95	95	
11	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	87,12	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
12	Presentase Tingkat Kepuasan Pasien di Fasilitas Kesehatan	%	80,78	80	80	80	80	80	80	
13	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	%	50	50	60	70	80	85	85	
14	Penemuan Kasus TBC	%	82	85	90	91	92	93	93	
15	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Orang	3,8	13	12	11	10	9	9	
16	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	145	130	117	104	91	77	77	
18	Persentase fasyankes yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	50	50	50	60	71	85	85	
19	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
20	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ?18 tahun.	(%)	0	0	0	0	0	0	0	
21	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	92	93	94	94	95	95	95	
AC	**1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**									
1	Persentase bangunan dan lingkungan yang tertata dengan baik	%	200	100	60	63	66	69	73	
2	Persentase penyelenggaraan penataan bangunan gedung	%	69,00	100	70	73	76	79	83	
3	Persentase Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	100	90	70	72	75	77	80	
4	Persentase penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air	%	67,16	84	60	63	65	67	70	
5	Persentase bangunan konstruksi yang berkualitas	%	0	35	15	20	25	30	35	
6	Persentase penyelenggaraan layanan sistem penyediaan air minum	%	76,00	100	75	78	81	83	85	
7	Persentase penyediaan prasarana persampahan	%	0	0	50	52	54	56	60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
8	Persentase penyelenggaraan layanan sistem air limbah	%	60	100	65	68	71	73	75	
9	Persentase Penanganan Sistem Drainase	%	54,30	100	65	67	69	71	73	
10	Persentase penyelenggaraan jalan	%	67,25	90	50	53	56	60	63	
AD	**1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**									
1	Persentase peningkatan pelayanan penerbitan sertifikasi registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	%	100	100	20	40	60	80	100	
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha	%	50	7,24	13,25	33,11	52,98	72,85	100	
3	Persentase penyediaan dan peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan	%	100	100	20	40	60	80	100	
4	Persentase rumah layak huni di kawasan kumuh perdesaan sesuai persyaratan teknis bangunan	%	70	6,43	20	40	60	80	100	
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	9	10	20	40	60	80	100	
AE	**1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**									
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	64,66	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	50,44	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	95,59	100	100	100	100	100	100	
AF	**1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**									
1	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Presentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan Baik	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
4	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitasi Sosial	%	0	50	52	68	78	89	100	
7	Presentase Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia, Gelandang /Pengemis terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar Panti.	%	100	100	100	100	100	100	100	
8	Persentase Penduduk Miskin yang Menjadi Peserta Jaminan Sosial Kesehatan	%	0,01	40	45	50	55	60	65	
9	Presentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang terpenuhi Kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial	Persentase	0	50	52	68	78	89	100	
AG	**2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**									
1	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak hak pekerja dan dialog sosial	Angka	11,557	12,006	12,435	12,864	13,293	13,722	14,151	
2	Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	%	0	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	2,93	2,99	3,05	3,11	3,17	3,23	3,30	
4	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	0	0	100	100	100	100	100	
AH	**2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**									
1	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	65,17	68,75	72,33	75,91	79,49	83,07	86,65	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	%	56,83	56,83	56,84	56,85	56,86	56,87	56,88	
3	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	59,14	60,86	61,72	62,58	63,44	64,3	65,16	
4	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	%	0	0	50	55	60	65	70	
5	Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang berperspektif gender dan Hak Anak sesuai Standarisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Presentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan yang Komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Persentase	68,36	6.836	68,46	68,56	68,66	68,76	68,86	
8	Cakupan Pelayanan Urusan Pemerintahan Daerah	%	95	97	97	98	98	99	99	
9	Presentase Anak yang memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100	
AI	**2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
2	Presentase daerah rawan pangan	%	0	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
3	Presentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (%)	%	0	12	12	12	20	20	24	
4	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	78,4	78,55	78,7	78,85	79	79,15	79,3	
AJ	**2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**									
1	Persentase penyelesaian sengketa tanah garapan	%	100	100	20	40	60	80	100	
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	20	40	60	80	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase jumlah penerima tanah obyek Landreform (TOL) yang berasal dari tanah kelebihan maksimum	%	50	21,5	19,84	39,86	59,52	79,37	100	
AK	**2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
1	Persentase Pengelolaan Sampah	%	13,59	14,54	15,54	16,62	17,77	19	20,32	
2	Persentase dokumen Perencanaan Lingkungan yang disusun	%	0	0	100	100	100	100	100	
3	Indeks kualitas air	Indeks	56,67	74,6	74,8	75	75,2	75,4	75,41	
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	89,81	82,82	83,03	83,22	83,42	83,63	83,64	
5	Persentase Pengawasan Penghasil Limbah B3	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Aduan Yang Tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	15	15	10,53	15,79	21,05	26,32	26,32	
8	Persentase Ruang Terbuka Hijau	%	0,0451	0,0451	0,0452	0,0453	0,0456	0,0457	0,0458	
9	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	45	45	52,38	54,54	56,52	58,33	60	
AL	**2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**									
1	Persentase Informasi Kependudukan yang dimanfaatkan	%	9.85	15	20	25	30	35	40	
2	Cakupan Pelayanan pendaftaran penduduk	%	63.85	64	65,1	66,34	67,58	68,82	70,37	
3	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Cakupan Pelayanan Pencatatan Sipil	%	94.24	95	96.3	97	97.5	98	98.5	
AM	**2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**									
1	Persentase lembaga kemasyarakatan Desa yang Terberdayakan	%	13	25	50	75	100	100	100	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Persentase	18,8	21,5	24,1	26,7	29,3	31,9	34,6	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
3	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	%	20	40	60	80	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Persentase	13	25	50	75	100	100	100	
AN	**2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**									
1	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5,4	5,2	5,1	5	4,8	4,5	4,3	
2	Presentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need),dan Ratio Akseptor KB	%	5,4	5,4	5	4,8	4,6	4,5	4,3	
AO	**2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**									
1	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Kabupaten/Kota	Persentase	70	75	80	85	90	95	100	
2	Persentase kelengkapanjalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	70	100	80	85	90	95	100	
AP	**2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**									
1	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualias informasi publik pemerintah daerah (survey)	%	50,41	70	75	75	75	75	75	
2	Indeks SPBE	Indeks	2,68	70,59	1,25	1,5	1,75	2	2,25	
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi puplik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	7,57	12	18	25	32	40	50	
4	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	51,52	54,55	57,58	63,64	69,7	75,76	85,45	
AQ	**2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**									
1	Persentase Koperasi Yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	%	8,33	0	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Persentase Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	%	7,50	7,78	9,44	11,39	13,61	15,56	17,50	
3	Persentase Usaha Mikro Yang Bertransformasi Dari Informal Ke Formal	%	10,49	10,49	10,51	10,53	10,55	10,57	10,59	
4	Proporsi Usaha Mikro Menjalin Kemitraan Dan Ekspor (%)	%	0,02	0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	
5	Meningkatnya Usaha Mikro menjadi Wirausaha	%	41,31	45,68	48,42	55,52	62,63	69,74	76,85	
6	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	4,17	4,17	4,44	4,72	5,00	5,28	5,56	
AR	**2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**									
1	Pertumbuhan Investasi	%	-54,34	3,31	3,33	3,37	3,43	3,51	3,61	
2	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persentase	20	21	21,5	22	22,5	23	23,5	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	3,55	3,56	3,57	3,57	3,58	3,58	3,59	
4	Nilai investasi	Rupiah	823.924.050.957	851.220.050.957	879.590.591.443	909.258.537.489	940.472.716.736	973.510.834.055	1.008.683.067.056	
5	Presentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	%	92	93	93	94	94	95	95	
AS	**2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,67	0,67	0,77	0,87	0,97	1,07	1,17	
2	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	%	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.47	0.48	
3	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	
AT	**2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**									
1	Indeks pembangunan statistik (IPS)	Indeks	2,11	2,11	2,15	2,15	2,25	2,25	2,55	
2	Persentase organisasi perangkat daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	3,77	3,77	7,55	11,32	15,09	18,87	22,64	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AU	**2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	65	20	20	15	18	20	22	
2	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	2,42	12,2	30	45	60	75	90	
AV	**2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**									
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,03	53,14	53,47	53,8	54,13	54,46	54,79	
2	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	25	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	0	0	0	50	50	50	50	
4	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	45	100	100	100	100	100	100	
5	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap pengembangan kebudayaan	%	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase warisan budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100	
7	Persentase Kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	100	100	100	100	100	100	100	
AW	**2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**									
1	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	Persentase	0	13	13	13,61	14	15	15	
2	Presentase pembinaan perpustakaan Daerah	%	13,41	15	15,08	15,1	15,4	15,8	16	
AX	**2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**									
1	Presentase Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah	%	53	53	53	58	60	62	64	
AY	**3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**									
1	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.628,14	24.751,28	24.875,04	24.999,41	25.124,41	25.250,03	25.376,28	
2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	6.983	7.017,92	7.053	7.088,27	7.123,71	7.159,33	7.195,13	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
AZ	**3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**									
1	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan Tervalidasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	%		1.50	1.85	2.18	2.49	2.78	3.04	
3	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	%	38	54	62	69	77	100	100	
BA	**3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**									
1	Pertumbuhan Populasi Ternak Rumunansia	%	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
2	Cakupan Pangan Asal Hewan yang Aman Sehat Utuh dan Halal (PAH ASUH)	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	
4	Cakupan wilayah pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	%	100	0	100	100	100	100	100	
5	Produktivitas Jagung	Ton	4,95	0	5,55	5,85	6,15	6,45	6,45	
6	Persentase Lahan yang terfasilitasi pengendalian dan Penangulangan Bencana Pertanian	%	0	100	100	100	100	100	100	
7	Cakupan PAH ASUH	%	100	0	100	100	100	100	100	
8	Produktivitas Kelapa	Ton	1,43	0	1,444	1,472	1,486	1,5	1,5	
9	Cakupan lokasi penyuluhan	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Presentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian / Persentase Kenaikan Kelas kelompok Tani	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Produktivitas Cabai Rawit	Ton	5,5	0	5,58	5,62	5,66	5,7	5,7	
12	Presentase Terciptanya Promosi, Informasi Hasil Pertanian dan Kerjasama Global	%	0	0	5	7	9	11	11	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
13	Produktivitas Padi	Ton	5,14	0	5,24	5,29	5,34	5,5	5,5	
BB	**3.28 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**									
1	Kawasan Tahura yang terkelola	Kawasan	0	0	1	1	1	1	1	
BC	**3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**									
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	9,33	9,42	9,51	9,61	9,7	9,8	9,89	
2	Persentase Perusahaan dan Gudang Terdaftar dan Memiliki Izin	%	15,51	15,82	16,14	16,46	16,78	17,11	17,45	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	54,4	55	56	57	58	59	60	
4	Indeks Harga Implisit Sektor Perdagangan	%	156,62	159,8	161,39	162,98	164,57	166,16	167,75	
5	Nilai Ekspor Barang	Nilai	7.999.063	8.159.044	8.160.675	8.323.888	8.490.365	8.660.172	8.833.375	
BD	**3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**									
1	Cakupan Potensi Panas Bumi yang terkelola	%	0	50	50	50	50	50	50	
2	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Persentase	4,58	4,67	4,76	4,85	4,95	5,05	5,15	
3	Persentase Industri yang terdaftar dalam SIINAS	%	2,15	2,19	2,44	2,48	2,53	2,62	2,66	
4	Pertambahan Jumlah Industri Kecil dan Menengah	%	7,56	7,71	7,87	8,02	8,18	8,33	8,49	
BE	**3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**									
1	persentase transmigran yang dibina dan diberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	Persentase	0	100	100	100	100	100	100	
3	persentase luas kawasan transmigrasi yang berkembang	%	100	100	100	100	100	100	100	
BF	**4.01 - SEKRETARIAT DAERAH**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Pemerintahan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
2	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BG	**4.02 - SEKRETARIAT DPRD**									
1	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Sekretariat DPRD	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100	
BH	**5.01 - PERENCANAAN**									
1	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
5	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
BI	**5.02 - KEUANGAN**									
1	Persentase Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD	%	65,17	67,67	68,19	68,71	69,23	69,75	70,27	
2	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Realisasi Penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD	%	75,49	76,02	76,44	76,86	77,27	77,69	78,11	
4	Persentase Pengelolaan Keuangan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
BJ	**5.03 - KEPEGAWAIAN**									
1	Persentase pegawai dengan SKP bernilai baik	%	51,43	52	55,06	53,55	52,05	50,03	50,16	
BK	**5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**									
1	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi dasar, manajerial dan fungsional	%	74,30	65,35	56,10	57,98	59,84	62,37	64,59	
BL	**5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**									
1	Persentase rekomendasi hasil penelitian yang dijadikan landasan kebijakan pembangunan daerah	%	50	53,33	55,56	57,14	58,33	59,26	60	
2	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Persentase	30	30	35	40	45	50	55	
BM	**6.01 - INSPEKTORAT DAERAH**									
1	Persentase Penyelenggaraan pengawasan yang dilakukan sesuai PKPT	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Pendampingan OPD dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi secara ekonomis, efektif dan efisien	%	67	100	100	100	100	100	100	
BN	**7.01 - KECAMATAN**									
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,07	87,19	87,2	88,19	88,2	88,29	88,3	
2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	90,12	90,13	90,14	90,15	90,17	90,18	90,2	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	87,19	87,23	87,27	87,32	87,37	87,42	87,47	
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,1	88,2	88,35	88,5	89,35	89,65	90	
5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	88,88	88,2	88,3	88,5	88,7	88,9	90	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	85,26	88	88,2	88,4	88,6	88,8	90	
7	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
8	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
10	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
11	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
12	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
13	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
14	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
15	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
17	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
18	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
19	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
20	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
21	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
22	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
23	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
24	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
25	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
26	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
27	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
28	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
29	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
30	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
31	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
32	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
33	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
34	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
35	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
36	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
37	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
38	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
39	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
40	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
41	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
42	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
43	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
44	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
45	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
46	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
47	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
48	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
49	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
50	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
51	Persentase layanan keamanan dan ketertiban yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
52	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
53	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
54	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
55	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
56	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
57	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
58	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
59	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
60	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
61	Persentase koordinasi penyelenggaraan pemerintahan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100	
62	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
63	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
64	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
65	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
66	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
67	Persentase Pemerintahan Desa yang terbina dan terawasi	%	100	100	100	100	100	100	100	
68	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
69	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
70	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
71	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETE-RANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
72	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
73	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
74	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
75	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
76	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
77	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
78	Persentase kelembagaan masyarakat yang terberdayakan	%	100	100	100	100	100	100	100	
BO	**8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
1	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif		52	60	65	70	80	90	100	
2	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan		75	80	82	85	90	95	100	
3	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik		25	30	40	45	60	70	85	
4	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		26	67	70	78	89	100	100	
5	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	

BAB 5 PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman utama bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pembangunan selama lima tahun ke depan. Dokumen ini merumuskan visi dan misi kepala daerah yang dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program-program prioritas pembangunan daerah. Sebagai instrumen perencanaan yang bersifat menyeluruh dan integratif, RPJMD berperan penting dalam mengarahkan kinerja seluruh perangkat daerah, termasuk sebagai acuan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan seperti RKPD. Oleh karena itu, pemahaman terhadap isi dan arah kebijakan RPJMD sangat diperlukan oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pada masa pelaksanaan normal maupun dalam periode transisi pemerintahan. Komitmen bersama dalam mengimplementasikan RPJMD akan menjadi kunci keberhasilan pencapaian target pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Gorontalo.

5.1. Pedoman Transisi

Guna menjamin kesinambungan pembangunan dan menghindari kekosongan perencanaan setelah berakhirnya masa RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029, maka RPJMD ini akan digunakan sebagai pedoman sementara dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RAPBD tahun anggaran 2030. Pedoman ini penting dalam menjembatani masa transisi pemerintahan, khususnya sebelum tersusunnya RPJMD baru yang memuat visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk periode selanjutnya.

Masa transisi ini menjadi krusial karena kerap diwarnai dengan belum tersedianya dokumen RPJMD yang baru. Oleh karena itu, diperlukan suatu pedoman transisi yang dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana dan kebijakan pembangunan tahunan, sekaligus mencegah kekosongan regulasi dan perencanaan. Pedoman transisi ini memiliki fungsi strategis, antara lain:

1. RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 dijadikan dasar dalam penyusunan RKPD dan penetapan kebijakan umum serta prioritas program APBD

untuk tahun pertama masa kepemimpinan Kepala Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.

2. Pemanfaatan RPJMD ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang belum tuntas pada akhir periode 2025–2029, serta untuk merespons tantangan dan permasalahan baru yang muncul pada tahun awal pemerintahan selanjutnya.
3. Selama belum ditetapkannya dokumen RPJMD hasil penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka RPJMD ini tetap menjadi pedoman penyusunan kebijakan tahunan, kecuali terdapat revisi atau penyesuaian berdasarkan kebijakan baru dari Pemerintah.
4. RKPD masa transisi juga akan menjadi bagian integral dari arah kebijakan dan indikasi program prioritas RPJMD periode 2030–2034, dan digunakan sebagai dasar penyusunan APBD tahun anggaran 2030.

Untuk sasaran pembangunan yang telah tercapai dalam periode sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Gorontalo perlu menetapkan kembali target-target baru yang relevan dengan kondisi dan tantangan pada masa transisi. Target baru tersebut akan dituangkan dalam dokumen RKPD transisi yang kemudian diselaraskan dan diintegrasikan ke dalam RPJMD periode berikutnya.

5.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029 diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, partisipatif, dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan. Dokumen ini menjadi dasar utama bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Pelaksanaan RPJMD ini berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo, bersama masyarakat dan dunia usaha, bertanggung jawab melaksanakan seluruh program yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025–2029 secara optimal, termasuk dalam masa transisi menuju tahun 2030.
2. Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo wajib menyusun Renstra PD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, serta program prioritas pembangunan sesuai tugas dan fungsi masing-masing, dengan merujuk pada arah kebijakan dalam RPJMD.

3. Pemerintah Kabupaten Gorontalo berkewajiban menjamin konsistensi perencanaan antara RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2029, serta RPJMN Tahun 2025–2029, agar terbangun sinergi antara pembangunan daerah dan nasional.
4. Seluruh Perangkat Daerah juga wajib memastikan keselarasan antara dokumen RPJMD Kabupaten Gorontalo, Renstra PD, dan Renja PD, sebagai bagian dari upaya menjamin integrasi perencanaan secara menyeluruh.
5. Untuk meningkatkan efektivitas implementasi RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Gorontalo, atau unit yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan, bertugas melakukan penyelarasan penjabaran RPJMD ke dalam Renstra PD, menyelaraskan program dengan RKPD, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kinerja guna mengukur pencapaian target yang telah ditetapkan.
6. Bagi program prioritas yang memiliki keterkaitan dengan agenda pembangunan provinsi maupun nasional, dan apabila Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengalami keterbatasan anggaran, pembiayaannya dapat dilakukan melalui berbagai skema alternatif seperti: kerja sama dengan badan usaha (PPP), program CSR, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), atau kerja sama dengan lembaga non-pemerintah, baik dalam negeri maupun internasional, dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Jika dalam pelaksanaan RPJMD terdapat target kinerja yang telah tercapai, maka besaran target kinerja baru perlu dirumuskan dan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, guna menyesuaikan arah pembangunan dengan dinamika dan kebutuhan terbaru.

Dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh elemen pembangunan daerah dapat bersinergi dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Gorontalo yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, sesuai dengan visi pembangunan daerah.

"Dulo Ito Mopo'o Lamahu Lipu"

BUPATI GORONTALO

SOFYAN PUHI